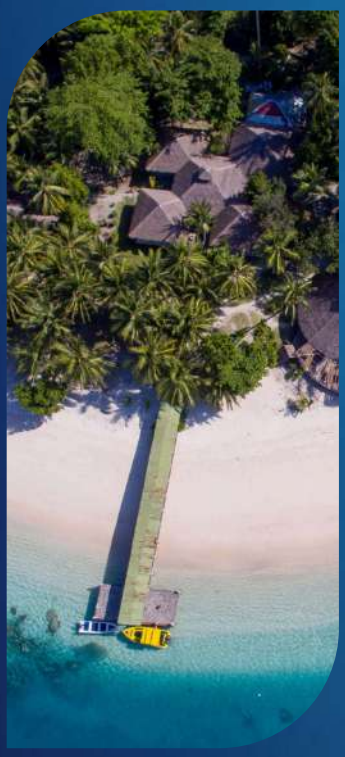
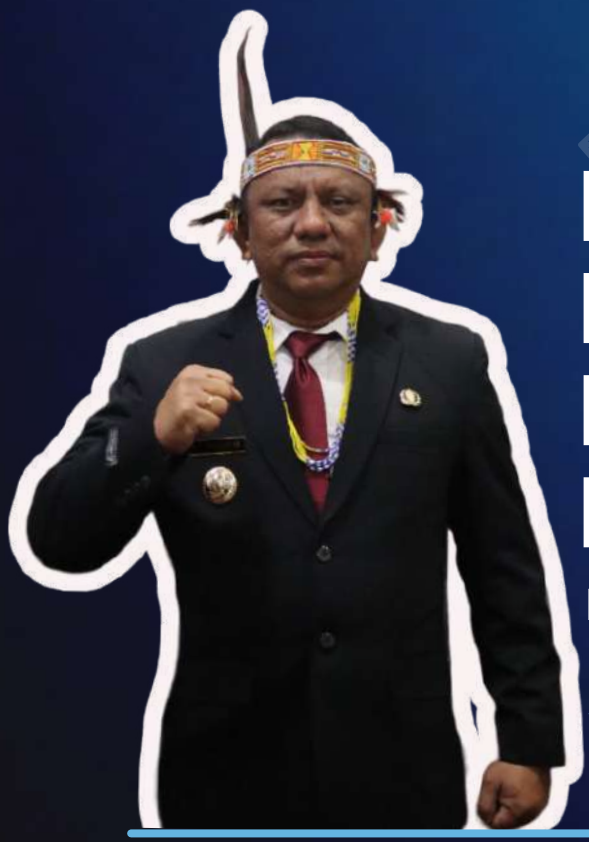
BAPPEDA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

2024

Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah
Berbasis Komoditas Unggulan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimksud pada ayat (1) merupakan pedoman:
   a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
   b. penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS; dan
   c. penyusunan Rencana APBD Tahun 2024.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika meliputi:
   a. BAB I memuat pendahuluan;
   b. BAB II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
   c. BAB III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   d. BAB IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. BAB V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
   f. BAB VI memuat kinerja penyelenggaraan pemeritahan Daerah; dan
   g. BAB VII penutup.

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024; dan
c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 setiap triwulan tahun anggaran berjalan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023 NOMOR 19

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan pertolonganNya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dapat disusun.

Penyusunan dokumen RKPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai tindaklanjut pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 ini sangat penting, mengingat:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

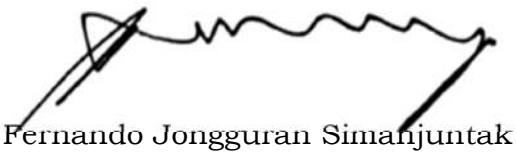
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Perkembangan pembangunan nasional 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan perbaikan dari semua sektor, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian akibat berbagai tekanan baik dari pengaruh perlambatan ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina, perang Israel-Pakistan dan berbagai isu nasional salah satunya pelaksanaan pemilu serentak yang sudah mulai berkembang dan akan semakin meningkat. Perbaikan ekonomi ini terbukti pertumbuhan ekonomi Kab. Kepulauan Mentawai tumbuh positif dari tahun 2021 sebesar 2,89 persen dan tahun 2022 tumbuh sebesar 4,49 persen. Pertumbuhan ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat (tahun 2021 sebesar 3,29 persen dan tahun 2022 sebesar 4,36 persen) dan secara Nasional (tahun 2021 sebesar 3,69 persen dan tahun 2022 sebesar 5,31 persen). Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan nasional sejak tahun 2023 dan diakselerasi pada tahun 2024. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebijakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, seiring dengan itu Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 fokus pada pembangunan sumber daya ekonomi daerah yang berbasis komoditas unggulan

dengan mengedepankan peningkatan nilai tambah (*value added*) dan produktivitas sektor usaha komoditas unggulan masyarakat sehingga secara bertahap menuju transformasi ekonomi daerah.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Instansi Vertikal, jajaran perangkat OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, masyarakat dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Mentawai.

Pj. Bupati Kepulauan Mentawai



Fernando Jongguran Simanjuntak

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TANGGAL 7 JULI 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar xi

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.5
1.3 Hubungan Antar Dokumen I.8
1.4 Maksud dan Tujuan I.10
1.4.1 Maksud I.10
1.4.2 Tujuan I.11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I.11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II.1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis II.1
2.1.1.1 Aspek Geografis II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II.8
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana II.22
2.1.1.4 Aspek Demografi II.25
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.31
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .. II.31
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II.51
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II.61
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II.63
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.64
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.98
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II.126
2.1.3.4 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan II.139
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II.145
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II.146
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II.149

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II.153
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II.155
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II.157
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II.261
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah II.261
2.3.1.1 Prioritas Pembangunan 1 ..... II.262
2.3.1.1 Prioritas Pembangunan 2 ..... II.263
2.3.1.1 Prioritas Pembangunan 3 ..... II.265
2.3.1.1 Prioritas Pembangunan 4 ..... II.266
2.3.1.1 Prioritas Pembangunan 5 ..... II.268
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II.269
2.3.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.269
2.3.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.274
2.3.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan II.283
2.3.2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Penunjang II.286
2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah II.288
2.4.1 Pembangunan Manusia yang Holistik II.289
2.4.2 Hilirisasi Komoditi Sektor Primer II.292
2.4.3 Pengembangan Pariwisata Mentawai II.292
2.4.4 Aksesibilitas II.293
2.4.5 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik II.294

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III.1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III.2
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 ..... III.2
3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional III.2
3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat III.7
3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah III.9
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 ..... III.13
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III.14
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah III.16

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah III.21
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaaan Daerah..... III.29

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV.1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024. IV.2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2024. IV.6
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024. IV.11
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....IV.15
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024. .....IV.15
4.2.2. Prioritas Pembangunan Propvinsi Sumatera Barat Tahun 2024. .....IV.26
4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024. .....IV.38

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V.1
5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 ....V.1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI.1

BAB VII PENUTUP VII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022 ..... II.3
Tabel 2.2 Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022 ..... II.4
Tabel 2.3 Luasan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai II.4
Tabel 2.4 Kontribusi PDRB ADHB (%) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.9
Tabel 2.5 Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.10
Tabel 2.6 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai II.23
Tabel 2.7 Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022 ..... II.26
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022 ..... II.27
Tabel 2.9 Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai Berdasarkan Jenis Kelamin, 2022 ..... II.30
Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.38
Tabel 2.11 Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.44
Tabel 2.12 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2022 ..... II.50
Tabel 2.13 Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022 ..... II.51
Tabel 2.14 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.62
Tabel 2.15 Perkembangan Kepemudaaan dan Keolahragaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.63
Tabel 2.16 Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2022 ..... II.66
Tabel 2.17 Angka Kesakitan Menurut Karakteristik (Persen), 2022 ..... II.71
Tabel 2.18 Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Karakteristik, 2022 ..... II.72
Tabel 2.19 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi (Persen), 2022 ..... II.73
Tabel 2.20 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Merokok dan Rata-Rata Batang Rokok yang dihisap per Minggu (Persen), 2022 ..... II.74
Tabel 2.21 Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.75

Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.80
Tabel 2.23 Jumlah Layanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.81
Tabel 2.24 Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.83
Tabel 2.25 Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2022 ..... II.84
Tabel 2.26 Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.87
Tabel 2.27 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022 ..... II.92
Tabel 2.28 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.93
Tabel 2.29 Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.95
Tabel 2.30 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.97
Tabel 2.31 Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.99
Tabel 2.32 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.101
Tabel 2.33 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.103
Tabel 2.34 Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.104
Tabel 2.35 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.105
Tabel 2.36 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.107
Tabel 2.37 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018-2022 ..... II.108
Tabel 2.38 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ... II.109
Tabel 2.39 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.111
Tabel 2.40 Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyebrangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.112
Tabel 2.41 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.114
Tabel 2.42 Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.116

Tabel 2.43 Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 .....II.117
Tabel 2.44 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 .....II.118
Tabel 2.45 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022.....II.119
Tabel 2.46 Perkembangan Indikator Urusan Persandian, 2018-2022 ..II.121
Tabel 2.47 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022.....II.122
Tabel 2.48 Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022.....II.124
Tabel 2.49 Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 .....II.126
Tabel 2.50 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 .....II.127
Tabel 2.51 Jumlah Sarana Tangkap Nelayan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022.....II.128
Tabel 2.52 Jumlah Nelayan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 .....II.129
Tabel 2.53 Banyaknya dan jenis Objek Wisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022.....II.130
Tabel 2.54 Banyaknya Resort, Wisma, dan Penginapan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 .....II.131
Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022.....II.131
Tabel 2.56 Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022.....II.134
Tabel 2.57 Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 .....II.137
Tabel 2.58 Perkembangan Kontribusi Perindustrian Terhadp PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 .....II.134
Tabel 2.59 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 .....II.141
Tabel 2.60 Perkembangan Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 .....II.145
Tabel 2.61 Angka Konsumsi RT Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2018-2022 .....II.142
Tabel 2.62 Rasio Angka Konsumsi RT non Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2018-2022.....II.147
Tabel 2.63 Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022.....II.154
Tabel 2.64 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022.....II.156
Tabel 2.65 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan, 2018-2022.....II.158
Tabel 2.66 Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022...II.261
Tabel 2.67 Pencapaian terhadap Tujuan dan sasaran Pembangunan Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif.....II.262

Tabel 2.68 Pencapaian terhadap Tujuan dan sasaran Pembangunan Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan II.264
Tabel 2.69 Pencapaian terhadap Tujuan dan sasaran Pembangunan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim..... II.266
Tabel 2.70 Pencapaian terhadap Tujuan dan sasaran Pembangunan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan melayani..... II.267
Tabel 2.71 Pencapaian terhadap Tujuan dan sasaran Pembangunan Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang harmonis dan berbudaya..... II.268
Tabel 3.1 Indikator sasaran Pembangunan Nasional, 2024..... III.3
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat, 2024 ..... III.8
Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024* III.11
Tabel 3.4 Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2018-2022 ..... III.16
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... III.19
Tabel 3.6 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024..... III.22
Tabel 3.7 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024 ..... III.23
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025..... III.27
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025 ..... III.31
Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 ..... IV.5
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Provinsi Sumatera Barat, 2021-2026 ..... IV.6
Tabel 4.3 Proyeksi Indikator Makro Daerah Provinsi Sumatera Barat 2024 ..... IV.10
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 ..... IV.11
Tabel 4.5 Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024..... IV.14
Tabel 4.6 Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2024 ..... IV.14
Tabel 4.7 Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai 2024 ..... IV.15
Tabel 4.8 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2024. IV.42
Tabel 4.9 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2024..... IV.43
Tabel 4.10 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2024.... IV.46
Tabel 4.11 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2024..... IV.48

Tabel 4.12 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan, Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2024.....IV.51
Tabel 4.13 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan, Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2024.....IV.54
Tabel 4.14 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2024.....IV.56
Tabel 4.15 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2024.....IV.58
Tabel 4.16 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Pertanian Terpadu, ketahanan Pangan dan sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai berdaya Saing) Tahun 2024 .IV.61
Tabel 4.17 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Pertanian Terpadu, ketahanan Pangan dan sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai berdaya Saing) Tahun 2024 .IV.62
Tabel 4.18 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2024 ....IV.65
Tabel 4.19 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2024 ....IV.66
Tabel 4.20 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2024.....IV.68
Tabel 4.21 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2024.....IV.69
Tabel 4.22 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2024.....IV.71
Tabel 4.23 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2024.....IV.71
Tabel 4.24 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradap) Tahun 2024.....IV.73
Tabel 4.25 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradap) Tahun 2024.....IV.74

Tabel 4.26 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2024 ..... IV.77
Tabel 4.27 Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2024 ..... IV.78
Tabel 4.28 prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Pendanaanya, 2024 ..... IV.82
Tabel 4.29 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV.85
Tabel 4.30 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 ..... IV.86
Tabel 4.31 Dukungan RKPD Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2024 Terhadap kegiatan Prioritas Terhadap Prioritas Nasional..... IV.102
Tabel 4.32 Dukungan RKPD Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2024 Terhadap kegiatan Prioritas Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat IV.204
Tabel 4.33 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi..... IV.366
Tabel 5.1 Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2024 ..... V.2
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama..... VI.1
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai , 2024..... VI.4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I.10
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai II.2
Gambar 2.2 Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai II.5
Gambar 2.3 Peta Fungsi Kawasan Hutan II.7
Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana II.24
Gambar 2.5 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022 ..... II.28
Gambar 2.6 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentang 14 Tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022 ..... II.29
Gambar 2.7 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.33
Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2022 ..... II.34
Gambar 2.9 Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022 ..... II.36
Gambar 2.10 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2028 ..... II.39
Gambar 2.11 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.41
Gambar 2.12 Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2022 ..... II.42
Gambar 2.13 Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.45
Gambar 2.14 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.47
Gambar 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.48
Gambar 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, 2021-2022 ..... II.49
Gambar 2.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.47
Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.54
Gambar 2.19 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.56
Gambar 2.20 Harapan Lama Sekolah(Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.57
Gambar 2.21 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.59
Gambar 2.22 Perkembangan Prevalensi Stunting (Persen) Provinsi Sumatera Barat, 2013-2022 ..... II.61
Gambar 2.23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.67

Gambar 2.24 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.69
Gambar 2.25 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.85
Gambar 2.26 Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.86
Gambar 2.27 Produktivitas Tenaga Kerja (miliar rupiah) Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.100
Gambar 2.28 Jalur pelayaran Padang -Kep Mentawai II.113
Gambar 2.29 Layanan Perpustakaan untuk Masyarakat dan Anak Sekolah..... II.125
Gambar 2.30 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.138
Gambar 2.31 Produktivitas Total Daerah (miliar rupiah) Kepulauan Mentawai, 2018-2022 ..... II.149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan nasional 2 tahun terakhir menunjukkan perbaikan dari semua sektor, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian akibat berbagai tekanan baik dari pengaruh perlambatan ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina, juga masih terus dilakukan upaya pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 agar aktifitas sosial masyarakat tidak terganggu. Pertumbuhan ekonomi yang positif tentunya akan sangat dirasakan dampaknya bagi daerah khususnya Kab. Kepulauan Mentawai. Sebagai daerah kepulauan, mobilisasi orang dan barang akan memberikan kontribusi besar dalam kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terbukti pertumbuhan ekonomi Kab. Kepulauan Mentawai tumbuh positif dari tahun 2021 sebesar 2,89 persen dan tahun 2022 tumbuh sebesar 4,49 persen. Pertumbuhan ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat (tahun 2021 sebesar 3,29 persen dan tahun 2022 sebesar 4,36 persen) dan secara Nasional (tahun 2021 sebesar 3,69 persen dan tahun 2022 sebesar 5,31 persen).

Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan nasional sejak tahun 2023 dan diakselerasi pada

tahun 2024. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebijakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Selaras dengan itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentunya mengacu Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJMD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 sebagaimana amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD ini berpedoman pada Permendagri terkait pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RKPD ini sangat penting, mengingat:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.

4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

Sebagai sebuah sistem perencanaan yang selaras dan berkelanjutan, Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan produktivitas masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang memberikan nilai tambah pada setiap komoditas yang dikembangkan sehingga pada setiap usaha ekonomi yang sedang dan terus diupayakan menuju transformasi ekonomi daerah. Hal ini juga sejalan dengan tema pembangunan nasional tahun 2024 sebagai estafet pembangunan berkelanjutan dengan tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2024. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memulai mengembalikan dan mengangkat pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih baik.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Sebagai catatan, tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6); dan
14. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;

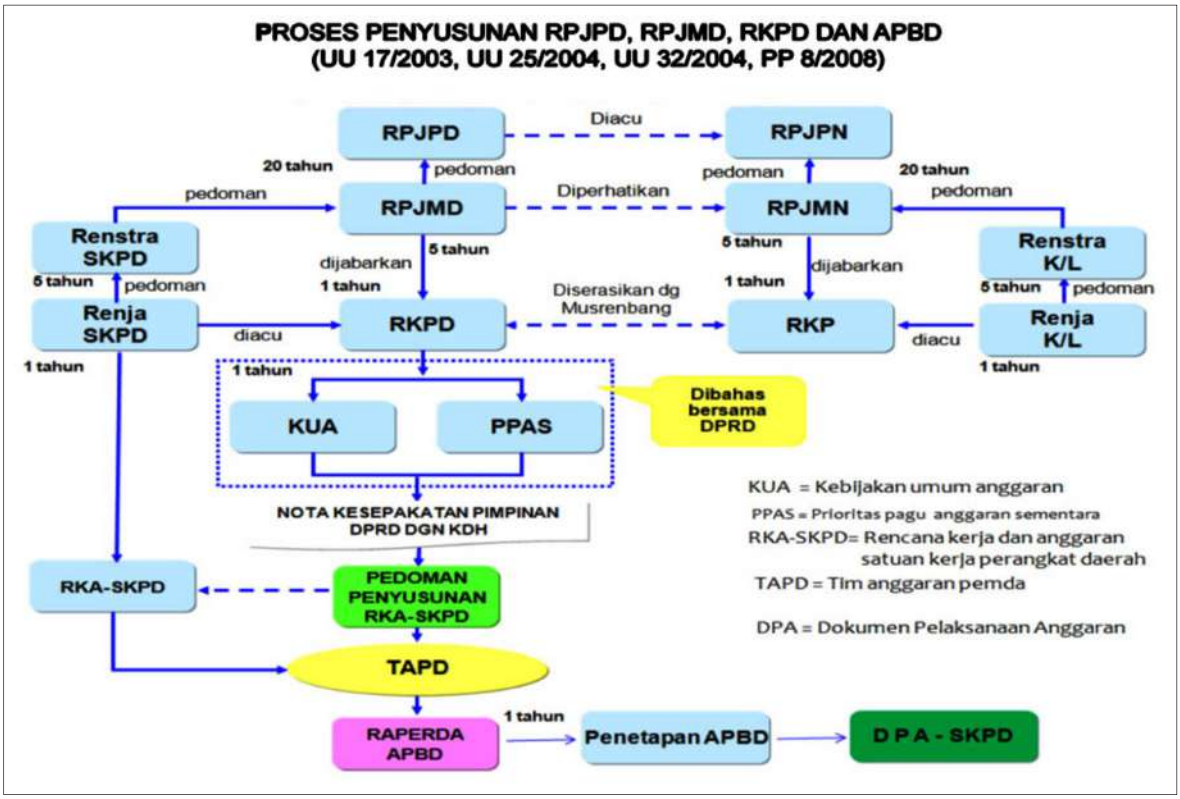
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Hubungan antara RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

2. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.
3. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
4. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.



Gambar 1.1
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dimaksudkan agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (RKPD) Tahun 2024 antara lain:

1. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2024.
2. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
3. Menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024.
4. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**;

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD;

BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**;

terdiri atas Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD dan Permasalahan Pembangunan Daerah. Kondisi Umum Kondisi Daerah menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPD. Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan

prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III **Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**;

terdiri atas Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi. Arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**;

mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**; mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**

berisi Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII **Penutup**;

berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografis

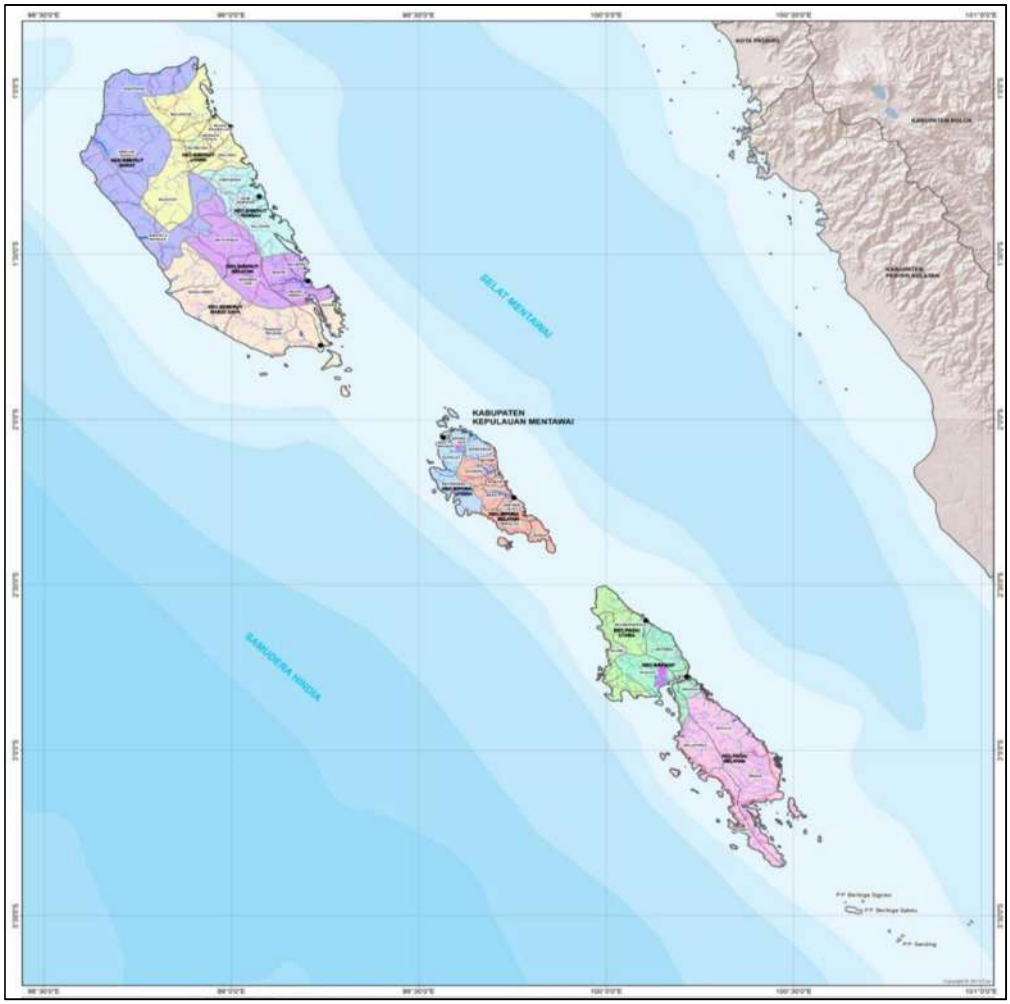
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada posisi $0^0$55'00"–$3^0$21'00" Lintang Selatan dan $98^0$35'00"-$100^0$32'00" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara geografis berbatasan dengan:

- sebelah Utara adalah Selat Siberut;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai;
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang wilayah administrasinya terpisah oleh laut dengan Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar luas wilayah 5.983,22 km^2 dan panjang garis pantai 1.402,66 km, sebagaimana Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 yang terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 341 dusun, dengan Kecamatan Siberut Barat memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1.124,86 km^2 dan Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah terkecil yaitu 278,45 km^2.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai



Adapun keadaan geografis dan administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap kecamatanya disajikan dalam bentuk tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km^2)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	901,08	$2^0$49'04"-$3^0$21'00"	$100^0$07'01"-$100^0$32'00"
2	Sikakap	Taikako	278,45	$2^0$37'12"-$3^0$55'04"	$100^0$00'00"-$100^0$16'12"
3	Pagai Utara	Saumanganya'	342,02	$2^0$30'00"-$2^0$51'36"	$99^0$57'00"-$100^0$09'36"
4	Sipora Selatan	Sioban	268,47	$2^0$06'00"-$2^0$24'36"	$99^0$36'00"-$99^0$52'12"
5	Sipora Utara	Sido Makmur	383,08	$1^0$57'00"-$2^0$18'00"	$98^0$30'00"-$99^0$42'00"
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	508,33	$1^0$19'48"-$1^0$42'00"	$98^0$48'00"-$99^0$18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	649,08	$1^0$27'36"-$1^0$57'00"	$98^0$45'00"-$99^0$19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	739,87	$1^0$15'00"-$1^0$33'00"	$98^0$54'00"-$99^0$12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	816,11	$0^0$54'00"-$1^0$27'00"	$98^0$40'48"-$99^0$06'00"
10	Siberut Barat	Betaet	1.124,86	$0^0$55'00"-$1^0$34'12"	$98^0$35'00"-$98^0$59'24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Jumlah desa dan dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditunjukkan tabel 2.2 dengan jumlah desa sebanyak 43 desa dan dusun sebanyak 431 dusun. Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah dusun paling banyak yaitu dengan 49 dusun dan Kecamatan Siberut Utara dengan jumlah dusun paling sedikit yaitu dengan 26 dusun.

Tabel 2.2
Jumlah Desa dan Dusun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Pagai Selatan	Bulasat	4	49
2	Sikakap	Taikako	3	44
3	Pagai Utara	Saumanganya'	3	30
4	Sipora Selatan	Sioban	7	43
5	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	34
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	3	25
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	32
9	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	6	26
10	Siberut Barat	Betaet	3	29
Jumlah			43	341

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Luasan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi kedalam 5 kawasan penggunaan lahan, antara lain hutan lindung, kawasan suaka dan pelestarian alam, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi dan areal penggunaan lainnya.

Tabel 2.3
Luasan Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

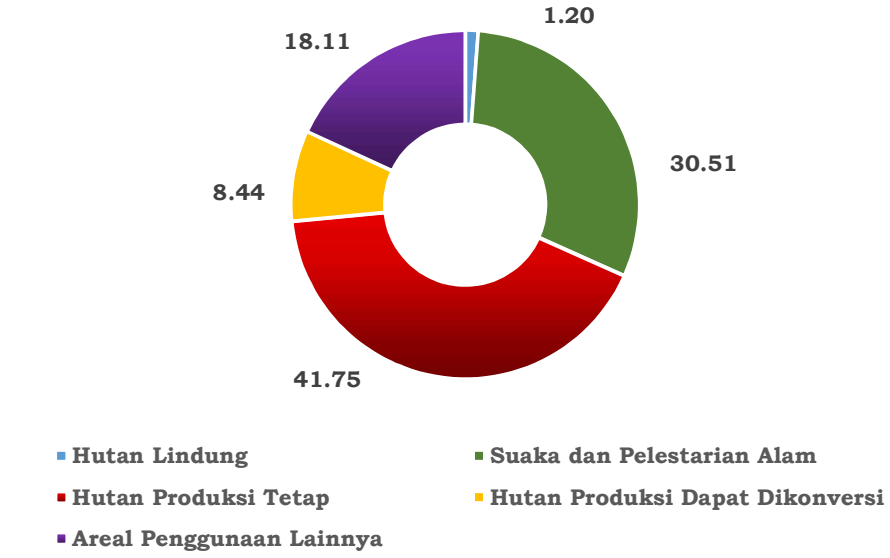
	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan didominasi oleh kawasan hutan dengan persentase sekitar 81,89

persen dan areal penggunaan lainnya sekitar 18,11 persen. Untuk luasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan dengan persentase sebesar 41,75 persen atau seluas 250.971,2 ha dan kawasan suaka dan pelestarian alam sebesar 30,51 persen atau seluas 183.378,9 ha, kawasan hutan lindung sebesar 7.217,28 ha atau sekitar 1,20 persen dari luas wilayah. Untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 50.727 ha atau sekitar 8,44 persen dari total luas wilayah dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Areal penggunaan lainnya sebagai areal penopang kehidupan masyarakat sebesar 108.840,62 ha atau sekitar 18,11 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

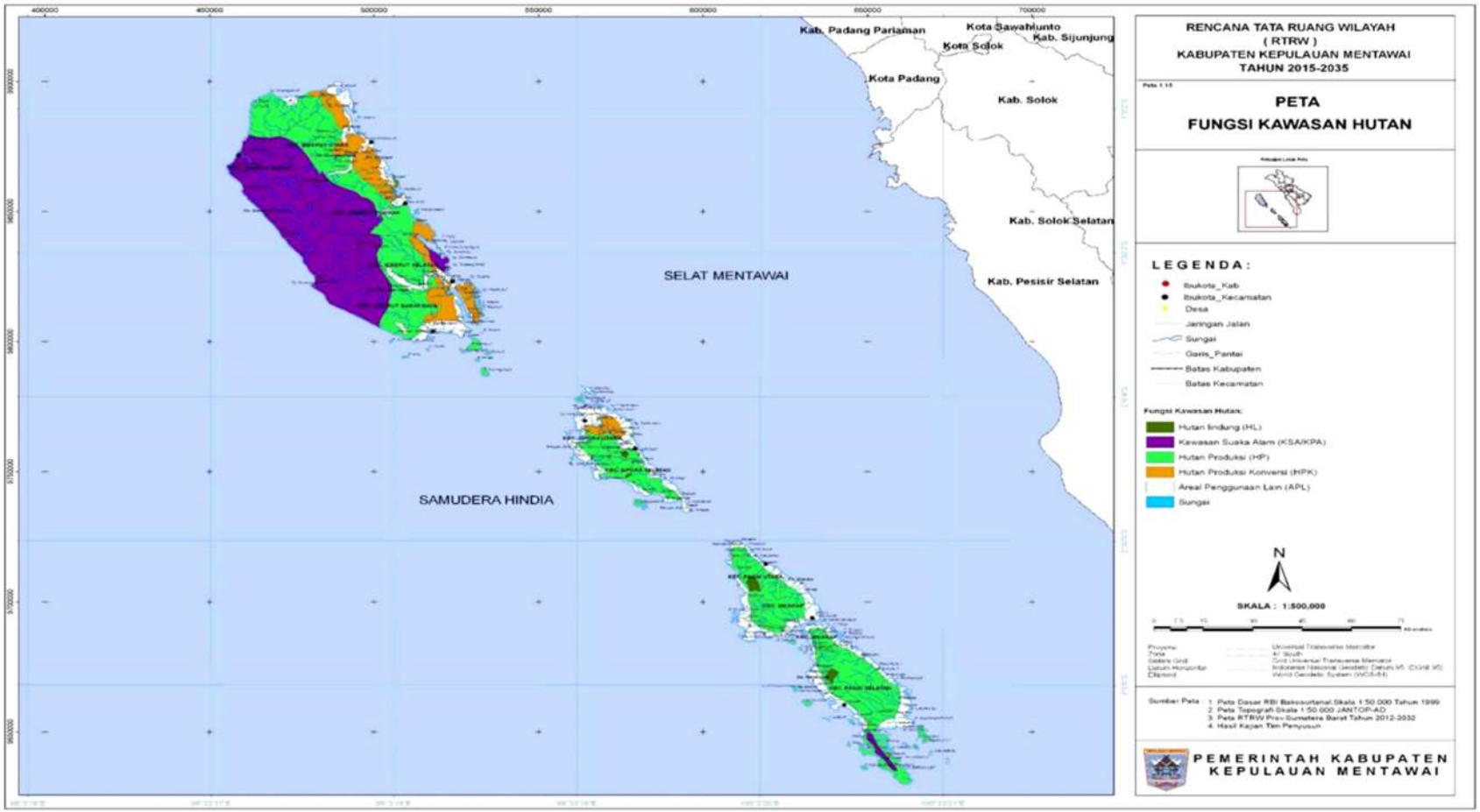
Gambar 2.2
Persentase Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Peruntukan dan Penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah, yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas ± 183.397 Ha termasuk Kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) di Pulau Siberut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk IUPHHK-HA oleh PT. Salaki Summa Sejahtera seluas ± 48.420 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dicadangkan seluas ± 79.795 ha di Pulau Siberut (eks IUPHHK-HA Koperasi Andalas Madani) untuk IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada PT. Global Green melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.769/Menhut-VI/2009 tanggal 28 September 2009.

Gambar 2.3
Peta Fungsi Kawasan Hutan



2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kepulauan Mentawai sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan wilayah daerah.

Tabel 2.4 menunjukkan struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi pada PDRB sebesar 47,92 persen, artinya sektor primer masih menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat Mentawai. Jika dilihat tren transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor manufaktur/ industri dan sektor jasa belum menunjukkan perubahan (kenaikan) yang signifikan.

Kontribusi Sektor kontruksi terhadap PDRB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang positif yaitu dari 13,04 persen tahun 2018 meningkat menjadi 14,03 persen pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian sebesar 13,30 persen.

Tabel 2.4
Kontribusi PDRB ADHB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	47,6	46,48	48,65	48,87	48,01	47,92
B	Pertambangan dan Penggalian	1,74	1,62	1,63	1,65	1,61	1,65
C	Industri Pengolahan	2,68	2,33	2,43	2,57	2,48	2,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
F	Konstruksi	12,58	13,04	13,2	13,66	14,03	13,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran	12,55	12,75	12,75	12,72	13,43	12,84
H	Transportasi dan Pergudangan	11,14	11,74	8,56	7,48	7,79	9,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,8	0,76	0,81	0,84	0,80
J	Informasi dan Komunikasi	0,85	0,9	0,98	1,04	1,06	0,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12
L	Real Astate	0,89	0,9	0,92	0,91	0,89	0,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan	6,45	6,61	7,18	7,25	6,84	6,87
P	Jasa Pendidikan	1,1	1,14	1,22	1,23	1,18	1,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,61	0,69	0,74	0,72	0,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,84	0,89	0,83	0,88	0,92	0,87

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Analisis potensi pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan PDRB dapat diketahui bahwa sektor lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan sektor maju dan tumbuh pesat dan juga sudah menjadi sektor basis ekonomi masyarakat Mentawai secara umum, kedepan sektor ini juga sangat potensial untuk dikembangkan dengan tingkat pertumbuhan sektor yang

tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif untuk wilayah Sumatera Barat.

Tabel 2.5
Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Lapangan Usaha		Tipologi Klassen	Analisis LQ	Analisis DLQ	Pertumbuhan Proporsional	Keunggulan Kompetitif	Pergeseran Bersih
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
B	Pertambangan dan Penggalian	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
C	Industri Pengolahan	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
F	Konstruksi	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
G	Perdagangan Besar dan Eceran	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
H	Transportasi dan Pergudangan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
J	Informasi dan Komunikasi	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
L	Real Astate	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
M,N	Jasa Perusahaan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
O	Administrasi Pemerintahan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
P	Jasa Pendidikan	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
R,S,T,U	Jasa Lainnya	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif

Sumber :BPS (data diolah)

Sektor lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan merupakan sektor yang dikategorikan sebagai Sektor Maju dan Tumbuh Pesat yang merupakan sektor basis dan memiliki potensi yang sangat baik, memiliki keunggulan kompetitif dan perkembangannya progresif. Begitu juga dengan sektor lapangan usaha konstruksi menjadi sektor yang dikategorikan sebagai Sektor Maju dan Tumbuh Pesat juga menjadi sektor basis, hal ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang cukup massif dan menjadi prioritas pembangunan daerah dan memiliki potensi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Hal yang menarik ada pada sektor lapangan usaha industri pengolahan dengan kategori sektor potensial / masih dapat berkembang dengan pesat, walaupun bukan merupakan sektor basis namun memiliki potensi untuk dikembangkan dan diintervensi karena keunggulan kompetitifnya ada dan perkembangannya kedepan progresif sehingga dapat dijadikan sebagai basis transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor industri/ manufaktur. Begitu juga dengan perkembangan sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang menjadi basisi sektor jasa dikategorikan sebagai sektor potensial / masih dapat berkembang dengan pesat, sektor ini menjadi penyokong kemajuan pariwisata daerah, walaupun bukan menjadi sektor basis karena kontribusi terhadap PDRB masih relatif kecil, namun memiliki keunggulan kompetitif

dan progresif dalam perkembangannya. Sektor ini cukup rentan pada gejolak sosial politik dan kesehatan yang terjadi, khususnya yang terjadi 2 tahun terakhir yaitu pandemi COVID-19.

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 601.134,96 ha terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 492.294,38 ha sekitar 82 persen dari luas wilayah, sedangkan 108.840,62 ha atau sekitar 18 persen adalah kawasan Area Penggunaan Lain (APL), potensi pengembangan wilayah Kepulauan Mentawai dapat dikembangkan melalui pengembangan kawasan budidaya yang telah ditetapkan antara lain.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi.

   Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi tetap yang merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun cara tebang habis. Kawasan ini terdapat di seluruh kecamatan, dengan luasan 246.011,41 hektar. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang dapat dicadangkan atau diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan diluar sektor kehutanan seperti perkebunan, pertanian, permukiman, industri. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Selatan dengan luasan kurang lebih 54.856,28 hektar.

2) Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi sawah dan komoditas tanaman pangan lainnya dengan total luas adalah 24.934,03 ha. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan komoditi sayuran dan buah-buahan dengan total luas adalah 3.740,17 ha. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas lahan adalah 90.818 ha dengan komoditas perkebunan skala kecil atau perkebunan rakyat khas Mentawai yaitu coklat, karet, cengkeh, pala, kelapa, nilam, manau. Kawasan perkebunan rakyat tidak merusak alam dan lingkungan sekitar hutan. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di seluruh wilayah daerah dengan memanfaatkan areal pertanian dan perkebunan.

3) Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap di seluruh perairan wilayah daerah dengan pusat perikanan tangkap di Kecamatan Siberut Utara, Tuapejat, Pagai Utara dan Sikakap. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari Budidaya perikanan laut meliputi: Muara Sigep, Malancan, Sirilogui, Saibi Samukop, Saliguma, Malilimok, Katurei (Pulau Siberut), Teraet, Teluk Beriulou, Teluk Pukarajat, Tuapejat (Pulau Sipora), Sikakap dan Betumonga (Pulau Pagai Utara), Pulau

Tanopo, Makalo dan Sinaka (Pulau Pagai Selatan). Budidaya perikanan darat meliputi: Bosua, Saureinu, Nemnemleleu, (Sipora Selatan), Malancan, Sirilogui, Bojakan, Sotboyak, Muara Sikabaluan, Monganpoula (Siberut Utara), Muara Siberut, Salappak, Maileppet, Muntei, Madobag, Matotonan (Siberut Selatan), Saibi Samukop, Cimpungan (Siberut Tengah), Saumanganya, Betumonga, Silabu (Pagai Utara), Matobe, Taikako (Sikakap), Desa Malakopa dan Desa Bulasat (Pagai Selatan). Kawasan Minapolitan adalah Sikakap dan Muara Siberut (Siberut Selatan). Kawasan pengolahan hasil perikanan memiliki prasarana pendukung, meliputi bagian wilayah Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara dan bagian wilayah Muara Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Muara Sikabaluan di Kecamatan Siberut Utara, Sikakap. Prasarana pendukung kawasan pengolahan hasil perikanan terdiri atas rencana pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Tuapejat dan Sikakap, rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut dan Muara Sikabaluan, dan rencana pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Sikakap.

4) Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga yang dapat dikembangkan di setiap kecamatan

dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

5) Kawasan peruntukkan pertambangan.

   Kawasan peruntukkan pertambangan diperuntukkan untuk wilayah pertambangan terdapat di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang memiliki potensi bahan tambang jenis bebatuan (galian C).

6) Kawasan peruntukan pariwisata.

   Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah terdapat di Pulau Siberut yang meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Siberut Selatan), Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sagulubbek (Siberut Barat Daya), benteng peninggalan Jepang di Sioban (Sipora Selatan). Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat dipulau Siberut yang meliputi kawasan Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sibudda Oinan (Siberut Tengah), Matotonan dan Madobag (Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Siberut Barat Daya). Kawasan peruntukan pariwisata bahari terdapat di Silabu (Pagai Utara), Sikakap, Malakopa dan Sinakak (Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobi dan Pulau Siruamata (Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat, Taraet dan Matuptuman (Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu (Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan

Saliguma (Siberut Tengah), Sirilogui (Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi dan Bosua 100 ha, Teluk Katurei 300 ha, Taraet 50 ha, Matutuman Buggei Siata 50 ha. Kawasan peruntukan konservasi budaya terdapat di Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan Sakudei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu Kecamatan Siberut Barat.

7) Kawasan peruntukan permukiman.

   Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu Muara Siberut (PKW), Tuapejat (PKL), Sikakap (PKLp), Muara Sikabaluan, Saibi Samukop, Pasakiat Taileleu, Saumanganyak, Bulasat, Sido Makmur dan Sioban. Kawasan peruntukan perdesaan yaitu pusat lingkungan pemukiman disetiap dusun diluar kawasan perkotaan dan kawasan hunian tetap (huntap) korban tsunami.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

   Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, seperti kawasan bandara, kawasan militer AD, AL, kepolisian dan satuan keamanan dan pertahanan lainnya.

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dikelompokkan berdasarkan potensi komoditas/ sumber

daya alam dan karakteristik wilayahnya. Beberapa Kawasan pengembangan wilayah, antara lain:

1. Kawasan pertanian, perkebunan/ mandiri pangan

   Masyarakat Mentawai dengan mayoritas sumber ekonominya berasal dari sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan memiliki berbagai komoditas unggulan sebagai sumber mata pencarian utama antara lain pisang, keladi, sagu, cengkeh, pala, kelapa. Komoditas unggulan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan sangat potensial dilakukan dalam memberikan nilai tambah di setiap produk komoditas unggulan sektor pertanian/ perkebunan. kawasan pengembangan pertanian tanaman pisang pada Desa Monganpoula, Desa Bulasat, Pengembangan Sagu di Desa Muntei, Desa Madobag. Kawasan pengembangan holtikultura pada Desa Goisoionan, Desa Bukit Pamewa, Desa Sikakap, Desa Matobe. Kawasan pertanian sawah pada Desa Saureinu, Desa Nemnemleleu, Desa Matobe, Desa Saumanganya, Desa Sotboyak. Pembangunan ekonomi pedesaan dengan konsep agribisnis juga dapat dikembangkan dalam pembangunan desa seperti pada kawasan perkebunan cengkeh di Desa Sirilogui, kawasan perkebunan kelapa di Taraet Desa Betumonga dan Desa Sagulubbeg.



Melalui pengembangan pertanian berbasis kawasan tentunya akan memberikan kemudahan dalam hal integrasi dalam hal keterkaitan input dan output (*backward dan forward linkage*), efektifitas dan efisiensi skala ekonomi tentunya dalam jengka Panjang akan memberi dampak pada pengembangan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta membentuk kemandirian desa dan masyarakat.

2. Kawasan perikanan/kelautan

   Pembangunan sektor perikanan, kelautan diharapkan dapat dipercepat dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh. Kemudahan atau peluang yang biasanya ada perlu dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi, yang didukung sarana prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan dan sumberdaya manusia yang memadai.

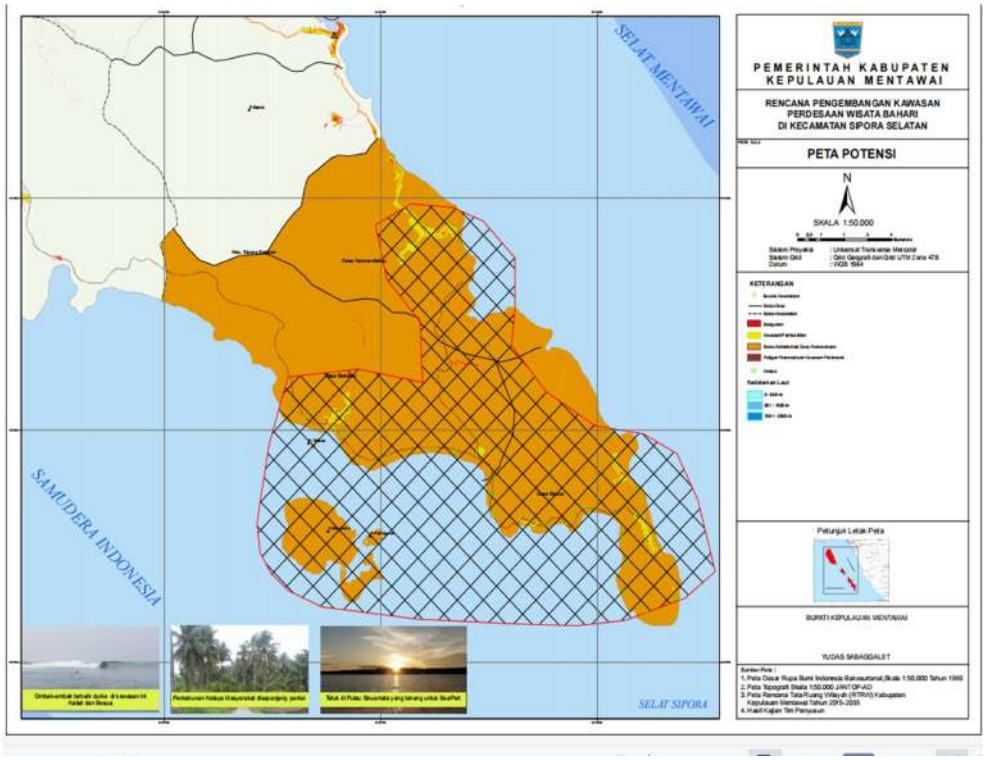
Pengembangan kawasan budidaya perikanan laut sangat potensial dikembangkan di kawasan perikanan di Desa Sikakap, Desa Sinaka, Desa Matobe, Desa Sikabaluan, Desa Tuapejat, Desa Muara Siberut. Selain itu juga dengan pembandan kawasan budidaya kepiting bakau, lobster dan udang di kawasan Desa Katurei, Desa Sikakap, Desa Pasakiat Taileleu. Produksi ikan yang melimpah juga potensial untuk pengembangan industri pengolahan ikan asin, ikan asap dan pengalengan ikan di kawasan Desa Sikabaluan Dusun Bose, Desa Sigapokna. Begitu juga dengan potensi pengembangan kawasan budidaya perikanan darat sangat memungkinkan dikembangan pada kawasan di Desa Saureinu, Desa Sido Makmur, Desa Sikakap.



3. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial dikembangkan di Kab. Kepulauan Mentawai, sebagai daerah kepulauan tentunya panorama alam dan lautnya sangat memukau dan potensial untuk dkembangkan. Sektor pariwisata menjadi

unggulan antara lain wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Wisata bahari yang menjadi sangat potensial dikembangkan di Kepulauan Mentawai hampir pada seluruh kawasan pesisir, Namun beberapa lokasi yang menjadi prioritas pengembangan seperti Desa Bosua pada kawasan Katiet, Desa Nemnemleleu, Desa Beriulou.



Arah pengembangan produk dan pariwisata bahari selain surfing, snorkling, diving juga dikembangkan wisata ekowisata, budaya, kano dan pengembangan kuliner serta akomodasi yang ramah lingkungan, memadai dengan kualitas standar internasional.

Zona Wilayah	Aktivitas Pariwisata Bahari
Desa Katurei	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan daiving, surfing dan snorkling - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Taileleu	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan daiving, surfing dan snorkling - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Bosua/ Katiet	- Surfing - Diving, snorkling - Sewa peralatan dan perlengkapan diving, surfing dan snorkling

Wisata Alam dan Wisata Budaya menjadi bagian yang saling melengkapi yang ada di Kepulauan Mentawai. Potensi pengembangannya ada dibeberapa titik di wilayah Pulau Siberut seperti di Desa Matotonan, Desa Madobag, Desa Muntei, dimana kelestarian alam dan budaya masyarakat yang masih terjaga dan tetap eksis hingga saat ini.

Zona Wilayah	Aktivitas pariwisata
Desa Matotonan	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai

Zona Wilayah	Aktivitas pariwisata
Desa Madobag	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Muntei	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.
Desa Maileppet	- Pemandangan alam/bahari - atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana

terhadap bahaya tsunami. Pada tahun 2023 telah terjadi gempa tektonik di wilayah Kepulauan Mentawai sebanyak 4 kali.

Dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar.

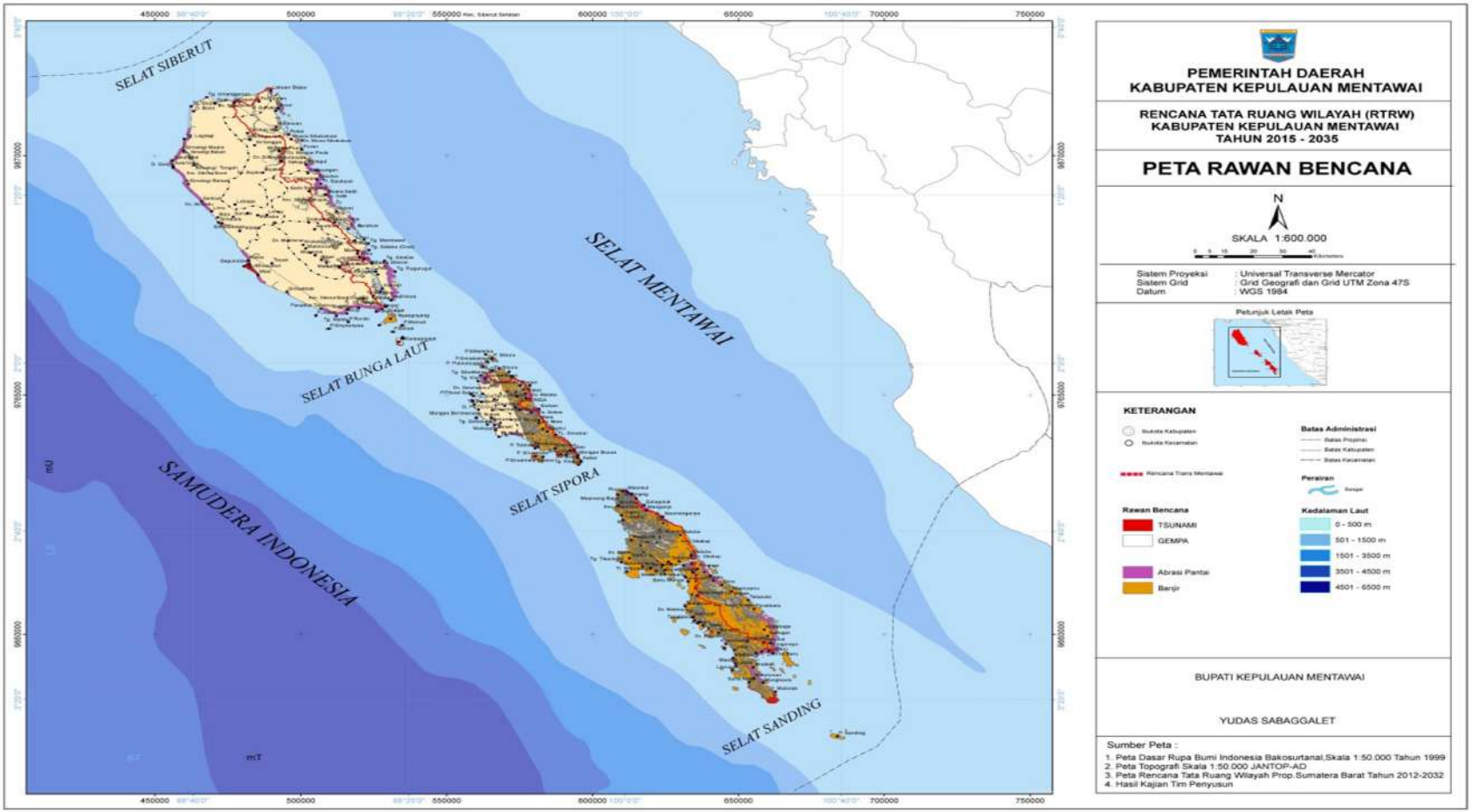
Tabel 2.6
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Kekeringan	Sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2022

Tabel 2.6 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, bencana gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya sedang terhadap bencana kekeringan. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.4
Peta Rawan Bencana



2.1.1.4 Aspek Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Secara umum keadaan kependudukan di Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara teori (BPS), penduduk diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk menjadi aset dan modal besar dalam pembangunan, sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan. Integrasi perencanaan dengan kependudukan menjadi hal penting bagi daerah dalam mengarahkan esensi pembangunan daerah, bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Disisi lain, tantangan pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan tersendiri di daerah baik itu dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi, tingkat ketergantungan, kepadatan penduduk yang akan dikaitkan dengan daya dukung lingkungan/alam. Jumlah penduduk per kecamatan, luas daerah dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022

No	Kecamatan	Luas Daerah (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/km^2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Jenis Kelamin (jiwa)	
							Laki-Laki	Perempuan
1	Pagai Selatan	901,08	9.421	10,54	11,06	0,29	4.914	4.507
2	Sikakap	278,45	10.280	11,5	32,88	0,34	5.332	4.948
3	Pagai Utara	342,02	6.157	6,89	16,58	1,19	3.211	2.946
4	Sipora Selatan	268,47	10.022	11,21	28,77	1,22	5.162	4.860
5	Sipora Utara	383,08	12.528	14,01	45,99	2,65	6.446	6.082
6	Siberut Selatan	508,33	10.173	11,38	31,02	1,37	5.240	4.933
7	Siberut Barat Daya	649,08	7.213	8,07	7,11	1,25	3.782	3.431
8	Siberut Tengah	739,87	7.251	8,11	12,3	1,3	3.762	3.489
9	Siberut Utara	816,11	8.387	9,38	10,72	0,34	4.384	4.003
10	Siberut Barat	1.124,86	7.969	8,91	6,84	1,21	4.182	3.787
2022		6.011,35	89.401		14,82	1,15	46.415	42.985
2021		6.011,35	88.389		19,96	0,84	45.891	42.498
2020		6.011,35	87.623		14,52	1,41	45.477	42.146
2019		6.011,35	92.021		15,31	1,82		

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 tercatat sebanyak 89.401 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata sebesar 1,15 persen. Laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sipora Utara yaitu sebesar 2,65 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan sebagai ibukota kabupaten dengan tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang cukup intens. Tingkat kepadatan penduduk di Kepulauan Mentawai dikategorikan masih sangat jarang yaitu 14,82 orang/km^2, artinya setiap km^2 terdapat sekitar 14-15 orang penduduk. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sipora Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 45,99 orang/km^2, kemudian

Kecamatan Sikakap dengan kepadatan penduduk 32,88 orang/km^2 dan Kecamatan Siberut Selatan dengan kepadatan penduduk 31,02 orang/km^2.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
0 - 4	3.590	3.426	104,8
5 - 9	4.060	3.958	102,6
10 - 14	4.918	4.643	105,9
15 - 19	4.582	4.047	113,2
20 - 24	4.092	3.846	106,4
25 - 29	3.963	3.861	102,6
30 - 34	4.083	3.929	103,9
35 - 39	3.629	3.119	116,4
40 - 44	3.176	2.929	108,4
45 - 49	2.769	2.433	113,8
50 - 54	2.480	2.122	116,9
55 - 59	1.810	1.606	112,7
60 - 64	1.364	1.266	107,7
65 - 69	819	739	110,8
70 - 74	645	613	105,2
75+	447	410	109,0
Total	46.427	42.947	108,1

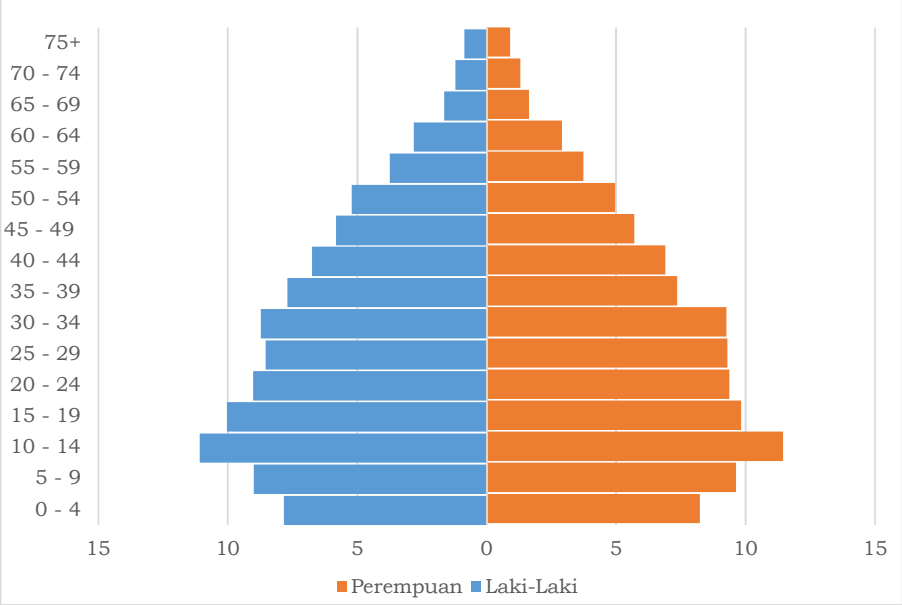
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan atau dengan rasio 108,1 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 orang penduduk laki-laki di Kepulauan Mentawai. Untuk kelompok umur usia non produktif lansia (65+ tahun), rasionya cukup besar yaitu 108,03. Artinya setiap 100 orang penduduk lansia perempuan terdapat 108 orang lansia laki-laki. Kondisi ini menggambarkan penduduk lansia laki-

laki lebih banyak daripada penduduk lansia perempuan, apakah data ini disebabkan oleh kematian, perpindahan atau migrasi penduduk lansia perempuan cukup sering tentunya perlu analisis lebih lanjut lagi.

Komposisi penduduk Kepulauan Mentawai jika dilihat dari piramida penduduk seperti pada Gambar 2.5 menunjukkan bahwa kelompok usia 10-14 tahun memiliki komposisi paling besar dari struktur usia penduduk di Kepulauan Mentawai, namun menurun tajam pada komposisi kelompok usia 55+ tahun.

Gambar 2.5
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022

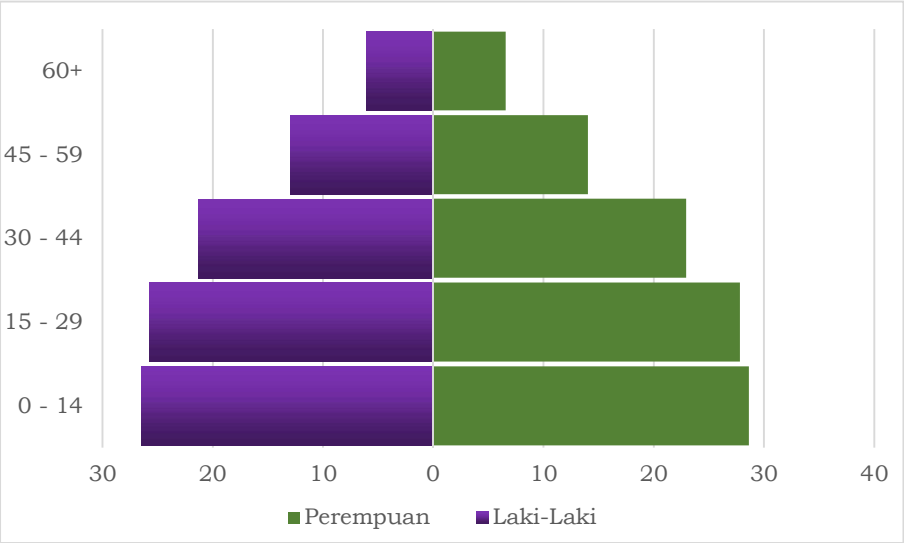


Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk menjadi indikator cukup tingginya komposisi penduduk usia 0-9 tahun, namun di sisi lain masih rendahnya kualitas kesehatan

lingkungan dan masyarakat berdampak pada penurunan jumlah penduduk kelompok usia produktif hingga penduduk pada kelompok usia lansia. Jika dilihat komposisi penduduk dari kelompok usia dengan rentang usia 14 tahun seperti pada Gambar 2.6 piramida penduduk usia rentang 14 tahun, menunjukkan bahwa kelompok usia 0-14 tahun dan 15-29 tahun dengan komposisi terbesar. Kelompok usia produktif 30-44 tahun, 45-59 tahun mengalami penurunan.

Gambar 2.6
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentang 14 Tahun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022



Hal ini mengindikasikan terjadinya pengurangan jumlah penduduk baik pria dan wanita kelompok usia produktif, apakah itu akibat adanya kematian atau karena perpindahan. Penduduk pada usia produktif yang menjadi tulang punggung pembangunan perlu menjadi perhatian, agar dapat ambil bagian dalam proses pembangunan, tentunya intervensinya dimulai dari menjadi

embrio kehidupan, lahir dan balita, baik itu dari segi kesehatan individu, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungannya.

Tabel 2.9
Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Jenis Kelamin, 2022

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio
Penduduk Usia 0 - 14	12.568	12.027	24.595	104,5
Penduduk Usia 15 - 64	31.948	29.158	61.106	109,6
Penduduk Usia 65 +	1.911	1.762	3.673	108,5
Rasio Ketergantungan	45,32	47,29	46,26	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2023

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan rasio 109,6. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif perempuan terdapat 109-110 penduduk usia produktif laki-laki. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, rasio ketergantungan Kepulauan Mentawai tahun 2022 sudah dibawah 50 persen yaitu sebesar 46,26 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 46 penduduk usia tidak produktif. Jika rasio ketergantungan ini ditahun berikutnya mengalami penurunan maka Kepulauan Mentawai akan mendapatkan bonus demografi yang tentunya sangat berguna dalam pembangunan di daerah terkhususnya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki daya saing dan kompetitif.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan pembangunan yang sebesarnya adalah menyejahterakan masyarakatnya. Sejatinya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menghilangkan ketimpangan pembangunan baik dari sisi pendapatan, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan ekonomi. Pembangunan manusia menjadi pembangunan yang senyata-nyatanya benar dan realitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh positif tidak serta merta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi merata dan setidaknya menjadi t*rickle-down effect* yang diharapkan menetes kebawah membantu ekonomi masyarakat dengan tetap membutuhkan intervensi pemerintah daerah sebagai katalisator pembangunan sehingga masyarakat benar-benar merasakan arti pembangunan.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Mulai pulihnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat seiring dengan terkendalinya COVID-19 memberikan pengaruh pada tingkat ekonomi daerah yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami kenaikan, yaitu 2021 sebesar 2,89 persen dan Tahun 2022 sebesar 4,94 persen. Begitu juga dengan telah dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022, sehingga tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat menjadi momentum dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi baik secara nasional juga hinga ke daerah. Begitu juga dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memutuskan situasi penularan COVID-19 bukan lagi sebagai kedaruratan kesehatan global. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers di Geneva, Swiss, Jumat (5/5/2023) waktu setempat, mengatakan, pandemi COVID-19 menunjukkan tren penurunan, baik pada kasus baru maupun kasus kematian. Tekanan pada sistem kesehatan pun berkurang. Selain itu, kekebalan komunitas atas penularan COVID-19 juga meningkat di tingkat global.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan ekonomi suatu daerah, semakin membaiknya distribusi ekonomi/pendapatan masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

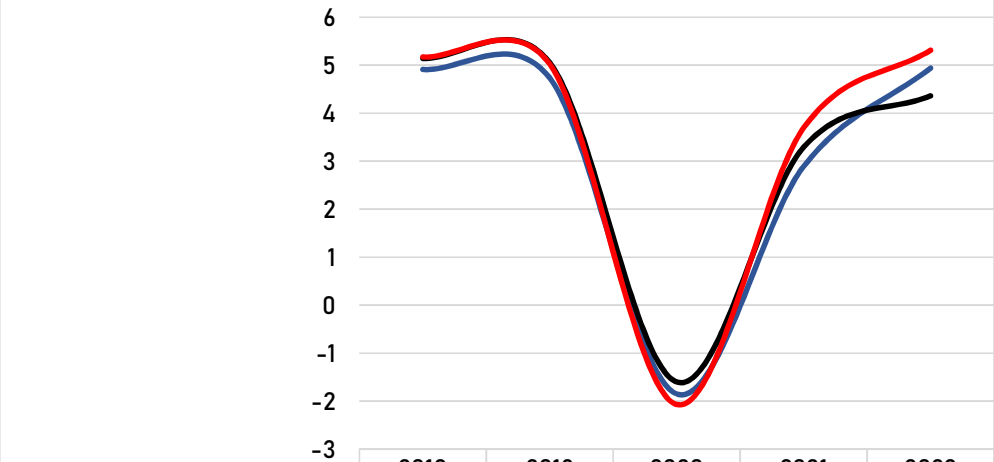
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat menunjukkan perkembangan produksi barang dan

jasa suatu daerah ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu.

Perkembangan kondisi ekonomi daerah Kab. Kepulauan Mentawai setelah pandemi COVID-19 menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 2.7 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020 saat COVID melanda dunia yang berimbas pada kondisi ekonomi daerah dengan tingkat pertumbuhan nasional pada angka minus 2,07 persen begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga terdampak dengan pertumbuhan ekonomi minus 1,6 persen dan ekonomi Kab. Kepulauan Mentawai sebesar minus 1,85 persen.

Gambar 2.7
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

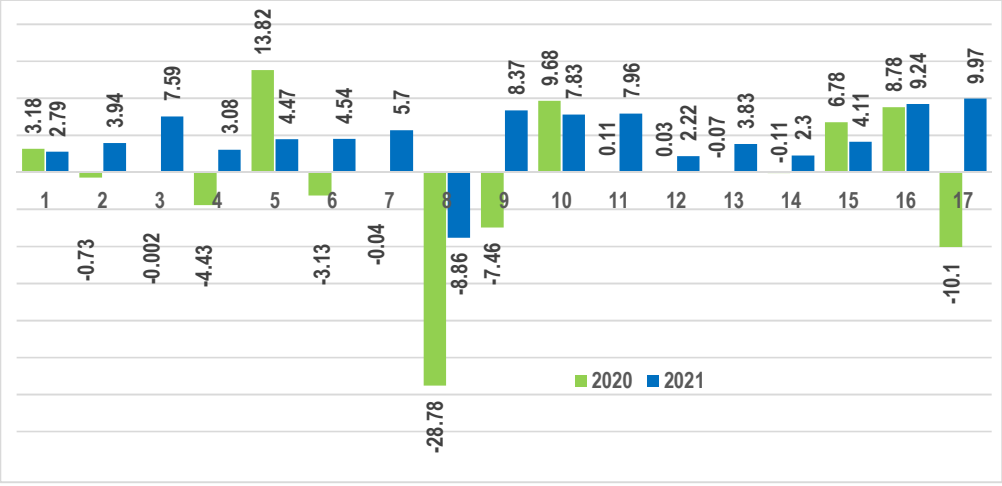


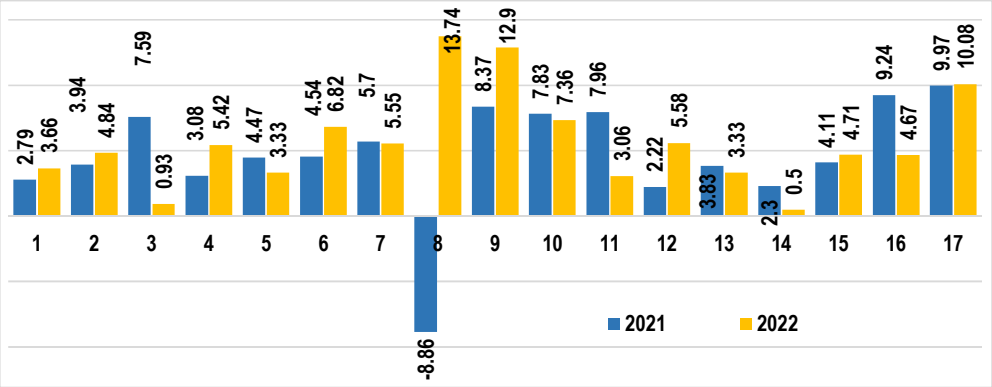
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Kep. Mentawai	4.91	4.73	-1.85	2.89	4.94
Prop. Sumatera Barat	5.14	5.05	-1.6	3.29	4.36
Indonesia	5.17	5.02	-2.07	3.69	5.31

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2023

Program vaksinasi dan pembatasan aktivitas sosial ekonomi yang dijalankan dapat mampu mengendalikan sembari melakukan upaya pencegahan dan penanganan dampak COVID 19. Begitu juga dengan program perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat untuk menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga pada tahun 2021 dan 2022 kondisi ekonomi secara nasional regional dan daerah mengalami pertumbuhan yang positif. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kab. Kepulauan Mentawai sebesar 2,89 persen dan mengalami peningkatan di Tahun 2022 menjadi 4,94 persen. Hal ini selaras dengan tren pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat (2021 = 3,29 persen, 2022 = 4,36 persen) dan Nasional yang juga bertumbuh positif (2021 = 3,69 persen, 2022 = 5,31 persen).

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2022





1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13	Jasa Perusahaan
2	Pertambangan dan Penggalian	8	Transportasi dan Pergudangan	14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
3	Industri Pengolahan	9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15	Jasa Pendidikan
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10	Informasi dan Komunikasi	16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11	Jasa Keuangan dan Asuransi	17	Jasa lainnya
6	Konstruksi	12	Real Estate		

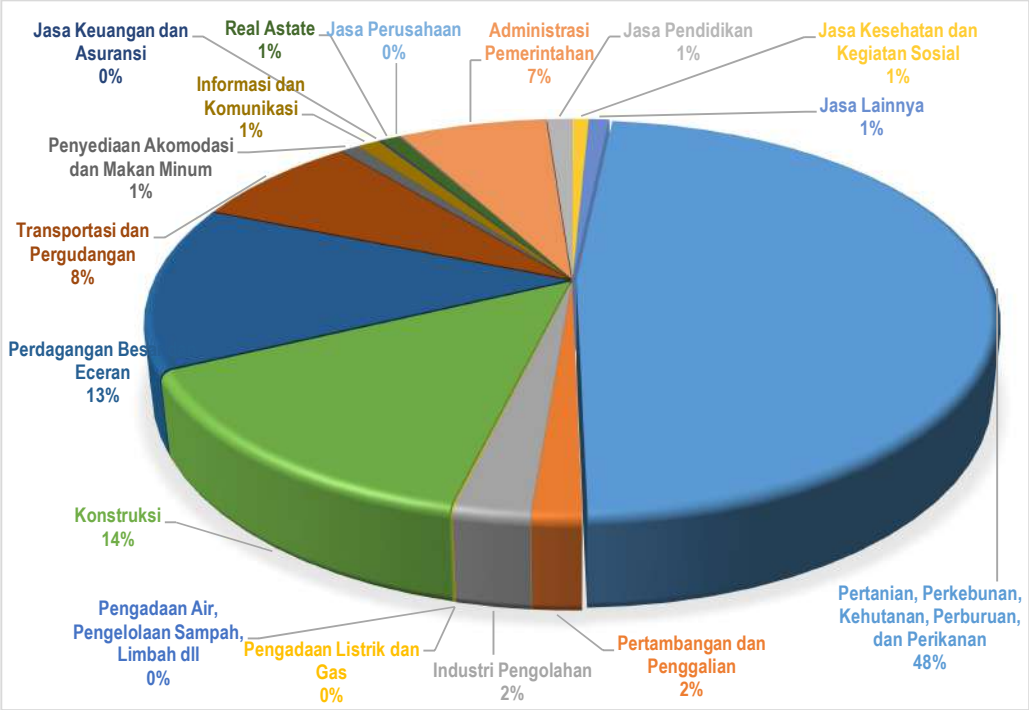
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2023

Gambar 2.8 menunjukkan laju pertumbuhan sektoral pada PDRB dalam kurun waktu 2020-2022. Dari perkembangan laju pertumbuhan sektoral menunjukkan bahwa tahun 2021 sebagaian besar laju pertumbuhan sektoral berada pada angka yang positif, kecuali sektor transportasi dan pergudangan, namun jika dilihat dari angka capaiannya, antara tahun 2020-2022 sudah mengalami perbaikan yaitu sebesar minus 28,78 persen tahun 2020 membaik menjadi minus 8,86 persen tahun 2021 dan menjadi 13,74 persen pada Tahun 2022. Begitu juga dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum selama masa pandemi COVID-19 sangat terdampak dengan laju pertumbuhan minus 7,46 persen dan pada tahun 2021 laju pertumbuhannya

membaik menjadi 8,37 persen dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 12,9 persen. Untuk sektor yang dominan (tumbuh) dimasa pandemi COVID-19 seperti sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor infomasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial relatif terjaga walaupun ada perlambatan dari sisi permintaan.

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa secara keseluruhan komponen penyusun PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 didominasi oleh 3 sektor utama antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 48,01 persen, konstruksi 14,03 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,43 persen.

Gambar 2.9
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022



Hal ini menjadi potensi bagi pemerintah daerah pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah yang memberikan nilai tambah (*value added*) dan produktivitas serta memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat.

Tabel 2.10 menunjukkan perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022 yang mengalami

kenaikan. Untuk PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dari 4,52 triliun rupiah tahun 2018 meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,44 triliun rupiah.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
ADHK	2.875.664	3.011.724	2.956.010	3.041.550	3.191.300
ADHB	4.525.824	4.641.481	4.647.100	4.843.810	5.445.470
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB	47,06	50,12	53,18	54,80	60,91

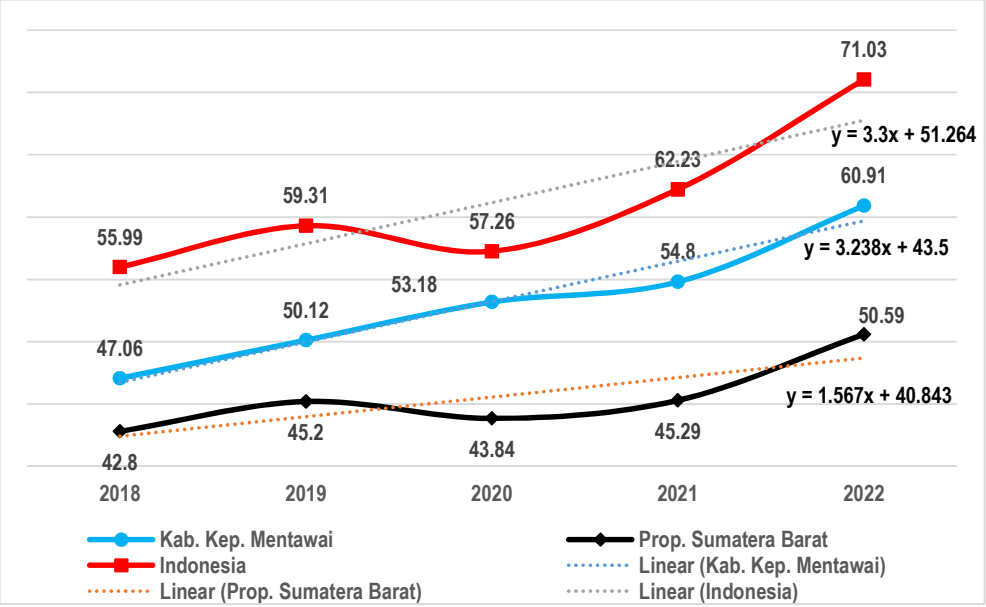
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2023

Begitu juga dengan PDRB perkapita yang dapat dilihat dengan membaginya dengan total jumlah penduduk, didapat bahwa pada tahun 2018 PDRB perkapita sebesar 47,06 juta rupiah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 PDRB perkapita menjadi sebesar 60,91 juta rupiah.

Secara umum gambaran pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018-2022 pada Gambar 2.10 mengalami tren kenaikan. Pendapatan perkapita yang diartikan sebagai total produktifitas sumber daya yang ada di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yaitu tahun 2018 sebesar 47,06 juta rupiah

perkapita pertahun meningkat menjadi 60,91 juta perkapita pertahun pada tahun 2022.

Gambar 2.10
Pendapatan Perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS (diolah)

Jika dibandingkan tren kenaikan pendapatan perkapita di kurun waktu yang sama antara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai berada diatas rata-rata pendapatan per kapita Propinsi Sumatera Barat, namun secara Nasional pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dibawah rata-rata pendapatan nasional. Namun angka statistik tidak selalu diartikan berbanding lurus ketika terjadi kenaikan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada kenyataannya tidak

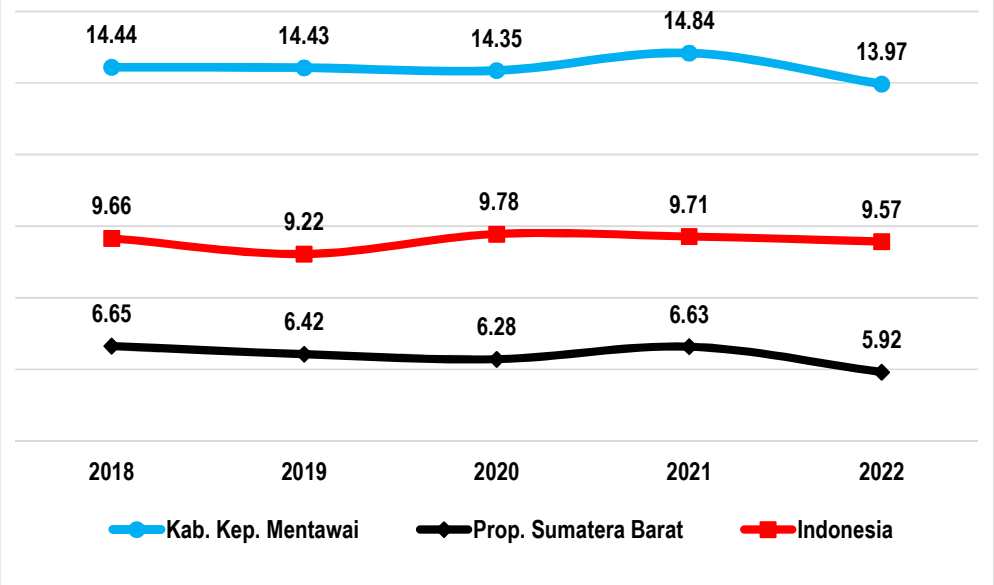
berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan (Tahun 2022 = 13,97 persen), fenomena ini mengindikasikan bahwa belum menjadi syarat utama bagi daerah ketika pendapatan per kapita menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Jika dilihat dari nilai intersep/ tren, Capaian pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh angka yang cukup tinggi yaitu sebesar 3,238, sedangkan Propinsi Sumatera Barat sebesar 1,567 dan nasional sebesar 3,3, hal ini mengindikasikan bahwa proyeksi pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengalami kenaikan yang lebih baik kedepannya.

3. Tingkat Kemiskinan Daerah dan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (Word Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022 mengalami tren penurunan walaupun secara agregat tidak signifikan.

Gambar 2.11
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



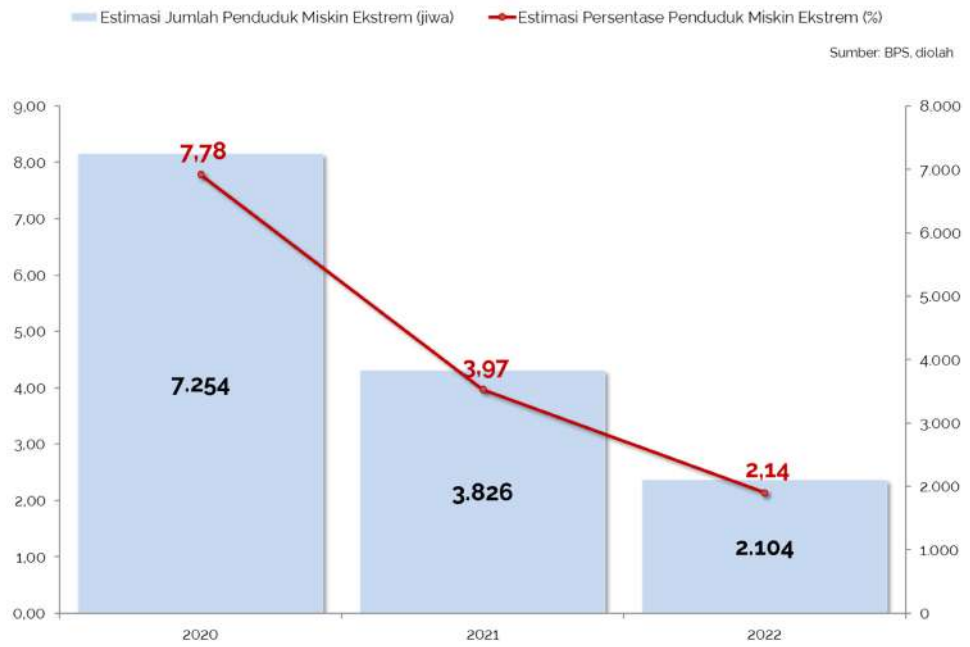
Sumber : BPS (diolah)

Jika dilihat Gambar 2.11 tingkat kemiskinan daerah dari sisi persentase mengalami penurunan yaitu 14,44 persen tahun 2018 turun menjadi 13,97 persen pada tahun 2022. Dampak pandemi terlihat dari meningkatnya tingkat kemiskinan yang dapat dilihat dari kenaikan, yaitu dari 14,35 persen ditahun 2020 menjadi 14,84 persen ditahun 2021.

Begitu juga jika dilihat dari perbandingan pencapaian penurunan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.11 menunjukkan bahwa pencapaian tingkat

kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada jauh di atas pencapaian penurunan tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat dan secara Nasional. Pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat sebesar 5,92 persen, Nasional sebesar 9,57 persen sedangkan capaian Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13,97 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem dihitung dari penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*).

Gambar 2.12
Perkembangan Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2022



Sumber : BPS

Tingkat kemiskinan ekstrem Kab. Kep. Mentawai mengalami penurunan dari 7,78 persen atau sebanyak 7.254 orang pada tahun 2020 turun menjadi 2,14 atau sebanyak 2.104 orang pada

tahun 2022. Berbagai upaya dilakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan pencapaian target SDG's yaitu tanpa kemiskinan dan untuk mencapai target Nasional pada 0 persen di tahun 2024 antara lain integrasi program, pemutakhiran pensasaran data kemiskinan daerah (P3KE) dan kolaborasi pemangku kepentingan dan dunia usaha.

Tabel 2.11 menunjukkan perkembangan berbagai indikator kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren penurunan, pada tahun 2018 capaiannya sebesar 0,61 dan mengalami penurunan menjadi 0,42 pada tahun 2019 dan ada kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,77 sebagai dampak COVID-19 lalu kembali turun menjadi 0,16 di tahun 2022. Capaian indeks keparahan kemiskinan dalam kurun waktu 2018-2022 mengindikasikan bahwa semakin rendahnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepulauan Mentawai. Begitu juga dengan indikator indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022 menunjukkan tren penurunan yaitu pada tahun 2018 sebesar 2,42 lalu turun pada tahun 2019 menjadi 1,87, walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,87 lalu turun pada tahun 2022 menjadi 1,76.

Tabel 2.11
Indikator Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,61	0,42	0,77	0,63	0,16
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,42	1,87	2,84	2,43	1,76
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	294.284	310.033	340.191	356.403	386.152
Tingkat Kemiskinan (persen)	14,44	14,43	14,35	14,84	13,97
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	12.990	13.200	13.370	14.310	13.740

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2023

Penurunan indeks kedalaman kemiskinan kurun waktu 2018-2022 menunjukkan kecenderungan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil. Kondisi ini menggambarkan tentu masih perlunya penanganan melalui program pembangunan yang terintegrasi dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Mentawai.

4. Rasio Gini

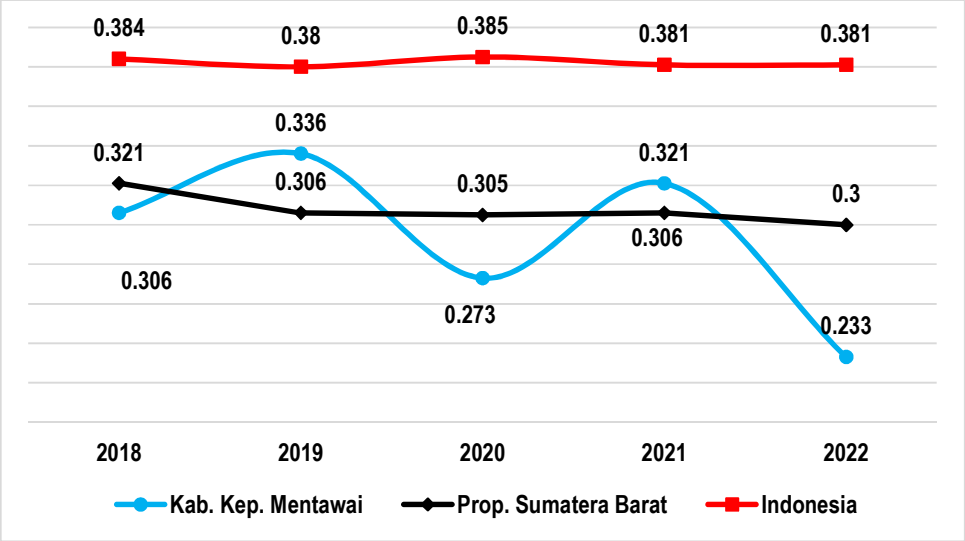
Rasio gini menjadi salah satu ukuran untuk melihat sejauh mana pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 - 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka dikatakan pemerataan pendapatan sempurna, namun jika rasio gini bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna.

Gambar 2.13 menunjukkan perkembangan rasio gini Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dikatakan cukup baik. Walaupun pencapaiannya selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Namun secara tren perkembangannya berada pada posisi 0,31. Perbandingan pencapaian Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional menunjukkan perkembangan yang baik, bahwa pencapaian Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 tahun terakhir berada di bawah rata- rata pencapaian Rasio Gini Nasional dan hanya terpaut 0,03 dari pencapaian rata-rata Rasio Gini Propinsi Sumatera Barat (0,31).

Gambar 2.13
Rasio Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS (diolah)

Capaian rasio gini Kepulauan Mentawai pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan yaitu tahun 2020 sebesar 0,273 turun pada angka 0,321 tahun 2021 dan Tahun 2022 turun lagi pada kisaran 0,233. Artinya kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kepulauan Mentawai berkurang. Secara umum pencapaian rasio gini Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 tahun terakhir masih dikategorikan pada tingkat ketimpangan rendah (0<rasio gini<0,4).

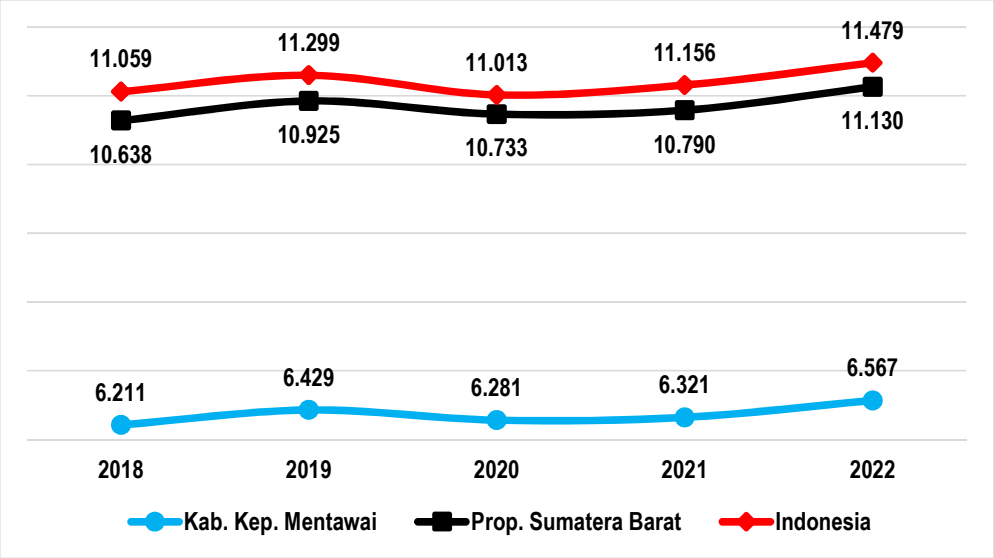
5. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran.

Semakin tinggi pendapatan, maka kecenderungannya semakin tinggi pengeluaran. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat

kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Gambar 2.14
Pengeluaran Perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS (diolah)

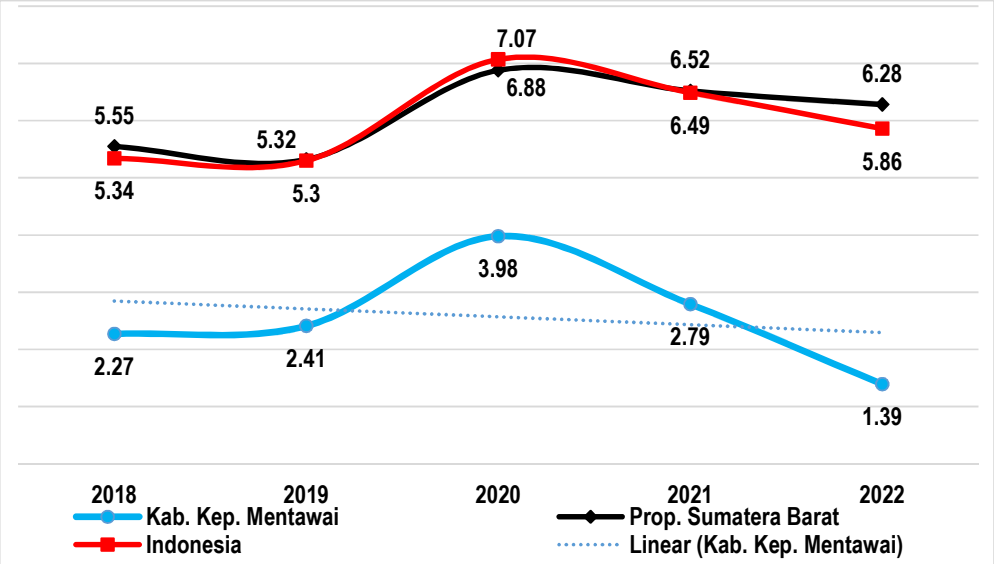
Pengeluaran Riil Per Kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran per kapita masyarakat di Kab. Kep. Mentawai menunjukkan tren kenaikan yaitu dari 6,2 juta rupiah/kapita/Tahun pada Tahun 2018 meningkat menjadi 6,5 juta rupiah/kapita/Tahun pada Tahun 2022, artinya kemampuan daya beli masyarakat mengalami peningkatan.

6. Tingkat Pengangguran

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing.

Penguatan sumberdaya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

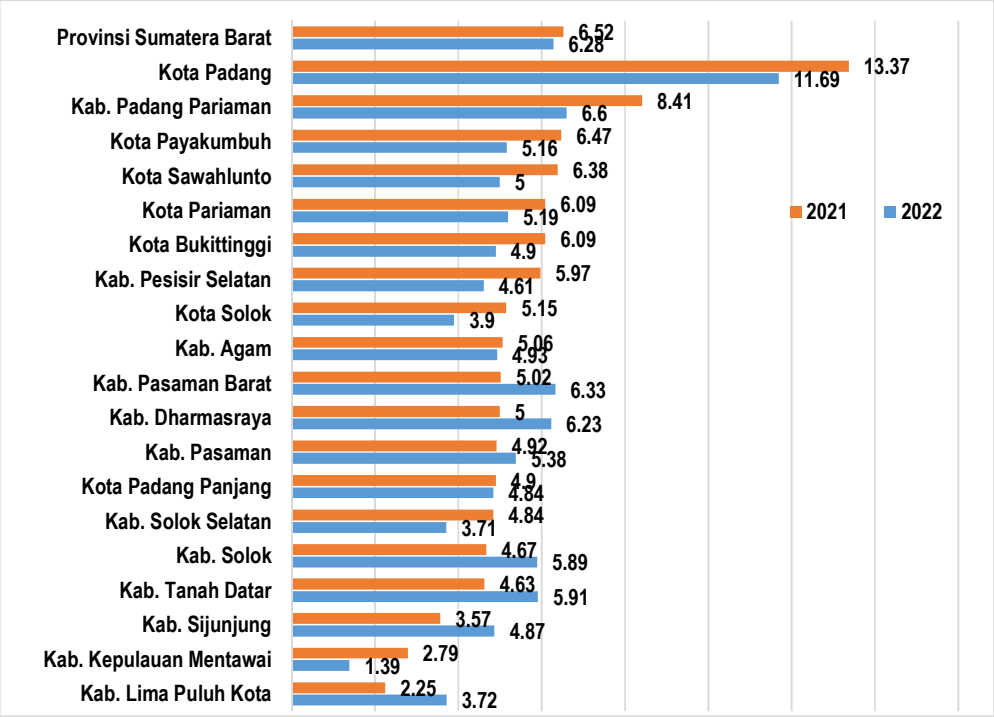
Gambar 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS (diolah)

Gambar 2.15 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Kep. Mentawai menunjukkan trend penurunan. Dari 2,27 persen (tahun 2018) turun menjadi 1,39 persen (tahun 2022). Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Kep. Mentawai lebih baik dari pencapaian Prop. Sumbar (6,28 persen) dan Nasional (5,86 persen) tampak dari grafik TPT Kab. Kep Mentawai berada di bawah dari grafik pencapaian Prop. Sumbar dan Nasional.

Gambar 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Propinsi Sumatera Barat, 2021-2022



Sumber : BPS (diolah)

Pada Gambar 2.16 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Kep. Mentawai mengalami penurunan dari 2,79 persen (tahun 2021) menjadi 1,39 persen (tahun 2022). Pada tahun 2021, pencapaian TPT Kab. Kep. Mentawai merupakan 2 terendah dari 19 kab/kota di Prop. Sumatera Barat. Pada tahun 2022, pencapaian TPT Kab. Kep. Mentawai merupakan yang terendah dari 19 kab/kota di Prop.Sumatera Barat.

Tabel 2.12
Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2022

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Berusaha Sendiri	8.430	3.092	11.522	22,62
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	7.885	4.132	12.017	23,59
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	603	0	603	1,18
Buruh/Karyawan/Pegawai	6.284	4.232	10.516	20,65
Pekerja Bebas	1.353	0	1.353	2,66
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	4.599	10.325	14.924	29,30
Jumlah	29.154	21.781	50.935	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2023

Dilihat dari penduduk Kepulauan Mentawai yang bekerja (15+ tahun) seperti pada Tabel 2.12 menunjukkan bahwa status pekerjaan utama masyarakat Mentawai pada kriteria status pekerjaan pekerja keluarga/tak dibayar dengan persentase sebesar 29,30 persen, dengan jumlah tenaga kerja perempuan lebih banyak yaitu sebesar 10.325 jiwa sedangkan pekerja laki-laki sebanyak 4.599 jiwa.penduduk dan dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tak dibayar dengan persentase sebesar 23,59 persen, dengan jumlah tenaga kerja laki-laki yang mendominasi yaitu sebanyak 7.855 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 4.132 jiwa dan hal ini menjadi wajar dikarenakan oleh sektor primer (pertanian, peternakan dan perikanan) sebagai sumber utama mata pencarian masyarakat Mentawai dan masih bersifat kekeluargaan.

Tabel 2.13
Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	19.835	11.669	31.504	66,45
Industri Pengolahan, Pedagangan, Konstruksi, Transportasi, Akomodasi	3.904	2.860	6.764	14,27
Jasa-Jasa	4.995	4.150	9.145	19,29
Jumlah	28.734	18.679	47.413	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2023

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama seperti pada Tabel 2.13 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Mentawai bekerja di sektor primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan) yaitu sebanyak 31.504 jiwa atau sekitar 66,45 persen sedangkan untuk lapangan usaha di sektor industri pengolahan, pedagangan, konstruksi, transportasi, akomodasi, jumlah pekerja/ masyarakat yang bekerja di sektor ini berbeda jauh dengan jumlah di sektor primer yaitu hanya sebanyak 6.764 jiwa atau sekitar 14,27 persen dengan jumlah pekerja laki-laki mendominasi sebanyak 3.904 jiwa dan pekerja perempuan sebanyak 2.860 jiwa.

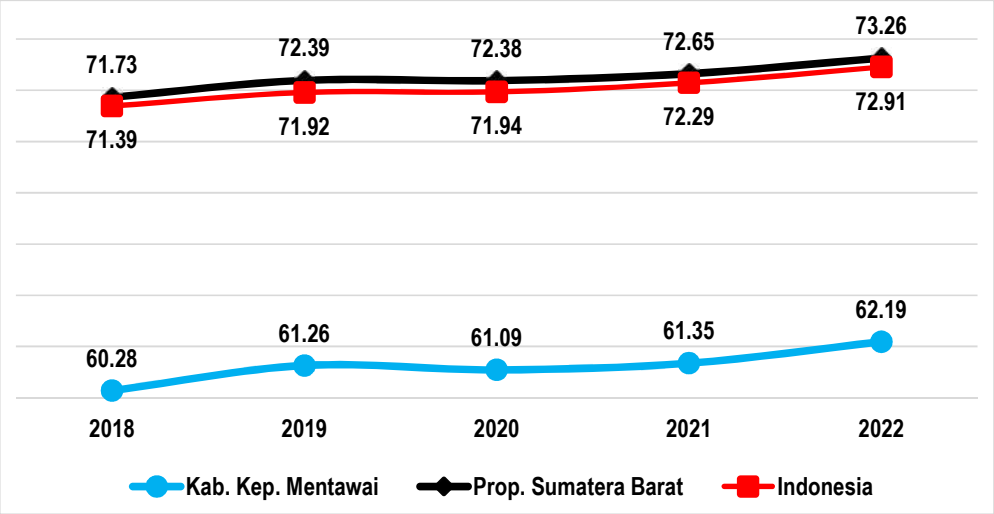
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator ukuran keberhasilan pembangunan dalam menyejahterahkan masyarakat dapat dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia setiap tahunnya. Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS (diolah)

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018-2022 seperti terlihat dalam Gambar 2.17 Jika dilihat dari perbandingan capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Propinsi Sumatera Barat dan nasional, tampak pada Gambar 2.17 bahwa capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022 berada jauh dibawah capaian rata-rata IPM Propinsi Sumatera Barat dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih di bawah pencapaian IPM menunjukkan belum baiknya

kinerja elemen/indikator yang membangun IPM itu sendiri, antara lain harapan lama sekolah, rata lama sekolah, pendapatan perkapita dan angka harapan hidup masih rendah.

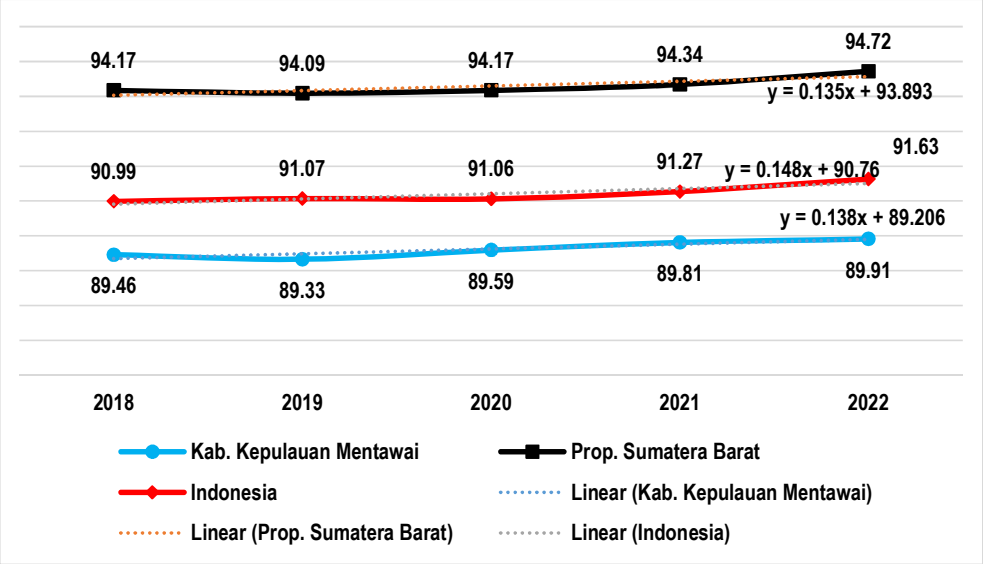
IPM ini merupakan angka komposit dari capaian angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Pada tahun 2018, capaian IPM Kepulauan Mentawai sebesar 60,28 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 61,26. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 61,09 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 62,19. penurunan IPM pada Tahun 2020 terjadi pada sisi pengeluaran perkapita masyarakat selama pandemi yang mengalami penurunan akibat pembatasan aktifitas masyarakat sehingga membatasi atau menahan belanja/pengeluaran masyarakat.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Indeks pembangunan gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Pembangunan gender menjadi hal penting dalam melihat bagaimana kesetaraan gender yang lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak -haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian IPG Propinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS (diolah)

Gambar 2.18 menunjukkan perkembangan IPG Kepulauan Mentawai Tahun 2018 sebesar 89,46 mengalami peningkatan

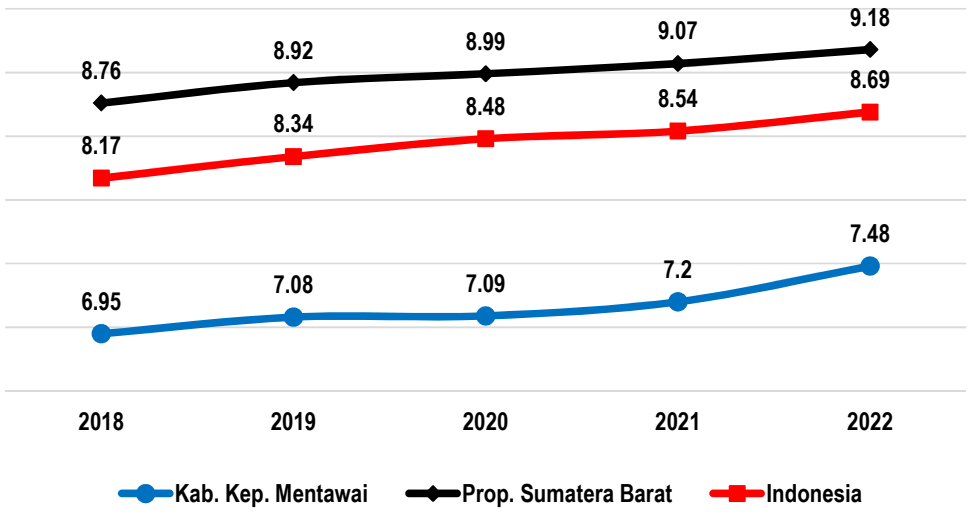
pencapaian hingga tahun 2022 IPG Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 89,91 artinya ketimpangan peran antara perempuan dengan laki-laki semakin berkurang (menuju 100). Namun, jika dilihat dari tren perkembangan IPG Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022 menunjukkan tren menaik (peningkatan), berbeda dengan tren IPG Nasional yang menaik tapi sangat landai, begitu juga tren IPG Propinsi Sumatera Barat tren menaik sangat landai. Kondisi ini tentunya menjadi optimisme peningkatan IPG tahun-tahun berikutnya agar capaiannya jauh lebih baik.

3. Rata dan Harapan Lama Sekolah

Mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemanusiaan. Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sejatinya pembangunan ekonomi daerah yang mengalami peningkatan haruslah berbanding lurus pembangunan manusianya, melalui Pendidikan maka mata rantai kesenjangan sosial, kemiskinan dapat diputus dengan munculnya generasi yang berpendidikan dan memiliki daya saing.

Gambar 2.19 menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah di Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2018 rata-rata lama sekolah di Kepulauan Mentawai sebesar 6,95 tahun naik setiap tahunnya hingga tahun 2022 menjadi sebesar 7,48 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/sederajat.

Gambar 2.19
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

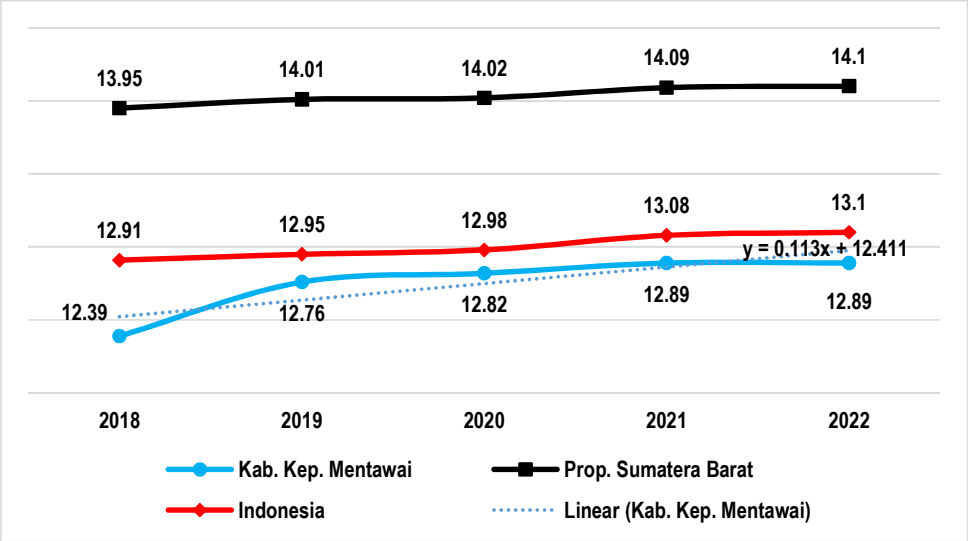


Sumber : BPS (diolah)

Jika dibandingkan dengan capaian Propinsi Sumatera Barat (9,18 tahun atau setara dengan kelas 8-9 SMP/sederajat) dan secara Nasional (8,69 tahun atau setara dengan kelas 8 SMP/sederajat) tentunya capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh dibawah capaian Propinsi Sumatera Barat dan Nasional (tampak seperti Gambar 2.19).

Begitu juga capaian harapan lama sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditampilkan melalui Gambar 2.20 menunjukkan bahwa capaian harapan lama sekolah selama kurun waktu 2018-2022 berada dibawah capaian harapan lama sekolah Propinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Gambar 2.20
Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS (diolah)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Pada tahun 2018 harapan lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 12,39 tahun dan setiap tahun meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar 12,89 tahun atau setara dengan Diploma I

atau Perguruan Tinggi (PT) semester 1. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kepulauan Mentawai masih jauh berada dibawah capaian HLS Propinsi Sumatra Barat dan secara Nasional. Namun, jika dilihat dari tren capaiannya bahwa proyeksi capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan (tren menaik tajam).

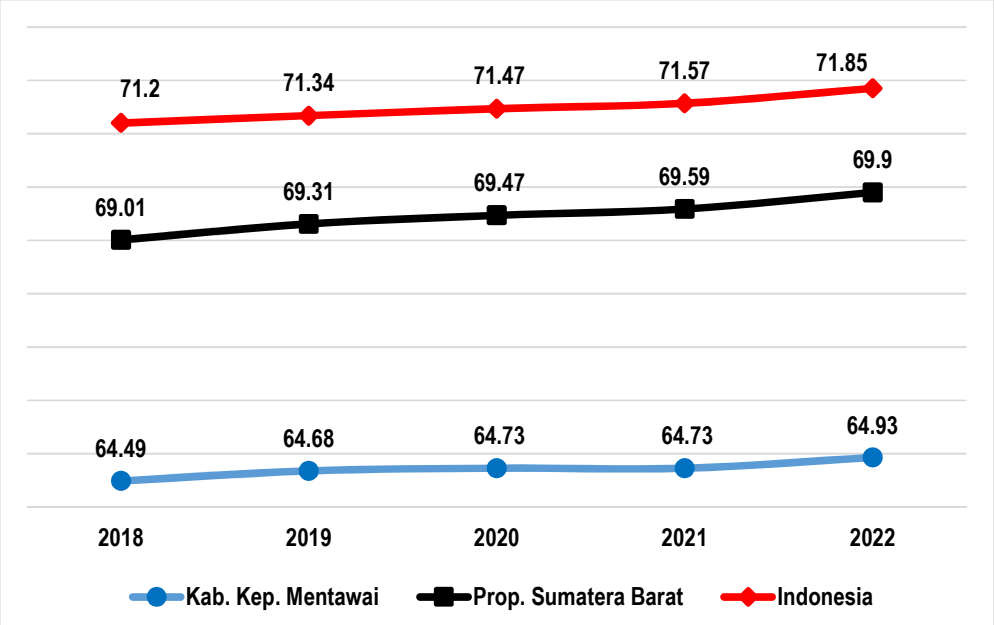
4. Angka Harapan Hidup

Kebijakan pembangunan kesehatan di daerah diarahkan pada upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan daerah tertinggal yaitu dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan agar derajat kesehatan masyakarat yang diukur dengan indikator-indikator kesehatan dapat tercapai dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Gambar 2.21 menunjukkan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan pencapaian, ini terlihat pada tahun 2018

AHH Kepulauan Mentawai sebesar 64,49 tahun meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 menjadi sebesar 64,93 tahun.

Gambar 2.21
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS (diolah)

Jika dibandingkan capaian AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian AHH Propinsi Sumatera Barat dan secara Nasional, tentunya capaian AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian AHH Propinsi Sumatera Barat dan Nasional. Upaya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) sangat erat kaitannya angka kematian anak lahir, gizi yang cukup bagi ibu hamil dan bayi lahir, nutrisi dan gizi bagi anak, pola hidup sehat dan produktivitas, kualitas lingkungan, kualitas hidup bagi lanjut usia.

5. Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Stunting dapat memperlambat perkembangan otak, membuat keterbelakangan mental hingga rendahnya kemampuan belajar. Hal tersebut sebagai dampak dari kekurangan gizi secara kumulatif. Sehingga dampaknya anak terlalu pendek untuk usianya diikuti dengan penurunan kemampuan kognitif dan resiko tinggi di masa depan mengalami berbagai komplikasi penyakit. Masalah stunting yang paling penting adalah menyiapkan generasi sumber daya manusia di masa depan apabila sudah memasuki usia kerja sehingga menghasilkan angkatan kerja yang tidak kompetitif.

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami perlambatan artinya terjadi penurunan kasus stunting dilihat dari kurun waktu 2013 hingga tahun 2022 walaupun penurunanya di angka 0,99 persen. Berdasarkan hasil survei SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2021 dan 2022 perkembangan prevalensi stunting di Kab. Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan yaitu dari 27,3 persen Tahun 2021 naik menjadi 32 persen pada tahun 2022.

Perlu pencegahan dan penanganan secara inklusif dan terintegrasi melibatkan semua sektor dan pemangku kepentingan dalam pengentasan stunting dengan target nasional pada tahun 2024 telah pada angka 14 persen.

Gambar 2.22
Perkembangan Prevalensi Stunting (Persen)
Propinsi Sumatera Barat, 2013-2022

No	Kabupaten/Kota	2013	2018	2019	2021	2022	Perubahan 2022 dibandingkan 2013 (+/-)	Rata-rata perubahan per tahun (+/-)
1	Kab. Kepulauan Mentawai	40,9	32,4	43,3	27,3	32,0	-8,9	-0,99
2	Kab. Pesisir Selatan	50,0	26,5	30,56	25,2	29,8	-20,2	-2,24
3	Kab. Solok	42,0	41,5	35,45	40,1	24,2	-17,8	-1,98
4	Kab Sijunjung	37,2	35,0	30,62	30,1	30,0	-7,2	-0,80
5	Kab Tanah Datar	38,8	26,3	23,31	21,5	18,9	-19,9	-2,21
6	Kab Padang Pariaman	41,0	26,1	21,29	28,3	25,0	-16,0	-1,78
7	Kab Agam	30,0	30,0	26,64	19,1	24,6	-5,4	-0,60
8	Kab. Lima Puluh Kota	28,8	40,1	29,94	28,2	24,3	-4,5	-0,49
9	Kab Pasaman	55,2	40,6	35,67	30,2	28,9	-26,3	-2,92
10	Kab Solok Selatan	48,6	27,7	34,99	24,5	31,7	-16,9	-1,88
11	Kab Dharmasraya	40,4	30,3	26,37	19,5	24,6	-15,8	-1,75
12	Kab Pasaman Barat	51,5	35,1	31,66	24,0	35,5	-16,0	-1,78
13	Kota Padang	33,7	22,4	20,92	18,9	19,5	-14,2	-1,58
14	Kota Solok	30,7	23,6	20,73	18,5	18,1	-12,6	-1,40
15	Kota Sawahlunto	22,5	20,6	23,43	21,1	13,7	-8,8	-0,98
16	Kota Padang Panjang	28,5	27,2	13,55	20,0	16,8	-11,7	-1,30
17	Kota Bukittinggi	28,5	17,2	23,46	19,0	16,8	-11,7	-1,30
18	Kota Payakumbuh	30,4	19,2	22,3	20,0	17,8	-12,6	-1,40
19	Kota Pariaman	44,0	17,8	20,78	20,3	18,4	-25,6	-2,84
	Provinsi Sumbar	**39,2**	**29,9**	**27,47**	**23,3**	25,2	-14,0	-1,56
	Nasional	**37,2**	**30,8**	**27,67**	**24,4**	**21,6**	-15,6	-1,73

Riskesdas 2013, 2018, SSGBI 2019 dan SSGI 2021, SSGI 2022

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik

sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa dilakukan dalam upaya pelestarian tata cara/norma kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan kepedulian dan minat masyarakat menjadi hal penting dalam menunumbuhkembangkan nilai-nilai budaya pada masyarakat terutama kaum muda agar nilai tersebut berkelanjutan dan lestari kegenerasi berikutnya.

Tabel 2.14
Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	8	0	0	0
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	1	1	2	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	55

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Melalui berbagai even/festival yang dilakukan juga berbagai pembangunan sarana, pelestarian objek dan warisan budaya diharapkan mampu memajukan kebudayaan daerah sehingga menjadi lestari dan dikenal dengan baik.

Tabel 2.15
Perkembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah organisasi pemuda	16	9	9	12	10
2	Jumlah organisasi olahraga	23	20	10	15	12
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	6	8	10
4	Jumlah kegiatan olahraga	12	10	3	0	5
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	30	25	20	20
6	Lapangan olahraga	209	267	205	145	150
	Total	270	331	28	25	25

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan keolahragaan di Kepulauan Mentawai sangat identik dengan kehidupan bermasyarakat Mentawai, tahun 2020 kegiatan even olahraga dan kepemudaan tidak terselenggara yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Beberapa sarana keolahragaan dimasing-masing desa juga beberapa dalam kondisi tidak terawat dan tidak difungsikan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan pelayanan yang secara umum dibutuhkan dan menjadi prasyarat kehidupan masyarakat yang bermartabat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga atas suatu barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan

kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisa kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; (6) sosial.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan tersebut antara lain kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah. Membuka akses pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan prioritas dalam membangun dunia pendidikan. Pembangunan unit sekolah baru

maupun rehabilitasi sekolah selalu diupayakan dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Letak geografis Kepulauan Mentawai menjadi tantangan tersendiri dalam membuka akses sekolah bagi masyarakat, selain terkait alokasi anggaran peran lintas sektoral juga ikut dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Keunggulan suatu bangsa tak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Secara rasional dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kualitas hidup manusia akan semakin baik, karena dengan ilmu pengetahuannya ia dapat mengelola dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh para ahli

aliran klasik yang menganggap manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusianya (Smith, 1790). Pembangunan pendidikan merupakan untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Tabel 2.16
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2022

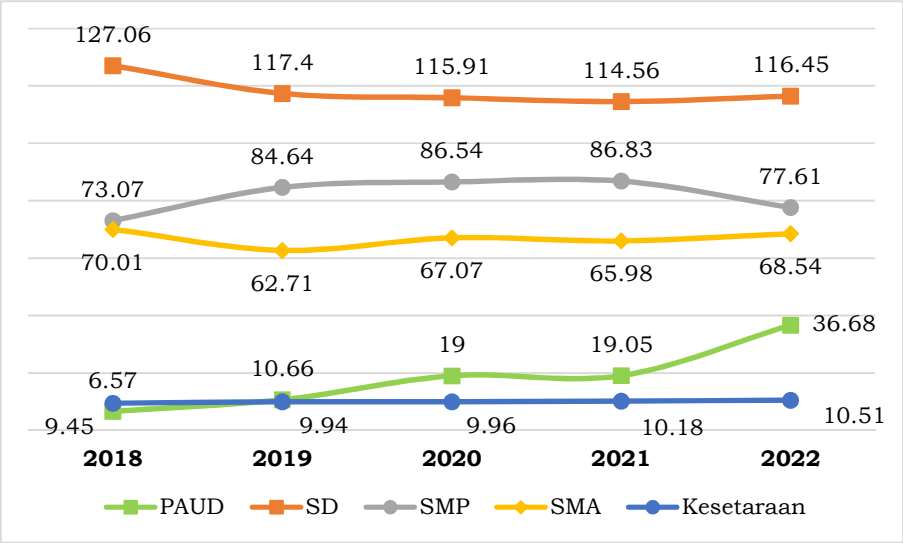
Karateristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	
JENIS KELAMIN					
Laki-Laki	6,30	13,51	5,73	6,75	62,72
Perempuan	8,04	17,04	6,08	5,12	63,72
KELOMPOK PENGELUARAN					
40 Persen Terbawah	9,63	19,55	7,32	6,43	57,07
40 Persen Tengah	5,84	14,06	4,91	6,27	68,91
20 Persen Atas	4,77	8,86	NA	4,44	76,91
Kabupaten Kepulauan Mentawai	7,14	15,21	5,90	5,96	65,79

Sumber: SATKESRA KKM 2022

Tabel 2.16 menunjukkan penduduk Mentawai yang berumur 5 tahun keatas dengan status pendidikan tidak bersekolah lagi

sebesar 65,79 persen dan dengan status pendidikan tidak/belum pernah bersekolah sebesar 7,14 persen. Artinya ada sekitar 72,93 persen masyarakat Mentawai yang belum pernah dan belum menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu, sehingga selain memastikan akses layanan pendidikan formal bagi masyarakat juga memfasilitasi masyarakat yang akan mengikuti pendidikan kesetaraan sehingga secara formal jenjang pendidikannya telah terpenuhi.

Gambar 2.23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Keb. Kepulauan Mentawai

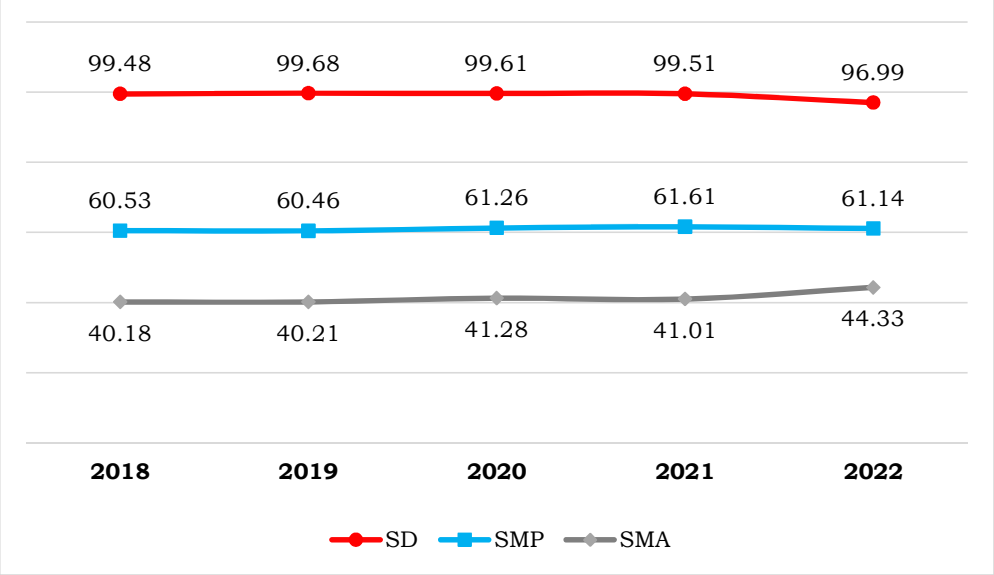
Gambar 2.23 menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2018-2022 dengan tren peningkatan. Untuk APK PAUD mengalami

pningkatan jika dilihat perkembangan capaian mulai dari tahun 2018 sebesar 6,57 persen menjadi 36,68 persen di tahun 2022.

Untuk jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan SD/sederajat sesuai dengan kelompok umur usia sekolah SD/sederajat hingga Tahun 2022 (APK) kurun waktu 2018-2022 sudah melebihi 100 persen, artinya bahwa jumlah peserta didik SD/sederajat sudah melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang seharusnya. Jika dilihat dari tren perkembangan APK SD/sederajat mengalami penurunan capaian, tentunya ini menjadi perhatian bagi masyarakat juga pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat terutama yang masyarakat yang tidak berusia sekolah jenjang SD/sederajat karena terdapat 11.753 jiwa atau 24,17 persen angkatan kerja belum pernah bersekolah atau tidak menamatkan SD/sederajat. Untuk capaian APK SMP/sederajat juga mengalami penurunan. Capaian APK SMP/sederajat tahun 2018 sebesar 73,07 persen capaiannya meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar 77,61 persen. Hal ini menjadi perhatian serius terkait kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada produktivitas. Begitu juga dengan capaian APK SMA/sederajat, dengan tren penurunan dari 70,01 persen pada tahun 2018 menjadi 68,54 persen tahun 2022 tentu menjadi perhatian serius bagaimana meningkatkan minimal penduduk usia produktif jenjang pendidikannya tamatan SMA/sederajat, agar dari sisi kapasitas dan produktifitas dapat

memadai. Begitu juga dengan cakupan usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dalam kurun waktu 5 tahun terkahir masih menunjukkan tren yang melandai, hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 tingkat partisipasi Pendidikan kesetaraan sebesar 9,45 persen dan setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi sebesar 10,51 persen.

Gambar 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS Sumatera Barat

Gambar 2.24 menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan tepat waktu dan pada rentang umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Untuk setiap jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat capaian APM belum mencapai 100 persen, artinya masih terdapat masyarakat pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu belum mendapatkan layanan pendidikan.

Untuk APM SMP/sederajat pencapaiannya masih sangat rendah yaitu pada tahun 2022 sebesar 61,14 persen (belum mendekati 100 persen), artinya masih ada sekitar 38,86 persen anak usia sekolah 13-15 tahun tidak sedang mengikuti pembelajaran tingkat SMP/sederajat, sedangkan untuk jenjang SD/sederajat mengalami tren penurunan dari 99,48 persen di tahun 2018 turun menjadi sebesar 96,99 persen tahun 2022. Begitu juga capaian APM untuk jenjang sekolah SMA/sederajat, jika dilihat dari tren capaiannya menunjukkan peningkatan yaitu tahun 2018 APM SMA/sederajat sebesar 40,18 persen hingga tahun 2022 menjadi 44,33 persen.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraannya, masyarakat yang yang sakit, akan terkendala untuk melakukan kegiatan yang produktif, penurunan penghasilan dan pendapatan, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan non fisik. Secara langsung kondisi fisik seseorang akan ditentukan oleh tingkat kesehatannya, sedangkan kondisi non fisik seperti tingkat intelektual, pengendalian emosional juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan seseorang.

Kesehatan yang buruk secara langsung menurunkan potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan

sekolah. Penyakit dapat membuat miskin keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya angka harapan hidup, dan menurunya kesejahteraan psikologis. Ketimpangan dan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan serta ketidaksiapan negara/ daerah dalam menanggulangi ancaman wabah/penyakit akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, kesiapan negara dalam mengelola dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya akan berbanding lurus pada pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Tabel 2.17
Angka Kesakitan Menurut Karakteristik (Persen), 2022

Karakteristik Penduduk	2021	2022
Laki-laki	14,11	13,09
Perempuan	14,61	11,89
40% Terbawah	17,25	11,67
40% Tengah	14,44	9,95
20% Teratas	8,48	19,28
Kepulauan Mentawai	14,37	12,51

Sumber : SATKESRA KKM, 2022

Angka kesakitan atau morbiditas adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan disini diartikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi.

Angka kesakitan masyarakat Kepulauan Mentawai Tahun 2022 secara keseluruhan adalah sebesar 12,51 persen. Artinya ada sekitar 12,51 persen dari total penduduk mengalami keluhan kesehatan menurun jika dibandingkan dengan angka kesakitan tahun 2021 yang sebesar 14,37 persen. Pola hidup sehat, perbaikan kualitas lingkungan dan penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan menjadi hal penting dalam upaya pengurangan tingkat kesakitan yang dialami oleh masyarakat. Jika dilihat lagi berdasarkan jenis kelamin, bahwa tingkat kesehatan atau keluhan kesehatan lebih banyak dialami oleh perempuan yaitu sebesar 11,89 persen, sedangkan laki-laki sebesar 13,09 persen. Begitu juga, jika dilihat persentase pengeluaran masyarakat.

Tabel 2.18
Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2022

Karakteristik Penduduk	2021	2022
Laki-laki	44,12	42,14
Perempuan	39,63	51,25
40% Terbawah	20,75	33,31
40% Tengah	57,43	53,34
20% Teratas	74,59	52,66
Kepulauan Mentawai	41,97	46,63

Sumber : SATKESRA KKM 2022

Masyarakat Kepulauan Mentawai yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 46,63 persen sedangkan pada tahun 2021 sebesar 41,97 persen. Capaian ini tentu masih sangat rendah untuk layanan kesehatan yang diterima

masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin yang berada pada rentang 40 persen pendapatan terendah yang pada angka 33,31 persen, artinya lebih setengah masyarakat miskin tidak menggunakan jaminan kesehatan dalam melakukan layanan kesehatannya.

Berbagai persoalan kemungkinan penyebab tidak maksimalnya penggunakan jaminan kesehatan daerah untuk melayani masyarakat terkhususnya masyarakat miskin dan rentan miskin di Kepulauan Mentawai. Fakta ini sangat bertolak belakang dengan kucuran iuran yang disalurkan ke BPJS kesehatan untuk memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Tabel 2.19
Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita)
yang Pernah Mendapat Imunisasi (Persen), 2022

Karakteristik Penduduk	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapat Imunisasi Lengkap
Laki-laki	91,54	21,55
Perempuan	90,61	32,24
40% Terbawah	88,68	21,94
40% Tengah	92,26	17,25
20% Teratas	98,59	54,06
Pendidikan Tertinggi KRT (SD kebawah)	97,77	19,81
Pendidikan Tertinggi KRT (SMP keatas)	88,60	31,52
Kepulauan Mentawai	91,11	26,60

Sumber : SATKESRA KKM 2022

Balita yang telah mendapatkan imunisasi lengkap pada tahun 2022 masih pada angka 26,60 persen, hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pasangan atau ibu yang memiliki

kartu imunisasi yang sudah pada angka 91,11 persen. Begitu juga dengan keluarga yang mendapatkan imunisasi dengan pendidikan tertinggi kepala keluarga SD kebawah hanya sebesar 19,81 persen. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan advokasi, himbauan bagi masyarakat yang memiliki balita (0-59 bulan) untuk melakukan imunisasi lengkap agar anak terpenuhi imun/daya tahan dan kekebalan tubuh anak. Kualitas kesehatan masyarakat juga sangat dipengaruhi dengan perilaku konsumsinya.

Tabel 2.20
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok
dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu (Persen), 2022

Karakteristik Penduduk	2022	
	Perokok	Rata-rata Batang Rokok per Minggu
40% Terbawah	32,83	139,04
40% Tengah	32,86	127,84
20% Teratas	34,05	127,11
Pendidikan Tertinggi SD ke bawah	35,87	140,10
Pendidikan Tertinggi SMP ke atas	30,63	122,90
Kepulauan Mentawai	33,11	131,73

Sumber : SATKESRA KKM 2022

Tabel 2.20 menunjukkan tingkat konsumsi rokok masyarakat Kepulauan Mentawai tahun 2022 sebesar 33,11 persen sebagaimana rata-rata konsumsi nasional sebesar 30-32 persen. Untuk persentase perokok penduduk dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah sebesar 35,87 persen lebih tinggi dari penduduk perokok dengan tingkat pendidikan SMP keatas yaitu sebesar

30,63 persen. Rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi setiap minggu adalah sebanya 131 batang, artinya dalam seminggu pengeluaran untuk kebutuhan rokok sebesar Rp.327.500. Jika dihitung dari jumlah rata-rata konsumsi rokok perbatang perhari, bahwa sebanyak 21 batang/hari atau setara dengan 1 bungkus rokok. Konsumsi rokok ini tentunya akan sangat menguras pendapatan dan menambah pengeluaran. Persentase pengeluaran penduduk pengkonsumsi rokok, bahwa mayoritas pengkonsumsi rokok terbesar adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen teratas yaitu dengan persentase 32,86 persen dan 34,05 persen.

Tabel 2.21
Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Indikator Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (tahun)	64,37	64,49	64,73	64,73	64,93
Prevalensi Stunting	31,7	25,2	19,3*	27,3	32
Angka Kematian Bayi (kematian/1.000 kelahiran hidup)	22,6	24,8	20,2	23	20,4
Angka Kematian Balita (1.000 balita)	27,9	28,1	3,6	3,2	13,8
Angka Kematian Ibu (kematian/100.000 kelahiran hidup)	332	191,3	356,3	207	191
Prevalensi Gizi kurang	6,3	3,6	10,1	12,7	13,8
Cakupan Desa UCI (%)	62,79	27,91	61,36	59,52	51,2
Kunjungan ibu hamil)%)	46,4	43,86	43,9	53,1	95,71
Rasio Daya Tampung RS Rujukan (TT/100.000 penduduk)	42	48	59	71	71
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	2,66	50,97	50,99	66,50	70,18
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin (%)	54,13	40,04	61,76	55,14	95,71
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	57,6	32,58	65,33	59,07	60,00
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	34,57	35,18	27,24	58,01	49,13

Indikator Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	4,26	8,61	12,74	17,74	21,43
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	30,9	37	31,71	32,71	54,60
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	4,18	0,9	8,79	84,61	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	16,48	17,23	15,54	48,83	35,44
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	29,3	31,5	14,36	10,88	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	8,46	0,81	36,04	38,91	90,15
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan standar pelayanan TBC sesuai standar (%)	38,85	53,96	30,04	18,52	20,74
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angka kesakitan Malaria	4	2,55	0,77	0,5	1,31
Angka kesembuhan TB	85,3	86,48	28,5	64	85,00

sumber: data (diolah), * data e-PPGM

Perkembangan indikator kinerja kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2018-2022 secara umum menunjukkan capaian yang sesuai dengan target yang direncanakan. Pada Tabel 2.21 menunjukkan beberapa capaian indikator kesehatan daerah selama 5 tahun terakhir. Capaian penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yaitu dari 31,87 persen di tahun 2018 menjadi 27,3 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 32,0 persen, peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat begitu juga

pemenuhan asupan gizi kepada pasangan atau ibu hamil/ 1000 hari pertama kehidupan ketika sudah diketahui ada janin, begitu juga dengan pemantauan gizi ibu hamil yang senantiasa dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Begitu juga perbaikan sarana dan prasarana lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan toilet RT, pengelolaan limbah, drainase dan berbagai intervensi yang terpadu. Akselerasi penanganan stunting telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti Stunting dan Gizi Buruk Peduli Anak (Masgibur Dua) dengan sasaran intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Indikator angka kematian bayi yang diukur dari jumlah kelahiran per 1.000 kelahiran hidup capaiannya juga mengalami perbaikan. Jumlah angka kematian bayi yang dilahirkan meninggal hingga berumur 1 tahun pada tahun 2018 sebanyak 22 kasus kematian lalu kasus ini meningkat dan pada tahun 2021 tercatat ada 23 kasus kejadian kematian bayi dari 1.000 kelahiran bayi hidup dan pada tahun 2022 kasusnya berkurang menjadi 20 kasus. Selain itu, indikator kesehatan lain yang sangat penting adalah angka kematian ibu yang capaiannya atau kasusnya masih cukup tinggi. Pada tahun 2018 angka kematian ibu melahirkan tercatat 332 kasus mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 tercatat sebanyak 191 kasus. Angka ini masih tergolong cukup tinggi karena 1 (satu) nyawapun ibu pada saat

bersalin/melahirkan harus tertolong. Begitu juga dalam upaya penanggulangan stunting dan pemberian asupan vitamin melalui imunisasi kepada balita, capaian indikator cakupan desa UCI mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 cakupan desa UCI mencapai 62,79 persen dan capaian relatif konstan hingga tahun 2022 cakupannya menjadi sebesar 51,2 persen. Upaya peningkatan cakupan desa UCI terus dilakukan selain secara konvensional melalui posyandu yang telah terjadwal setiap bulannya, juga dilakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan ataupun melalui kunjungan langsung ke rumah tangga.

Persentase kunjungan ibu hamil dalam kurun 5 tahun terakhir (2018-2022) mengalami peningkatan dari 46,4 persen tahun 2018 meningkat menjadi 95,71 persen di tahun 2022 dengan harapan menurunnya risiko atau kasus kematian ibu melahirkan dan anak lahir. Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2018 sebesar 2,66 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi 70,18 persen. Begitu juga dengan persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan persalinan pada tahun 2022 sudah mencapai 95,71 persen, dan persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2022 sebesar 60,0 persen.

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 sebesar 21,43 persen. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 54,6 persen. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sudah mencapai 100 persen pada tahun 2022 tentu ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat usia lanjut dan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Cakupan layanan kesehatan bagi penderita hipertensi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaotu pada tahun 2018 sebesar16,48 persen meningkat menjadi 35,44 persen pada tahun 2022. Cakupan layanan penderita diabetes melitus (DM) juga mengalami peningkatan yaitu dari 29,3 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2022. Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yaitu 20,74 persen pada tahun 2022. Untuk rasio daya tampung RS rujukan setiap tahunnya mengalammi peningkatan yaitu sebesar 71 TT per 100.000 penduduk, artinya telah tersedia sebanyak sekitar 71 tempat tidur untuk melayani rujukan dan rawatan di RS, angka ini juga sebagai syarat untuk peningkatan akreditasi layanan RS dimana hingga pada tahun 2022 masih dengan tipe D.

Pembangunan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki atau yang tersedia pada daerah tersebut. Tentunya tenaga kesehatan yang tersedia sudah seharusnya memiliki standar keahlian dimasing-masing disiplin ilmunya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga kesehatan melalui beberapa saluran, antara lain penerimaan CPNS, tenaga medis kontrak, tenaga penyuluh, kemitraan dengan perdesaan/dusun, tenaga kesehatan PTT dan melalui saluran lainnya.

Tabel 2.22
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Tenaga Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter	25	17	48	38	43
Perawat	329	160	297	137	353
Bidan	239	82	250	79	263
Dukun Bermitra	181	151	132	79	107

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Jumlah tenaga kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022 mengalami peningkatan jumlah yaitu untuk tenaga kesehatan perawat dan bidan. Untuk penyediaan tenaga kesehatan dokter masih menjadi tugas berat dalam menyediakan jasa layanan kesehatannya terkhusus di desa-desa dan dusun.

Pembangunan kesehatan adalah bentuk pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan

bermartabat. Tentunya akses terhadap layanan kesehatan harus menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana kesehatan untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan sebagai sarana bagi masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan permasalahan kesehatan baik itu preventif, kuratif dan promotif kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 2.23
Jumlah Layanan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Sarana Layanan Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	RSUD/RS Pratama	1	1	1	1	2
2	Puskesmas	12	14	15	15	15
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	22	39	38	27	39
4	Poskesdes	71	82	82	128	90
5	Posyandu	255	255	279	279	289
6	Polindes	39	52	33	33	90

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Ketersediaan layanan kesehatan berupa sarana dan prasarana kesehatan adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses layanan kesehatan. Pusat layanan kesehatan masyarakat harus menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak bersusah payah pergi ke daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.23 menunjukkan perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2018-2022

mengalami perkembangan dalam hal jumlah sarana, terutama di daerah terpencil yaitu di dusun-dusun. Tentunya tidak sekedar penyediaan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, yang lebih esensial lagi adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan promosi pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat dalam memperlancarkan aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas serta daya saing.

Pembangunan jalan menjadi hal utama dan pertama yang harus disediakan pemerintah. Ketersediaan jalan menjadi prasayarat awal dalam pembangunan yang berkelanjutan. Jalan memegang peranan penting dalam kegiatan transportasi dan mobilitas penduduk. Sebagai penopang sistem sosial dan ekonomi masyarakat, jalan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, terutama dalam peningkatan sektor ekonomi riil masyarakat. Tabel 2.24 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan kualitas panjang jalan hingga tahun 2022 total panjang jalan dengan kondisi baik hanya 111,92 km dari

total panjang jalan yang ada 1.130 km atau 9,90 persen, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak sedang tahun 2022 sekitar 41,54 km atau 3,67 persen dari total panjang jalan dan panjang jalan dalam kondisi rusak berat sekitar 941,01 km atau sekitar 83,27 persen. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, mengingat peran strategis pembangunan jalan dalam memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.24
Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Tahun	Kondisi Jalan (km)				Panjang Jalan (km)
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2018	50,45	10,5	10,7	1.058,55	1.130,2
2019	64,6	268,1	619,9	177,6	1.130,2
2020	53,89	293,54	388,93	393,82	1.130,2
2021	88,52	60,54	210,18	770,94	1.130,2
2022	111,92	41,54	35,71	941,01	1.130,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kep. Mentawai

Perkembangan jalan trans Mentawai yang dilaksanakan melalui program pembangunan jalan tahun jamak (*multi years*) hingga tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hingga tahun 2022, panjang jalan yang telah dibangun adalah sepanjang 359,3 km dengan rincian struktur beton sepanjang 93,92 km, dengan perkerasan sepanjang 9,9 km, dengan pembukaan/ tanah sepanjang 255,48 km.

Tabel 2.25
Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2022

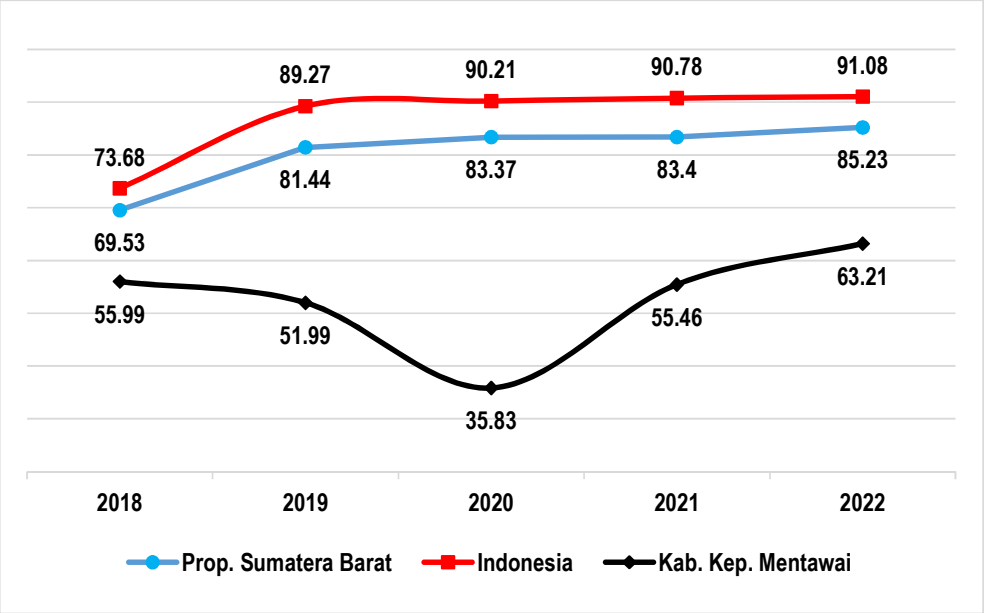
Rencana Jalan TRANS MENTAWAI (405,69 km)	Beton (km)	Perkerasan (km)	Pembukaan/ Tanah (km)	Belum Terbuka (km)
Trans Sipora (89,49 km)	60,10	0	14,0	15,39
Trans Pagai Utara (63 km)	15,0	0	25,0	23,0
Trans Pagai Selatan (66 km)	3,28	0	54,72	8
Trans Siberut (187,2 km)	15,54	9,9	161,76	0
Total	93,92	9,9	255,48	46,39

Sumber : Dinas PUPR Kab.Kepulauan Mentawai

Secara total, panjang trans Mentawai yang belum terbangun adalah sepanjang 46,39 km. ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan pembukaan jalan trans Mentawai agar wilayah mulai dari ujung utara hingga selatan Pulau Siberut sudah terhubung, begitu juga di 3 pulau lainnya.

Gambar 2.25 menunjukkan perkembangan rumah tangga dengan akses air minum layak, selama kurun waktu 2018-2022 tren pencapaiannya menurun, yaitu pada tahun 2018 persentase RT dengan akses air minum layak sebesar 69,53 persen dan capaiannya setiap tahun menurun hingga pada tahun 2022 capaiannya menjadi sebesar 63,21 persen.

Gambar 2.25
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



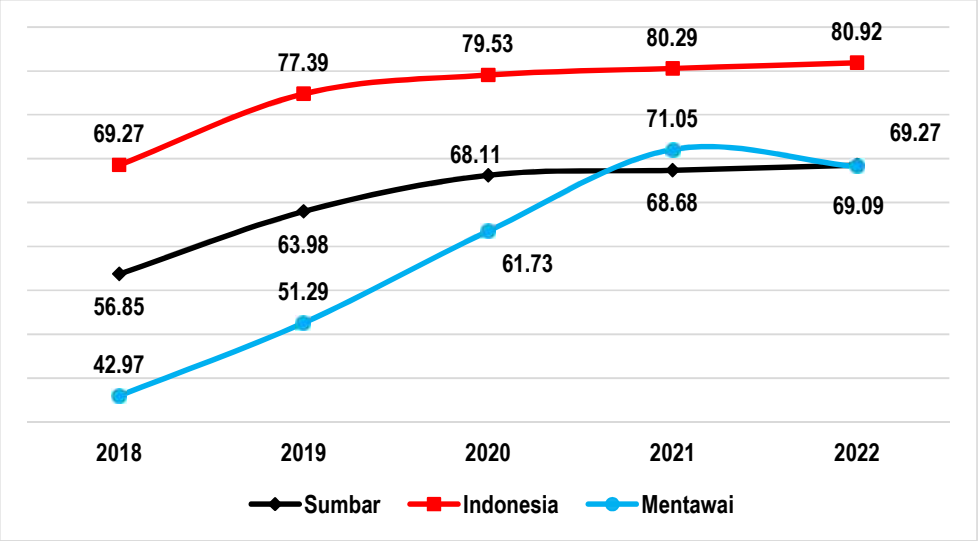
Sumber : BPS (diolah)

Angka ini tentunya sangat kecil jika dilihat kebutuhan masyarakat akan layanan dasar air bersih dan juga bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harusnya sudah ada dan dinikmati oleh masyarakat. Capaian ini tentunya menjadi perhatian pemerintah karena intervensi capaiannya dapat didorong dari investasi atau belanja pemerintah pada pengadaan sistem penyediaan air minum.

Perkembangan capaian rumah tangga dengan sanitasi layak di Kepulauan Mentawai Tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan pencapaian. Pada gambar 2.26, tahun 2018 rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 42,97 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi 69,09 persen. Capaian ini tentunya didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat

secara mandiri untuk menyediakan dan mengelola sanitasi layak skala rumah tangga.

Gambar 2.26
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber : BPS (diolah)

Perkembangan capaian indikator pekerjaan umum dan penataan ruang pada tabel 2.26 secara umum mengalami peningkatan capaian walaupun tidak signifikan. untuk rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir setiap tahun perkembangannya semakin membaik, yaitu dari 3,16 persen tahun 2018 meningkat menjadi 4,5 persen pada tahun 2022, masih rendahnya capaian ini disebankan oleh alokasi anggaran yang cukup besar pada penaangnan dan pembangunan pada sepanjang kawasan permukiman yang berpotensi dan terdampak banjir.

Begitu juga dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum berbasis SPAM perpipaan dan non perpipaan mengalami peningkatan pencapaian yaitu pada tahun 2018 sebesar 46,12 persen meningkat pada tahun 2022 menjadi 61,71 persen. Upaya pemenuhan air minum kepada setiap rumah tangga menjadi target pembangunan setiap tahunnya terutama delam mendukung pengentasan kemiskinan, pengentasan stunting dan sebagai komitmen dalam penerapan SPM dan pelayanan dasar.

Tingkat kemantapan jalan di Kab. Kepulauan Mentawai kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan walaupun belum signifikan. pada tahun 2018 tingkat kemantapan jalan kebupaten sebesar 6,34 persen dari total sepanjang 1.130 km dan kemantapan jalan kabupaten mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 telah mencapai 13,63 persen.

Tabel 2.26
Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	3,16%	3,5%	3,5%	4,2%	4,5%
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	3,54%	3,82%	3,82%	4,20%	4,58%
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	18 ha	20 ha	20 ha	21 ha	22 ha
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	46,12%	49,80%	54,58%	56,65 %	61,71%

Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	23,78%	24,25%	25,63%	26,2%	30,56%
Rasio kepatuhan IMB kab/kota					
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	6,34%	14,54%	14,89%	13,19 %	13,63%
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1,62%	1,8%	1,8%	2%	2,6%
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	98%	100%	96%	98%

sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kep.Mentawai

Penataan ruang dan wilayah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 menjadi acuan hukum dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Rencana kawasan tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 20 tahun di bagi dalam 2 kawasan antar lain kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri:

1) Kawasan hutan lindung.

   Kawasan hutan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung darat dan kawasan hutan lindung manggrove dengan luas 13.533,86 ha.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain adalah kawasan resapan air. Kawasan ini tersebar di setiap kecamatan di Kepulauan Mentawai.

3) Kawasan perlindungan setempat.

   Kawasan ini meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar danau, kawasan hutan mangrove dengan ketentuan daratan sepanjang tepian dengan jarak minimal 100 meter dari titik ke arah daratan, sedangkan kawasan hutan mangrove dengan luas 13.353 ha.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

   Kawasan ini terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan suaka alam perairan, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

   Kawasan suaka terdiri atas kawasan suaka alam dengan luas 6.019,99 ha. Kawasan suaka alam perairan terdiri atas kawasan suaka alam perairan atau dpl dengan luas 160 ha. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Siberut seluas 190.500 hektar. Kawasan wisata alam laut yaitu Taman Wisata Laut Teluk Sarabua Saibi terdapat di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah seluas 21.200 hektar. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu kawasan komunitas adat/budaya Mentawai terdapat di Dusun Terekan

Hulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Dusun Sirisurak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Desa Madobag, Dusun Ongah dan Kinikdog Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Dusun Bolotok dan Boboakenen Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, dan benteng Peninggalan Jepang di Sioban Kecamatan Sipora Selatan.

5) Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor di wilayah perbukitan Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan gempa dan tsunami tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan banjir tersebar di sekitar aliran dan muara Sungai Talopulai dan Sungai Makalo di Kecamatan Pagai Selatan, Sungai Silabu dan Sungai Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara, Sungai Taikako dan Sungai Matobe di Kecamatan Sikakap, Sungai Saureinu di Kecamatan Sipora Selatan, Sungai Pogari, Sungai Berimanua dan Sungai Betumonga di Kecamatan Sipora Utara, Sungai Sagulubbek dan Sungai Taileleu di Kecamatan Siberut Barat Daya, Sungai Saibi di Kecamatan siberut tengah, Sungai Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Sungai Sikabaluan, Sungai Monganpoula, Sungai Sotboyak, Sungai Bojakan, Sungai Sirilanggai di Kecamatan Siberut Utara, Sungai

Simalegi, Sungai Simatalu, Sungai Berisigep, dan Sungai Policoman di Kecamatan Siberut Barat.

Kawasan rawan abrasi terdapat di Pantai Muara Sikabaluan (Kecamatan Siberut Utara), Pantai Muara Siberut (Kecamatan Siberut Selatan), Pantai Mapaddegat dan Pantai Tuapejat (Kecamatan Sipora Utara), Pantai Sioban, Pantai Beriulou, Pantai Desa Bosua, Pantai Bandara Rokot Matobe (Kecamatan Sipora Selatan), dan di Pantai Sikakap (Kecamatan Sikakap).

6) Kawasan lindung geologi.

   Kawasan lindung geologi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan rawan gempa bumi terdapat di terdapat di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh wilayah pesisir seluruh wilayah daerah.

7) Kawasan konservasi perairan.

   Kawasan konservasi perairan di Kepulauan Mentawai terdapat pada Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut dengan luas total 123.746,94 hektar.

8) Kawasan lindung lainnya.

   Kawasan lindung lainnya terdiri atas kawasan terumbu karang di Pulau Siberut seluas kurang lebih 5.410,7 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Sipora seluas kurang lebih 5.988 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Utara seluas

kurang lebih 733 hektar dan kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Selatan seluas kurang lebih 1.099 hektar.

Kawasan budidaya di Kepulauan Mentawai terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 246.011,41 ha, kawasan peruntukan pertanian dengan luas 119.492,20 ha. Kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi bandar udara (bandara), pertahanan dan keamanan.

Tabel 2.27
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022

	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135
Persentase	1,20	30,51	41,75	8,44	18,11	

Peruntukan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mayoritas merupakan kawasan hutan atau suaka pelestarian alam dengan luas sebesar 492.294,38 ha atau sekitar 81,89 persen dari total wilayah, sedangkan untuk areal penggunaan lainnya sebesar 108.804,62 ha atau sebesar 18,11 persen.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu

pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis di Kepulauan Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Sebuah rumah harus memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

Tabel 2.28
Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio rumah layak huni (%)	29,8	25	30.98	38,02	43,05
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	7%	7,3%	7,5%	8%	10%
3	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah/ kota (%)	1,3%	1,45%	1,5%	1,73%	1,85%
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	3%	4,25%	4,25%	5%	5,3%
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7400	7180	6800	6500	5500
6	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	0	0	1 kawasan	1 kawasan

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Perkembangan rasio rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 rasio rumah layak huni telah mencapai 29,8 persen lalu tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sekitar 43,05 persen dengan jumlah rumah tidak layak huni sekitar sebesar 5.517 unit. Begitu juga dengan cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meningkat dari 7 persen di tahun 2018 menjadi 10 persen pada tahun 2022. Untuk persentase fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 1,3 persen pada tahun 2018 menjadi 1,85 persen tahun 2022. Begitu juga dengan jumlah rumah tidak layak huni yang selalu diintervensi melalui program pemerintah daerah yaitu pembangunan rumah layak huni baik itu yang menjadi relokasi kawasan bencana atau berpotensi bencana juga sebagai program pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, yaitu dari 7.400 unit RTLH pada tahun 2018 berkurang menjadi 5.517 unit pada tahun 2022.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, selama periode waktu 2018-2022, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.28 sesuai dengan indikator yang tersedia,

menunjukkan terjadi peningkatan, sesuai dengan tabel 2.28 di bawah ini:

Tabel 2.29
Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	72	72	85	88	90
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (persen)	25	30	35	38	40
Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	80	80	30	25	25
Persentase Penegakan PERDA (persen)	100	80	70	65	65
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3.508	2.814	15.568	2.536	3.217
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.508	2.814	15.568	2.536	3.217
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	566	167	12.560	856	592
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Perkembangan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum kondusif dan masih dalam situasi yang terkendali. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat pluralis/majemuk secara prinsip memiliki potensi pada gesekan antar golongan, suku ataupun agama, namun penguatan koordinasi antar pimpinan lembaga pemerintahan dan para pemuka agama, pemuka adat dan masyarakat yang sudah terjalin dan terjaga

dengan baik menjadikan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak terjadi atau tidak ada kasus yang serius. Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dim Kepulauan Mentawai dengan tingkat kesulitan geografis mampu diselesaikan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 90 persen. Namun pada cakupan layanan bencana kebakaran masih pada angka 40 persen di tahun 2022, hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana antisipasi kebakaran di setiap kecamatan belum ada (yang ada di Sikakap, Muara Siberut, Tuapejat) sehingga tidak dapat mencakup seluruh wilayah di Kepulauan Mentawai. Untuk *respon time* kejadian kebakaran sudah semakin membaik yaitu 25 menit di tahun 2022. Untuk penegakan perda senantiasa dilakukan dengan mengutamakan sosialisasi dan ajakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan tindakan-tindakan yang mengarah pada preventif dalam upaya menjaga kondusifitas dan kenyamanan masyarakat. Untuk capaian penegakan perda pada tahun 2022 mencapai 65 persen.

Untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaam kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana. Beberapa indikator terkait

kebencanaan yang menjadi bagian dari urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dirangkum dalam tabel 2.29.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib sosial, selama periode waktu 2018-2022, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.30 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan pada sarana sosial yang direhabilitasi serta indikator lain.

Tabel 2.30
Perkembangan Indikator Sosial
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PPKS yang memperoleh bantuan (persen)	100	100	100	100	100
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial (persen)	100	100	100	100	100
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penanganan PPKS (persen)	100	100	100	100	100
Jumlah PPKS	24.413	24.413	30.286	24.636	24.797
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah sangat baik, dalam artian setiap kejadian dan kebutuhan PPKS selalu difasilitasi dan dibantu. Begitu juga dengan

penanganan korban bencana alam dan sosial terutama pada saat pandemi COVID-19. Untuk jumlah PPKS dalam kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami penurunan dari tahun 2018 sebanyak 24.413 orang dan meningkat di tahun 2019 menjadi 30.286 orang dan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 24.797 orang.

Untuk capaian cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti serta cakupan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota telah mencapai 100 persen, artinya untuk setiap kasus yang ada telah ditangani/difasilitasi oleh dinas terkait.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Salah satu faktor utama dalam pembangunan derah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumberdaya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Sumatera Barat

adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indikator tenaga kerja lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.31 dibawah ini.

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	97,73	98,04	83,10	81,65	78,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	1,96	2,92	3,98	2,79	1,39
Jumlah pengangguran (orang)	980	1.420	2.063	1.485	716
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1	1,2	5	10	20
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	30,27	32,6	35	35,4	38
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	68,3	77,8	80	83,6	85
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	0	0	0	0	0

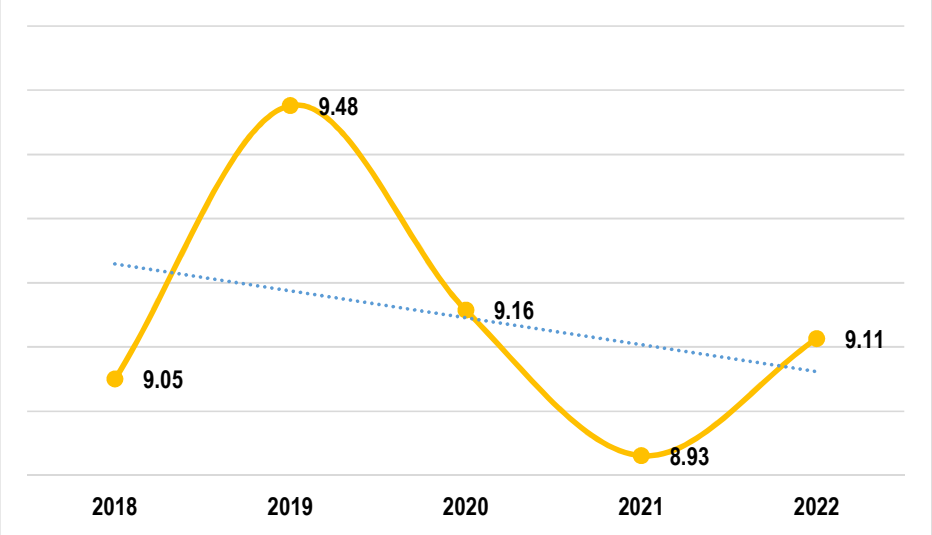
Sumber : BPS Kepulauan Mentawai dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir realtif konstan pada kisaran 2-3 persen. Ada peningkatan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, namun pada tahun 2021 kondisinya membaik atau menurun menjadi 2,79 persen dan tahun 2022 turun lagi menjadi 1,39 persen. Tingkat partisipasi angkatan sebagai bentuk gambaran ketersediaan angkatan kerja pada kelompok penduduk usia kerja yang produktif menunjukkan perkembangan yang

membaik pada tahun 2022 yaitu sebesar 78,25 persen. Untuk jumlah pengangguran di Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2022 sebanyak 716 orang berkurang jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1.485 orang.

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator untuk melihat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022 seperti pada gambar 2.27 menunjukkan tren penurunan.

Gambar 2.27
Produktivitas Tenaga Kerja (milliar rupiah)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Pada tahun 2018 nilai produktivitas tenaga kerja sebesar 9,05 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun lalu naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 9,48 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun, namun pada tahun 2020 sampai pada tahun 2021 menurun dan menjadi

sebesar 8,93 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 9,11 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada periode tahun yang sama menunjukkan pesentase yang semakin bertambah, hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Pembangunan gender di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, untuk tahun 2018 capaian IPG sebesar 89,45 persen dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2022 menjadi 89,91 persen.

Tabel 2.32
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase pemenuhan hak anak (persen)	100	100	100	100	100
Pencanangan kecamatan layak Anak (kec)	0	0	4 kec	4 kec	4 kec
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait (persen)	100	100	100	100	100
Persentase Kepala Keluarga perempuan yang sejahtera (persen)	8,22	8,6	8,75	9	7
Indeks Pembangunan Gender	89,45	89,33	89,59	89,81	89,91
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh	100	100	100	100	100

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)					
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	11,22	11,22	51,03	52	50
Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	65,12	65,12	42,40	42,93	42,17
Persentase PNS perempuan dibanding total PNS (persen)	48,81	49,55	51,03	51,25	52,37
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,14	0,16	0,13	0,11	0,12
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk pencapaian kabupaten layak anak di Kepulauan Mentawai belum tercapai, bahkan pada predikat pratama juga belum tercapai, hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk membangun komitmen dan mengintegrasikan program-progaram pembangunan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kepulauan Mentawai. Dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, setiap kasus yang ada selalu ditangani dengan baik, koordinasi dengan forkopimda dan muspika di kecamatan sangat baik begitu juga dengan peranan pokja P2TP2A sebagai perpanjangan tangan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat baik sehingga dalam upaya pencegahan dan penanganan kejadian tanggap dan melibatkan berbagai pihak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pada urusan wajib pangan berbagai indikator yang terlihat pada Tabel 2.33 mengambarkan perkembangan yang cukup baik

dan mengalami peningkatan pencapaian dalam kurun waktu 2018-2022, begitu juga dengan pengawasan dan pembinaan pangan.

Tabel 2.33
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ketersediaan pangan utama	66	67	67	68	68
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	48,61	48,81	48,81	52,07	52,07
lndeks Ketahanan Pangan	49,92	38,86	46,67	37,67	52,48
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	76	78	80	82	84

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Perkembangan capaian ketahanan pangan secara nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah yang dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Tahun 2018 Indeks Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Mentawai sebesar 49,92 dan capaian ini terus menurun hingga tahun 2021 capaian indeks ketahanan pangan menjadi sebesar 37,67 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 52,48. Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam kaitan ketersediaan pangan utama sebagai konsumsi pangan lokal yang tersedia, capaiannya cukup stabil, tahun 2018 sebesar 66 persen dan hingga tahun 2022 capaiannya sebesar 68 persen. Angka ini masih dikatakan sangat kecil mengingaat potensi sumber daya alam Keo. Mentawai yang sangat besar untuk

pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dan juga sebagai upaya ketahanan pangan untuk antisipasi keadaan mendesak atau terjadinya bencana.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Legalisasi aset berupa tanah sangat penting bagi pemerintah khususnya masyarakat dalam menopang tumbuh kembangnya sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penanganan sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi (persen)	100	100	100	100	100
Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	14,6	13,8	11,05	11,4	20,42
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	28	30	35	38	40
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	0	0	0
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	0	1.200 ha	1.200 ha	800 ha
Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	0	0	0
Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0

Sengketa pertahanan/lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu menjadi konflik sosial ditengah masyarakat. Tanah hak ulayat (adat) dan sengketa tanah masyarakat menjadi persoalan khususnya menyangkut hak masyarakat miskin selalu dimediasi baik melalui pemerintahan desa, di kecamatan dan

bahan tingkat kabupaten melalui koordinasi pemangku kepentingan agar hak-hak kepemilikan pertanahan masyarakat terjamin. Untuk persentase luas lahan yang telah memiliki sertifikat di Kepulauan Mentawai pada tahun 2022 baru mencapai 20,42 persen atau seluas 81.572.246,39 m^2.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 2.35 kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestisasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup perkembangannya mengalami perbaikan dari tahun 2018 dengan predikat cukup baik meningkat hingga pada tahun 2022 pada predikat baik.

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penetapan hak MHA	Tidak ada	Tidak ada	4	4	0
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota (persen)	6	6,2	6,84	7,38	14,35
Penanganan kasus lingkungan	100	100	100	100	100

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
hidup					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota (%)	34,2	30	45	50	53,4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah derah, melalui dukungan seluruh stakeholder, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik.untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun memang intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten (Kecamatan Sipora Utara/Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih rendahnya persentase penanganan sampah atau pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 14,35 persen pada tahun 2022.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan angka yang terlihat pada Tabel 2.36 menunjukkan berbagai indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2018-2022. Indikator pencapaian bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel 2.36 di bawah ini:

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (persen)	45,99	44.96	45.51	64,90	67,77
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	56,54	60,25	61,44	64,25	66,28
Persentase kepemilikan akte kelahiran (persen)	67,26	70,16	63,36	77,34	77,24
Persentase pasangan berakte nikah (persen)	19,69	19,76	20,23	49,79	42,08
Rasio kepemilikan KK	57,98	68,25	74,38	89,82	85,18
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	19,69	19,76	20,23	49,79	42,08

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian indikator perkembangan kemajuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pada tabel 2.36 menunjukkan perkembangan yang baik. Dari sisi rasio penduduk berKTP per satuan penduduk telah mencapai 67,77 persen. Begitu juga dengan kepemilikan akte kelahiran yang telah mencapai 77,24 persen. Rasio kepemilikan

Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2022 telah mencapai 85,18 persen dan pasangan/keluarga yang telah memiliki akte nikah pada tahun 2022 telah mencapai 42 persen.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan bahwa belum mengalami kemajuan yang cukup berarti hal ini terlihat dari indikator-indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti terlihat dari Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018-2022

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	341	341	559	559	559
Jumlah LPM	43	43	43	43	43
PKK aktif	43	43	43	43	43
Posyandu aktif	185	188	100	180	283
IDM (Desa Tertinggal)	NA	23 Desa	18 desa	15 Desa	11 Desa
IDM (Desa Maju)	NA	1 desa	2 desa	6 Desa	9 Desa
Persentase pengentasan desa tertinggal	NA	16	21,73	16,67	26,6
Persentase peningkatan status desa mandiri	NA	0	0	100	50

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P2 KB

Perkembangan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018-2022 dari sisi kinerja pembangunan masyarakat dan desa, indikator utama yang dapat dijadikan patokan pembangunannya adalah Indeks Desa Membangun (IDM), dimana dalam kurun waktu 5

tahun terakhir menunjukkan perbaikan capapaian. Pada tahun 2020 - 2022 tidak ada lagi status desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan predikat desa sangat tertinggal. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 untuk capaian desa dengan kategori maju mengalami penambahan dari 1 desa tahun 2019 menjadi 9 desa di tahun 2022, begitu juga dengan status desa tertinggal dari 23 desa tertinggal tahun 2019 berkurang menjadi 11 desa di tahun 2022. Untuk tahun 2018, indeks desa membangun tidak dilakukan penilaian oleh Kemendes sehingga disebutkan dalam tabel dengan narasi NA (*not available*).

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami peningkatan walau tidak signifikan, seperti terlihat dari Tabel 2.38. Untuk jumlah rata-rata anak per keluarga relatif stabil untuk setiap tahunnya. Hingga tahun 2022 rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Kepulauian Mentawwai sebanyak 4 orang.

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	6	5	4	4	4
Rasio akseptor KB	23	54	58	58	62
Cakupan peserta KB aktif (persen)	51,24	54,96	58.39	58,40	58,44
TFR (Angka Kelahiran	1,56	1,82	1,90	2,20	2,35

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total)					
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	10,25	11,76	13,30	21,27	24,15
Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	0,25	0,43	0,87	0,65	1,12

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan P2 KB

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2018-2022 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dengan capaian sebesar 51,24 persen tahun 2018 dan meningkat setiap tahun hingga tahun 2022 menjadi sebesar 58,44 persen. Begitu juga dengan rasio akseptor keluarga KB setiap tahun mengalami peningkata, yaitu dari tahun 2018 dengan rasio sebesar 23 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2022 rasio akseptor KB menjadi 62.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bercirikan kepulauan. Konektivitas antar pulau di Kepulauan Mentawai dan sebagai penghubung Kepulauan Mentawai dan Padang atau daerah lain di luar Mentawai urusan perhubungan mengambil bagian penting dalam menunjang dan memperlancar arus barang dan arus orang yang pergi dan menuju Kepulauan Mentawai.

Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dari cakupan layanan transportasi yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2018 cakupan layanan transportasi sebesar 75,3 persen dan capaian ini meningkat ditahun 2022 menjadi 85 persen, hal ini didukung oleh sudah terbukanya akses transportasi di wilayah pantai barat seperti di Desa Simalegi.

Begitu juga dengan kondisi sarana dan prasarana perhubungan terutama pelabuhan laut sebanyak 7 buah dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 3 buah dengan kondisi baik dan masih beroperasi hingga sekarang.

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan layanan transportasi (persen)	75,3	78,5	80	83	85
Persentase armada angkutan laik jalan/ layar (persen)	75	72	70	80	80
Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (orang)	209.768	210.428	149.235	145.206	168.742
Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (ton)	64.847	65.720	47.654	52.669	65.163
Rasio konektivitas Kota	46,71	47,59	51,13	52,19	52,64
V/C Ratio di jalan Kota	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Sumber : Dinas Perhubungan

Sebagai bagian dari sistem konektivitas daerah, selain ketersediaan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah rencana pembangunan pelabuhan menjadi

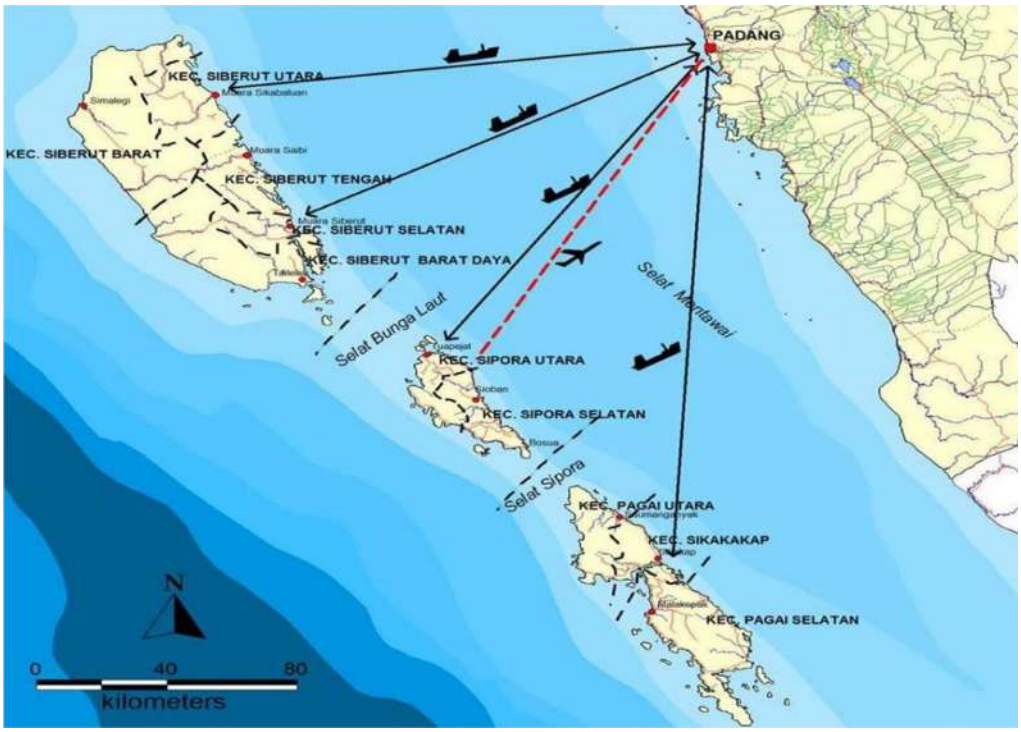
kebutuhan untuk menjawab konektivitas total antar wilayah/antar pulau dan konektivitas regional antar kabupaten dan propinsi. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional bahwa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut/ penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 9 pelabuhan yaitu di Pulau Siberut antara lain Pelabuhan Sikabaluan, Subelen, Mabukkuk, Sirilogui. Pulau Sipora antara lain Pelabuhan Simaoumbuk, Sao, Sagitsi Pulau Pagai Utara Selatan antara lain Pelabuhan Polaga, Sinaka.

Tabel 2.40
Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Nama Pelabuhan	Kepemilikan Aset	Pengelola	Status	Kondisi	Ket
1	Pelabuhan Muara Siberut	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
2	Pelabuhan Sikakap	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
3	Pelabuhan Siuban	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
4	Pelabuhan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
5	Pelabuhan Pasapuat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
6	Pelabuhan Sikabaluan	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
7	Pelabuhan Labuhan Bajau	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
8	Pelabuhan Penyeberangan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
9	Pelabuhan Penyeberangan Siberut	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
10	Pelabuhan Penyeberangan Sikakap	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan

Sumber : Dinas Perhubungan

Gambar 2.28
Jalur Pelayaran Padang -Kep. Mentawai



10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service to Internet*). Perkembangan pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2021 untuk SPBE di Kepulauan Mentawai tidak ada nilai oleh Kementerian PANRB dan sedangkan tahun

2022 nilai SPBE Kab. Kepulauan Mentawai sebesar 1,23, sedangkan unyuk tahun 2018 dan 2020 tidak dilakukan penilaian. Perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Layanan Telekomunikasi	70	86	84,5	85	88
Nilai SPBE	NA	1,9	NA	0	1,23
OPD yang terhubung oleh akses internet yang disediakan Diskominfo (persen)	27,7	55,5	63,8	69,4	69,4
Layanan publik yang dilayani secara Online (persen)	4,6	4,8	5	5,2	5,2
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	60	70	70	70	70

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kepulauan Mentawai. Akses data dan komunikasi yang sangat terbatas, sarana dan prasarana yang masih minim juga sumber daya manusia dalam upaya *maintenance* yang belum ada sehingga biaya (*cost*) menjadi sangat besar dan kendala pengembangannya.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan indikator urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk persentase koperasi aktif secara tren dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 36 persen tahun 2018 menjadi 20 persen tahun 2020, indikator pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah, seperti terlihat pada Tabel 2.42. Untuk jumlah usaha mikro dan kecil juga mengalami tren peningkatan jumlah usaha. Tabel 2.42 menunjukkan untuk usaha mikro sebanyak 1.061 usaha pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi sebanyak 3.180 usaha. Untuk usaha kecil juga mengalami peningkatan jumlah usaha kecil yaitu pada tahun 2018 sebanyak 135 unit usaha dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 15 usaha. Dalam upaya menciptakan wirausaha baru (enterprenuer), program kedepan yang disusun adalah pelatihan/ peningkatan kapasitas keterampilan keahlian agar memiliki skil untuk dapat terjun kedunia usaha, begitu juga dengan membangun relasi melalui perjanjian kerjasama dengan dunia usaha (MoU) sehingga dihulunya pembangunan sumberdaya tenaga kerja yang terampil (skil) didukung dengan dihilirnya adalah terserapnya tenaga kerja sebagai modal awal untuk menjadi wirausaha baru.

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase koperasi aktif	36	59.09	25,3	20	20
2	Jumlah BPR/BPRS	2	2	3	3	3
3	Usaha Mikro dan Kecil					
	- Usaha Mikro	1.061	1.357	1.956	2.508	3.180
	- Usaha Kecil	135	217	206	240	15
	- Usaha Menengah dan Besar	19	38	41	43	43
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (persen)	3	3	3	3,50	3,5
5	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha	5	5	4	6	7

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Harapannya, dengan dukungan semua sektor dan pendampingan dari pemerintah daerah, untuk usaha mikro dan kecil dapat mengambangkan unit usaha/permodalan dan skala pemasaran serta legalitas sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningakatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dengan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan rata-rata pengurusan izin sekitar 5-6 hari. Perkembangan realisasi investasi tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih didorong oleh investasi skala kecil berupa resort/homestay dengan realisasinya sekitar Rp.11,9 miliar. Angka ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi investasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan sumber daya alam yang melimpah dan proses perijinan yang sangat mudah dan cepat.

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase peningkatan investasi di Kota	11,99	13,09	10,78	10,63	11,9

Sumber: Dinas PMPTSP

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian indikator urusan kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada perkembangan jumlah organisasi yang masih bertahan. Pemuda yang diasosiasikan dengan paham idealisme yang dapat melihat setiap perkembangan dan isu daerah secara jernih tentunya akan mampu memberikan pemikiran dan dukungan yang utuh tanpa ada unsur kepentingan. Untuk urusan wajib kepemudaan dan olahraga dari data pada Tabel 2.44, secara umum dapat memberikan gambaran bahwa indikator menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dan

terus meningkat selama periode 2018-2022. Hal ini terlihat dari Tabel 2.44 dibawah ini.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah organisasi pemuda	16	9	9	12	10
Jumlah organisasi olahraga	23	20	10	15	12
Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	6	8	10
Jumlah kegiatan olahraga	12	10	3	0	5
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	30	25	20	20
Lapangan olahraga	209	267	205	145	150
Pertumbuhan wirausaha (enterprenuer)	10,29	27,90	14,14	21,73	23,15
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	8	10	14,14	14,14	15
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15	20	25,28	25,28	28
Peningkatan prestasi olahraga	16	10	10	10	10

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.44 menunjukkan perkembangan jumlah organisasi di Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari sisi kuantitas. Pada tahun 2018 jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 16 organisasi dan mengalami penurunan hingga pada tahun jumlah organisasi kepemudaan menjadi sebanyak 10 organisasi. Begitu juga dilihat dari kapasitas ekonomi kepemudaan yang dilihat dari pertumbuhan wirausaha mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 pertumbuhan wirausaha di Kab. Kepulauan Mentawai sebesar 10,29 persen dan pada tahun 2019

mengalami peningkatan menjadi sebesar 27,9 persen dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 23,15 persen.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan wajib statistik berkenaan dengan penyediaan data yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan, melihat perkembangan pembangunan dan dihilirnya sebagai baan evaluasi untuk memberikan sebuah informasi analisis pembangunan. Perkembangan capaan kinerja urusan statistik erat kaitannya dengan ketersediaan data dan informasi yang digunakan oleh setiap pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah melalui perangkat daerah. Selama periode 2018-2022 secara rutin telah diterbitkan buku Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berbagai dokumen atau buku statistik dasar lainnya yang secara resmi dirilis melalui Badan Pusat Statistik (BPS) seperti dilihatkan pada tabel 2.45.

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Statistik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Buku ”Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”PDRB kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah (persen)	68,5	70	72,1	75	76,2
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	50,00	55,56	61,11	69,44	71,4

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	daerah					
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	38,89	41,67	50,56	58,33	60,5

Sumber : BPS dan Bappeda

Data statistik ini baik statistik dasar maupun statistik sektoral yang berasal dari perangkat daerah tentunya menjadi pedoman dalam merumuskan dan menganalisis sebuah perkembangan indikator pembangunan daerah. Begitu juga dengan data-data statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi atau perangkat daerah juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan khususnya dalam merumuskan indikator kinerja pemerintah daerah sehingga nantinya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan penerapan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Integrasi sistem informasi pemerintahan masih parsial sehingga perlu dilakukan kesepahaman sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan keamanan dan perlindungan data yang terjamin. Seluruh sistem informasi pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, layanan publik harus memenuhi

kaidah-kaidah tingkat keamanan dengan menyelenggarakan keamanan persandian sehingga risiko kerusakan sistem, data hilang, *hack* dapat dicegah dan ditangkal.

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Urusan Persandian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat keamanan informasi pemerintah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan persandian yang telah dikukuhkan kedalam susunan struktur organisasi perangkat daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika belum memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengamanan informasi pemerintah daerah, terutama dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang secara keahlian (sertifikasi) belum ada, sehingga data terkait tingkat keamanan informasi pemerintah belum tersedia atau belum dapat dihitung/diukur.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk

kedalam agenda pariwisata nasioanal dalam Pesona Indonesia. Selain itu dalam kebijakannya, telah disusun pokok-pokok pikiran kebudayaan pada tahun 2020 serta telah disertifikasi 4 tenaga tim ahli cagar budaya (TACB) untuk memfasilitasi dalam penilaian warisan budaya benda yang ada di Kepulauan Mentawai. Pembangunan kebudayaan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama tahun 2020 dan tahun 2021 selama pandemi yang dibatasi pergerakan/mobilitas dan bahkan melarang berkumpulnya orang, sehingga even dan festival terkait kebudayaan tidak dilaksanakan. Dengan melihat dari perkembangan periode waktu 2018-2022, penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda situs budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 ada 2 even atau penyelenggaraan seni budaya setalah vakum pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, perkembangan indikator kebudayaan di Kab. Kepulauan Mentawai dapat dilihat seperti terlihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	8	0	0	2
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	1	1	2	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	55

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja urusan wajib perpustakaan selama periode 2018-2022 diperlihatkan pada Tabel 2.48 Perkembangan indikator jumlah pengunjung memberi bukti bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan pustaka daerah semakin membaik terutama dalam meningkatkan minat literasi dan numerasi masyarakat.

Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 pada masa pandemi yang mengalami penurunan dari 10.273 pengunjung menjadi sebanyak 8.988 pengunjung di tahun 2020. Namun pada tahun 2022 jumlah kunjungan perpustakaan telah mencapai 12.445 pengunjung. Untuk pembangunan literasi Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 dengan nilai indeks 11 masih berada dibawah capaian Propinsi Sumatera Barat yang pada angka 14,17 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 63,62. Begitu juga dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 sebesar 15 persen masih berada jauh jika dibandingkan dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat secara keseluruhan di Propinsi Sumatera Barat dengan capaian sebesar 56 persen dan secara nasional pada angka 59,52 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi sebesar 43,87. Upaya untuk meningkatkan literasi dan minat baca di Kepulauan Mentawai seperti perlombaan menulis,

bercerita, pidato, cerdas cermat antar jenjang sekolah begitu juga dilakukan program pustaka keliling untuk mempermudah jangkauan anak-anak sekolah/ peserta didik dan juga masyarakat akan layanan perpustakaan seperti buku, buletin dan bahan pustaka lainnya.

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Perpustakaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5.327	10.273	8.988	9.842	12.445
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	18.065	19.796	19.796	21.044	32.773
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	NA	NA	11	63,62
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (persen)	NA	NA	NA	15	43,87

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Nilai literasi dan tingkat kegemaran membaca Kab. Kepulauan Mentawai baru dinilai pada tahun 2021 sehingga data capaian kinerja perpustakaan untuk tahun 2018-2020 belum tersedia. Indeks literasi Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 11 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 63,62. Begitu juga dengan nilai tingkat kegemaran membaca mengalami peningkatan dari 15 pada tahun 2021 menjadi 43,87 pada tahun 2022.

Gambar 2.29
Layanan Perpustakaan untuk Masayarakat dan Anak Sekolah



18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja urusan wajib kearsipan dapat diukur dari pembinaan tata kelola arsip secara baku, persentase kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan dan indikator lainnya, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.49. Perkembangan pembangunan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikatakan belum berkembang secara signifikan. Selain dari masih terbatasnya tenaga atau SDM kearsipan yang secara fungsional mengelola dan menata arsip juga mesih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menata arsip yang baik dan benar. Sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan dan layanan arsip setiap perangkat daerah dan pemerintah daerah tentunya urusan kearsipan sudah mulai menjadi bagian penting yang harus diintervensi sehingga pengelolaan kearsipan daerah semakin lebih baik.

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1	1	2,7	5,5	6
2	Persentase Kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	0,8	1	1	1,5	1,17
3	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	28,4	30,2	26	25	33
4	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	4,26	4,8	5	5	6,5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Selain urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain meliputi beberapa bidang, yaitu (1) Kelautan dan Perikanan (2) Pariwisata (3) Pertanian (4) Energi dan Sumber Daya Mineral (6) Perdagangan. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah kepulauan yang ditutupi oleh sepanjang garis pantai 1.402,66 km tentunya Kabupaten Kepulauan Mentawai dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa. Pengembangan

produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan potensi pengembangan perikanan sekitar Rp.1 Triliun memberikan harapan bagi nelayan untuk meningkatkan ekonomi mulai dari peningkatan kapasitas nelayan, sarana dan prasarana, budidaya perikanan, pengolahan bahkan pada pemasaran produk perikanan.

Tabel 2.50
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Jumlah Produksi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perikanan Tangkap (ton)	7.056	7.543	7.698	8.694,5	10.354
2	Perikanan Budidaya (ton)	184,27	114,44	127,59	215,14	10.033
3	Produksi Olahan Ikan (kg)	31.042	32.538	5.685	31.070	33.210

Sumber : Dinas Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap sebanyak 7.056 ton dan mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap sebesar 10.354 ton. Jika dilihat dikonversikan ke dalam penghasilan para nelayan maka penghasilan yang didapatkan masing-masing nelayan adalah Rp.54.708.857/tahun atau sekitar Rp.4,5 juta/bulan. Untuk perikanan budidaya khususnya budidaya wilayah pesisir/terumbu karang dengan luasan lebih dari 17.636,72 ha. Potensi budidaya

kawasan pesisir terumbu karang seperti kerapu, lobster dan kepiting bakau sangat menjanjikan dengan pasar kebutuhan domestik dan juga pasar nasional dan luar negeri dengan produksi rata-rata pertahun sebesar 58 ton.

Tabel 2.51
Jumlah Sarana Tangkap Nelayan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Armada Tangkap	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perahu tanpa Motor	1.390	1.081	936	555	583
2	Long Tail	1.150	1.231	1.642	1.315	1.482
3	Mesin Tempel	822	1.050	1.225	1.698	1.822
4	Kapal <5 GT	48	51	51	58	62

Sumber : Dinas Perikanan

Peningkatan kapasitas nelayan selalu diupayakan melalui memberikan sarana dan prasarana perikanan seperti alat tangkap perikanan, mesin tempel dan juga peralatan pendukung perikanan lainnya. Hingga tahun 2022 jumlah mesin yang telah disalurkan kepada nelayan sebanyak 1.822 mesin dan perlengkapan long tail sebanyak 1.482 unit. Sebagai daerah kepulauan dengan luas wilayah pesisir yang terbentang sepanjang 1.402 km dengan potensi perikanan yang besar, menjadikan sektor perikanan menjadi sumber kehidupan masyarakat walaupun rantai pasok sektor ini masih sangat pendek dan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan masih sangat cukup besar

yaitu sebanyak 2.029 nelayan yang hampir sama dengan jumlah nelayan penuh ditahun 2022 sebanyak 2.204 nelayan.

Tabel 2.52
Jumlah Nelayan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Jumlah Nelayan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nelayan Penuh	1.284	1.466	1.641	2.144	2.204
2	Nelayan Sambilan Utama	1.215	1.215	1.215	1.095	1.126
3	Nelayan Sambilan Tambahan	1.004	1.004	1.004	893	903
	Total	3.503	3.685	3.860	4.132	4.233

Sumber : Dinas Perikanan

Penerapan teknologi tepat guna, kemampuan dan kemampuan sumber daya masyarakat yang masih terbatas merupakan kendala utama dalam pengembangan sektor kelautan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Memang disadari bahwa masih banyak potensi kelautan dan perikanan Kepulauan Mentawai yang bisa digali lebih lagi, tentunya ini perlu perhatian dan mengembangkan strategi pembangunan dan pengembangan perikanan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier*

effect terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal akan potensi pariwisatanya, kabupaten ini memiliki pelbagai kawasan objek wisata yang sudah dikenal hingga penjuru dunia. Banyaknya jenis objek wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dalam tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53
Banyaknya dan jenis Objek Wisata
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Tahun	Panorama Alam	Bahari	Sumber Air	Budaya	Jumlah
2018	22	150	9	3	184
2019	22	150	9	3	184
2020	19	46	9	7	81
2021	19	46	9	7	81
2022	19	46	9	7	81

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Jenis kawasan objek wisata yang tersebar di pelbagai tempat/pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memunculkan beberapa industri pariwisata, salah satunya berdirinya pelbagai resort, penginapan, dan wisma. Tabel 2.52 menunjukkan banyaknya resort, penginapan dan wisma yang telah berdiri sejak tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2022 untuk akomodasi yang telah ada di Mentawai sebanyak 91 akomodasi dengan 759 kamar dan sekitar 1.297 tempat tidur.

Tabel 2.54
Banyaknya Resort, Wisma, dan Penginapan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Tahun	Resort	Wisma	Penginapan	Jumlah
2018	48	10	16	74
2019	50	12	18	80
2020	57	15	63	135
2021	58	16	66	140
2022	60	18	78	146

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Pariwisata
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Item	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (orang)	9.425	9.164	1.315	3.807	9.318
Jumlah Kunjungan Wisata Domestik (orang)	957.477	994.655	122.763	391.228	866.562
Lama Kunjungan (Lama tinggal)	±10 hari	±10 hari	±5 hari	±5 hari	±5 hari
Penerimaan Retribusi Daerah	8 M	7,9 M	1,22 M	4 M	6 M
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	8	7	5	10	11
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	18	9	8	12	13
Tingkat hunian akomodasi	73,58	75,24	1,25	82,43	85,86
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	14,72	16,86	0	6,12	22,08
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	6,8	7.3	1,4	4,2	6,04

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya menunjukkan perkembangan yang positif kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami kontraksi dikarenakan oleh dampak pandemi COVID-19 yang tentunya membatasai aktifitas masyarakat dan juga larangan untuk melakukan even atau

kegiatan yang memicu berkumpulnya masyarakat/orang. Tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 9.425 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 957.477 orang dan meningkat hingga tahun 2019 dimana wisatawan nusantara sudah mendekati 1.000.000 orang atau tepatnya 994.655 orang. Namun, pencapaian ini menurun di tahun 2020 dengan jumlah wisatawan mancanegara menjadi berjumlah 1.315 orang dan wisatawan nusantara berjumlah 122.763 orang. Penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata memang belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata sebesar 18 persen setiap tahunnya (kondisi normal), tentu strategi pengembangan pariwisata dan program pemasaran yang tepat menjadi hal penting harus diperhatikan dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pengembangan pariwisata saat ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pengembangan Daerah tujuan desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet (3M1K) yang diperkuat dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penetapan kawasan desa wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana aksi pengembangan daerah desa wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet adalah rencana daerah dalam pengembangan desa wisata untuk periode lima tahun. Penetapan kawasan desa wisata Mapadegat, Madobag,

Muntei dan Katiet dapat ditentukan atau dikelompokkan berdasarkan jenis potensi pariwisata yang dimiliki. Pengembangan kawasan desa wisata bukan hanya dengan menetapkan lokasi atau daerah mana saja yang menjadi kawasan strategis, namun perlu juga memperhatikan tema pengembangan, ketersediaan dana, perancangan lokasi pengkajian kelayakan dan peluang kerjasama antar pihak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Hasil pertanian dan perkebunan menjadi andalan dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai. Dari data BPS didapatkan bahwa dalam 5 tahun terakhir persentase kontribusi sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah lebih dari 48 persen. Begitu juga isu strategis dalam pengembangan sektor pertanian yang tidak sekedar menjual *raw material* tapi harus mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditi pertanian, sehingga mampu menyejahterakan para petani. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan lokal (ketahanan pangan), alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman/perkantoran dan alih fungsi lahan untuk komoditas pertanian lainnya (tidak konsisten) menjadi isu penting dalam mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Tabel 2.56 menunjukkan perkembangan produksi tanaman pertanian, perkebunan dan perkembangan ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat. Produksi tanaman sagu, kelapa, cengkeh relatif stabil dengan masing-masing pertumbuhan produksi, sagu (17,31 persen), kelapa (35,59 persen), cengkeh (0,73 persen).

Tabel 2.56
Produksi Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Jumlah Produksi	2018	2019	2020	2021	2022
1	Keladi (kwintal)	97.730	1.155	13.260	1.152	1.041,5
2	Ubi Kayu (kwintal)	18.800	2.290	1.150	333,5	515
3	Ubi Jalar (kwintal)	86.000	22.510	2.630	241,3	362,50
4	Pisang (kwintal)	11.990	22.893	19.506	75.351	139.873
5	Durian (kwintal)	56.780	54.599	20.700	57.801	117.211
6	Kelapa (ton)	9.346	15.113	15.591	13.824	13.854
7	Cengkeh (ton)	1.519	1.524	1.539	1.328	1.481
8	Cacao (ton)	2.330	2.301	133,47	210,8	147,34
9	Sagu (ton)	1.847	958	1.205,48	1.060,99	690,63
10	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2,42	2,5	2,47	2,5	2,5
11	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	80	80	85	85	85
12	Babi (ekor) --- produksi	30.489	27.598	25.561	31.878	42.510
	Babi (kg) --- pemotongan	3.000	4.200	15.625	16.117	16.368
13	Ayam Pedaging (ekor) --- pemotongan	1.900	2.700	4.371	4.457	4.804

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk perkembangan produksi tanaman pertanian/ perkebunan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pisang, kepala, sagu relatif terjaga dan cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 produksi komoditi pisang sebesar 11.990 kwintal dan meningkat hingga tahun 2022 produksi komoditi pisang sebesar 139.873 kwintal, komoditi kelapa pada tahun 2018 sebanyak 9.346 ton meningkat menjadi 13.854 ton pada tahun 2022. Namun, pada komoditi sagu ada penurunan produksi yaitu pada tahun 2018 produksinya 1.847 ton menurun hingga tahun 2022 produksi komoditinya menjadi 690,63 ton, hal ini disebabkan karena budidaya sagu sudah mulai tidak dikembangkan dan alih fungsi lahan sagu menjadi areal perumahan atau pertanian komoditas lainnya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai rata-rata 12,5 persen. Kontribusi sektor perdagangan trhadap PDRB kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan walaupun di tahun 2020 dan 2021 sedikit ada perlambatan. Capaian ini tergolong sangat kecil, dikarenakan belum maksimalnya pengembangan sektor perdagangan terutama pusat-pusat perdagangan seperti pasar yang berkembang. Disisi lain sektor perdagangan yang didorong yang tumbuh dari tumbuh

kembangnya usaha perdagangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dalam legalisasi sektor usaha perdagangan.

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,66	12,82	12,80	12,72	13,43
2	Jumlah Koperasi	84	84	83	85	85
3	Jumlah Perdagangan (Pasar, Toko, Swalayan)	584	643	880	47	47
4	Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan	4	5	6	6	6
5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0	0	1.07	1,60	1,80
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	0,32	0,38	0,42	0,35	0,4
7	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	0	0,4	0,2	0,2

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama 5

tahun terakhir masih sangat konstan diangka 2-2,5 persen terhadap PDRB belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,68	2,34	2,43	2,57	2,48
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	0	0	2,07	1,25	0,031
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0	0	0	0,8
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0,02
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0,6825
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada	ada	ada	ada	ada

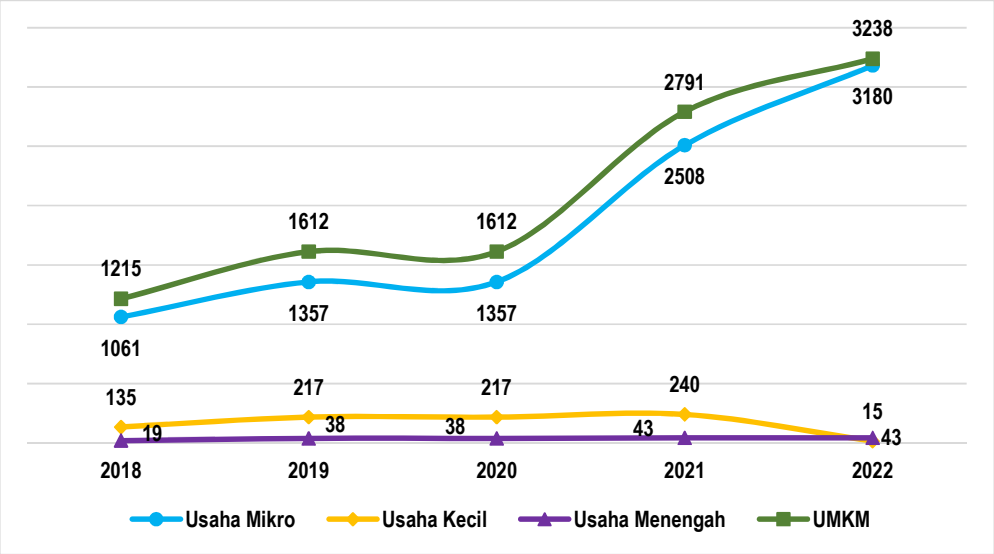
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor raw material/primer dengan kontribusi dengan

rata-rata 48 persen setiap tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktural ekonomi ke arah sektor industri/pengolahan.

Total Jumlah UMKM Tahun 2022 sebanyak 3.238 UMKM usaha mikro sebanyak 3.180 atau 98,20%, usaha kecil sebanyak 15 atau 0,4%, usaha menengah sebanyak 43 atau 1,32%. Gambar 2.30 menunjukkan meningkatnya jumlah usaha kecil di Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022, begitu juga dengan jenis usaha mikro yang bergerak pada sektor informal yang meningkat setiap tahun dari 1.061 usaha mikro tahun 2018 bertambah menjadi sebanyak 3.180 usaha mikro pada tahun 2022, tentunya berbagai program pendampingan dan akses permodalan yang harus dibuka bagi masyarakat agar usaha mikro dapat beralih pada usaha kecil dan memiliki legalitas usaha.

Gambar 2.30
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Besar
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, 2022

2.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Penunjang Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif. Kurun waktu hingga tahun 2022, perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin baik. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa penghargaan yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 2018, anata lain:

1. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2018.
2. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2019.
3. Perencanaan Terbaik III se-Sumatera Barat Tahun 2019.
4. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2020.

5. Perencanaan Terbaik Harapan III se-Sumatera Barat Tahun 2020.
6. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2021.
7. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2022.
8. Perencanaan Terbaik Harapan III se-Sumatera Barat Tahun 2021.

Begitu juga dengan proses dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, Penyusunan Rencana Kerja Pemarintah Daerah setiap tahunnya telah disusun dan batas waktu penetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Unsur Penunjang Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi,

akuntabilitas, dan partisipatif. Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan keuangan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD merupakan instrumen fiskal di daerah yang digunakan dalam membiayai membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Sejak tahun 2018 kinerja penyelenggaraan keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah pada pencapaian tertinggi yaitu dengan opini keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh pertama kali sejak kabupaten berdiri yaitu tahun 2019. Namun, pancapaian ini mengalami penurunan yatu pada tahun 2021 untuk pengelolaan keuangan tahun 2021 dengan opini keuangan dengan predikat WDP dan pada tahun 2022 opini pengelolaan keuangan daerah Kembali mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 2.59
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini Keuangan	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
2	Realisasi PAD (persen)	96,03	47,0	62,25	69,78	112,89

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa menargetkan maksimal dalam pencapaian kinerja opini

keuangan terhadap hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan setiap tahunnya dengan opini wajar tanpa pengecualian.

3. Unsur Penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Suksesnya pencapaian kinerja pembangunan daerah sangat tergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Perhatian pada unsur kepegawaian menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, juga sebagaimana amanat Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, seluruh Pemerintah Daerah diamanahkan untuk menerapkan Sistem Merit dilingkungannya. Penerapan sistem merit sebagai salah satu strategi dalam manajemen SDM ASN tentunya bukanlah hal yang mudah. Pada perjalanannya, banyak tantangan dan inkonsistensi yang ditemui dalam pelaksanaan sistem ini. Tantangan dan inkonsistensi datang tidak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata, namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara tidak langsung mempengaruhi.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai penerapan dan penilaian Sistem Merit dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek antara lain Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Karir, Promosi dan Rotasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan Serta Sistem Informasi. Penerapan

Sistem Merit akan diukur dengan Penilaian Sistem Merit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya menjadi indikator dalam urusan penunjang kepegawaian menggantikan indikator Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70 persen. Pada tahun 2022 sistem merit di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 85 (skala 0-400) dimana tahun sebelumnya (2021) tidak memperoleh nilai. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi pendidik masih belum dipenuhi sebagai syarat guru/pendidik dengan kisaran baru 16 persen. Begitu juga dengan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan juga dalam jabaran struktural dan fungsional yang diselenggarakan dalam upaya menyesuaikan kapasitas sumber daya dengan jabatan yang diemban sehingga mempercepat tercapainya tujuan organsasi.

4. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan urusan penunjang yang sangat vital dalam proses penyusunan perencanaan terutama dalam perumusan strategi/ kebijakan dengan penarikan kesimpulan secara ilmiah yang dijadikan pedoman dan dasar/rujukan pengambilan kebijakan.

Masih belum adanya SDM dalam bidang kelitbangan (peneliti) yang kompeten di dalam bidangnya. Selain itu juga disebabkan

oleh permasalahan mengenai hasil penelitian dan pengembangan yang belum optimal sedangkan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan. Begitu juga dengan perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih fluktuatif, inovasi yang diartikan sebagai pembaharuan tata kelola dan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2022 dan 2021 telah mencapai predikat inovatif walaupun ditahun 2020 mengalami penurunan pada predikat kurang inovatif. Kebijakan pengembangan inovasi belum sepenuhnya menjadi bagian capaian kinerja pemerintah daerah terlebih pada perangkat daerah.

5. Unsur Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kedudukan inspektorat daerah adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Tabel 2.60
Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase tindak lanjut temuan	65,80	69,70	77,76	86,25	76,80
2	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	88,20	96	97,25	97,58	100
3	Maturitas SPIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2

Sumber: Inspektorat

Perkembangan indikator pengawasan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan. Penguatan unsur pengawasan tidak dapat hanya berada pada unsur pengawasan atau berdasarkan temuan-temuan pemeriksaaan, yang lebih penting adalah penguatan tata kelola, tertib adminstrasi dan penguatan sumber daya manuasia sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan tertib dan taat azas.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) merupakan jenis komponen pengeluaran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.61
Angka Konsumsi RT
Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Total Pengeluaran RT	2.249.953	2.484.444	2.365.148	2.473.204	2.765.960
Pertumbuhan pengeluaran RT (persen)		6,63	10,42	-4,80	4,57	11,84
2	Jumlah RT	21.554	21.950	20.843	21.085	21.327

Sumber: PDRB Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pengeluaran 2018-2022

Tabel 2.61 menunjukkan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan. Peningkatan konsumsi ini dipengaruhi oleh beberapa indikator ekonomi makro salah satunya adalah naiknya pendapatan masyarakat dan peningkatan konsumsi rumah tangga juga menggambarkan peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19 dimana masyarakat lebih hati-hati/menjaga dalam melakukan pengeluaran/konsumsi khususnya untuk jenis konsumsi non pangan. Pertumbuhan angka konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang positif dan

dengan tren walaupun di tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup dalam diangka minus 4,80 persen dan kembali positif di tahun 2021 pada angka 4,57 persen dan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 11,84 persen.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah RT. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Tabel 2.62 menunjukkan rasio konsumsi rumah tangga non pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini terlihat pada tahun 2018 persentase total pengeluaran non pangan terhadap pengeluaran rumah tangga sebesar 49,90 persen seterusnya hingga tahun 2022 sekitar menjadi 51,17 persen.

Tabel 2.62
Rasio Angka Konsumsi RT non Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Total Pengeluaran RT pangan	1.107.845	1.227.068	1.178.828	1.253.566	1.326.851
2.	Total Pengeluaran	2.249.953	2.484.444	2.365.148	2.473.204	2.592.987
Persentase		49,90	49,24	49,39	49,84	51,17

Sumber: BPS (diolah)

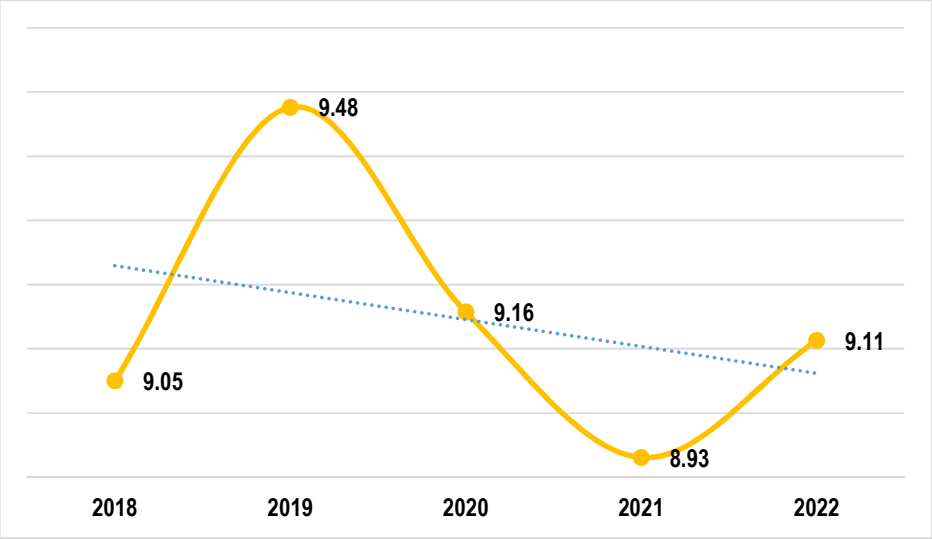
Hal ini menjadi perhatian khusus, artinya tingkat konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh konsumsi pangan (rata-rata melebihi 50 persen), artinya pola konsumsi masyarakat Mentawai masih sangat konsumtif dan belum produktif. Tentu konsumsi selain pangan dapat didorong dalam meningkatka kulaitas hidup dan ekonomi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, kualitas lingkungan dan kesehatan.

c. Produktifitas Total Daerah

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator untuk melihat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022 seperti pada gambar 2.31 menunjukkan tren penurunan.

Pada tahun 2018 nilai produktivitas daerah sebesar 9,05 miliar rupiah/kapita/tahun lalu naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 9,48 miliar rupiah/kapita/tahun, namun pada tahun 2020 sampai pada tahun 2021 menurun dan menjadi sebesar 8,93 miliar rupiah/kapita/tahun pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 9,11 miliar rupiah/ kapita/ tahun.

Gambar 2.31
Produktivitas Total Daerah (milliar rupiah)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu capaian yang dapat dijadikan ukuran dalam daya saing daerah adalah ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung kegiatan sektor rill masyarakat. Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

a. Aksesibilitas

Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

a) Sarana jalan yang tersedia dalam kondisi baik sepanjang 107,9 km atau sekitar 9,54 persen dari total jalan yang tersedia, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 405,4 km atau sekitar 35,86 persen dari total panjang jalan tersedia.
b) Bandar Udara Rokot melayani penerbangan domestik Padang-Rokot (Tuapejat) dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Pelayanan penerbangan Padang-Tuapejat telah memiliki rute penerbangan tetap (2 kali seminggu) dengan kapasitas pesawat 15 s/d 20 orang.
c) Pelabuhan Laut sebanyak 5 buah, yaitu Pelabuhan Tuapejat, Pelabuhan Sioban, Pelabuhan Sikakap, Pelabuhan Sikabaluan, Pelabuhan Maileppet.

Untuk pelayaran Padang-Mentawai dapat dilalui oleh kelima pelabuhan tersebut dengan rute sudah terjadwal. Kapal ASDP yang tersedia sebanyak 3 buah (KMP Gambolo, KMP Ambu-Ambu, KMP Tanjung Burang) dan 2 unit Mentawai Fast juga melayani pelayaran rute Padang-Mentawai. Pelayaran antar pulau dalam wilayah Kepulauan Mentawai tersedia kapal penyeberangan antar pulau antara lain KM Simasin, KM Nade, KM Beriloga, KM Simatalu, LCT Teluk Katurei, KM Bakkat Menuang dengan rute sudah terjadwal.

b. Penataan Wilayah

Penataan ruang dan wilayah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 menjadi acuan hukum dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Rencana kawasan tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 20 tahun di bagi dalam 2 kawasan antara lain kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri:

a) Kawasan hutan lindung.
b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain adalah kawasan resapan air.
c) Kawasan perlindungan setempat.
d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.
e) Kawasan rawan bencana alam.

   Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan gempa dan tsunami, kawasan rawan banjir, kawasan rawan abrasi.

f) Kawasan lindung geologi.

g) Kawasan konservasi perairan.

h) Kawasan lindung lainnya.

Kawasan budidaya di Kepulauan Mentawai terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 246.011,41 ha, kawasan peruntukan pertanian dengan luas 119.492,20 ha. Kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi bandar udara (bandara), pertahanan dan keamanan.

c. Air Bersih

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih secara agregat masih sekitar 55,46 persen. Hal ini menjadi perhatian serius karena kebutuhan akan air bersih akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengembangkan SPAM untuk kawasan di 10 kecamatan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

d. Listrik dan Komunikasi

Rasio elektrifikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 masih rendah sekitar 72,63 persen. Kendala utama adalah infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas dan juga kemampuan ekonomi masyarakat calon pelanggan yang tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik. Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebanyak 14.717 pelanggan. Untuk 4 wilayah antara lain Tuapejat, Sioban, Sikakap, Muara Siberut, Sikabaluan telah beroperasi PLN selama 24 jam, sedangkan di daerah lain masih sekitar 10-12 jam/hari. Pengembangan sektor energi terutama energi baru dan terbarukan kedepan menjadi alternatif pilihan dalam rangka pembangunan energi yang berkelanjutan terutama dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% hingga tahun 2025.

Layanan surat menyurat juga sudah tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain di Sikakap, Sioban, Tuapejat, Muara Siberut, Sikabaluan. Begitu juga untuk akses telekomunikasi sudah dapat melayani konsumen di 10 kecamatan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk pelbagai

kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelbagai jenis kejahatan lainnya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.63
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

No	Jenis Kriminal	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kasus Narkoba	5	6	4	5	4
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	2	24	21	15
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	7	1	8	6	3
5.	Jumlah kasus Pencurian	17	12	20	13	12
6.	Jumlah kasus Penipuan	5	4	5	6	5
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	56	31	61	51	39
9.	Jumlah Penduduk	90.373	92.021	87.623	88.389	89.401
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	3,98	2,72	6,96	5,76	4,36

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai cenderung mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 tingkat kriminalitas sebesar 3,98 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,76 persen dan pada tahun 2022 relatif menurun dengan angka sebesar 4,36. Harapannya dengan panguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan seluruh unsusr masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.

b. Layanan Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi.

Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu pendekatan proses pembangunan adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Peningkatan sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya mewujudkan manusia yang seutuhnya dan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari

kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3. Tabel 2.64 menunjukkan adanya peningkatan rasio lulusan sarjana pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 kurun waktu 2018-2022, persentase penduduk 15 tahun keatas ijazah S1, S2, dan S3 tahun 2018 sebesar 4,79 persen dan mengalai peningkatan hingga tahun 2022 sebesar 8,54 persen.

Tabel 2.64
Jumlah Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas berijazah S1/S2/S3	2.768	3.361	3.512	5.494	5.590
Jumlah penduduk 15 tahun keatas	57.790	58.745	63.474	64 370	65.431
Persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 (1/2)	4,79	5,72	5,53	8,53	8,54

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah dapat tercapai. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan melalui pencapaian indikator kinerja RKPD yang sesuai/selaras dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Tabel 2.65
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN, tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi terbayarkan	1150	116.022.696.075	1150	106.101.934.473	100,00	91,45	5750	570.192.718.773	100,00	98,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah terbayarnya honor ASN di lingkungan Disdikbud	60	1.681.460.000	60	1.478.498.000	100,00	87,93	300	8.204.338.000	83,33	59,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja guru	600	306.511.000	600	284.731.000	100,00	92,89	1200	957.909.000	200,00	191,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	22	260.220.900	22	176.368.900	100,00	67,78	44	586.359.250	200,00	117,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan bacaan ASN	2	39.725.000	2	25.012.600	100,00	62,96	12	55.012.300	120,00	137,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	10	19.500.000	10	19.400.000	100,00	99,49	12	22.400.000	600,00	89,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30	139.876.000	30	139.013.036	100,00	99,38	60	246.527.836	200,00	82,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3	90.000.000	3	58.095.362	100,00	64,55	6	97.510.626	200,00	108,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya pemeliharaan kendaraan mobil dinas operasional Tercapainya pemeliharaan kendaraan motor dinas operasional	12	105.750.000	12	82.508.732	100,00	78,02	24	131.608.732	200,00	87,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terbangunnya unit sekolah baru	1	977.341.020	1	976.073.400	100,00	99,87	1	976.073.400	50,00	32,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun pada sekolah dasar	15	1.277.425.048	15	1.263.735.500	100,00	98,93	16	1.730.310.500	266,67	53,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun pada sekolah dasar	12	1.126.079.600	12	1.118.897.300	100,00	99,36	20	3.125.612.800	200,00	125,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang pustaka yang dibangun pada sekolah dasar	10	834.119.199	10	828.804.200	100,00	99,36	15	2.072.340.816	250,00	138,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya jamban sekolah/WC, pagar pada sekolah dasar	18	1.564.065.680	18	1.540.410.800	100,00	98,49	21	2.063.239.468	175,00	113,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas yang dibangun	16	341.492.400	16	308.735.700	100,00	90,41	17	1.183.000.700	340,00	51,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya pengadaan mobiler sekolah dasar	19	221.487.000	19	217.234.700	100,00	98,08	19	217.234.700	190,00	16,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan pendidikan di SD	134	19.305.292.208	134	13.670.887.900	100,00	70,81	269	42.967.386.784	199,26	330,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	10	1.342.937.400	10	1.258.685.000	100,00	93,73	10	1.258.685.000	100,00	83,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya ujian sekolah berstandar nasional dan try out SD	134	200.881.000	134	198.032.400	100,00	98,58	269	264.084.400	199,26	132,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya evaluasi satuan pendidikan dasar	134	100.000.000	134	99.580.000	100,00	99,58	134	99.580.000	100,00	99,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah jasa guru kontrak SD yang dibayarkan	450	7.169.352.500	450	7.086.198.500	100,00	98,84	585	16.121.252.000	433,33	169,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya SDM bagi tenaga kependidikan	100	277.804.000	100	267.955.800	100,00	96,45	100	267.955.800	100,00	89,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terkelolanya Aneka Tunjangan Guru, PEngawas, Kepala Sekolah Jenjang SD	370	75.336.000	370	73.681.880	100,00	97,80	680	173.090.880	219,35	98,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terkelolanya BOS SD	134	174.350.000	134	169.311.450	100,00	97,11	269	297.134.150	199,26	198,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah sekolah yang dibangun	1	909.219.760	1	894.989.082	100,00	98,43	2	1.894.989.082	200,00	189,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunannya ruang guru/TU/Kepala sekolah	2	1.582.874.120	2	1.574.347.918	100,00	99,46	2	1.574.347.918	100,00	78,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya ruang perpustakaan	2	1.299.413.000	2	1.281.812.647	100,00	98,65	5	3.671.259.647	166,67	122,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium	Tersedianya laboratorium sekolah	1	5.074.727.136	1	5.031.945.287	100,00	99,16	4	7.493.862.787	133,33	249,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah aula yang dibangun	3	1.032.819.480	3	732.197.795	100,00	70,89	3	732.197.795	100,00	36,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tersedianya rumah dinas guru	14	3.849.822.748	14	3.837.347.779	100,00	99,68	18	4.967.324.279	300,00	248,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya jamban sekolah/WC, pagar pada sekolah menengah atas	3	1.522.466.320	3	1.438.787.529	100,00	94,50	8	1.859.115.529	114,29	206,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya mebel sekolah	6	427.633.960	6	420.196.640	100,00	98,26	6	420.196.640	66,67	60,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang menerima dana BOS	32	7.773.661.000	32	6.864.692.353	100,00	88,31	66	11.864.692.353	194,12	237,29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya ujian nasional sekolah dasar	37	183.940.000	37	148.787.526	100,00	80,89	71	439.250.526	208,82	146,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan	34	74.315.000	34	45.325.500	100,00	60,99	34	45.325.500	100,00	15,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya tenaga kependidikan	145	4.006.396.000	145	3.811.403.000	100,00	95,13	290	8.102.409.500	200,00	168,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya SDM pendidik dan tenaga kependidikan	200	125.550.000	200	112.037.772	100,00	89,24	200	112.037.772	100,00	22,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terkelolanya Aneka Tunjangan Guru, Pengawas, Kepala Sekolah Jenjang SMP	200	74.421.000	200	74.363.052	100,00	99,92	265	74.363.052	407,69	12,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terkelolanya BOS SMP	34	112.430.000	34	96.110.000	100,00	85,48	68	96.110.000	200,00	48,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa PAUD	100	185.000.000	100	179.783.700	100,00	97,18	100	179.783.700	100,00	97,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tersedianya tenaga kependidikan	100	99.999.800	100	99.966.800	100,00	99,97	100	99.966.800	100,00	99,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah PTK PAUD yang mengikuti pelatihan	180	214.195.120	180	201.816.720	100,00	94,22	180	201.816.720	100,00	100,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100	110.688.500	100	106.258.500	100,00	96,00	100	106.258.500	100,00	30,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terkelolanya BOP PAUD	100	1.437.959.500	38	615.328.000	38,00	42,79	38	615.328.000	38,00	41,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Tersedianya tenaga kependidikan	12	100.000.000	12	99.058.500	100,00	99,06	12	99.058.500	100,00	49,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah PTK Kesetaraan yang mengikuti pelatihan	12	149.996.000	12	140.809.330	100,00	93,88	12	140.809.330	100,00	70,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Kesetaraan	12	96.902.800	12	96.395.300	100,00	99,48	12	96.395.300	100,00	48,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terkelolanya BOP Kesetaraan	12	475.168.500	10	253.458.500	83,33	53,34	10	253.458.500	83,33	126,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM												
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal												
Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD	60	66.154.000	60	58.434.800	100,00	88,33	60	58.434.800	100,00	88,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penilaian kenaikan pangkat guru, pengawas, dan kepala sekolah	350	73.386.000	350	54.358.000	100,00	74,07	700	140.730.000	200,00	93,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	380	36.104.311.080	380	32.334.776.095	100,00	89,56	2.160	201.454.970.101	4060,00	111,60	Dinas Kesehatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya administrasi keuangan	862	14.579.244.000	862	14.393.591.293	100,00	98,73	2.612	30.889.696.293	5198,00	126,24	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	7	40.806.450	7	40.646.807	100,00	99,61	36	46.596.607	161,00	6,86	Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Perkantoran	50	77.759.005	50	74.687.936	100,00	96,05	125	149.161.886	275,00	100,14	Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	40	69.994.500	40	69.993.200	100,00	100,00	120	169.982.200	240,00	113,33	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	43	123.023.840	43	122.380.900	100,00	99,48	93	217.883.970	246,00	97,37	Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk perkantoran	10	56.205.400	10	53.429.900	100,00	95,06	37	181.319.909	67,00	127,60	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	300	19.995.000	300	19.700.000	100,00	98,52	396	27.900.000	911,00	78,59	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	24	160.350.000	24	160.179.401	100,00	99,89	89	360.088.401	157,00	31,78	Dinas Kesehatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang Tersedia	3	50.000.000	0	0	0,00	0,00	0	81.000.000	5,00	97,59	Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	24	50.000.000	24	49.250.000	100,00	98,50	1	94.250.000	27,00	0,94	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telekomunikasi berupa internet, informasi, sumberdaya air dan listrik	36	51.300.000	36	44.529.440	100,00	86,80	41	136.329.440	50,00	20,07	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Pajak kendaraan	30	116.820.000	30	112.896.750	100,00	96,64	83	239.920.083	227,00	69,52	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rakit dan prasarana pendukung yang dibangun	1	7.303.951.567	0	5.139.737.914	0,00	70,37	2	16.390.986.097	5,00	30,38	Dinas Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibangun	24	636.447.000	24	632.408.397	100,00	99,37	46	2.709.878.397	72,00	108,40	Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang direhabilitasi	5	58.020.000	5	55.858.731	100,00	96,27	20	205.858.731	50,00	4,57	Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang diadakan	6	2.070.679.840	6	1.814.599.749	100,00	87,63	13	3.942.989.999	21,00	171,43	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan penunjang yang tersedia	2	6.868.272.320	2	6.165.540.988	100,00	89,77	19	13.379.102.608	39,00	1216,28	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat, vaksin yang tersedia	18	3.743.527.836	18	3.543.481.589	100,00	94,66	241	6.885.170.779	563,00	78,24	Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Habis Pakai	JenisBahan Habis Pakai yang tersedia	15	2.284.426.615	15	1.886.049.075	100,00	82,56	33	8.704.693.295	53,00	125,82	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang dipelihara	10	117.070.000	10	115.185.710	100,00	98,39	23	407.466.710	38,00	134,80	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2600	75.000.000	2.600	73.150.000	100,00	97,53	12.100	347.188.462	25100,00	110,22	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	65	929.733.000	65	547.095.600	100,00	58,84	9.565	2.027.230.600	22565,00	127,48	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	2364	50.000.000	2.364	45.842.500	100,00	91,69	11.864	310.805.500	24864,00	113,04	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	35	50.000.000	35	42.890.800	100,00	85,78	9.535	282.890.725	22535,00	113,16	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	5	50.000.000	5	30.842.000	100,00	61,68	15	130.842.000	40,00	52,34	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif mendpat Pelayanan Kesehatan sesuai standar	15	50.000.000	15	46.560.000	100,00	93,12	75	246.559.980	150,00	98,62	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang dengan lanjut usia mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	5	50.000.000	5	37.925.000	100,00	75,85	85	117.925.000	180,00	124,13	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang dengan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	65	75.000.000	65	74.460.000	100,00	99,28	160	184.075.370	265,00	151,94	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang dengan Diabetes mellitus medpata pelayanan Kesehatan sesuai standar	50	60.000.000	50	59.715.000	100,00	99,53	110	119.715.000	205,00	99,76	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10	50.000.000	10	49.845.000	100,00	99,69	28	139.845.000	48,00	139,85	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	30	150.000.000	30	116.438.100	100,00	77,63	70	316.438.100	130,00	105,48	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayana Kesehahtan sesuai standar	10	70.000.000	10	56.965.000	100,00	81,38	28	182.965.000	53,00	104,55	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen yang tersedia	25	80.610.000	25	58.301.000	100,00	72,32	55	219.521.000	105,00	136,16	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan mendapat pelayanan sesuai standar	10	907.505.852	10	837.375.716	100,00	92,27	40	2.314.059.116	90,00	51,00	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan sesuai standar	15	273.878.000	10	244.439.000	66,67	89,25	15	344.439.000	25,00	137,78	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen yang tersedia	1	50.000.000	1	48.459.800	100,00	96,92	2	98.459.800	5,00	65,64	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersedia	15	75.000.000	15	66.661.000	100,00	88,88	30	141.661.000	50,00	141,66	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	5	50.000.000	5	44.610.200	100,00	89,22	13	124.610.200	21,00	155,76	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen yang tersedia	236	75.000.000	236	63.424.000	100,00	84,57	386	113.424.000	636,00	142,76	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	1	50.000.000	1	31.379.000	100,00	62,76	3	131.379.000	5,00	131,38	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen yang tersedia	9	673.676.400	9	655.109.800	100,00	97,24	209	1.288.512.300	499,00	184,07	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersedia	100	3.843.433.500	100	3.264.499.200	100,00	84,94	205	6.955.200.400	3705,00	5,17	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen yang tersedia	2	50.000.000	1	9.051.800	50,00	18,10	4	84.461.800	8,00	84,46	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen yang tersedia	12	955.376.946	12	456.755.402	100,00	47,81	27	1.962.967.835	47,00	102,98	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen yang tersedia	12	26.343.972.896	12	7.640.841.300	100,00	29,00	22	24.502.594.268	37,00	0,89	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen yang tersedia	37	466.600.000	37	391.172.094	100,00	83,83	77	1.047.017.094	227,00	55,35	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	5	519.972.900	5	249.782.190	100,00	48,04	11	962.381.490	36,00	37,02	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak	206	10.790.009.656	206	10.517.666.631	100,00	97,48	1030	45.047.330.823	100,00	104,37	RSUD KKM
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	6	30.521.500	6	30.489.150	100,00	99,89	30	120.737.150	100,00	107,03	RSUD KKM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	25	101.221.900	25	101.047.248	100,00	99,83	125	505.934.848	100,00	99,97	RSUD KKM
	Tersedianya Bahan da Perlengkapan Kebersihan Kantor	31	163.078.000	31	162.885.295	100,00	99,88	155	815.197.295	100,00	99,98	RSUD KKM
	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	30	60.099.800	30	60.067.800	100,00	99,95	150	300.467.000	100,00	99,99	RSUD KKM
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	45	308.686.000	45	306.564.410	100,00	99,31	225	1.441.008.410	100,00	101,62	RSUD KKM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	32	152.454.000	32	151.570.876	100,00	99,42	160	652.186.876	100,00	104,22	RSUD KKM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening listrik dan air	3	496.500.000	3	469.398.612	100,00	94,54	15	2.311.398.612	100,00	100,39	RSUD KKM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	286.500.000	9	276.111.920	100,00	96,37	45	1.422.111.920	100,00	99,27	RSUD KKM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terbayarnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	343.420.000	5	301.868.784	100,00	87,90	25	1.512.828.784	100,00	99,94	RSUD KKM
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
Pengadaan Obat, Vaksin	Terbayarkan obat dan vaksin	4	710.820.915	4	707.162.962	100,00	99,49	20	3.356.846.622	100,00	101,35	RSUD KKM
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terbayarkan bahan habis pakai	5	1.073.115.906	5	1.070.321.932	100,00	99,74	25	4.350.951.304	100,00	106,10	RSUD KKM
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbayarkannya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2	262.720.000	2	257.894.750	100,00	98,16	10	1.303.334.750	100,00	99,73	RSUD KKM
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terbayarkannya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8	1.349.857.560	8	1.175.772.480	100,00	87,10	20	2.672.172.480	133,33	142,86	RSUD KKM
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terbayarkannya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	4	624.986.000	4	518.223.258	100,00	82,92	12	1.989.007.258	120,00	108,19	RSUD KKM
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi												
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	3	50.000.000	3	46.189.900	100,00	92,38	7	111.189.900	15,00	83,39	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah dokumen yang tersedia	2	253.610.000	2	251.490.000	100,00	99,16	5	626.490.000	10,00	100,24	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota												
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	21	25.000.000	23	20.540.000	109,52	82,16	46	50.301.905	71,00	169,01	Dinas Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen yang tersedia	10	25.000.000	10	19.322.800	100,00	77,29	30	69.322.800	55,00	110,92	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen yang tersedia	75	75.000.000	75	50.837.800	100,00	67,78	207	182.867.800	347,00	130,62	Dinas Kesehatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)												
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen yang tersedia	3	50.000.000	3	49.865.000	100,00	99,73	8	99.925.000	14,00	85,65	Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga												
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen yang tersedia	25	50.000.000	25	47.440.000	100,00	94,88	71	145.184.900	131,00	120,99	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen yang tersedia	3	50.000.000	3	42.268.500	100,00	84,54	9	167.720.500	24,00	67,09	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen yang tersedia	15	50.000.000	15	47.300.000	100,00	94,60	71	236.905.000	146,00	94,76	Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen yang tersedia	15	50.000.000	15	49.985.100	100,00	99,97	35	199.985.100	85,00	119,99	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi kinerja											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1	40.000.000	1	39.820.200	100,00	99,55	5	99.820.200	100,00	99,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	6.289.476.267	12	5.910.720.647	100,00	93,98	60	24.652.581.751	100,00	98,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	4.926.744.000	12	4.888.654.990	100,00	99,23	60	25.876.344.704	100,00	99,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15	27.136.375	15	27.131.675	100,00	99,98	75	112.004.651	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	47.480.000	6	47.480.000	100,00	100,00	30	58.480.000	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	216.350.000	3	216.205.800	100,00	99,93	15	837.959.280	100,00	99,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7	75.000.000	7	74.923.950	100,00	99,90	35	273.909.450	100,00	99,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	7	102.000.000	7	101.409.500	100,00	99,42	35	177.339.500	100,00	99,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	35	199.606.000	35	198.973.797	100,00	99,68	175	1.245.041.797	100,00	99,95	Dinas Pekerjaan Umum dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD											Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TerpenuhinyaKebutuhan Sarana Komunikasi Air, Listrik dan Internet											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	140.800.000	9,8	114.271.230	81,67	81,16	57,8	496.271.230	96,33	94,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	141.270.000	24	96.679.650	68,57	68,44	164	487.730.850	93,71	91,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	519.982.890	7	486.753.941	100,00	93,61	35	1.943.643.541	100,00	98,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	77.900.000	17	51.692.000	68,00	66,36	117	271.392.000	93,60	91,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Air Baku											
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Air Baku Berbagai Keperluan dan Terlindunginya Kawasan dari Ancaman Abrasi, Banjir dan Longsor											
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1	231.330.000	1	229.880.335	100,00	99,37	5	975.720.215	100,00	99,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	55	521.082.300	55	518.810.680	100,00	99,56	275	2.518.810.680	100,00	99,91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Irigasi											
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	50	483.548.900	50	483.548.900	100,00	100,00	250	967.097.800	100,00	200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	6	3.644.313.240	4,5	2.681.537.449	75,00	73,58	28,5	8.264.792.569	95,00	89,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	400	797.510.000	400	789.847.000	100,00	99,04	2000	1.675.240.000	100,00	99,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tinggal Beakses Air Minum											
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat											
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2	1.052.530.000	2	1.014.953.040	100,00	96,43	10	1.314.953.040	100,00	97,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	500	600.000.000	500	593.196.656	100,00	98,87	2500	10.618.809.556	100,00	99,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	450	6.040.954.300	215	2.856.149.949	47,78	47,28	2015	10.856.149.949	89,56	77,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10	1.672.962.400	8,9	1.477.060.080	89,00	88,29	48,9	3.477.060.080	97,80	94,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga ramah lingkungan											
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistim dan Pengelolaan Persampahan											
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2	100.000.000	2	97.965.800	100,00	97,97	10	297.965.800	100,00	99,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Lingkungan yang tertata											
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tesedianya Bangunan Gedung Daerah siap Pakai											
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan	2	5.726.476.200	1,7	4.698.575.359	85,00	82,05	9,7	25.049.163.859	97,00	96,06	Dinas Pekerjaan Umum dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya											Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap											
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan penyelengaraan jalan Kabupaten											
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	11	2.019.921.320	11	1.938.466.879	100,00	95,97	55	10.893.553.683	100,00	99,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	1.056.303.600	2	1.022.155.850	100,00	96,77	10	2.300.825.850	100,00	98,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7,4	17.924.984.405	6,4	14.668.307.669	86,49	81,83	36	188.758.665.376	97,30	98,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	5,	24.995.519.535	2,8	13.039.348.034	56,00	52,17	22,8	160.119.245.671	91,20	93,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6,	1.530.205.730	5	1.254.075.739	83,33	81,95	29	14.297.094.151	96,67	98,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	50,	3.259.976.000	50	3.051.674.979	100,00	93,61	250	10.821.144.979	100,00	98,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	300,	440.619.500	250	365.215.172	83,33	82,89	1450	1.814.682.644	96,67	96,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	7	1.740.227.530	5,8	1.424.430.200	82,86	81,85	33,8	5.279.585.200	96,57	94,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi											
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Tersedianya Data Badan Usaha											
Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	1	99.999.900	0,5	49.315.300	50,00	49,32	4,5	49.315.300	90,00	49,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW											
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota												
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	205.667.200	1	191.484.100	100,00	93,10	5	391.484.100	100,00	96,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	42.277.900	1	41.481.930	100,00	98,12	5	241.481.930	100,00	99,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1	217.326.280	1	175.714.500	100,00	80,85	5	235.714.500	100,00	85,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1	29.999.600	1	29.999.600	100,00	100,00	5	149.998.000	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah	1	72.627.500	1	72.457.500	100,00	99,77	5	362.967.500	100,00	99,95	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	14	2.472.040.970	14	2.096.086.682	100,00	84,79	70	11.984.250.562	100,00	96,96	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	760.802.000	36	652.864.777	100,00	85,81	300	3.696.072.777	100,00	97,16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan	6	14.988.600	6	14.988.600	100,00	100,00	30	74.943.000	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kantor	bangunan kantor											Permukiman
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pealatan dan perlengkapan kantor	10	77.537.800	10	76.803.600	100,00	99,05	50	384.018.000	100,00	99,05	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	25	50.667.000	25	50.484.900	100,00	99,64	125	253.152.900	100,00	99,93	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100000	29.998.500	100000	29.998.500	100,00	100,00	500000	149.992.500	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersdianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16	19.995.000	16	18.800.000	100,00	94,02	80	98.792.000	100,00	98,80	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20	160.402.000	20	160.041.826	100,00	99,78	100	801.649.826	100,00	99,96	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	20	43.342.500	20	42.662.500	100,00	98,43	100	216.032.500	100,00	99,69	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	3	77.426.385	3	77.426.385	100,00	100,00	3	387.131.925	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	2	94.800.000	2	80.233.995	100,00	84,64	10	459.433.995	100,00	96,93	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	8	50.000.000	8	41.702.099	100,00	83,40	40	241.702.099	100,00	96,68	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa pemeliharaan, dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersdianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	22.195.000	1	22.181.385	100,00	99,94	5	110.961.385	100,00	99,99	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	10	29.790.000	10	29.790.000	100,00	100,00	50	148.950.000	100,00	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Program Kabupaten/Kota												
Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah layak huni	1	370.072.643	1	336.966.680	100,00	91,05	5	1.817.257.252	100,00	98,21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota												
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan tanggap Bencana	Terlaksananya sosialisasi dan penyiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	25	102.655.000	25	46.720.000	100,00	45,51	125`	457.340.000		89,10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota												
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya pembangunan rumah bagi korban bencana	10	539.570.000	10	505.030.000	100,00	93,60	50	2.663.310.000	100,00	98,72	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota												
Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan serah terima rumah korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten/kota	10	83.340.000	10	51.945.000	100,00	62,33	50	385.305.000	100,00	92,47	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha												
Pembangunan Rumah Baru layak huni	Terlaksananya pembangunan rumah tidak lyak huni	115	6.185.956.633	115	6.078.398.100	100,00	98,26	575	30.822.224.632	100,00	99,65	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kerja sama Perbaikan rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	10	516.940.000	10	383.114.365	100,00	74,11	50	2.450.874.365	100,00	94,82	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pendataan dan Verifiksi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	6	124.495.000	6	101.255.000	100,00	81,33	30	599.235.000	100,00	96,27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya perbaikan rumah tidak lyak huni	53	191.898.000	53	162.512.200	100,00	84,69	265	930.104.200	98,88	96,94	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH												
Penceghan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota												
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya perbaikan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha	12	1.050.204.000	12	944.365.800	100,00	89,92	265	5.145.181.800	100,00	97,98	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan												
Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	370	865.606.725	370	750.470.100	100,00	86,70	1850	4.212.897.000	100,00	97,34	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	22.757.500	4	20.984.100	100,00	92,21	4,00	20.984.100	80,00	92,21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	26	2.918.166.423	26	2.702.131.226	100,00	92,60	200,00	14.317.210.426	160,00	95,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	84	1.383.339.000	84	1.362.144.525	100,00	98,47	728,00	7.335.121.720	158,26	97,80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	4	9.985.000	4	5.051.500	100,00	50,59	45,60	62.453.663	91,20	83,27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	93	71.445.400	93	65.104.700	100,00	91,13	178,35	587.491.737	178,35	78,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	2	19.998.700	2	15.469.800	100,00	77,35	47,50	92.191.977	95,00	92,19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	1	19.995.000	1	12.050.000	100,00	60,27	26,40	47.050.000	105,60	94,10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15	165.832.000	15	163.934.880	100,00	98,86	75,20	868.398.924	100,27	86,84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	12	72.800.000	12	48.909.367	100,00	67,18	84,00	318.909.367	70,00	70,87	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	2	54.905.000	2	54.615.430	100,00	99,47	8,00	219.615.430	80,00	79,86	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional	14	226.455.000	7	123.646.113	50,00	54,60	37,00	288.646.113	74,00	27,49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	4	30.300.000	4	18.905.000	100,00	62,39	34,00	183.905.000	68,00	73,56	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1	49.972.000	1	49.960.750	100,00	99,98	1,00	49.960.750	25,00	99,98	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	31	3.281.080.408	31	3.099.300.364	100,00	94,46	62	6.184.452.438	100,00	97,14	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji	211	4.611.847.000	211	4.531.053.000	100,00	98,25	1854	47.697.373.100	100,00	99,83	Satpol PP dan Damkar

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	pegawai kontrak											
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	7	7.997.450	1	6.659.850	14,29	83,27	21	26.610.125	77,78	95,21	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya isi ulang gas dan peralatan rumah tangga, Kursi, Meja, Laptop,Printer dan Alat Studio	7	98.530.000	7	88.375.000	100,00	89,69	73	170.189.828	100,00	94,37	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	70	66.044.500	59	63.406.273	84,29	96,01	706	1.239.149.823	98,47	99,79	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12	35.899.600	6	35.698.300	50,00	99,44	202	253.574.450	97,12	99,92	Satpol PP dan Damkar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15	150.396.000	13	150.061.636	86,67	99,78	127	1.447.351.636	98,45	99,98	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	3	25.800.000	2	7.191.728	66,67	27,87	6	827.962.328	85,71	97,80	Satpol PP dan Damkar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas dan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	14	235.860.000	12	191.794.000	85,71	81,32	62	2.221.234.000	96,88	98,05	Satpol PP dan Damkar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional	14	14.000.000	2	8.360.000	14,29	59,71	56	210.514.900	82,35	97,39	Satpol PP dan Damkar
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1	14.880.000	1	14.655.000	100,00	98,49	3	1.022.415.000	100,00	99,98	Satpol PP dan Damkar
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	10	174.713.800	4	122.780.400	40,00	70,28	225	2.420.662.170	97,40	97,90	Satpol PP dan Damkar

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan												
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tentram dan tertib	10	89.637.000	3	89.481.800	30,00	99,83	3	89.481.800	30,00	99,83	Satpol PP dan Damkar
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota												
Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen Renkon Tsunami dan Banjir, KRB dan RPB	1	237.439.400	1	218.941.561	100,00	92,21	1,00	218.941.561	33,33	92,21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan radio, repeater dan dokumen informasi kebencanaan	12	451.110.000	10	427.303.430	83,33	94,72	12,00	577.303.430	300,00	230,92	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penanganan Pasca Bencana	Terlaksananya penanganan pasca bencana	12	137.610.000	6	18.140.000	50,00	13,18	6,00	18.140.000	50,00	13,18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	1	50.273.000	1	18.819.400	100,00	37,43	1,00	18.819.400	100,00	11,48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana												
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya pelayanan penanganan bencana penyakit/ keracunan makanan	10	138.250.000	10	95.058.450	100,00	68,76	55,00	1.145.058.450	73,33	65,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10	340.674.000	10	307.625.350	100,00	90,30	11,00	557.625.350	366,67	111,53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya distribusi logistik korban bencana	10	144.493.600	4	96.340.700	40,00	66,67	64,00	546.340.700	64,00	72,85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	1	21.243.850.141	1	13.165.820.911	100,00	61,97	2,00	13.215.820.911	100,00	62,06	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	15	100.007.900	4	97.957.000	26,67	97,95	73	2.104.916.700	86,90	99,90	Satpol PP dan Damkar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terlaksananya Kegiatan pengadaan peralatan pemadam kebakaran	3	301.493.000	3	298.155.900	100,00	98,89	6	1.698.155.900	100,00	99,80	Satpol PP dan Damkar
Investigasi Kejadian Kebakaran												
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengujian penyebab kebakaran	2	98.288.000	2	88.438.800	100,00	89,98	121	753.824.300	100,00	98,71	Satpol PP dan Damkar
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		1	97.511.000	1	95.911.000	100,00	98,36	1	95.911.000	100,00	98,36	Satpol PP dan Damkar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
Administrasi keuangan perangkat daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarakan	31	3.169.039.022	31	3.035.528.546	100,00	95,79	155	15.711.684.634	100,00	99,16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya Honorarium PNS dan Pegawai Kontrak	37	647.782.000	36	641.182.000	97,30	98,98	236	2.855.072.536	57,84	194,72	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Administrasi umum perangkat daerah												
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan	9	3.994.100	9	3.994.100	100,00	100,00	38	20.545.150	76,00	27,39	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	10	137.310.599	10	134.664.319	100,00	98,07	10	134.664.319	100,00	26,36	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah dan jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan, jumlah Pertemuan/ rapat yang diadakan	62	72.132.300	62	71.819.920	100,00	99,57	310	360.349.120	100,00	99,91	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang dibutuhkan	2	17.877.800	2	17.877.800	100,00	100,00	1010	83.813.800	3607,14	48,70	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilakukan / Dihadiri	30	149.617.000	30	149.013.094	100,00	99,60	132	631.057.700	100,00	36,88	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	24	53.950.000	24	45.810.341	100,00	84,91	102	276.807.516	1020,00	60,86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah												
Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan layak jalan	6	33.002.000	6	30.979.800	100,00	93,87	44	91.721.350	29,73	67,24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	3	198.048.524	3	197.530.753	100,00	99,74	3	671.128.136	150,00	366,74	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	18		17		94,44		32		213,33		
Program pemberdayaan sosial												
Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)												
Fasilitasi pemberdayaan sosial KAT	Fasilitasi dalam pemetaan lokasi dan pembangunan rumah KAT	50	143.312.300	37	107.889.268	74,00	75,28	175	401.058.168	31,93	36,63	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/ kota												
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial Masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	Terbinanya pekerja sosial masyarakat	43	46.928.000	43	45.892.300	100,00	97,79	43	45.892.300	28,86	19,56	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah TKSK yang terbina	12	77.554.500	12	50.554.392	100,00	65,19	12	50.554.392	120,00	56,17	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga	Jumlah PSKS keluarga yang dibina	5515	49.295.500	5515	44.007.300	100,00	89,27	6647	313.580.352	21,74	20,23	Dinas Sosial, Pemberdayaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
kewenangan kabupaten/kota												Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah pengurus dan pengelola LK3 yang terbina	40	20.470.000	40	18.300.000	100,00	89,40	64	74.863.400	142,22	29,95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Rehabilitasi Sosial												
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat												
Penyediaan permakanan	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan permakanan	900	653.122.300	900	652.524.400	100,00	99,91	900	652.524.400	64,29	37,29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang terlantar sampai ketempat tujuan	4	26.564.000	4	23.459.045	100,00	88,31	4	23.459.045	3,33	0,87	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian layanan Rujukan	Jumlah Anak Putus Sekolah Yang dirujuk ke PSBR	27	120.437.000	27	109.924.300	100,00	91,27	77	445.098.600	154,00	51,72	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program perlindungan dan jaminan sosial												
Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota												
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Penerima Bantuan	6	346.517.560	6	326.453.200	100,00	94,21	30	614.768.700	100,00	45,44	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terlakasanaya pemberian PKH	93	374.167.000	93	361.642.344	100,00	96,65	193	850.827.444	48,25	54,89	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	162	66.000.000	162	66.000.000	100,00	100,00	810	330.000.000	100,00	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program penanganan bencana												
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	7942	258.887.400	7942	256.949.732	100,00	99,25	9730	352.467.332	1621,67	47,34	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana kab/kota												
Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Anggota Tagana Rescue Yang di Latih	20	38.913.000	20	37.941.700	100,00	97,50	20	37.941.700	20,00	3,53	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja											
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan											
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya pendidkan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaterkompetensi	3	282.366.800	1	267.667.400	33,33	94,79	6	945.886.650	66,67	55,83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Tersediannya struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	46	286.835.350	40	134.331.808	86,96	46,83	90	196.576.958	0,00	11,60	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan												
Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota												
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kab/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	2	35.061.700	2	31.440.000	100,00	89,67	2	31.440.000	20,00	3,59	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG dan termasuk PPRG	2	44.099.880	2	39.497.900	100,00	89,56	20	69.826.200	47,62	69,83	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk nPPRG	Terlaksananya sosialisasi PUG termasuk PPRG di OPD terkait	2	49.966.000	2	46.072.600	100,00	92,21	3	56.076.600	25,00	56,08	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial,dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota												
Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2	49.995.000	2	47.116.900	100,00	94,24	2	147.106.900	16,67	117,69	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota												
Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten yang ditingkatkan kapasitasnya	3	797.275.000	3	572.398.775	100,00	71,79	3	572.398.775	10,71	68,14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan												
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota												
Avokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenagan kab/kota	Jumlah workshop kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten	2	49.999.800	2	48.976.800	100,00	97,95	2	48.976.800	100,00	12,24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota												
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten		2	49.999.800	2	48.509.622	100,00	97,02	2	48.509.622	14,29	13,86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layananperlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota												
Penigkatan kapsitas sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota		3	39.120.700	3	34.489.400	100,00	88,16	3	34.489.400	100,00	86,22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)												
Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
kabupaten/kota												
Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak dilaksanakan	3	120.072.800	3	113.770.300	100,00	94,75	4	135.299.600	400,00	90,20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota												
Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pertemuan forum anak	3	110.559.300	3	107.840.000	100,00	97,54	4	119.644.800	80,00	15,30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten /kota	Terlaksananya forum temu anak	2	49.999.900	2	42.387.600	100,00	84,78	3	51.041.401	21,43	5,67	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program perlindungan khusus anak												
Kegiata pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota												
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan tehadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan	5	108.659.800	5	104.772.400	100,00	96,42	49	505.349.600	272,22	202,14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota												
Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan unit layanan pengaduan masyarakat bagi anak	1	50.000.000	1	44.904.900	100,00	89,81	2	76.084.307	200,00	93,72	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan sinkronisasasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindunan khusus kewenangan kab/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten	4	130.947.900	4	130.094.467	100,00	99,35	4	130.094.467	2,86	10,58	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
khusus tingkat daerah kabupaten/kota												
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah pelatihan dan workshop peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tindkat daerah kabupaten	2	49.999.900	2	45.576.800	100,00	91,15	2	45.576.800	14,29	8,14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	7	2.605.050	7	2.605.050	100,00	100,00	25	11.251.650	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	21	100.543.360	21	100.372.280	100,00	99,83	110	367.757.160	100,00	137,54	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, peserta rapat dan tamu	12		12		100,00		60		100,00		
	jumlah dan jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	13		13		100,00		26		200,00		
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11		11		100,00		22		200,00		
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	13	5.554.700	13	5.540.000	100,00	99,74	52	37.614.700	100,00	99,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan/surat kabar	6	19.995.000	6	13.800.000	100,00	69,02	26	74.330.000	100,00	92,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi	36	192.360.000	36	192.301.964	100,00	99,97	108	760.119.115	100,00	99,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	2	50.000.000	2	30.622.623	100,00	61,25	9	237.022.623	100,00	92,44	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	20	1.057.874.400	20	1.039.953.144	100,00	98,31	62	5.308.950.604	1,00	124,36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Terbayarnya honorarium Non PNS dan PNS	53		53		100,00		270		1,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perizinan kendaraan	16	19.470.000	16	16.312.700	100,00	83,78	33	34.792.700	100,00	91,68	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	16	183.660.200	16	183.659.919	100,00	100,00	118	389.149.919	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1	19.620.000	1	19.620.000	100,00	100,00	10	56.520.000	1,00	153,17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5		5		100,00		22		1,00		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												
Koordinasi Sinskronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkugan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air Udara dan Laut	Jumlah wilayah koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan terhadap media,tanah,air, udara dan laut	10	74.217.280	10	50.591.000	100,00	68,17	10	56.744.000	100,00	70,60	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	1	267.442.200	1	260.066.455	100,00	97,24	2	744.734.955	100,00	99,02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota												
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah bibit yang tersedia	5000	2.188.852.000	5000	1.809.521.904	100,00	82,67	5350	9.088.898.404	100,00	95,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda	110	106.631.000	110	98.736.800	100,00	92,60	375	1.911.560.720	100,00	99,59	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH												
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dak Hak MHA yang terkait dengan PPLH												
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	5	77.755.000	5	64.211.450	100,00	82,58	10	364.693.430	100,00	96,42	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH	1	157.239.500	1	151.430.500	100,00	96,31	1	151.430.500	100,00	96,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
Pengelolaan Sampah												
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang tersedia	50	194.212.250	50	193.795.750	100,00	99,79	99	1.644.927.550	100,00	99,97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	oprasional penanganan persampahan	24		24		100,00		48		200,00		
	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang tersedia	8		8		100,00		16		200,00		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi dan gotong royong	10	92.179.800	10	80.105.800	100,00	86,90	10	80.105.800	100,00	86,90	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang tersedia	22	1.041.286.780	22	945.465.072	100,00	90,80	44	2.208.308.372	200,00	95,84	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	penyediaan sarana dan prasarana persampahan	12		12		100,00		24		200,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota												
Administrasi keuangan perangkat daerah												
penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	terbayarnya gj pegawai kontrak dan honor pegawai ASN	56	4.034.423.315	56	2.334.129.526	100,00	57,86	68	3.550.071.526	77,27	225,65	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terlaksananya komponen listrik atau sarana penerangan	7	7.483.600	7	5.341.700	100,00	71,38	9	13.091.700	450,00	168,93	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	3	145.883.708	3	145.883.708	100,00	100,00	3	145.883.708	42,86	97,26	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
penyediaan bahan logistik kantor	terlasaksananya atk dan makan minum pegawai	45	94.175.400	45	94.175.400	100,00	100,00	48	319.175.400	1600,00	91,19	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya cetak dan penggandaan	3	26.240.000	3	26.240.000	100,00	100,00	11	73.140.000	110,00	155,95	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2	14.400.000	2	14.160.000	100,00	98,33	4	23.760.000	44,44	247,50	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi antar skpd	12	397.036.644	12	121.491.800	100,00	30,60	24	307.451.800	66,67	165,33	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah												
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening air dan listrik	2	43.800.000	2	41.800.000	100,00	95,43	5	165.400.000	250,00	140,65	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terlaksananya alat kebersihan kantor	17	14.816.000	17	14.815.100	100,00	99,99	29	58.644.100	181,25	133,80	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	6	43.260.000	6	23.461.750	100,00	54,23	13	75.061.750	118,18	115,66	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program pendaftaran penduduk												
Pelayanan pendaftaran penduduk												
peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	12000	782.814.241	12000	642.432.800	100,00	82,07	60000	2.442.432.800	100,00	97,70	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program pencatatan sipil												
Pelayanan pencatatan sipil												
peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	terlaksananya pelayanan pencattan sipil	7	519.214.864	7	445.339.100	100,00	85,77	14	947.620.350	200,00	37,90	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penyelenggaraan pencatatan sipil												
komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	tersedianya komunikasi dan informasi kepada masyarakat	2	640.279.900	2	403.368.430	100,00	63,00	3	423.368.430	300,00	846,74	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan												
Penyusunan Profil Kependudukan												
penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	tersedianya buku profile	100	25.000.000	100	19.980.000	100,00	79,92	100	19.980.000	100,00	79,92	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	34	3.373.037.956	34	3.071.894.318	100,00	91,07	70	12.467.995.563	145,83	93,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Terbayarnya honorarium PNS dan Pegawai Kontrak	129	1.652.788.000	129	1.642.014.736	100,00	99,35	165	6.060.805.099	343,75	95,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan logistik kantor	12	64.997.900	12	59.893.000	100,00	92,15	48	243.495.580	100,00	97,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan bacaan dan per-Undang-undangan	10	34.277.300	10	32.499.100	100,00	94,81	50	169.608.300	100,00	98,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan bacaan peraturan dan PerUndang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan per-Undang-undangan	12	4.500.000	7	2.400.000	58,33	53,33	19	14.400.000	79,17	87,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya bahan bacaan dan per-Undang-undangan	15	160.429.000	15	160.371.257	100,00	99,96	75	802.087.257	100,00	99,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Listrik dan Internet	12	26.400.000	6	21.480.811	50,00	81,37	42	133.575.279	87,50	69,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	24.990.500	12	23.039.400	100,00	92,19	48	116.944.400	100,00	91,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional yang Layak Pakai	4	15.000.000	4	3.000.000	100,00	20,00	37	72.047.800	84,09	66,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah kelembagaan yang diberdayakan											
Penyelenggaraan Penataan Desa												
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Presentase desa yang ditata	43	96.867.000	43	94.164.700	100,00	97,21	215	481.632.700	100,00	99,44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa adat yang difasilitasi	5	8.256.000	5	8.149.300	100,00	98,71	25	41.173.300	100,00	99,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kelembagaan yang diberdayakan											
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		43	52.309.000	43	50.800.800	100,00	97,12	215	260.036.800	100,00	99,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		43	88.695.000	43	66.193.900	100,00	74,63	215	420.973.900	100,00	94,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		43	114.720.600	43	95.857.700	100,00	83,56	215	554.740.100	100,00	96,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Keluarga Berencana
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		43	60.976.000	43	60.576.000	100,00	99,34	215	304.480.000	100,00	99,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		43	63.406.100	43	60.600.800	100,00	95,58	215	314.225.200	100,00	99,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		20	91.800.000	20	91.305.900	100,00	99,46	100	458.505.900	100,00	99,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		43	91.700.000	43	63.082.824	100,00	68,79	215	429.882.824	100,00	93,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		43	108.332.500	43	106.383.500	100,00	98,20	215	539.713.500	100,00	99,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		10	485.943.500	10	479.141.152	100,00	98,60	50	2.422.915.152	100,00	99,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kelembagaan yang diberdayakan											
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya kegiatan PKK	6	352.809.400	6	351.517.016	100,00	99,63	38	2.892.044.417	100,00	99,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kelembagaan yang diberdayakan											
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		20	1.762.400	20	1.500.000	100,00	85,11	100	8.549.600	100,00	97,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		20	147.279.800	20	95.686.800	100,00	64,97	100	684.806.000	100,00	92,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah kelembagaan yang diberdayakan											
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal												
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya rapat koordinasi rakorcam	10	4.375.000	10	4.325.000	100,00	98,86	10	4.325.000	100,00	98,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya rapat koordinasi rakorcam	10	25.000.000	10	25.000.000	100,00	100,00	10	25.000.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Keluarga Berencana
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya rapat koordinasi rakorcam	10	74.978.000	10	69.838.000	100,00	93,14	10	69.838.000	100,00	93,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya balai KB	10	471.187.500	5	266.848.200	50,00	56,63	17	566.073.200	70,83	54,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah program KKBPK yang dikendalikan	10	39.970.000	10	28.825.000	100,00	72,12	10	28.825.000	100,00	72,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)												
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Meningkatnya kapasitas PKB/PLKB	43	206.352.500	11	41.719.848	25,58	20,22	11	41.719.848	110,00	20,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota												
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah alokon yang didistribusikan	10	4.500.000	10	4.500.000	100,00	100,00	10	4.500.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		10	164.556.033	10	152.156.033	100,00	92,46	10	152.156.033	100,00	92,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	10	84.222.474	10	71.442.834	100,00	84,83	10	71.442.834	100,00	84,83	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terfasilitasinya Pelatihan Tenaga Pelayanan KB	10	84.222.474	1	2.974.500	10,00	3,53	1	2.974.500	10,00	3,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB												
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		1	426.230.000	0	162.918.100	0,00	38,22	0	162.918.100	0,00	38,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah kelembagaan yang diberdayakan											
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terbayarnya honorarium PPKBD dan Sub PPKBD	10	600.000.100	10	437.166.780	100,00	72,86	10	437.166.780	100,00	72,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terbayarnya honorarium PPKBD dan Sub PPKBD	10	459.650.000	0	4.325.000	0,00	0,94	0	4.325.000	0,00	0,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	fungsi perangkat daerah											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Penyusunana Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan renja renstra, terlaksnanya forum OPD	3	30.000.000	3	29.967.000	100,00	99,89	3	29.967.000	100,00	128,26	Dinas Perhubungan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan											
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium dan Vakasi Non PNS, tersedianya honorarium pengelola keuangan	167	4.980.665.424	167	4.980.665.424	100,00	100,00	835	24.903.327.120	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang yang disediakan											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36	49.994.750	36	48.017.400	100,00	96,04	180	247.996.400	100,00	99,21	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	15.680.000	8	15.000.000	100,00	95,66	32	62.040.000	100,00	98,92	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	30	10.897.794	30	10.897.794	100,00	100,00	150	54.488.970	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	53	121.749.594	53	121.749.594	100,00	100,00	246	294.145.994	121,78	340,94	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	24	32.856.000	7	23.558.656	29,17	71,70	957	131.021.556	33,80	86,04	Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	64.810.000	3	64.671.606	100,00	99,79	15	323.911.606	42,86	99,96	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	10	23.250.000	3	23.250.000	30,00	100,00	11	76.250.000	52,38	112,13	Dinas Perhubungan
Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	24	243.286.000	8	243.146.023	33,33	99,94	47	1.160.536.023	43,12	80,58	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik	6	133.600.000	5	113.589.745	83,33	85,02	24	876.922.945	53,33	55,06	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum											
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor	17	1.108.997.911	2	109.966.100	11,76	9,92	14	2.327.961.922	93,33	69,97	Dinas Perhubungan
Peyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas	16	11.500.000	0	2.220.000	0,00	19,30	33	48.220.000	58,93	83,86	Dinas Perhubungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	8	49.999.000	3	47.025.000	37,50	94,05	19	147.023.000	118,75	147,03	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
Identifikasi Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah angkutan untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) 3 unit daerah kabupaten/kota	80	50.000.000	30	49.892.000	37,50	99,78	80	99.892.000	26,14	6,13	Dinas Perhubungan
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan											
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten	1	49.999.500	1	49.899.500	100,00	99,80	3	149.898.500	150,00	149,90	Dinas Perhubungan
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenagan Kabupaten / Kota	Jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten	2	55.685.000	1	52.165.000	50,00	93,68	5	219.220.000	125,00	131,23	Dinas Perhubungan
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisa tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan											
Analisa Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kanupaten/Kota	Tersedia Dokumen Kajian Tarif	1	126.534.000	1	126.534.000	100,00	100,00	2	226.534.000	25,00	89,52	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAAN PELAYARAN	TERJAGANYA DAN TERKENDALINYA KEAMANAN LALU LINTAS DARAT											
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasiaan untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan	12	8.316.631.500	12	7.662.269.779	100,00	92,13	36	40.928.795.779	120,00	98,43	Dinas Perhubungan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen tarif kelas ekonomi											
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tarif Kelas Ekonomi	1	152.700.000	1	131.445.200	100,00	86,08	2	138.822.900	33,33	22,97	Dinas Perhubungan
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Pelabuhan Yang Disusun											
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1	170.229.800	0	58.213.770	0,00	34,20	0	58.213.770	0,00	34,20	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Tugas Pokokm dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	24.895.500	4	24.428.000	100,00	98,12	4	24.428.000	100,00	116,60	Kominfo
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan											
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor PA,PPTK,PPK dan pegawai kontrak	41	924.164.000	41	813.185.599	100,00	87,99	95	5.094.974.700	35,19	72,06	Kominfo
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatanya Pelayanan Administrasi Umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	3.366.000	12	3.366.000	100,00	100,00	24	71.314.700	40,00	95,09	Kominfo
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5	79.988.100	5	79.403.100	100,00	99,27	62	370.271.900	21,75	81,26	Kominfo

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	4	14.662.250	4	12.252.250	100,00	83,56	15	49.653.850	27,27	97,26	Kominfo
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2	9.997.500	2	2.400.000	100,00	24,01	4	295.050.000	40,00	22,70	Kominfo
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat- rapat koordinasi keluar daerah	30	323.685.000	30	293.839.016	100,00	90,78	55	1.108.045.387	45,83	61,56	Kominfo
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemngadaan Barang Milik Daerah											
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang Diadakan	3	31.749.900	3	31.383.900	100,00	0,00	10	91.234.600	20,00	15,21	Kominfo
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	4	30.680.000	4	30.672.200	100,00	99,97	12	382.981.900	24,00	15,32	Kominfo
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening listrik,internet	3	130.000.000	3	81.276.347	100,00	62,52	9	1.517.861.998	30,00	35,36	Kominfo
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional kantor Sebanyak 1 unit kendaraan roda 4 dan roda 2	1	50.900.000	1	46.345.800	100,00	91,05	2	3.101.987.845	28,57	1240,80	Kominfo
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	1	99.996.000	1	99.910.000	100,00	99,91	2	449.397.000	100,00	29,96	Kominfo
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kepuasaan Masyarakat terhadap Media Informasi											
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemeintah Daerah											
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Yang Tersedia	6	294.791.543	6	238.705.400	100,00	80,97	6	1.574.628.107	60,00	89,98	Kominfo
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Forum KIM	3	422.099.800	3	351.087.300	100,00	83,18	3	361.079.800	12,00	90,27	Kominfo
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi yang diadakan	2	619.019.204	2	607.398.890	100,00	98,12	2	607.398.890	20,00	98,19	Kominfo
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPBE											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Yang Dikelola											
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah Daerah	Tersedinya Sistem Jaringan Internet Satu Pintu	26	3.255.380.000	26	3.130.534.700	100,00	96,16	52	9.800.115.294	200,00	65,33	Kominfo
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tata Kelola E-Government											
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan BTS dan Akses Internet	12	595.265.800	12	567.689.000	100,00	95,37	37	1.577.524.148	30,83	105,17	Kominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Terbayarnya 'Gaji Dan Tunjangan ASN	22	2.608.826.719	22	2.349.556.389	100,00	90,06	110	13.068.985.357	100,00	97,53	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayranya Gaji dan Vakasi Pegawai Non ASN	21	472.230.000	21	458.893.333	100,00	97,18	105	2.936.589.333	100,00	94,82	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Tersedianya 'Komponen Instalasi Listrik	50	9.000.000	50	9.000.000	100,00	100,00	250	45.000.000	100,00	100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya 'Bahan Logistik Kantor	30	109.043.200	30	104.380.990	100,00	95,72	150	504.380.990	100,00	100,88	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan	20	24.003.600	20	23.990.400	100,00	99,95	65	407.990.400	100,00	85,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	4	20.000.000	4	11.000.000	100,00	55,00	20	75.000.000	100,00	93,75	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	186.312.900	14	185.957.267	100,00	99,81	70	665.957.267	100,00	110,99	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor											
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya 'Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	40	52.800.000	40	32.084.366	100,00	60,77	200	256.084.366	100,00	91,46	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40	43.200.000	40	37.579.327	100,00	86,99	200	617.579.327	100,00	85,18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum											
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan	1	100.000.000	1	98.077.544	100,00	98,08	2	98.077.544	200,00	98,08	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Jasa Administrasi Umum											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	1	107.099.500	1	105.039.150	100,00	98,08	2	105.039.150	200,00	105,04	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN												
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota												
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopmpetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	2	478.525.300	2	430.772.061	100,00	90,02	4	430.772.061	200,00	90,02	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota												
Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Standarisasi usaha koperasi	2	365.254.500	2	227.382.710	100,00	62,25	2	227.382.710	100,00	141,82	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pendataan Potensi Usaha Mikro	40	97.180.000	40	95.314.100	100,00	98,08	40	95.314.100	100,00	98,08	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	50	200.000.000	50	177.079.800	100,00	88,54	50	177.079.800	100,00	88,54	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan Kelembegaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro	50	400.000.000	50	338.944.518	100,00	84,74	50	338.944.518	100,00	84,74	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi usaha mikro	250	100.000.000	250	71.582.300	100,00	71,58	250	71.582.300	100,00	71,58	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Terfasilitasinya usaha mikro menjadi usaha kecil	40	625.274.000	40	509.164.191	100,00	81,43	40	509.164.191	100,00	67,42	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					0				0			
Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksaanaan tugas poko dan fungsi perangkat daerah											
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perangkat daerah											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	4	29.990.000	4	29.360.000	0,00	97,90	4	29.360.000	100,00	97,87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	25	2.519.161.949	25	2.254.170.779	100,00	89,48	105	8.960.284.164	98,13	83,31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium aparatur DPMPTSP (honor PNS dan Pegawai Kontrak)	45	593.954.980	32	591.762.484	71,11	99,63	204	2.904.940.017	91,07	94,74	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatanya Pelayanan Administrasi Umum											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10	11.997.950	10	11.946.700	100,00	99,57	34	29.990.450	66,67	46,20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	10	28.025.000	10	28.025.000	100,00	100,00	61	116.047.950	96,83	101,74	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya ATK dan makanan dan minumam	38	146.277.900	38	145.523.244	100,00	99,48	215	600.252.989	93,48	96,73	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		46		43		93,48		227		97,84		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	6	19.995.000	6	9.050.000	100,00	45,26	22	12.350.000	73,33	32,93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30	198.398.000	30	198.388.005	100,00	99,99	150	842.156.523	85,71	67,37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda											
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, Air dan Internet	36	139.950.000	36	81.994.641	100,00	58,59	180	764.267.364	100,00	79,13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	30	59.999.700	30	59.994.200	100,00	99,99	155	247.913.400	88,57	96,12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah					0							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Terpenuhinya Peralatan Kantor	3	29.507.058	3	29.507.058	100,00	100,00	3	29.507.058	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah					0							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	10	74.997.000	10	68.518.200	100,00	91,36	50	272.636.221	100,00	77,90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Satu Pintu
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	20	19.960.000	20	19.960.000	100,00	100,00	61	92.261.618	98,39	89,37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan/Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	31.680.000	0	0	0,00	0,00	5	997.274.808	83,33	94,43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasaranan pendunkung kantor atau bangunan lainnya	Perlengkapan Kantor yang dipelihara	15	14.760.000	15	14.710.000	100,00	99,66	54	59.799.900	72,00	39,87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persepsi kemudahan berinvestasi											
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunya dokumen RUPM Kep. Mentawai								0			
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunya dokumen RUPM Kep. Mentawai	10	500.000.000	10	401.999.208	100,00	80,40	10	401.999.208	100,00	53,60	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rata-rata pengurusan izin investasi											
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Periizinan dan non Perizinan								0			
Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Periizinan dan non Perizinan kemasyarakat secara elektronik	4	149.998.000	4	146.636.800	100,00	97,76	12	339.842.200	50,00	39,20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
Pembinaan dan PengembanganOlahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet											Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet	5	85.546.250	5	85.546.250	100,00	100,00	10	171.092.500	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan											
Peberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota				0								
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dana Organisasi Kepemudaan	4	139.660.288	4	139.660.288	100,00	100,00	11	384.065.792	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	terbentunya tim ahli cagar budaya tingkat kabupaten	5	148.169.748	5	142.564.990	100,00	96,22	5	142.564.990	100,00	95,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terbinanya SDM, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2	136.195.000	2	135.733.300	100,00	99,66	2	135.733.300	100,00	98,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Terdaftarnya cagar budaya	10	116.762.844	10	114.615.500	100,00	98,16	10	114.615.500	100,00	98,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya kesenian tradisional	4	124.134.760	4	121.702.600	100,00	98,04	4	121.702.600	40,00	98,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Menjadi pedoman penyusunan kerja perangkat daerah											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya forum OPD dan tersusunnya program dan	3	23.210.000	3	23.160.000	100,00	99,78	3	23.160.000	75,00	77,20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan renja murni dan renja perubahan											
AADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Administrasi Keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	22	2.579.879.921	21	2.202.534.835	95,45	85,37	43	4.665.934.233	61,43	36,17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50	527.405.730	37	527.405.730	74,00	100,00	84	1.083.063.597	120,00	42,62	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersediannya Administrasi Perkantoran											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Kebutuhan Komponen instalasi listrik Kantor	20	9.990.550	11	9.990.550	55,00	100,00	23	17.369.100	31,94	41,82	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	32	50.999.510	32	50.944.510	100,00	99,89	60	97.973.110	61,22	39,88	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Tersediannya makanan dan minuman rapat, harian pegawai dan tamu	15		15		100,00		30		43,48		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan	13	16.498.000	13	16.498.000	100,00	100,00	22	32.553.700	39,29	17,17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar derah	36	152.936.000	36	195.073.958	100,00	127,55	72	355.522.608	100,00	31,49	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersediannya layanan administrasi umum											
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	379.999.800	1	378.324.311	100,00	99,56	1	378.324.311	100,00	99,56	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersediannya layanan administrasi umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa kmunikasi sumber daya air dan listrik	3	12.000.000	3	4.409.650	100,00	36,75	5	5.888.045	15,63	1,75	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersediannya layanan administrasi umum											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya pemeliharaan mobil jabatan	1	35.000.000	1	25.575.944	100,00	73,07	2	63.336.194	100,00	63,34	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	10	45.000.000	10	38.677.400	100,00	85,95	19	59.968.550	172,73	59,97	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	15	4.880.000	15	4.880.000	100,00	100,00	21	9.030.000	75,00	11,58	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun											
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terkelolanya perpustakaan tingkat daerah											
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang melaksankan inovasi dan fasilitasi didalam pengembangan perpustakaan daerah	20	211.731.370	20	198.239.834	100,00	93,63	25	252.594.834	250,00	36,08	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan yang melaksankan inovasi dan fasilitasi didalam pengembangan perpustakaan daerah	5	125.778.400	5	125.778.400	100,00	100,00	10	180.133.400	100,00	25,73	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku											
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten											
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya pembinaan / penataan serta pengawasan tata kelola kearsipan pada OPD/Desa	15	166.810.000	15	164.853.200	100,00	98,83	18	221.044.200	43,90	27,47	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten											
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya pembinaan / penataan serta pengawasan tata kelola kearsipan pada OPD/Desa	2	74.999.800	2	69.906.200	100,00	93,21	5	126.097.200	125,00	21,02	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten											
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan / penataan serta pengawasan tata kelola kearsipan pada OPD/Desa	100	128.659.200	100	128.659.200	100,00	100,00	104	184.850.200	104,00	25,80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1	15.476.000	1	15.400.600	100,00	99,51	5	153.102.600	100,00	15,38	Dinas Perikanan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)	14	3.994.416.732	14	3.699.712.294	100,00	92,62	69	13.702.679.042	100,00	65,56	Dinas Perikanan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Tenaga Kontrak	12	1.233.763.500	12	1.214.585.217	100,00	98,45	60	5.344.539.211	100,00	44,17	Dinas Perikanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningatnya Pelayananan Operasional Perkantoran											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat Listrik (jenis)	5	20.778.000	5	20.450.000	100,00	98,42	17	37.950.000	113,33	39,63	Dinas Perikanan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	meubeliur kantor (unit)	10	54.600.000	8	54.600.000	80,00	100,00	8	54.600.000	160,00	58,24	Dinas Perikanan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	logistik kantor (jenis)	30	79.390.450	30	79.295.000	100,00	99,88	174	571.173.467	92,06	35,84	Dinas Perikanan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan kantor (jenis)	5	31.820.000	5	31.095.000	100,00	97,72	29	96.832.900	72,50	36,82	Dinas Perikanan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (jenis)	12	19.995.000	12	19.800.000	100,00	99,02	60	132.283.000	100,00	33,17	Dinas Perikanan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (kali)	40	227.808.000	40	225.576.538	100,00	99,02	128	1.011.365.579	66,67	37,67	Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi peningkatan layanan operasional perkantoran											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik dan air (rekening)	12	330.000.000	12	313.390.297	100,00	94,97	60	1.288.699.357	100,00	67,89	Dinas Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (unit)	17	96.000.000	17	95.660.000	100,00	99,65	95	408.915.021	65,97	21,98	Dinas Perikanan
Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	4	386.270.000	4	385.086.625	100,00	99,69	7	395.086.625	77,78	41,37	Dinas Perikanan
Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (jenis)	3	56.981.424	3	56.541.800	100,00	99,23	108	232.200.800	61,71	144,22	Dinas Perikanan
Program Pengolahan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap											
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok Nelayan (jumlah)	28	9.195.332.627	28	9.077.833.878	100,00	98,72	28	9.077.833.878	100,00	62,60	Dinas Perikanan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)												
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	terkelolanya pasar ikan dan pabrik es (unit)	2	120.614.600	2	119.276.800	100,00	98,89	6	119.276.800	46,15	0,42	Dinas Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya											
Pemberdayaan Pembudidaya ikan Kecil												
pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	jumlah UPR yang terfasilitasi (UPR)	2	90.004.000	2	87.990.900	100,00	97,76	6	87.990.900	9,09	0,48	Dinas Perikanan
Pengelolaan Pembudidayaan ikan												
Penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam 1(satu) daerah kabupaten /kota	Jumlah prasarana pembudidaya ikan yang tersedia (jenis)	3	965.999.888	3	875.923.150	100,00	90,68	43	875.923.150	41,75	13,60	Dinas Perikanan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya benih ikan kerapu (ekor)	50000	494.976.963	50000	479.353.892	100,00	96,84	50010	1.889.653.483	384692,31	16,23	Dinas Perikanan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Perikanan											
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasill perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil												
Penyediaam Data dan Informasi Usuha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	tersedianya data informasi usaha perikanan (dokumen)	1	44.399.900	1	44.122.400	100,00	99,37	1	44.122.400	100,00	3,27	Dinas Perikanan
Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil												
Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Pelatihan Kelompok Pengolahan	12	833.950.800	12	830.993.203	100,00	99,65	60	1.049.405.303	100,00	77,73	Dinas Perikanan
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota												
Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota	Target konsumsi (kg/tahun)	53	125.655.000	50	124.104.978	94,34	98,77	50	124.104.978	94,34	0,99	Dinas Perikanan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terbayarnya honoraium Aparatur PNS dan Non PNS											
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH												
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		50	31.395.300	50	31.395.300	100,00	100,00	129	80.999.874	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan		6	8.940.000	6	8.940.000	100,00	100,00	24	35.760.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Belanja Jasa Tenaga Administrasi		28	45.999.996	28	45.999.996	100,00	100,00	140	229.999.980	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		90	120.681.810	90	120.681.810	100,00	100,00	440	589.999.960	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Belanja Jasa Tenaga Keamanan		84	15.960.000	84	15.960.000	100,00	100,00	420	79.800.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Belanja Jasa Tenaga Supir		5	5.500.000	5	5.500.000	100,00	100,00	20	22.000.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH												
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		2	40.000.000	2	40.000.000	100,00	100,00	5	100.000.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		7550	7.489.600	7550	7.486.368	100,00	99,96	37746	37.440.800	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH												
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		530	3.975.000	530	3.975.000	100,00	100,00	2666	19.995.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	1	31.500.000	1	31.500.000	100,00	100,00	2	63.000.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya layanan operasional perkantoran											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		25	33.240.650	25	33.240.650	100,00	100,00	107	142.269.982	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Kunjungan Wisata											
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1	928.624.694	1	928.624.694	100,00	100,00	5	4.643.123.470	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1	271.753.000	1	271.753.000	100,00	100,00	2	351.753.000	200,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1	90.328.000	1	90.328.000	100,00	100,00	2	190.328.000	200,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		4	33.644.500	4	33.644.500	100,00	100,00	12	100.933.500	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Kapasitas SDM											
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		2	90.097.500	2	90.097.500	100,00	100,00	4	180.195.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		2	249.998.500	2	249.998.500	100,00	100,00	4	499.997.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	140	12.894.498	140	12.894.496	100,00	100,00	380	34.999.348	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah ATK yang tersedia	303	6.352.395	303	5.805.920	100,00	91,40	1515	31.215.500	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah Kertas dan Cocer	4	199.600	4	199.600	100,00	100,00	9	449.100	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah Benda Pos	100	1.000.000	100	1.000.000	100,00	100,00	300	3.000.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah perabot kantor	96	2.355.840	96	2.355.840	100,00	100,00	196	4.809.840	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah Makan Minum Harian Pegawai	100	2.750.000	100	2.750.000	100,00	100,00	500	13.750.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	Jumlah peralatan kebersihan kantor	110	1.650.000	110	1.650.000	100,00	100,00	300	4.500.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningatnya koordinasi kepariwisataan dan olah raga	30	12.385.530	30	12.385.530	100,00	100,00	101	41.697.951	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5	51.900.000	5	51.900.000	100,00	100,00	10	103.800.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Paajak Kendaraan Dinas yang dibayarkan	1	31.500.000	1	31.500.000	100,00	100,00	2	63.000.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Perkantoran terlaksananya kegiatan administrasi keuangan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Perkantoran terlaksananya kegiatan administrasi keuangan											
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kelancaran administrasi perkantoran lancarnya adinistrasi perkantoran											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Meningkatnya kesejateraan aparatur	89	7.324.137.970	80	4.381.193.279	89,89	59,82	420	32.813.034.093	98,82	91,15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kesejateraan aparatur	107	2.653.390.249	107	2.435.272.953	100,00	91,78	535	13.925.273.953	100,00	96,04	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya administrasi perkantoran	14	64.800.000	9	46.827.000	64,29	72,26	21	676.827.000	140,00	96,69	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaaan Bahan Logistik Kantor	Tersedinaya Alat Tulis Kantor	17	35.870.000	17	30.370.000	100,00	84,67	168	263.312.000	988,24	97,95	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Penyediaan Makan dan minum	40	30.737.000	39	30.021.800	97,50	97,67	75	145.801.095	166,67	99,51	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	6	45.540.000	6	25.899.600	100,00	56,87	42	88.399.600	93,33	35,36	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	meningkatnya impormasi/wawasan ASN	1	19.950.000	1	14.400.000	100,00	72,18	10	1.491.542.096	100,00	80,78	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan singronisasi program dan kegiatan antar kab./propinsi dan pemerintah pusat	33	275.929.000	33	275.929.000	100,00	100,00	133	791.604.800	110,83	158,32	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	lancarnya administrasi perkantoran											
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	lancarnya administrasi perkantoran	12	114.500.000	12	68.152.963	100,00	59,52	24	503.495.847	40,00	71,93	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	lancarnya administrasi perkantoran	6	68.720.000	6	67.810.000	100,00	98,68	12	136.530.000	200,00	198,68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAEARAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	lancarnya administrasi perkantoran											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terkelolanya aset kendaraan dinas operasional	7	61.680.000	7	49.045.500	100,00	79,52	67	480.569.500	95,71	96,11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya AC	7	17.241.400	7	15.392.250	100,00	89,27	22	35.392.250	146,67	176,96	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	1	46.624.000	1	46.623.599	100,00	100,00	9	82.623.599	60,00	82,62	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase tngkat pengawasan											
PENGAWASAN PENGGUNA SARANA PERTANIAN	tersedianya sarana pertanian											
Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	tersedianya sarana pertanian	60	2.056.240.650	60	1.702.426.404	100,00	82,79	67	8.813.018.004	670,00	97,92	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAINNYA	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak											
Pengadaan benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	tersedianya bibit benih sapi,kerbau,itik dan ayam	50	1.168.556.000	50	160.759.200	100,00	13,76	270	7.256.893.400	103,85	80,63	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	tersedianya pakan ternak	2	67.545.000	2	58.766.200	100,00	87,00	3	21.564.896.780	100,00	84,32	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prasarana yang dibangun											
PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	panjang irigasi yang terbangun											
Penyusutan Peta Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B	Tersedianya Dokumen LP2B	1	578.254.900	1	476.238.400	100,00	82,36	1	476.238.400	50,00	33,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun	131	210.166.850	131	207.678.850	100,00	98,82	1011	7.690.078.850	91,91	90,66	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terlaksananya perhutanan sosial											
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	Peningkatan Produkai Tanaman Perkebunan	4	134.416.000	4	75.440.000	100,00	56,12	19	3.695.440.000	95,00	408,34	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan penyuluh											
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian												
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		50	200.000.000	50	37.728.300	100,00	18,86	200	837.728.300	80,00	83,77	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan												
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terfasilitasinya pertumbuhan usaha perdagangan	20	41.600.000	20	33.272.500	100,00	79,98	20	33.272.500	100,00	79,98	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terfasilitasinya Distribusi Perdagangan	1	125.520.000	1	114.662.499	100,00	91,35	1	114.662.499	100,00	90,97	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota												
Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terpantaunya Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	5	143.990.000	5	107.260.400	100,00	74,49	25	400.520.400	100,00	109,26	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan												
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	10	185.885.320	10	134.276.000	100,00	72,24	10	134.276.000	100,00	55,08	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Terawasinya Metrologi Legal	500	60.775.000	400	39.684.500	80,00	65,30	400	39.684.500	80,00	45,37	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI												
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri												
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	10	137.203.000	10	91.414.924	100,00	66,63	10	91.414.924	100,00	56,35	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Meningkatnya Informasi Perdagangan	1	48.495.400	1	39.583.400	100,00	81,62	1	39.583.400	100,00	121,81	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota												
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunya Rencana Pembangunan Industri	10	257.762.200	10	193.125.400	100,00	74,92	10	193.125.400	100,00	82,89	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan peran serta masyarakat	Terlaksanya Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri	13	1.280.514.500	13	1.114.902.415	100,00	87,07	13	1.114.902.415	100,00	77,99	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA												
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah												
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronikPerizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terfasilitasinya Perizinan pasar secara elektronik	10	59.640.000	10	40.702.200	100,00	68,25	10	40.702.200	100,00	45,55	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Aparatur SETDA yang dibayar honorariumnya	12	4.833.558.500	12	4.656.488.803	100,00	96,34	803	25.395.716.570	120,57	52,12	Sekretariat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia	39	280.393.500	39	277.429.710	100,00	98,94	102	1.106.937.640	23,72	66,18	Sekretariat Daerah
	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, peserta rapat dan tamu yang tersedia	12	574.000.000	12	573.808.966	100,00	99,97	72	2.501.301.209	54,55	55,49	Sekretariat Daerah
	jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	30	602.300.500	30	601.872.238	100,00	99,93	120	1.190.484.188	76,92	72,70	Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	13	259.140.000	13	208.507.077	100,00	80,46	70	982.319.357	16,06	45,07	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu Sekretariat Daerah	12	526.272.400	12	513.230.200	100,00	97,52	71	2.175.025.749	43,56	45,04	Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Kabag,	12	1.478.410.000	12	1.477.242.561	100,00	99,92	340	37.374.554.627	40,00	306,09	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kasubag dan Staf											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1	804.850.000	1	728.622.930	100,00	90,53	1	728.622.930	100,00	90,53	Sekretariat Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	31	941.322.987	28	929.985.189	90,32	98,80	60	1.874.958.674	65,22	50,47	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon seluler, listrik, air, indovision dan internet yang terbayar	5	425.500.000	5	363.799.684	100,00	85,50	46	2.487.736.540	328,57	185,59	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala	6	471.328.000	6	459.955.923	100,00	97,59	36	1.908.167.500	31,03	24,30	Sekretariat Daerah
	Jumlah terlaksananya pengurusan STNK KIR kendaraan Dinas/Operasional	10	28.251.800	3	21.316.400	30,00	75,45	64	191.976.000	116,36	96,51	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan bermotor apung terpelihara secara rutin/berkala	10	1.698.000.000	5	1.696.662.692	50,00	99,92	20	11.872.675.724	400,00	69,71	Sekretariat Daerah
	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2,3 dana 4 yang terpelihara secara rutin/berkala	27	5.356.974.750	27	5.352.761.294	100,00	99,92	145	9.275.863.736	73,23	59,43	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4	1.782.717.500	4	1.764.089.312	100,00	98,96	34	4.023.430.804	29,31	117,62	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor, Jabatan/Dinas yang terpelihara	12	242.570.000	3	241.682.910	25,00	99,63	119	1.088.695.510	43,12	62,31	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	2	478.564.444	2	359.595.305	100,00	75,14	10	2.184.868.113	100,00	77,95	Sekretariat Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan	28	141.500.000	28	141.348.000	100,00	99,89	114	548.480.729	109,62	51,00	Sekretariat Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
dan Wakil Kepala Daerah	KDH/WKDH tersedia											
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional KDH/WKDH	1	2.095.524.000	1	2.063.006.487	100,00	98,45	2	10.272.466.340	200,00	40,11	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah												
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah tersedia kebutuhan rumhatangga KDH tersedia	90	474.128.300	90	471.695.655	100,00	99,49	487	2.371.935.755	115,13	36,40	Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah tersedia kebutuhan rumahtangga WKDH tersedia	74	148.667.000	74	148.660.100	100,00	100,00	227	1.886.986.950	65,23	42,35	Sekretariat Daerah
Penataan Organisasi												
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perbup tentang Anjab, ABK dan Evjab	3	312.000.000	3	228.942.454	100,00	73,38	42	694.211.771	116,67	347,11	Sekretariat Daerah
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penetapan perjanjian kinerja	3	84.000.000	2	79.563.727	66,67	94,72	6	348.988.107	100,00	25,66	Sekretariat Daerah
Peningkatan Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1	66.000.000	1	13.306.027	100,00	20,16	1	13.306.027	100,00	20,16	Sekretariat Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Indeks kepuasan masyarakat	1	78.000.000	1	74.444.200	100,00	95,44	2	254.702.324	200,00	127,35	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja mPemerintah Daerah	Penyusunan Dokumen PK,IKU,Renja,Renaksi,Lakip	36	60.000.000	1	9.933.481	2,78	16,56	1	9.933.481	2,78	16,56	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan												
Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya kegiatan penerimaan tamu daerah	24	534.797.000	24	511.722.450	100,00	95,69	45	990.112.346	75,00	30,34	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya komunikasi pimpinan	24	196.668.923	12	193.816.398	50,00	98,55	115	3.946.796.796	127,78	34,22	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Liputan kegiatan pimpinan daerah	24	298.372.678	22	292.326.922	91,67	97,97	131	1.370.124.922	98,50	99,56	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												
Administrasi Tata Pemerintahan												
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya peningkatan administrasi pemerintahan	2	274.999.470	2	208.226.152	100,00	75,72	6	259.826.652	100,00	79,56	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi dalam proses penataan desa	42	282.319.800	42	254.221.311	100,00	90,05	110	817.498.370	100,00	96,68	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Melaksanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	4	231.540.000	4	218.097.701	100,00	94,19	10	842.034.511	50,00	51,03	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah terselenggaranya pembinaan dan seleksi UKS di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai	10	154.685.900	10	143.192.300	100,00	92,57	21	371.855.700	210,00	97,00	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah mahasiswa penerimaan pembiayaan pendidikan Tugas Belajar Non PNS	342	4.654.279.800	321	4.638.277.660	93,86	99,66	1529	26.517.023.345	110,00	204,92	Sekretariat Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum												
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah berupa Perda, Perbup dan keputusan yang difasilitasi	10	215.970.500	9	213.957.600	90,00	99,07	638	858.285.950	319,00	214,57	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus terselesaikan	8	457.410.000	6	436.701.530	75,00	95,47	28	1.605.858.680	44,44	32,12	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum daerah yang dapat diakses oleh masyarakat	12	356.091.500	12	345.814.800	100,00	97,11	755	830.019.850	419,44	553,35	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerjasama Daerah												
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kerjasama dengan BPN dalam Sertifikasi tanah Pemerintah Daerah	100	2.342.955.000	100	2.305.379.662	100,00	98,40	148	3.349.777.562	986,67	744,40	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian												
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	8	396.000.845	4	296.969.548	50,00	74,99	4	296.969.548	50,00	74,99	Sekretariat Daerah
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		6	104.599.400	2	56.734.100	33,33	54,24	2	56.734.100	33,33	54,24	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan												
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	1	199.999.400	1	197.287.200	100,00	98,64	5	1.162.462.050	83,33	24,81	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	1	259.816.726	1	255.884.900	100,00	98,49	2	527.774.800	100,00	99,26	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembanguan	1	113.347.500	1	110.982.320	100,00	97,91	25	565.373.220	34,72	21,33	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan barang - barang jasa pemerintah yang dikelola	300	520.851.700	136	481.649.329	45,33	92,47	833	2.547.617.345	35,87	20,55	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masuk dalam layanan LPSE	400	529.425.850	136	491.080.161	34,00	92,76	904	3.620.990.367	38,93	19,14	Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	80	138.688.000	20	132.110.849	25,00	95,26	88	712.656.287	44,00	156,63	Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam												
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersedianya data energi, sumber daya alam dan air	1	89.642.000	1	51.290.734	100,00	57,22	2	113.892.234	200,00	181,93	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi perangkat daerah											
Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	meningkartnya pelayanan administrasi perkantoran	88	1.282.541.882	88	1.282.541.882	100,00	100,00	402	7.580.980.803	100,50	92,77	Sekreteriat DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi perangkat daerah											
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	3	30.870.900	3	30.778.725	100,00	99,70	21	200.371.010	87,50	75,08	Sekreteriat DPRD
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	3	432.481.224	3	432.481.224	100,00	100,00	18	1.592.657.414	81,82	125,16	Sekreteriat DPRD
Penyedia Bahan logistik Kantor	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	15	405.837.130	15	405.837.130	100,00	100,00	79	1.566.013.320	97,53	65,93	Sekreteriat DPRD
Penyedia Barang Catakkan dan Penggadaan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	10	122.346.171	10	122.346.171	100,00	100,00	49	598.701.671	98,00	96,57	Sekreteriat DPRD
Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1	172.435.000	1	172.435.000	100,00	100,00	9	530.631.000	81,82	116,65	Sekreteriat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	6	402.488.500	6	402.488.500	100,00	100,00	20	2.306.204.651	100,00	94,22	Sekreteriat DPRD
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	meningkatnya sarana pendukung pelaksanaan tugas											
Pengadaan Mebel	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1	212.500.000	1	199.200.000	100,00	93,74	7	383.210.000	77,78	32,37	Sekreteriat DPRD
Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	terpeliharanya barang milik daerah											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyedia Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	3	369.000.000	3	110.263.440	100,00	29,88	16	621.653.213	94,12	47,98	Sekreteriat DPRD
Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	terpeliharanya barang milik daerah											
Penyedia Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	22	443.900.000	22	351.479.673	100,00	79,18	103	741.109.976	111,96	56,84	Sekreteriat DPRD
Pemeliharaan / Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1	499.488.000	1	18.140.000	100,00	3,63	4	310.564.000	100,00	29,75	Sekreteriat DPRD
Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD											
Penyelengaraan Administrasi Keuangan DPRD	meningkatnyalayanan administrasi da kesejateraan DPRD	20	9.881.553.650	20	8.955.782.135	100,00	90,63	100	42.959.962.942	100,00	115,17	Sekreteriat DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Meningkatnya disiplin pimpinan dan anggota DPRD	144	140.680.000	144	139.852.000	100,00	99,41	720	896.428.000	720,00	97,37	Sekreteriat DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD											
Fasilitasi fraksi DPRD	meningkatnya pengelolaan administrasi DPRD	1	246.450.000	1	9.477.997	100,00	3,85	2	23.252.997	16,67	26,05	Sekreteriat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat fraksi baleg dan paripurna											
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukanperda dan peraturan DPRD											
Penyusunan dam Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	adanya dokumen ranperda yang di bahas oleh DPRD	1	808.188.000	1	256.656.300	100,00	31,76	2	651.906.800	100,00	53,57	Sekreteriat DPRD
Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	adanya dokumen ranperda yang di bahas oleh DPRD	18	1.131.818.000	18	906.976.113	100,00	80,13	55	5.640.010.413	83,33	95,68	Sekreteriat DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	adanya hasil kajian ranperda yang di bahas oleh DPRD	1	560.254.000	1	239.930.800	100,00	42,83	2	377.821.800	100,00	156,02	Sekreteriat DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Naskah Akademik	tersusunannya dokumen dan draf Ranperda	1	48.000.000	1	39.000.000	100,00	81,25	2	78.000.000	100,00	76,75	Sekreteriat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran											
Pembahasan KUA dan PPAS	adanya dokumen KUA dan PPAS yang di sepakati	1	35.927.000	1	14.489.500	100,00	40,33	2	54.728.200	100,00	55,62	Sekreteriat DPRD
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	adanya dokumen KUA dan PPAS yang di sepakati	1	36.919.000	1	18.267.000	100,00	49,48	1	18.267.000	100,00	49,48	Sekreteriat DPRD
Pembahasan APBD	adanya dokumen pembahasanAPBD yang di	1	289.106.000	1	218.347.537	100,00	75,53	2	634.421.392	100,00	84,98	Sekreteriat DPRD

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	sepakati											
Pembahasan APBD Perubahan	adanya dokumen pembahasanAPBD yang di sepakati	1	290.061.000	0	185.226.000	0,00	63,86	0	185.226.000	0,00	63,86	Sekreteriat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	adanya dokumen pembahasan pertanggungjawaban APBD	1	224.907.000	1	143.981.000	100,00	64,02	2	161.694.500	100,00	270,78	Sekreteriat DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	meningkatnya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan											
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	meningkatnya pengawasan urusan bidang pemerinthan dan hukum	4	605.859.700	4	605.859.700	100,00	100,00	17	908.140.600	80,95	68,73	Sekreteriat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	meningkatnya pengawasan urusan bidang pemerinthan dan hukum	4	449.106.584	4	449.106.584	100,00	100,00	4	449.106.584	26,67	59,88	Sekreteriat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	meningkatnya pengawasan urusan bidang kesejahteraan Rakyat	4	734.981.100	4	734.981.100	100,00	100,00	9	1.156.234.551	75,00	90,21	Sekreteriat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	meningkatnya pengawasan urusan bidang Perekonomian	4	770.498.870	4	770.498.870	100,00	100,00	10	1.335.106.686	83,33	94,06	Sekreteriat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumbner daya Alam	meningkatnya pengawasan urusan bidang sumber daya alam	4	677.767.992	4	677.767.992	100,00	100,00	6	1.250.140.792	50,00	93,94	Sekreteriat DPRD
Pengawasan Penggunaan Anggaran	meningkatnya pengawasan urusan bidang anggaran	3	235.760.000	3	220.566.000	100,00	93,56	6	231.502.000	100,00	408,82	Sekreteriat DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur											
Pendalaman Tugas DPRD	Meningkatnya Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	6	1.918.469.000	6	1.581.086.616	100,00	82,41	30	10.901.651.376	100,00	80,08	Sekreteriat DPRD
Publikasi dan dan Dokumentasi Dewan	Tersampainya informasi dari DPRD ke Masyarakat	6	360.000.000	6	244.412.500	100,00	67,89	24	806.002.500	100,00	84,34	Sekreteriat DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	adanya kelompok pakar dan Tim Ahli	3	180.000.000	3	110.000.000	100,00	61,11	5	135.000.000	55,56	51,92	Sekreteriat DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli fraksi	Adanya tenaga ahli fraksi	4	240.000.000	4	240.000.000	100,00	100,00	8	435.000.000	100,00	83,65	Sekreteriat DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyrakat	Terserapnya aspirasi Masyarakat											
Kunjungan Kerja dalam daerah	Terhimpunnya aspirasi Masyarakat melalui monev	6	1.917.684.000	6	1.917.684.000	100,00	100,00	33	22.017.827.000	97,06	94,89	Sekreteriat DPRD
Pelaksanaan Reses	Terhimpunnya aspirasi Masyarakat melalui Reses	3	3.314.430.000	3	2.991.105.000	100,00	90,24	14	13.378.145.000	100,00	96,32	Sekreteriat DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode Etik											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan kode Etik DPRD	Acuan standar dalam pelaksanaan dan pengawasan DPRD	3	241.551.800	3	241.551.800	100,00	100,00	6	657.659.680	100,00	117,17	Sekreteriat DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD											
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi alat kelengkapan DPRD	6	3.127.903.862	6	3.127.903.862	100,00	100,00	30	16.565.738.562	100,00	92,57	Sekreteriat DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan kinerja DPRD	1	25.185.000	1	2.533.964	100,00	10,06	2	5.601.464	100,00	11,16	Sekreteriat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
PERENCANAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	27	3.383.377.947	27	3.362.660.478	100,00	99,39	135	22.049.968.268	100,00	117,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Pengelolaan Adminnistrasi Perkantoran	27	75.816.000	27	75.816.000	100,00	100,00	135	541.896.000	100,00	116,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pkok da Fungsi Perangkat Daerah											
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka Tugas dan Fungsi	Teredianya Layanan Admiistrasi Kepegawaian	72	202.341.000	72	197.059.040	100,00	97,39	72	324.064.040	100,00	255,16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Operasional Kantor											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Listrik yang dibutuhkan	12	38.814.000	12	38.814.000	100,00	100,00	26	142.724.000	65,00	137,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kaantor	12	219.529.200	6	219.318.880	50,00	99,90	21	2.721.989.680	20,19	99,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tersedianya ATK	5		3		60,00		105		98,13		
	Tersedianya Makan Minum Kantor	24		12		50,00		60		83,33		
Penyedian Barang Cetak dan Penggandan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	6	88.495.000	6	88.495.000	100,00	100,00	12	1.202.248.000	33,33	107,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan/surat kabar yang dibutuhkan	6	20.250.000	2	20.250.000	33,33	100,00	7	238.642.500	17,50	109,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan/dihadiri	36	323.673.000	36	306.895.721	100,00	94,82	57	553.054.721	237,50	224,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			56.399.700									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3	56.399.700	3	41.997.000	100,00	74,46	3	98.396.700	100,00	174,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Operasional Kantor		379.549.000									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah	2	52.800.000	1	52.797.087	50,00	99,99	6	61.145.087	120,00	732,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas layak jalan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1	97.970.000	1	97.107.968	100,00	99,12	8	190.807.968	66,67	203,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	120.959.000	1	118.800.224	100,00	98,22	2	240.439.224	16,67	197,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan/rehabilirasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor	3	60.730.000	3	60.709.425	100,00	99,97	4	141.439.425	33,33	175,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lancarnya Operasional Kantor											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang di Bayarkan	3	284.100.000	2	283.946.007	66,67	99,95	5	595.816.523	27,78	18,83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sewa mesin Genset PLN yang dipakai	4		0		0,00		0		0,00		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaaga Honorer	19	416.032.000	19	310.684.000	100,00	74,68	19	310.684.000	20,00	71,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Terbayarnya Vakasi supir, jaga malam, sekretaris pribadi	5		5		100,00		5		20,00		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RENSTA OPD											
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pesentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD											
Pelasanaan Konsultasi Publik	Jumlah rapat/ koordinasi konsultasi Publik	2	343.093.000	2	304.004.300	100,00	88,61	10	502.954.300	100,00	252,80	Badan Perencanaan Pembangunan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Daerah
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang difasilitasi	10	338.599.600	10	338.305.383	100,00	99,91	20	601.296.483	83,33	14,18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah Musyawarah/Koordinasi Perencanaan yang dilakukan	3		3		100,00		15		100,00		
Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan RKPD yang tersedia	2	182.807.000	2	138.221.200	100,00	75,61	3	669.221.200	50,00	126,03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daearh BIdang Perencanaan Pembangunan Daerah	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah											
Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aparatur Perencana yang dilatih	20	260.642.848	3	216.661.000	15,00	83,13	23	216.661.000	115,00	201,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah Dokumen Data Statistik yang tersedia	4		2		50,00		6		150,00		
Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Aparatur yang dilatih tentang simpul jaringan	36	349.866.900	0	258.829.497	0,00	73,98	0	348.347.297	0,00	75,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	2		2		100,00		2		200,00		
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah											
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD	1	326.082.900	1	307.268.800	100,00	94,23	1	1.307.268.800	0,56	130,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung											
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023 dan Perubahan 2022	1	188.076.000	1	119.569.400	100,00	63,58	1	407.569.400	10,00	141,52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penyusunan Strategi Penanggulanagan Kemiskinan Daerah	1	562.113.800	1	467.291.641	100,00	83,13	31	555.609.635	62,00	289,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Rapat Koordinasi Bidan Pembangunan Manusia dan	12		9		75,00		57		95,00		

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosial Budaya											
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2023 dan Perubahan 2022	4	113.293.000	3	112.782.554	75,00	99,55	3	432.782.554	7,50	135,24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tersusunnya Dokumen Kerja Pemerintahan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1	109.743.900	1	109.011.159	100,00	99,33	1	269.011.159	10,00	168,13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratuktur dan Wilayahan	Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfratuktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kebinaragaan dan Perhubungan	10	107.418.000	10	106.376.843	100,00	99,03	10	256.376.843	50,00	170,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang keciptakaryaan	10	106.192.000	10	103.164.484	100,00	97,15	10	403.164.484	25,00	134,39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEUANGAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51	25.214.104.992	51	16.298.457.068	100,00	64,64	255	64.500.549.363	100,00	169,29	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3	1.788.520.000	3	1.742.488.732	100,00	97,43	15	8.388.348.621	100,00	69,72	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	84.721.700	1	79.535.500	100,00	93,88	5	290.816.850	100,00	92,07	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	568.719.900	1	442.746.434	100,00	77,85	5	1.854.877.474	100,00	126,29	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	1	99.060.000	1	98.966.847	100,00	99,91	5	370.575.987	100,00	97,40	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	disediakan											
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	15.997.500	1	14.200.000	100,00	88,76	5	105.740.000	100,00	59,94	Badan Keuangan Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasillitasi kunjungan tamu	1	41.726.000	1	913.000	100,00	2,19	5	913.000	100,00	0,88	Badan Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	591.790.000	1	558.479.096	100,00	94,37	5	2.251.534.399	100,00	91,90	Badan Keuangan Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	828.461.105	1	815.264.702	100,00	98,41	5	1.781.781.202	100,00	416,72	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2	836.156.000	2	644.329.923	100,00	77,06	10	3.051.602.468	100,00	67,10	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	277.897.000	3	205.705.870	100,00	74,02	15	484.710.070	100,00	24,92	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	187.310.000	2	177.190.000	100,00	94,60	10	850.622.355	100,00	119,53	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentsae OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik											
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	94.382.000	2	86.767.900	100,00	91,93	10	608.201.624	100,00	142,13	Badan Keuangan Daerah
Koordnasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2	80.094.000	2	70.561.818	100,00	88,10	10	543.031.858	100,00	133,53	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan	2	868.743.100	3	735.598.909	150,00	84,67	11	4.395.555.749	110,00	220,91	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD											
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	908.335.500	2	859.038.681	100,00	94,57	10	5.449.776.255	100,00	287,04	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	2	284.537.000	2	255.825.993	100,00	89,91	10	669.036.156	100,00	124,64	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	72	873.223.000	72	753.455.035	100,00	86,28	360	2.028.281.035	100,00	147,51	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlaah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	4	454.070.500	4	432.167.120	100,00	95,18	20	1.440.873.200	100,00	22,56	Badan Keuangan Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas	3	249.828.000	3	156.397.230	100,00	62,60	15	1.415.986.521	100,00	533,04	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3	182.977.860	3	161.645.650	100,00	88,34	15	1.144.398.978	100,00	404,69	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	292.576.500	12	287.696.866	100,00	98,33	60	1.621.541.450	100,00	294,84	Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan	9	214.408.500	9	178.943.535	100,00	83,46	45	1.420.990.049	100,00	277,55	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	atas SP2d dengan instansi terkait											
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	5	74.479.200	5	63.741.700	100,00	85,58	25	403.660.860	100,00	9,31	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	432	39.391.000	432	31.841.000	100,00	80,83	2160	196.832.275	100,00	155,74	Badan Keuangan Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	2	238.786.800	2	199.282.390	100,00	83,46	10	1.096.886.496	100,00	235,13	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2	286.211.000	2	248.944.253	100,00	86,98	10	2.339.824.032	100,00	229,66	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	242.373.500	1	235.193.500	100,00	97,04	5	448.130.400	50,00	11,24	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	75.596.400	2	11.342.900	100,00	15,00	10	558.120.900	100,00	129,98	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	72	389.855.500	72	183.973.650	100,00	47,19	360	834.109.650	100,00	80,07	Badan Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												
Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	11.492.249.499	1	8.454.845.622	100,00	73,57	5	250.485.883.298	100,00	96,56	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	1	103.742.224.461	1	97.350.498.291	100,00	93,84	5	512.319.396.135	100,00	98,77	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik											
Pengelolaan Barang Milik Daerah												
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	4	16.645.500	4	16.374.100	100,00	98,37	20	83.639.360	100,00	18,74	Badan Keuangan Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36	143.488.500	36	135.959.100	100,00	94,75	180	957.985.808	100,00	414,82	Badan Keuangan Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	126.161.500	10	115.136.000	100,00	91,26	50	390.218.060	100,00	162,52	Badan Keuangan Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30	215.706.500	30	211.887.000	100,00	98,23	150	1.276.071.761	100,00	35,86	Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	150.645.500	2	150.561.500	100,00	99,94	10	639.116.720	100,00	33,59	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	49.886.000	1	38.123.200	50,00	76,42	9	253.492.550	90,00	16,15	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total pendapatan											
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah												
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	208.959.000	1	170.042.000	100,00	81,38	5	412.361.100	100,00	206,15	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengendalian pajak daerah	4	133.400.000	4	101.090.500	100,00	75,78	20	1.397.814.052	100,00	698,91	Badan Keuangan Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	1	247.897.000	1	241.952.000	100,00	97,60	5	587.522.349	100,00	195,84	Badan Keuangan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1	136.948.500	1	124.171.000	100,00	90,67	5	709.641.476	100,00	354,83	Badan Keuangan Daerah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	1	379.194.500	1	209.447.700	100,00	55,23	5	716.206.800	100,00	238,74	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	4	838.527.500	4	829.976.490	100,00	98,98	20	2.885.659.213	100,00	267,95	Badan Keuangan Daerah
KEPEGAWAIAN												
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan Perkantoran											
Peneydiaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguan Kantor	Terwujudnya Ruang Kantor Yang Terang	6	19.973.350	6	16.751.350	100,00	83,87	30	18.396.350	45,45	15,96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum ASN	10	63.999.300	10	63.151.610	100,00	98,68	46	103.935.080	71,88	5,21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tersedianya alat tulis kantor	30		30		100,00		100		90,91		
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	20	18.204.700	15	18.204.700	75,00	100,00	60	30.054.700	90,91	4,38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pemahaman Apartur tentang peraturan perundang-undangan	6	19.995.000	5	14.400.000	83,33	72,02	29	20.600.000	46,77	11,40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Singkronisasi Informasi dan Pemahaman terhadap pelaksaan Kegiatan	25	259.454.030	25	259.454.030	100,00	100,00	105	380.819.329	92,11	22,02	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	12	250.000.000	12	79.545.518	100,00	31,82	36	123.937.152	54,55	7,90	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lancarnya Kegiatan Kantor	10	49.469.000	5	49.383.192	50,00	99,83	10	73.833.192	200,00	295,33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan JasaPemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	15	39.999.000	15	39.674.250	100,00	99,19	63	55.779.250	87,50	13,12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah												
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN												
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terpenuhinnya ASN sesuai dengan formasi jabatan dan analisis kebutuhan	160	436.437.128	160	436.437.128	100,00	100,00	510	635.116.643	85,00	35,28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinasi pelaksaan Administrasi Pemberhentian	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	120	71.659.100	120	69.224.900	100,00	96,60	200	98.875.200	200,00	10,75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Data Kepegawaian	Dapat digunakan untuk kenikan pangkat dan pengurusan pensiun	2500	42.763.900	2500	41.435.697	100,00	96,89	5050	78.962.290	144,29	10,74	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mutasi dan Promosi ASN			0									
Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SDM	50	978.635.408	50	978.635.408	100,00	100,00	125	2.157.677.625	138,89	46,95	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan karir asn	300	116.724.977	300	116.724.977	100,00	100,00	600	180.710.677	200,00	27,63	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kompetensi ASN												
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyratan dalam penyesuian ijazah dan pindah golongan ruang ASN	30	657.386.000	30	317.787.519	100,00	48,34	55	1.087.118.719	183,33	141,31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinasi dan kerjasama Pelaksanaan Dikalat	Terlaksananya Diklat Jabatan Struktural	200	2.373.285.300	200	2.154.399.797	100,00	90,78	200	2.154.399.797	57,14	122,79	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
Pembinaan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	10	69.999.500	10	62.862.600	100,00	89,80	10	62.862.600	66,67	12,99	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Sumber Daya Manusia
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia												
Pengembangan Kompetensi Teknis												
Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum,inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren,perangakat daerah penunjang, dan urusan pemerintah umum	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyratan dalam penyesuian ijazah dan pindah golongan ruang ASN	5	462.881.800	5	401.334.692	100,00	86,70	383	401.334.692	101,32	2,79	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan Inovasi yang di terapkan di Daerah											
Penelitian dan Pengembangnan Bidang Sosial dan Kependudukan												
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi di Bidang Pariwisata	1	221.942.700	1	216.839.900	100,00	97,70	1	500.195.100	100,00	176,53	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1	531.460.200	1	477.009.204	100,00	89,75	1	477.009.204	100,00	83,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah Dokumen Kajian	1		1		100,00		1		100,00		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Menjadi Pedonan dalam Pengembangan Pertanian Pangandan Kehutanan											
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Bidang Partanian dan Perikanan	1	263.153.300	1	246.679.200	100,00	93,74	2	544.850.000	100,00	182,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Bidang Insfratuktur Publik	1	288.039.300	1	288.028.900	100,00	100,00	1	633.122.700	20,00	183,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
INSPEKTORAT DAERAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	4	110.839.800	4	103.477.200	100,00	93,36	24	400.754.780	80,00	98,95	Inspektorat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibutuhkan	5	14.999.700	5	14.988.299	100,00	99,92	29	50.987.999	96,67	145,68	Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang dibutuhkan	15	146.997.700	15	146.973.030	100,00	99,98	75	908.970.730	100,00	88,68	Inspektorat
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	40		40		100,00		200		100,00		
	Jumlah pertemuan/rapat yang dilaksanakan	12		12		100,00		60		100,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6	69.999.900	6	67.554.200	100,00	96,51	30	287.554.100	100,00	143,78	Inspektorat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan	4	20.000.000	3	18.300.000	75,00	91,50	15	98.300.000	100,00	98,30	Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan/dihadiri	12	226.551.200	12	225.146.903	100,00	99,38	60	1.051.698.103	100,00	105,17	Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3	137.743.636	3	126.580.939	100,00	91,90	15	534.324.575	100,00	118,74	Inspektorat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan layak jalan	10	135.270.000	10	129.314.450	100,00	95,60	50	564.584.450	100,00	112,92	Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	3	50.000.000	3	49.953.000	100,00	99,91	15	219.953.000	100,00	109,98	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												
Penyelenggaraan Pengawasan Internal												
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	16	424.784.800	14	389.812.072	87,50	91,77	78	2.614.596.872	97,50	87,15	Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah lapran hasil pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10	379.441.000	10	361.578.400	100,00	95,29	50	2.541.019.400	100,00	84,70	Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Jenis reviu kinerja	12	468.650.000	12	464.130.000	100,00	99,04	60	2.432.780.000	100,00	97,31	Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu	37	107.376.100	37	106.735.000	100,00	99,40	185	664.111.100	100,00	88,55	Inspektorat
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	24	539.375.000	24	526.300.000	100,00	97,58	196	3.091.750.000	91,16	42,28	Inspektorat
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal	2	397.500.000	2	377.716.560	100,00	95,02	10	1.313.626.360	100,00	60,27	Inspektorat
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan TLHP	2	199.288.400	2	197.000.400	100,00	98,85	10	1.196.288.800	100,00	95,70	Inspektorat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penanganan Penyeesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan	2	78.699.000	2	56.045.800	100,00	71,22	2	56.045.800	100,00	61,58	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu												
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	18	531.175.600	18	456.916.000	100,00	86,02	66	2.399.276.600	110,00	152,67	Inspektorat
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan	5	59.302.100	5	56.501.000	100,00	95,28	25	265.803.100	100,00	106,32	Inspektorat
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan Bidang Fasilitasi Pengawasan	2	305.916.180	2	285.138.407	75,00	93,21	10	1.510.912.247	95,00	116,85	Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan dan pendampingan dan asistensi yang dilakukan	3	146.172.000	3	141.010.000	100,00	96,47	18	840.382.000	100,00	100,79	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah laporan pelaksanaan ZI '- Jumlah laporan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	1	86.953.500	1	86.946.100	100,00	99,99	2	159.363.100	100,00	79,68	Inspektorat
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah laporan klinik konsultasi 2. Jumlah laporan LHKASN 3. Jumlah laporan pelaksanaan LHKPN 4. Jumlah laporan renaksi KPK 5. Jumlah laporan UPG	5	257.789.000	5	194.582.200	100,00	75,48	25	677.575.340	100,00	36,99	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan dan penegakan Integritas	1	72.386.800	1	52.272.332	100,00	72,21	3	68.963.332	100,00	15,33	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN SIPORA UTARA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	23.385.000	6	23.275.000	100,00	99,53	30	105.175.000	100,00	102,74	Kecamatan Sipora Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Utara	14	1.764.320.025	14	1.499.847.364	100,00	85,01	70	8.248.864.648	100,00	92,66	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	12	500.348.000	12	477.046.095	100,00	95,34	68	2.308.570.095	97,14	101,91	Kecamatan Sipora Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	8	4.960.850	8	4.906.400	100,00	98,90	28	47.482.900	112,00	95,25	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang tersedia	1	7.500.650	1	7.450.000	100,00	99,32	5	68.670.000	100,00	91,55	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor,Jumlah makanan dan Minuman di Sediakan	591	81.406.800	462	81.325.140	78,17	99,90	2826	332.005.440	95,63	94,98	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah ATK yang tersedia	29	53.589.300	25	53.543.140	86,21	99,91	141	231.622.940	97,24	90,50	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Kantor yang Disediakan	559	15.372.500	434	15.372.500	77,64	100,00	2309	66.935.000	102,62	109,52	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah Natura dan Pakan Natura yang tersedia	3	12.445.000	3	12.409.500	100,00	99,71	15	33.447.500	100,00	102,92	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5	9.699.800	5	9.699.800	100,00	100,00	30	47.199.800	100,00	96,96	Kecamatan Sipora Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	175	68.062.000	175	67.480.000	100,00	99,14	810	322.480.000	95,29	88,68	Kecamatan Sipora Utara
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersesia	3	35.000.000	3	34.320.000	100,00	98,06	10	246.320.000	66,67	100,54	Kecamatan Sipora Utara
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	4	60.739.002	4	58.409.750	100,00	96,17	21	380.868.752	87,50	95,83	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Rekening listrik yang Dibayar	12	25.200.000	12	21.031.938	100,00	83,46	60	141.031.938	100,00	39,18	Kecamatan Sipora Utara
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Alat dan bahan Pembersih yang Tersedia	12	6.346.200	12	6.339.100	100,00	99,89	59	54.928.100	98,33	84,50	Kecamatan Sipora Utara
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya Administrasi Umum											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak,Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Transportasi yang dipelihara	6	23.500.000	5	22.490.000	83,33	95,70	41	148.240.000	91,11	102,23	Kecamatan Sipora Utara
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	2484	31.056.000	2484	31.056.000	100,00	100,00	12420	130.416.000	100,00	105,00	Kecamatan Sipora Utara
	Jumlah Alat transportasi yang diurus Perizinannya	6	4.000.000	1	1.515.000	16,67	37,88	36	15.765.000	72,00	48,51	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	2.190.000	4	2.165.000	100,00	98,86	32	36.615.000	80,00	91,54	Kecamatan Sipora Utara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	29.944.000	1	28.520.000	100,00	95,24	4	154.514.400	400,00	61,81	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Nonperizinan yang diurus	250	20.200.000	173	20.190.000	69,20	99,95	1173	155.615.000	93,84	103,61	Kecamatan Sipora Utara
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	200	35.000.000	135	34.810.000	67,50	99,46	885	178.077.655	88,50	101,76	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1	16.134.800	1	16.134.800	100,00	100,00	5	148.390.125	100,00	95,74	Kecamatan Sipora Utara
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Pkk Yang dilaksanakan	6	25.000.000	6	24.830.000	100,00	99,32	36	212.172.765	100,00	94,30	Kecamatan Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta	Terlaksananya HUT-RI	1	19.965.000	1	19.965.000	100,00	100,00	5	252.554.000	100,00	101,02	Kecamatan Sipora Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat											
PASILITAS REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	6	29.919.000	6	29.879.000	100,00	99,87	36	217.441.000	100,00	96,64	Kecamatan Sipora Utara
KECAMATAN SIPORA SELATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	70.370.000	11	70.260.000	91,67	99,84	23	172.800.000	191,67	168,52	Kec. Sipora Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Selatan	27	2.337.679.585	27	1.858.435.629	100,00	79,50	52	4.085.345.605	208,00	183,45	Kec. Sipora Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	45	510.138.000	39	381.170.000	86,67	74,72	79	1.053.791.000	197,50	156,67	Kec. Sipora Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	18	6.660.000	13	23.659.875	72,22	355,25	14	29.629.875	1400,00	496,31	Kec. Sipora Selatan
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1	17.500.000	1	16.999.875	100,00	97,14	1	16.999.875	100,00	97,14	Kec. Sipora Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	4	55.960.100	3	38.662.400	75,00	69,09	38	116.627.300	108,57	149,59	Kec. Sipora Selatan
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kntor-Perabot Kantor	1	16.088.300	1	12.092.700	100,00	75,16	1	12.092.700	100,00	75,16	Kec. Sipora Selatan
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1	900.000	1	900.000	100,00	100,00	1	900.000	100,00	100,00	Kec. Sipora Selatan
	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor yang	1	21.250.000	1	15.002.500	100,00	70,60	9	28.007.500	112,50	215,36	Kec. Sipora Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Disediakan											
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	26	112.181.000	15	69.450.000	57,69	61,91	41	139.150.000	157,69	199,64	Kec. Sipora Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	4	24.000.000	4	23.294.000	100,00	97,06	16	47.294.000	133,33	197,06	Kec. Sipora Selatan
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2	500.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kec. Sipora Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9	3.850.000	9	3.850.000	100,00	100,00	9	3.850.000	100,00	100,00	Kec. Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	7	41.422.900	0	0	0,00	0,00	750	63.437.696	100,00	100,00	Kec. Sipora Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	7	24.103.500	7	24.103.500	100,00	100,00	8	68.793.500	800,00	153,93	Kec. Sipora Selatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Kecamatan (PKK)	7	19.959.800	5	14.000.800	71,43	70,14	5	14.000.800	71,43	70,14	Kec. Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	Terlaksananya HUT-RI	1	102.375.000	1	11.762.500	100,00	11,49	2	24.440.000	200,00	192,78	Kec. Sipora Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan masyarakat											
Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Dokumen Keuangan Desa	7	73.683.500	6	67.693.500	85,71	91,87	6	67.693.500	85,71	91,87	Kec. Sipora Selatan
KECAMATAN PAGAI UTARA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	16	1.618.449.378	14	1.414.794.322	87,50	87,42	30	8.266.002.661	37,50	97,13	Kec. Pagai Utara
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19	554.112.000	10	552.187.000	52,63	99,65	29	4.527.214.500	30,53	101,12	Kec. Pagai Utara
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya penerangan dan aktifitas kantor	8	6.000.000	8	5.102.750	100,00	85,05	13	9.102.750	25,49	13,55	Kec. Pagai Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	51	37.588.400	37	37.435.900	72,55	99,59	45	45.165.900	60,81	18,99	Kec. Pagai Utara
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Pelayanan kantor Kecamatan Pagai	15	4.494.800	15	4.494.800	100,00	100,00	27	7.081.800	225,00	47,22	Kec. Pagai Utara
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi	24	78.522.000	10	73.983.000	41,67	94,22	55	130.543.000	52,38	8,88	Kec. Pagai Utara
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Barang Milik Daerah											
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40	24.330.000	40	23.610.000	100,00	97,04	40	23.610.000	1333,33	29,30	Kec. Pagai Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya asa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	4.870.000	3	3.550.000	50,00	72,90	3	3.550.000	50,00	72,90	Kec. Pagai Utara
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	7	14.500.000	4	14.402.000	57,14	99,32	12	66.352.000	10,53	20,42	Kec. Pagai Utara
Pemeliharaan Bangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	159.772.000	2	158.176.731	100,00	99,00	2	158.176.731	100,00	99,00	Kec. Pagai Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	19.874.000	1	16.114.000	100,00	81,08	2	65.724.000	33,33	13,07	Kec. Pagai Utara
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3	14.780.000	1	13.945.000	33,33	94,35	1	13.945.000	0,20	0,78	Kec. Pagai Utara
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terlaksananya Perayaan HUT RI	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	5	20.000.000	100,00	1,18	Kec. Pagai Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa											
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuanga desa dan pendayagunaan aset desa	3	17.950.000	3	17.880.000	100,00	99,61	7	87.880.000	29,17	17,79	Kec. Pagai Utara
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3	20.170.000	3	19.814.000	100,00	98,24	3	19.814.000	100,00	39,01	Kec. Pagai Utara
KECAMATAN SIKAKAP												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta tambahan penghasilan PNS	14	2.528.721.036	12	2.362.809.997	85,71	93,44	68	12.477.694.141	97,14	98,69	Kec. Sikakap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	367.452.000	12	364.348.000	100,00	99,16	60	1.834.156.000	100,00	99,83	Kec. Sikakap
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	5.698.000	12	5.693.600	100,00	99,92	60	28.485.600	100,00	99,98	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan belanja makan minum											
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	16	14.785.000	12	14.771.000	75,00	99,91	76	73.911.000	95,00	25,00	Kec. Sikakap
	Tersediannya Perabot Kantor	16	5.044.750	12	5.036.050	75,00	99,83	76	25.215.050	95,00	99,97	Kec. Sikakap
	Tersedianya Natura dan Pakan Natura	5	8.300.000	5	8.283.400	100,00	99,80	5	41.483.400	40,00	99,96	Kec. Sikakap
	tersedianya makan minum rapat	12	20.400.000	12	20.400.000	100,00	100,00	60	102.000.000	100,00	100,00	Kec. Sikakap

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	20	77.300.000	12	77.270.000	60,00	99,96	92	386.470.000	92,00	99,99	Kec. Sikakap
Pnyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening air dan listrik	12	33.000.000	9	21.680.875	75,00	65,70	57	153.680.875	95,00	93,14	Kec. Sikakap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	36.904.000	3	36.724.000	300,00	99,51	7	184.340.000	140,00	99,90	Kec. Sikakap
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terlaksananya Perayaan HUT RI	1	44.249.500	1	22.474.500	100,00	50,79	5	199.472.500	100,00	90,16	Kec. Sikakap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa											
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuanga desa dan pendayagunaan aset desa	3	19.650.000	3	19.020.000	100,00	96,79	15	97.620.000	100,00	99,36	Kec. Sikakap

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KECAMATAN PAGAI SELATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	4	68.038.000	4	66.850.000	100,00	98,25	20	450.317.500	100,00	49,04	Kec. Pagai Selatan
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.608.316.612	14	1.354.397.376	100,00	84,21	70	7.469.425.429	100,00	87,90	Kec. Pagai Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	603.183.000	12	603.125.000	100,00	99,99	60	3.108.781.662	100,00	83,54	Kec. Pagai Selatan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Lancarnya penerangan dan aktifitas kantor	4	492.250	4	492.250	100,00	100,00	44	14.921.250	97,78	30,33	Kec. Pagai Selatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pelayanan kantor Kecamatan Pagai Selatan	5	63.131.620	5	63.050.000	100,00	99,87	11	167.892.000	36,67	51,87	Kec. Pagai Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	20	11.200.600	20	11.200.600	100,00	100,00	101	102.505.900	37,97	34,01	Kec. Pagai Selatan
	Tersedianya Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17	7.281.100	17	7.261.100	100,00	99,73	65	106.848.604	108,33	44,43	Kec. Pagai Selatan
	Tersedianya Natura dan Pakan Natura	6	9.550.000	6	8.324.000	100,00	87,16	6	8.324.000	100,00	87,16	Kec. Pagai Selatan
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	12	8.500.000	12	8.287.500	100,00	97,50	32	52.696.000	53,33	20,61	Kec. Pagai Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	164.440.000	32	149.698.800	100,00	91,04	170	566.054.509	99,42	40,28	Kec. Pagai Selatan
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	4.800.000	12	2.351.000	100,00	48,98	60	97.462.000	100,00	23,10	Kec. Pagai Selatan
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	8	35.960.000	7	18.000.000	87,50	50,06	51	111.698.000	92,73	51,95	Kec. Pagai Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	16	12.210.000	16	12.210.000	100,00	100,00	27	28.120.000	23,68	8,65	Kec. Pagai Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	25.290.000	1	25.289.500	100,00	100,00	5	189.921.500	100,00	45,87	Kec. Pagai Selatan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4	28.322.000	4	27.837.000	100,00	98,29	8	48.513.000	40,00	15,07	Kec. Pagai Selatan
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terlaksananya Perayaan HUT RI	1	10.625.000	1	10.625.000	100,00	100,00	5	215.362.900	100,00	20,35	Kec. Pagai Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat											
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuanga desa dan pendayagunaan aset desa	4	149.220.000	4	133.017.500	100,00	89,14	20	411.334.000	100,00	101,31	Kec. Pagai Selatan
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah											
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	6	36.062.400	6	35.977.000	100,00	99,76	18	113.594.000	50,00	24,97	Kec. Siberut Barat Daya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan											
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Lancarnya Pengolahan Adm Keuangan Kec. Siberut Barat Daya	15	1.512.387.119	15	1.287.907.249	100,00	85,16	75	7.337.455.725	100,00	97,03	Kec. Siberut Barat Daya
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya honororium pelaksana kegiatan dan gaji pegawai kontrak	29	371.730.000	29	371.030.000	100,00	99,81	145	783.700.000	102,84	184,64	Kec. Siberut Barat Daya
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya penyedia instalasi Listrik Kantor	13	7.559.500	13	7.551.500	100,00	99,89	65	37.789.500	100,00	99,98	Kec. Siberut Barat Daya
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pengadaaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	9	36.920.409	9	36.920.409	100,00	100,00	45	184.602.045	100,00	100,00	Kec. Siberut Barat Daya
Penyedia Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jenis alat tulis	58	54.148.600	58	54.005.700	100,00	99,74	146	151.608.800	49,32	41,55	Kec. Siberut Barat Daya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	20	78.476.000	20	77.730.000	100,00	99,05	46	197.100.000	26,29	32,92	Kec. Siberut Barat Daya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	1	45.000.000	1	44.930.000	100,00	99,84	8	131.500.000	66,67	17,12	Kec. Siberut Barat Daya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	1	21.000.000	1	20.910.000	100,00	99,57	8	83.460.000	114,29	11,59	Kec. Siberut Barat Daya
Peemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor atau	1	34.968.000	1	34.921.000	100,00	99,87	8	111.482.000	800,00	96,85	Kec. Siberut Barat Daya

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
bangunanya lainya	bangunan											
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah penduduk yang terekam KTP-EL	3	29.999.000	3	29.429.000	100,00	98,10	12	100.498.000	0,71	102,65	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	1	23.965.000	1	23.911.000	100,00	99,77	8	89.462.000	133,33	25,81	Kec. Siberut Barat Daya
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi PKK	1	35.030.000	1	34.890.000	100,00	99,60	8	111.420.000	17,39	21,30	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap kebangsaaan dan Ketahanan Nasional											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam ranka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	terlaksananya Kegiatan HUT RI	1	33.604.000	1	33.515.000	100,00	99,74	8	108.670.000	7,41	12,00	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Kordinasi, Pembinaaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kordinasi Pemberdayaan Desa-Desa											
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kordinasi ke Desa Desa	9	29.997.000	3	29.820.000	33,33	99,41	39	158.382.000	36,11	17,50	Kec. Siberut Barat Daya

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KECAMATAN SIBERUT SELATAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah											
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4	58.620.000	4	58.465.000	100,00	99,74	68	220.455.000	85,00	99,93	Kec. Siberut Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	18	1.871.567.794	18	1.681.587.177	100,00	89,85	94	4.037.479.917	101,08	40,46	Kec. Siberut Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	18	503.370.000	18	500.870.000	100,00	99,50	142	2.517.302.000	92,81	99,44	Kec. Siberut Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	7.993.200	9	7.993.000	100,00	100,00	39	42.095.000	59,09	99,88	Kec. Siberut Selatan
Penyediaan Bnhan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	24	18.180.320	24	18.180.320	100,00	100,00	154	125.976.940	83,24	99,72	Kec. Siberut Selatan
	Tersedianya Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18	5.225.800	18	5.225.800	100,00	100,00	36	24.143.400	39,13	37,42	Kec. Siberut Selatan
	Tersedianya Natura dan Pakan-Natura	7	8.750.000	7	8.750.000	100,00	100,00	15	17.500.000	83,33	29,36	Kec. Siberut Selatan
	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	25.500.000	11	24.607.500	91,67	96,50	189	126.222.500	96,92	99,99	Kec. Siberut Selatan
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	5	7.000.000	5	6.530.000	100,00	93,29	34	28.902.000	91,89	98,40	Kec. Siberut Selatan
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	16	117.790.000	16	117.580.000	100,00	99,82	193	529.695.000	77,20	95,12	Kec. Siberut Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon dan listrik	12	13.700.000	12	12.000.000	100,00	87,59	60	62.000.000	100,00	96,27	Kec. Siberut Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum											
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	Terbayarkannya pajak dan STNK kendaraan dinas dan	4	42.100.000	3	40.440.000	75,71	96,06	35	181.780.000	87,57	97,46	Kec. Siberut Selatan

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas opersional											
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	27.377.089	1	27.377.089	100,00	100,00	3	49.081.864	100,00	70,72	Kec. Siberut Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya halaman gedung kantor	1	191.570.000	1	191.569.427	100,00	100,00	2	191.569.427	200,00	96,53	Kec. Siberut Selatan
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	500	26.460.000	200	25.560.000	40,00	96,60	1100	174.200.000	91,67	97,81	Kec. Siberut Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	5	107.000.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Selatan
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3	26.215.000	2	26.055.000	66,67	99,39	5	163.380.000	100,00	99,75	Kec. Siberut Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap kebangsaaan dan Ketahanan Nasional											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Meningkatnya pengetahuan kebinekaan	1	19.997.500	1	19.997.500	100,00	100,00	4	218.417.500	80,00	59,29	Kec. Siberut Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Kordinasi, Pembinaaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kordinasi Pemberdayaan Desa-Desa											

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terpasilitasinya kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa	5	26.650.000	2	25.700.000	40,00	96,44	17	145.250.000	85,00	99,25	Kec. Siberut Selatan
KECAMATAN SIBERUT TENGAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah											
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	4	34.996.000	3	34.752.000	75,00	99,30	7	65.552.000	58,33	100,00	Kec. Siberut Tengah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan											
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100	587.169.000	100	575.375.000	100,00	97,99	175	3.230.631.000	35,00	99,64	Kec. Siberut Tengah
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedinaya Komponen Pelatalatan listrik	20	5.023.700	13	5.023.700	65,00	100,00	43	13.025.700	86,00	100,00	Kec. Siberut Tengah
Penyediaan Logistik	Tersedianya ATK	25	14.082.000	25	14.082.000	100,00	100,00	150	272.504.611	93,75	100,00	Kec. Siberut Tengah
	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	18	1.236.700	18	1.236.700	100,00	100,00	108	44.257.400	100,00	100,00	Kec. Siberut Tengah
	Tersedianya Makan dan Minum	6	14.087.500	6	13.245.000	100,00	94,02	21	123.982.423	100,00	99,33	Kec. Siberut Tengah
Penyediaan barang cetak dan penggandaan		6	5.011.600	6	4.971.600	100,00	99,20	30	17.477.000	100,00	99,77	Kec. Siberut Tengah
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		7	69.525.000	7	66.695.000	100,00	95,93	55	344.960.000	91,67	99,19	Kec. Siberut Tengah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	12.000.000	10	11.000.000	83,33	91,67	58	59.000.000	96,67	98,33	Kec. Siberut Tengah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4	6.000.000	4	6.000.000	100,00	100,00	20	30.000.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Tengah
Pelaksanaan urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		300	23.911.000	180	22.860.000	60,00	95,60	1380	118.504.000	92,00	99,12	Kec. Siberut Tengah

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan											
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	5	100.000.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Tengah
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan		3	19.999.900	3	14.369.900	100,00	71,85	7	94.369.500	100,00	94,37	Kec. Siberut Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap kebangsaaan dan Ketahanan Nasional											
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamanan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ini serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.		1	18.782.500	1	18.682.500	100,00	99,47	5	359.900.000	100,00	99,97	Kec. Siberut Tengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Kordinasi, Pembinaaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kordinasi Pemberdayaan Desa-Desa											
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		4	79.313.000	3	78.715.000	75,00	99,25	19	382.172.000	95,00	99,84	Kec. Siberut Tengah
KECAMATAN SIBERUT UTARA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah											
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	6	45.430.000	6	43.390.000	100,00	95,51	50	152.955.000	100,00	32,76	Kec Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan											
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya honororium pelaksana kegiatan dan gaji pegawai kontrak	34	484.032.000	34	482.512.000	100,00	99,69	170	3.122.790.000	100,00	100,40	Kec Siberut Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	10	2.914.250	10	2.914.250	100,00	100,00	55	16.429.350	100,00	100,00	Kec Siberut Utara
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	17	17.028.500	17	17.028.500	100,00	100,00	43	98.417.700	43,00	100,00	Kec Siberut Utara
	Jumlah Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10	2.983.800	10	2.983.800	100,00	100,00	115	5.641.100	100,00	212,29	Kec Siberut Utara
	Jumlah Natura dan Pakan-Natura	5	12.342.000	5	12.342.000	100,00	100,00	25	61.592.000	100,00	100,00	Kec Siberut Utara
	Jumlah makanan dan minuman rapat	2	8.500.000	2	8.500.000	100,00	100,00	10	17.850.000	100,00	3,49	Kec Siberut Utara
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dibutuhkan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dibutuhkan	10	1.038.000	10	1.038.000	100,00	100,00	16	1.288.000	38,10	1,36	Kec Siberut Utara
	Tersedianya Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	2	1.939.900	2	1.939.900	100,00	100,00	10	2.846.200	100,00	149,30	Kec Siberut Utara
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	25	134.043.000	10	88.963.000	40,00	66,37	110	190.113.000	88,00	25,11	Kec Siberut Utara
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	12	48.000.000	12	19.981.300	100,00	41,63	70	155.981.300	97,22	91,75	Kec Siberut Utara
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Yang Diservice	1	67.550.000	1	25.800.000	100,00	38,19	5	133.800.000	100,00	99,11	Kec Siberut Utara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	4	6.000.000	2	4.000.000	50,00	66,67	52	81.500.000	96,30	97,60	Kec Siberut Utara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor dan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	10	15.720.000	10	15.720.000	100,00	100,00	56	94.600.000	100,00	100,00	Kec Siberut Utara

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	300	39.986.048	87	39.985.000	29,00	100,00	2087	58.176.424	37,95	6,34	Kec Siberut Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1	34.709.000	1	17.609.000	100,00	50,73	5	50.328.000	100,00	5,89	Kec Siberut Utara
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan PKK di wilayah Kecamatan	1	24.999.900	1	24.863.900	100,00	99,46	5	73.256.900	100,00	9,40	Kec Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap kebangsaaan dan Ketahanan Nasional											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan NKRI	Terlaksananya HUT-RI	1	23.490.000	1	23.490.000	100,00	100,00	5	397.546.000	100,00	100,00	Kec Siberut Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Kordinasi, Pembinaaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kordinasi Pemberdayaan Desa-Desa											
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi ADD	6	41.000.000	6	40.820.000	100,00	99,56	30	306.380.000	100,00	99,94	Kec Siberut Utara
KECAMATAN SIBERUT BARAT												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah											
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah											
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	9	75.732.000	9	75.707.000	100,00	99,97	48	540.146.000	100,00	100,00	Kec Siberut Barat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan											
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya honororium pelaksana kegiatan dan gaji pegawai kontrak	168	554.294.000	168	553.044.000	100,00	99,77	1416	3.396.604.000	100,00	99,96	Kec Siberut Barat
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	154	7.998.100	154	7.998.100	100,00	100,00	770	40.127.600	100,00	100,00	Kec Siberut Barat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	666	19.834.720	666	19.806.220	100,00	99,86	3330	114.382.320	100,00	99,98	Kec Siberut Barat
	Jumlah Bahan Cetak	19	3.160.000	19	3.160.000	100,00	100,00	95	9.160.000	100,00	100,00	Kec Siberut Barat
	Jumlah Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	361	6.743.600	361	6.743.600	100,00	100,00	4361	148.841.100	100,00	100,00	Kec Siberut Barat
	Jumlah Natura dan Pakan Natura	845	13.940.000	845	13.937.000	100,00	99,98	4225	72.097.000	100,00	100,00	Kec Siberut Barat
	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	300	6.375.000	300	6.375.000	100,00	100,00	1500	108.847.000	100,00	100,00	Kec Siberut Barat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	15	164.928.000	15	164.809.900	100,00	99,93	63	738.199.900	100,00	99,98	Kec Siberut Barat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	11.956.065	1	11.950.000	100,00	99,95	1	11.950.000	100,00	99,95	Kec Siberut Barat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	12	24.000.000	12	24.000.000	100,00	100,00	60	240.480.000	100,00	100,00	Kec Siberut Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	6	11.000.000	6	4.386.000	100,00	39,87	30	94.111.000	100,00	93,43	Kec Siberut Barat

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan											
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	500	35.910.000	500	35.745.000	100,00	99,54	1800	381.084.900	100,00	93,84	Kec Siberut Barat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	1	41.903.000	1	41.843.000	100,00	99,86	5	259.521.000	100,00	99,98	Kec Siberut Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap kebangsaaan dan Ketahanan Nasional											
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	1	12.300.000	1	12.300.000	100,00	100,00	5	479.610.250	100,00	95,75	Kec Siberut Barat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat											
Fasilitasi, Rekomendasi dan Kordinasi, Pembinaaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kordinasi Pemberdayaan Desa-Desa											
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkat Pelaksanaan APBDesa yang efektif dan efesien	20	55.280.000	20	55.275.000	100,00	99,99	100	486.883.000	100,00	99,72	Kec Siberut Barat
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi ADD	6	55.280.000	6	55.275.000	100,00	99,99	30	486.883.000	100,00	99,72	Kec Siberut Barat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	11	1.170.574.026	11	618.838.293	100,00	52,87	44	4.611.794.115	66,67	69,30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelila kegiatan dan gaji pegawai kontrak	15	329.476.000	15	274.142.000	100,00	83,21	60	1.453.102.000	80,00	75,49	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	13	4.995.500	12	4.942.000	92,31	98,93	44	24.942.000	110,00	99,77	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	35	67.998.200	35	67.371.200	100,00	99,08	195	517.371.200	97,50	103,47	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	8	14.999.900	8	14.670.400	100,00	97,80	26	59.670.400	86,67	79,56	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	18	19.995.000	18	16.800.000	100,00	84,02	33	46.800.000	132,00	93,60	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20	103.348.000	20	100.900.971	100,00	97,63	65	700.900.971	86,67	70,09	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	24	25.800.000	4	6.870.719	16,67	26,63	100	276.870.719	83,33	221,50	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya kendaraan dinas	2	18.650.000	2	14.018.000	100,00	75,16	8	179.018.000	160,00	65,10	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	10	8.770.000	6	8.770.000	60,00	100,00	46	173.770.000	92,00	69,51	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELAUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK												

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik												
Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	Terbayarnya Bantuan Partai politik	9	641.928.500	9	640.728.000	100,00	99,81	42	790.728.000	93,33	24,63	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terawasinya ormas di Kabupaten Kepulauan Mentawai	10	62.106.000	6	44.908.500	60,00	72,31	36	544.908.500	72,00	54,49	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA												
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan Budaya												
Pelaksanaan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Teraciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama	1	121.981.900	1	82.148.100	100,00	67,34	2	182.148.100	10,00	182,15	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	Terawasinya aliran kepercayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	2	144.554.900	2	78.319.395	100,00	54,18	2	78.319.395	100,00	54,18	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Di Evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah												
Pelaksanaan Monitoring di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Terlaksananya sosialisasi P4GN di Kab.Kep. Mentawai	2	90.549.900	2	50.698.500	100,00	55,99	2	50.698.500	100,00	55,99	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terkendalinya cegah dini konflik di Masyarakat	4	178.798.000	4	129.715.193	100,00	72,55	20	844.907.193	100,00	94,51	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kewspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terpantauanaya tenaga kerja asing	10	74.002.000	2	45.557.500	20,00	61,56	2	341.565.500	10,00	92,31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
CAPAIAN KINERJA (FISIK/ KEUANGAN)		230.897	830.476.791.662	228.128	702.757.266.242	98,80	84,62		3.556.052.834.486	0,00	53,08	
PREDIKAT KINERJA						SANGAT TINGGI	TINGGI					

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022 sangat penting mengingat tahun tersebut adalah tahun terakhir dari implementasi RPJMD 2017-2022. Begitu juga tahun 2022 menjadi baseline data dasar penyusunan perencanaan jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Tabel 2.66
Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA			KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
		JUMLAH	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI	
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif	7	5	2	71,42%
2	Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	15	8	7	53,33%
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim	6	4	2	66,67%
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani	5	2	3	40%
5	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	5	4	1	80%
TOTAL PENCAPAIAN KINERJA		**38**	**23**	**15**	**60,52%**

Hasil evaluasi pencapaian kinerja untuk setiap prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 menunjukkan ketercapaian sebesar 60,52 persen, yaitu dengan 23 indikator kinerja tercapai dan 15

indikator dengan kinerja tidak tercapai. Untuk prioritas mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani dengan tingkat capaian terendah yaitu sebesar 40 persen dan selanjutnya prioritas mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan tingkat capaian sebesar 53,33 persen.

2.3.1.1. Prioritas Pembangunan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif

Terdapat 8 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 1 yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat cerdas dan produktif dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif					**71,42%**
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	61,30	62,19	Tercapai
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,50	13,97	Tercapai
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,3	7,48	Tercapai
4	Harapan Lama sekolah	Tahun	13	12,89	Tidak Tercapai
5	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks	0,58	NA	-
6	Angka Harapan Hidup	Tahun	64,80	64,93	Tercapai
7	Prevalensi stunting	Persen	30	32	Tidak Tercapai
8	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	Persen	3	26,79	Tercapai

Pencapaian prioritas pembangunan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif secara

keseluruhan tujuan dan sasaran pembangunan sebesar 71,42 persen. Indikator harapan lama sekolah dan prevalensi stunting yang menjadi perlu perhatian karena realisasi pencapaian indikator ini belum sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

Harapan lama sekolah masih kurang sebesar 0,12 poin dari target yang diharapkan mengindikasikan bahwa masyarakat masih berharap ada perbaikan dari sisi kuantitas dan kualitas sektor pendidikan sehingga mesyarakat menaruh harapan/ekspektasi sekolah pada tingkat SD dan SMP pada kelas VII. Penenurunan angka stunting menjadi isu sentral secara nasional dengan target 2024 sebesar 14 persen. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting melalui penguatan kelembagaan TPPS kabupaten, komitmen pemangku kepentingan dan integrasi program prioritas penanganan dan penanggukangan stunting dengan harapan tidak ada lagi muncul kasus baru.

2.3.1.2. Prioritas Pembangunan 2 : Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Terdapat 15 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 2 yang difokuskan untuk mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.68
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/ STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 2 : Mewujudkan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan					**53,33%**
1	Persentase ketersediaan infrastruktur publik (jalan/jembatan, air bersih) dalam kondisi baik	Persen	10	10	Tercapai
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	Persen	11,25	13,63	Tercapai
3	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	Persen	70	68	Tidak Tercapai
4	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	Persen	65	67	Tercapai
5	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	Persen	100	100	Tercapai
6	Cakupan Layanan Transportasi	Persen	85	77	Tidak Tercapai
7	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	67	83,5	Tercapai
8	Rasio Elektrifikasi	Persen	90	72,63	Tidak Tercapai
9	Persentase Permukiman Layak Huni	Persen	45	37,8	Tidak Tercapai
10	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	75	60	Tidak Tercapai
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	>80	>80	Tercapai
12	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	Persen	45	58,2	Tercapai
13	Rata-rata capaian rumah tangga bersanitasi layak (limbah, sampah, drainase)	Persen	50	60	Tercapai
14	Jumlah Desa STBM	Desa	4	1	Tidak Tercapai
15	Indeks Resiko Bencana	Indeks	sedang	tinggi	Tidak Tercapai

Pencapaian prioritas pembangunan mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan lingkungan secara keseluruhan tingkat ketercapaiannya sebesar

53,33 persen. Hasil evaluasi infrastruktur menjadi perhatian dalam tahapan perencanaan berikutnya khusunya dalam Upaya peningkatan layanan dasar dan publik. Infrastruktur dasar baik itu pemmbangunan jalan/jembatan, air bersih, sanitasi, PSU kawasan perumahan dan permukiman menjadi prasyarat bagi tumbuhkembangnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga sektor infrastruktur menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah terutama integrasi program prioritas untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

2.3.1.3. Prioritas Pembangunan 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim

Terdapat 6 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 3 yang difokuskan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing berbasis maritim dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Pencapaian prioritas pembangunan mewujudkan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing berbasis maritim menunjukkan tingkat ketercapaian sebesar 66,67 persen. dari 6 indikator ketercapaian kinerja, terdapat 4 indikator dengan kategori tercapai dan ada 2 indikator dengan kategori tidak tercapai.

Tabel 2.69
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/ STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Berbasis Maritim					**66,67%**
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,3	4,94	Tercapai
2	Indek Gini	Indeks	0,3	0,233	Tercapai
3	Pendapatan Perkapita	juta/ kapita/ tahun	52,42	60,91	Tercapai
4	Nilai Investasi	miliar rupiah	200	16,8	Tidak Tercapai
5	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	3,25	1,39	Tercapai
6	Tingkat Inflasi	Persen	3,82	7,15	Tidak Tercapai

Hal ini menunjukkan perbaikan di sisi ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka), namun ada perlu perhatian dan upaya serius terkait indikator nilai realisasi investasi dan tingkat inflasi yang masih jauh dari target yang direncanakan, mengingat indikator ini juga menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat.

2.3.1.4. Prioritas Pembangunan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani

Terdapat 5 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 4 yang difokuskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.70
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/ STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani					**40%**
1	Indek RB	Indeks	B	CC	Tidak Tercapai
2	Indek Kepuasan masyarakat	Indeks	85	77,90	Tidak Tercapai
3	WBK/WBBM	OPD	5	0	Tidak Tercapai
4	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	Tercapai
5	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	Tercapai

Pencapaian prioritas pembangunan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani dengan tingkat ketercapaiannya sebesar 40 persen. Hal ini perlu perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan prima, tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Beberapa indikator yang masih belum tercapai seperti nilai RB yang masih pada posisi CC, nilai indeks kepuasan masyarakat masih pada angka 77,90 dan OPD yang telah menerapkan WBK/WBBM hingga pada saat ini belum ada yang menerapkan.

2.3.1.5. Prioritas Pembangunan 5 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya

Terdapat 5 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Prioritas Pembangunan 5 yang difokuskan untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya dengan pencapaian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.71
Pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		KINERJA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN/ STATUS
			TARGET	REALISASI	
Prioritas Pembangunan 5 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya					**80%**
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	51,35	NA	-
2	Jumlah MHA yang dilestarikan	MHA	5	5	Tercapai
3	Tingkat Kriminalitas	Persen	2,50	3	Tercapai
4	Tingkat Kabupaten layak Anak	Predikat	madya	pratama	Tidak Tercapai
5	Indek Pembangunan Gender	Indeks	89,80	89,91	Tercapai

Pencapaian prioritas pembangunan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya secara aggregat tingkat ketercapaiannya telah mencapai angka 80 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam upaya menciptakan suasana kehidupan yang harmonis dan berbudaya sudah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di Kepulauan Mentawai. Indikator yang perlu perhatian dan penekanan adalah tingkat kabupaten layak anak, indikator ini akan menggambarkan dukungan atas terjaminnya kebutuhan akan anak dalam pembangunan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja yang kemudian dilakukan telaah lebih mendalam dengan perangkat daerah pengampu urusan, berdasarkan capaian tersebut menjadi catatan terhadap permasalahan yang akan ditarik dan didentifikasi pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan selama 4 tahun kedepan.

2.3.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya guru yang bersertifikat (sertifikasi) sekitar 27 persen.
2) Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi Pendidikan sarjana (starata 1) sekitar 46 persen.
3) Akses rumah menuju sarana Pendidikan yang berjauhan (letak geografis) dan tidak dapat ditempuh jalur darat.
4) Belum ada konsep pendidikan berasrama dalam upaya menjawab kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang tersebar dengan akses layanan pendidikan yang terbatas.
5) Terbatasnya sarana tempat tinggal/ asrama untuk para peserta didik yang jauh dari orang tua/tempat tinggal.

6) Masih rendahnya tingkat partisipasi kesetaraan, masih sekitar 56 persen.
7) Belum memadainya kualitas dan ketersediaan sarana layanan dan fasilitas pendidikan.
8) Masih terdapat/ banyak masyarakat (orang tua) Mentawai yang menyekolahkan anaknya pada sarana layanan pendidikan di luar Mentawai.
9) Masih terdapatnya lembaga pendidikan yang belum terakreditasi maupun masih terakreditasi B.
10) Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan sarana layanan kesehatan, dan masih banyak masyarakat masih menggunakan dukun (sikerei)/ tenaga non kesehatan.
2) Masih terdapat posyandu yang tidak memiliki peralatan pengukuran (antropometri) masih ada sekitar 160 posyandu yang belum memiliki set peralatan antopometri.
3) Masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan khususnya masyarakat miskin (sekitar 46 persen).
4) Masih terbatasnya ketersediaan layanan kesehatan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat dusun dengan

kondisi geografis yang belum sepenuhnya dapat diakses jalur darat.

5) Belum adanya rumah sakit di setiap pulau besar (Siberut, Sikakap) sebagai bagian dari sistem kesehatan daerah.
6) Masih terbatasnya tenaga dokter umum, dokter spesialis dan alat-alat kesehatan hingga ke pusat-pusat layanan kesehatan di desa (Poskesdes).
7) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus penyakit menular dan tidak menular.
8) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya cakupan aksesibiltas jalan sebagai prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2) Tingginya angka kemahalan kontruksi di Kepulauan Mentawai.
3) Tidak tersedianya material lokal sebagai bahan dasar pembangunan fisik (jalan dan jembatan) seperti batu, pasir, kerikil yang harus didatangkan dari luar Mentawai.
4) Belum terhubungnya akses darat (Jalan) Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan sebagai bagian dari sistem transportasi daerah.

5) Terbatasnya ruang pembangunan fisik di Kepulauan Mentawai dikarenakan sekitar 82 persen adalah Kawasan hutan.
6) Masih rendahnya keterjangkauan/cakupan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) daerah yaitu sebesar 30,23 persen atau sekitar 13 desa.
7) Ketersediaan sanitasi rumah tangga belum menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih banyak kawasan permukiman yang tidak dilengkapi dengan PSU sekitar 71,42 persen.
2) Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh (ada 28 kawasan kumuh).
3) Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
4) Masih banyaknya permukiman potensi bencana alam belum di relokasi.
5) masih terdapat kawasan permukiman masyarakat berada pada kawasan hutan.
6) Belum adanya hamparan lahan/tanah yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pembangunan, khususnya untuk menyediakan permukiman layak bagi masyarakat.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2) Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan masih terjadinya gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum.
3) Masih belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran, serta minimnya sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran.
4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta alat peraga informasi kebencanaan.
5) Letak geografis yang kepulauan dan permukiman penduduk yang terpencar di setiap dusun dengan akses dan infrastruktur telekomunikasi yang terbatas menyulitkan dalam koordinasi dan pemberian layanan kebencanaan.
6) Pada umumnya kawasan permukiman masyarakat masih berada pada zona rawan bencana.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih belum maksimalnya pengelolaan dan *updating* data DTKS, masih terdapat *exclusion error* dan *inclusion error* data kemiskinan daerah.
2) Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana seperti lumbung sosial, dapur umum, peralatan dan perlengkapan kesiapsiagaan bencana.

2.3.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan dan pendampingan kewirausahaan (*entrepreneurship*) mulai dari hulunya pengembangan dan peningkatan kapasitas sampai pada hilirnya yaitu bisa mengembangkan usaha atau berwirausaha (mandiri).
2) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten.
3) Masih rendahnya kompetensi/skill tenaga kerja.
4) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan.

5) Belum adanya pendampingan terhadap akses tenaga kerja dan enterprenuer ke dunia usaha, permodalan dan pasar.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya kontribusi alokasi anggaran dalam penguatan kabupaten layak anak dan gender.
2) masih rendahnya komitmen pemangku kepentingan (pimpinan perangkat daerah, desa) dalam mencanangkan dan menerapkan kabupaten layak anak.
3) Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangakan usaha.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih tingginya ketergantungan pangan dari luar Mentawai.
2) Kebutuhan pangan masih terbatas pada pemenuhan pangan rumah tangga (subsisten).
3) Masih perlu ditingkatkannya penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya luasan lahan yang dilakukan sertifikasi lahan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) perwakilan Kepulauan Mentawai.
2) Mahalnya biaya operasional pengurusan sertifikasi lahan secara mandiri.
3) Belum tersedianya bank tanah yang digunakan sebagai wadah penyediaan tanah untuk pembangunan.
4) Masih rendahnya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait alih fungsi lahan, pemanfaatan lahan pada kawasan dan proses redistribusi lahan baik itu program TORA, perhutanan sosial, hutan adat (Masyarakat Hukum Adat).

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya tenaga atau sumber daya di bidang keahlian lingkungan hidup.
2) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3) Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah masih di ibukota kabupaten (tuapejat sekitarnya), sarana dan prasaraan yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.
4) Masih terbatasnya aparatur dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup.
5) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Andministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Kondisi geografis yang sulit dengan akses yang terbatas sehingga memakan waktu dan biaya yang besar dalam menjangkau di setiap wilayah masyarakat.
2) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah (OPD).
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
2) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama desa masih sekitar 6,9 persen BUMdes yang aktif.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait keluarga berencana.
2) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
3) Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
4) Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan seperti di pelabuhan, PJU, rambu-rambu.
2) Belum terbangunnya 5 pelabuhan penyeberangan sebagai simpul konektivitas sistem transportasi daerah.
3) Belum optmialnya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten (antar pulau), masih terdapat wilayah khususnya di pantai barat yang belum mendapatkan layanan transportasi laut.
4) Masih terbatasnya jalur/trayek pelayaran menuju Kepulauan Mentawai akses masih 3 kali seminggu.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum adanya *grand design* pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
2) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
3) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
4) Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya koperasi yang aktif sekitar 20 persen.
2) Minimnya diversifikasi usaha koperasi.
3) Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri.
4) Masih rendahnya pendampingan kewirausahaan dan kepada pelaku usaha mikro.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.
2) Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah adat/ulayat.
3) Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
4) Belum lengkapnya data kajian terkait potensi dan peluang investasi.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya SDM keolahragaan.
2) Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
3) Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan.
4) Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan dan keolahragaan.
5) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
6) Masih rendahnya pembinaan terhadap bibit atlet potensial dan pembinaan bagi atlet.
7) Masih rendahnya pembinaan/pelatihan terhadap pemuda/i untuk berwirausaha.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum defenitifnya SOTK yang mengurusi statistik daerah.
2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.
3) Belum terjalinnya kerjasama dengan lembaga statistik (BPS) dan lembaga lain penyedia data dalam mewujudkan satu data terintegrasi.
4) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

5) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi secara optimal.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem infirmasi pemerintah daerah.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Rendahnya pengenalan dan pemahaman budaya daerah oleh kalangan muda.
2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya.
3) Belum terselenggaranya event atraksi kebudayaan secara kontiniu.
4) Masih sedikitnya pengakuan dan penetapan cagar budaya.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum terdapatnya gedung perpustakaan daerah sebagai sarana layanan perpustakaan publik.
2) Masih terbatasnya sosialisasi dan penggunaan media sosial/elektronik dalam mengkampanyekan budaya literasi.
3) belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book), pustaka keliling
4) Terbatasnya tenaga dan sumberdaya perpustakaan.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah.
2) Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip.
3) Keterbatasan ketersediaan SDM pengelola kearsipan.

2.3.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.

2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
3) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan).
4) Terbatatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es).
5) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayan tangkap dan budidaya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K.
2) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata.
3) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival.
4) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.
5) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
2) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.

3) Belum optimalnya pendampingan petani dan kelembagaan tani (kelompok tani).
4) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pertanian (jalan pertanian, irigasi), sarana prasarana, lahan, pupuk dan air.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya penggunaan pasar sebagai sarana perdagangan.
2) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
3) Minimnya SDM penera alat UTTP.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM (revitalisasi IKM Taraet).
3) Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor industri pengolahan dan sektor industri lainnya.
4) Belum optimalnya pendampingan calon dan pelaku industri mikro dan kecil dalam hal bisnis proses, sertifikasi, manajemen mutu, akses pasar, permodalan.

2.3.2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang

a. Unsur Penunjang Perencanaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah dalam penyusunan akuntabilitas kinerja.
2) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
3) Masih rendahnya kapasitas fungsional perencana dalam Menyusun dokumen perencanaan.

b. Unsur Penunjang Keuangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah (pajak dan retribusi daerah) untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.
3) Belum teradministrasinya aset dengan baik.

c. Unsur Penunjang Kepegawaian

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN.
2) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat.
3) Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
4) Belum terlaksana sepenuhnya merit sistem.
5) Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya.
6) Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
7) Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN.

d. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Belum tersedianya tenaga/ SDM peneliti.
2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
3) Masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pemanfaatan kelitbangan dan berinovasi.

e. Unsur Penunjang Pengawasan

Identifikasi permasalahannya adalah:

1) Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.
2) Masih rendahnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pendampingan reformasi birokrasi, penerapan ZI, WBK/WBBM, SAKIP dan berbagai penilaian tata kelola pemerintah lainnya.
3) Masih rendahnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP.
4) Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis yang dirumuskan berasal dari permalsahalan jangka menengah yang segera harus diintervensi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2023-2026, begitu juga menjadi bagian permasalahan pembangunan dalam Evaluasi RKPD.

2.4.1 Pembangunan Manusia yang Holistik

Manusia menjadi aset yang paling berharga dan sangat penting bagi pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi sebuah kepastian akan meningkatkan dan mensejahterakan manusia. Pembangunan manusia dapat dilakukan pada dimensi pendidikan, kesehatan, budaya dan pengembangan ekonomi.

Pada dimensi pendidikan, pembangunan harus memastikan bahwa akses layanan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana utama pendidikan yang menjadi tantangan karena Kepulauan Mentawai yang luas, begitu juga dengan karakteristik wilayah dan permukiman masyarakat yang tersebar dimana akses transportasi darat belum ada dan layanan pendidikan terdekat belum tersedia sehingga masyarakat harus berpikir untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan baik SD, SMP maupun SMA. Disisi lain, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing sedangkan masyarakat Mentawai didominasi dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk melanjutkan pendidikan dijenjang S1 ataupun diploma (vakasi) sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi perhatian kedepan. Sistem kesehatan daerah dengan konsep kepulauan mengharuskan adanya rumah sakit rujukan disetiap pulau besar seperti di Pulau Siberut (RS Pratama Siberut) yang sudah dibangun, di Pulau Sipora (RSUD Tuapejat) dan di Pulau Pagai Utara Selatan (RS Pratama Sikakap), ini menjadi kebutuhan utama dalam konektivitas layanan kesehatan daerah. Begitu juga dengan kelangkaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis untuk penanganan penyekit tertentu menjadi tantangan kedepan dan berbagai inovasi-inovasi layanan kesehatan akan muncul untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka stunting daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (Stunting). Stunting adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya berdasarkan standar yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran

fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual dan akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah.

Pembangunan manusia kedepan akan diperhadapkan pada eksistensi dan pola hidup yang modern sehingga potensi kehilangan jati diri, budaya, nilai-nilai luhur, kearifan lokal akan sangat besar. Pembangunan kebudayaan sudah mulai sedini mungkin menjadi bagian pembangunan manusia baik di tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA bahkan dijenjang perguruan tinggi. Pembangunan kebudayaan kedepan akan menjadi bagian dari pembangunan manusia dengan elaborasi kebijakan yang inklusif yang non-diskriminatif, berdasarkan partisipasi masyarakat lokal dan unsur-unsur nilai kebudayaan.

Pembangunan harus menjadikan manusia sebagai subjek yang produktif. Menciptakan wirausaha (*enterprenuer*) bukan sekedar melakukan pelatihan atau memberikan sarana dan prasarana latihan, namun hal yang lebih bernilai adalah eksistensi, konsistensi dan kontiniunitas wirausaha atau pelaku usaha dalam mengembangkan potensinya. Pendampingan calon pelaku usaha/wirausaha di Kepulauan Mentawai harus dilakukan, stigma terhadap memulai usaha harus memliki modal dana yang besar menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan peluang dalam memulai dan mengembangkan

peluang usaha sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wirausaha mulai dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan, bisnis proses, hingga dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang satu kesatuan dalam pendampingan kedepan.

2.4.2 Hilirisasi Komoditi Sektor Primer

Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu pada sektor primer (*raw material*) ke sektor perdagangan/jasa atau pada sektor industri. Kepulauan Mentawai dengan potensi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi sehingga permasalahan pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi. Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

2.4.3 Pengembangan Pariwisata Mentawai

Sebagai destinasi pariwisata yang telah dikenal hingga mancanegara, tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan segala sumberdaya baik itu amenitas, aksesiblitas, atraksi, sumber daya manusia, dan menjaga kelestarian kawasan destinasi. Menjadi bagian dari destinasi prioritas yang telah ditetapkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai

terus berbenah dalam mempersiapkan destinasi kawasan pariwisata dengan menjalin kerjasama/kolaborasi disetiap sektor baik di internal pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah, pihak swasta, pelaku ekonomi kreatif, investor. Selain itu pendampingan kawasan desa wisata yang bagian terintegrasi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas daerah menjadi hal penting dilakukan agar citra dan *length of stay* semakin baik, begitu juga dengan pengalaman/experience lebih bermakna.

2.4.4 Aksesibilitas

Sebagai prasyarat pembangunan dan kemajuan daerah, pembangunan infrastruktur jalan menjadi unsur utama yang harus disediakan. Dengan adanya infrastruktur jalan akan mengurangi biaya (cost), memaksimalkan efisiensi dan efektivitas, mempercepat layanan, meningkatkan produktivitas dan mempercepat reformasi struktur ekonomi daerah. Sebagai daerah kepulauan, tantangan aksesibilitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada dua, yaitu disisi darat adalah pembangunan jalan disepanjang pulau dengan terhubung pada setiap pelabuhan penyeberangan (hub) di setiap ujung pulau dan disisi laut tersedianya sarana penyeberangan kapal antar pulau. Keadaan ini menjadi tantangan dikarenakan kondisi jalan yang tersedia/terbangun (trans Mentawai) dengan persentase yang masih rendah, begitu juga masih terdapat setidaknya 4 pelabuhan

penyeberangan yang harus dibangun serta kapal penyeberangan antar pulau yang memadai belum tersedia.

2.4.5 Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seiring dengan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang baik/*good governance,* maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan terhadap delapan area tersebut masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan implementasi refomasi birokrasi yang ditandai dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Berdasarkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, terdapat beberapa tujuan akhir dari Reformasi Birokrasi. *Pertama*, mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan.

Kedua, menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*. *Ketiga*, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. *Keempat*, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi. *Kelima*, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi. *Terakhir*, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Untuk mencapai enam tujuan tersebut telah ditetapkan delapan area perubahan dan hasil yang diharapkan. Delapan area tersebut antara lain organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja *(culture set*) aparatur.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di tengah perlambatan ekonomi global pada tahun 2022. Ini menjadi modal kuat dalam menghadapi risiko resesi di tahun 2023 dan tantangan pada tahun 2024. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian target pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi Indonesia diprakirakan akan tetap tangguh pada tahun 2023 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu juga halnya dengan perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat ditentukan aktivitas sosial ekonomi secara regional dan nasional. Perkembangan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan

ekonomi dalam dalam 2 (dua) tahun terakhir tumbuh positif yaitu tahun 2021 sebesar 2,89 persen dan tahun 2022 tumbuh sebesar 4,49 persen menunjukkan membaiknya aktivitas sektor pendukung ekonomi daerah seperti sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tumbuh positif dan didukung dengan semakin kuatnya ekonomi secara nasional memberikan kepercayaan bahwa pada Tahun 2023 ekonomi daerah akan tumbuh positif begitu juga dengan konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diprakirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen.

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US$4.970–5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori *upper-middle income countries*. Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 dengan menjaga indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin kesinambungan dalam jangka menengah-panjang, di sisi lain tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5–3,5 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp14.800–Rp15.400 per US$.

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, 2024

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	*Outlook* 2023	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,5	5,3–5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3–6,0	5,0–5,7
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5–9,0	6,5–7,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,36–73,37	73,99–74,02
5	Rasio Gini (nilai)	0,375–0,378	0,374–0,377
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	107–108	107–110
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	105–107	105–108
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02	27,27

Sumber: Ranwal RKP 2024

Pada tahun 2024, TPT diupayakan turun menjadi 5,0–5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374–0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat

diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105–108 dan NTN pada kisaran 107–110.

Postur makro fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, Major Project dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta (iii) penyelenggaraan pemilihan Presiden RI (pelaksanaan tahun politik).

Di tengah perkiraan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,50–3,50 persen (*yoy*). Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran (*supply*) dan pemintaan (*demand*) dalam kerangka menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), mencakup (i) kestabilan harga melalui pengelolaan permintaan dan kebijakan

stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain operasi pasar, pasar murah; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi implementasi Program Lumbung Pangan (*Food Estate*), pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas serta penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD); serta (iv) komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, penguatan koordinasi pusat-daerah sejak proses perencanaan, dan pengelolaan ekspektasi.

Arah kebijakan sektor keuangan ke depan akan difokuskan pada upaya percepatan pendalaman sektor keuangan melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang memuat berbagai upaya diantaranya (1) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (2) peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil termasuk UMKM, (3) perluasan basis investor ritel, (4) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (5) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, (6) peningkatan pembiayaan hijau, serta (7) implementasi harmonisasi kebijakan.

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta

mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045 dengan Fokus Kebijakan Makro Tahun 2024 antara lain:

Percepatan Transformasi Ekonomi; Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

Pembangunan Inklusif; Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pembangunan Berkelanjutan; Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan

berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

Mewujudkan Stabilitas Ekonomi; Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat

Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2023 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,4%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2023 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar 4,65%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2024 diperkirakan berada pada angka 4,2 – 5,2 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan

perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,29	4,36	4,65	4,76
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	31,58	32,37	33,60	34,85
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	45,41	50,59	48,88	59,88
4	Indeks Gini (Rasio)	0,300	0,300	0,291	0,290
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,04	5,92	5,70	5,62
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	339,92	335,21	325,41	324,71
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,52	6,28	5,97	5,70
8	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekoh (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	72,65 69,59 14,09 9,07 10.790	73,26 69,90 14,10 9,18 11.130	73,72 70,01 14,25 9,27 11.290	74,25 70,20 14,41 9,36 11.455
9	Inflasi (%)	1,40	7,43	5,00	4,00

Sumber : Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2023

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber

daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam middle income trap. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.

3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program pemulihan ekonomi ini akan berlanjut di tahun 2023 dan 2024 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perkembangan ekonomi daerah yang dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif mengindikasikan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebesar 2,89 persen naik menjadi 4,94 persen pada

Tahun 2022. Seiring dengan terkendalinya COVID-19 dan berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah yang secara hati-hati diterapkan dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 seiring dengan tren pertumbuhan ekonomi nasional dan tren pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat yang diprediksi tumbuh positif. Pembangunan sumber daya ekonomi berbasis komoditas unggulan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2024, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian/*value added* dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah. Hal ini selaras arah pembangunan nasional yang menitik beratkan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi/penguatan teknologi dan infrastruktur ekonomi.

Secara umum, gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2024*

Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi*	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	54,8	60,91	58,47	61,82
PDRB Per Kapita (Harga Konstan)	Rp (dalam Juta)	34,41	35,69	35,38	34,96
IPM	indeks	61,35	62,19	61,98	62,48
Pertumbuhan Ekonomi	%	2,89	4,94	3,93	4,27
Tingkat Kemiskinan	%	14,84	13,62	14,67	14,44
Tingkat Pengangguran	%	2,79	1,39	2,75	2,70
Gini Rasio	%	0,321	0,233	0,320	0,316

Sumber: Badan Pusat Statistik (https://sumbar.bps.go.id/)
* data RPD KKM 2023-2026

Momentum percepatan ekonomi yang menjadi fokus pembangunan nasional menjadi *trigger* bagi daerah yang diharapkan senantiasa memberikan efek pengganda untuk mendorong sektor publik, layanan dasar dan ekonomi terpenuhi. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan nasional melalui percepatan transformasi ekonomi menjadi ruang bagi daerah untuk ambil peran dan bagian yang integral sebagi satu kesatuan dengan arah kebijakan ekonomi daerah Kab. Kepulauan Mentawai tahun 2024 antara lain:

1. Penguatan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang lebih mendorong pembangunan manusia dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pengentasan stunting.

2. Pembangunan infrastruktur ekonomi sebagai prasyarat pengembangan sektor sosial ekonomi masyarakat senantiasa didorong dengan alokasi anggaran yang memadai.
3. Pengembangan produk komoditas unggulan daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah yang dapat dioptimalkan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Menjaga situasi sosial politik masyarakat yang kondusif menjelang dan selama pemilu berlangsung melalui alokasi pendanaan pilkada serentak sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/Sj tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
5. Menjaga kestabilan harga komoditas pangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah.
6. Optimalisasi alokasi belanja pemerintah melalui penggunaan produk dalam negeri dan lokal untuk penguatan ekonomi masyarakat lokal dan peningkatan program dan kegiatan padat karya.

7. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan even pariwisata, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan desa wisata menuju pariwisata berkelanjutan.
8. Penguatan pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMK (optimalisasi craft center dan forum UMK, sertifikasi dan uji produk UMK), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan UMK, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha UMK dan koperasi, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM UKM dan koperasi, pengembangan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan UKM dan koperasi.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 menjadi salah satu faktor utama dalam percepatan capaian pertumbuhan ekonomi daerah, Tahun 2023 menjadi kunci mengejar pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Potensi varian baru COVID-19,

ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan dan juga potensi isu global yang berkembang hingga saat ini terutama potensi perang rusia dan NATO. Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dalam pembangunan tahun 2023 dan 2024 adalah:

1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dana transfer ke daerah yang akan mengalami penyesuaian yang ketat sedangkan sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan masih sangat terbatas.
2) Kemampuan daerah dalam meredam dan mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga dapat memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepastian berusaha/investasi daerah.
3) Optimalisasi pengembangan IPTEK dan inovasi dalam mengikuti perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat.
4) Potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang melimpah tetapi belum memiliki nilai tambah sehingga perlu integrasi pengembangan komoditi unggulan hulu hilir hingga pada pemasarannya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Begitu juga

untuk kebijakan pembangunan nasional 2022-2023 yang menitikberatkan pada pemulihan ekonomi sebagai respon dari pandemi COVID-19 dan menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transfomasi ekonomi nasional dan percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional juga memperhatikan kondisi yang tengah terjadi secara nasional dan global, namun tetap bertumpu pada keadaan fiskal yang sehat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Berdasarkan perhitungan rasio kapasitas fiskal daerah dikelompokkan dengan kategori sebagai berikut:

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 1,171	sangat rendah
1,171 ≤ RKFD < 1,504	rendah
1,504 ≤ RKFD < 1,838	sedang
1,838 ≤ RKFD < 2,171	tinggi
2,171 ≤ RKFD	sangat tinggi

Melihat perkembangan nilai peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa kecenderungannya membaik. Artinya daerah dalam

membiayai alokasi belanja rutin, belanja tertentu, pembiayaan tertentu sudah mempunyai kemampuan.

Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2018-2022

Tahun	Rasio KFD	Kategori KFD
2018	0,419	Sangat Rendah
2019	0,625	Rendah
2020	0,415	Sangat Rendah
2021	0,628	Rendah
2022	1,552	Sedang
Rata-rata	0,7278	Sangat rendah

Sumber: https://jdih.kemenkeu.go.id/

Pada Tabel 3.4. tampak bahwa Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2018-2022 rata-rata 0,7278 persen dengan kategori sangat rendah. Secara keseluruhan, KFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang cenderung membaik dari tahun 2020-2022 yaitu dari rasio 0,415 (2020) naik menjadi rasio 1,552 (2022).

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum untuk peningkatan Pendapatan Daerah tersebut dibutuhkan berbagai kebijakan sesuai dengan kondisi riil sumber Pendapatan dengan tanpa membebani sumber daya sosial

ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 antara lain:

1. Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan beberapa peraturan daerah terkait dengan retribusi (Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 7 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 8 tentang Retribusi Tenpat Rekreasi dan Olahraga) sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi *online* bekerja sama dengan Bank Nagari, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
3. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.

4. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment.*
6. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan percepatan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.
7. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun Berjalan 2023	Proyeksi/Target pada Tahun	
				2024	2025
Pendapatan Asli Daerah	**31.638.013.029**	**43.986.409.611**	**50.360.638.686**	**50.360.638.686**	**60.470.627.750**
Pajak Daerah	3.860.497.217	6.774.251.385	6.066.362.757	6.066.362.757	9.166.352.750
Retribusi Daerah	3.033.172.955	11.663.347.221	21.110.275.929	21.110.275.929	25.120.275.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.684.123.854	13.093.811.005	14.099.000.000	14.099.000.000	17.099.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.060.219.003	12.455.000.000	9.085.000.000	9.085.000.00	9.085.000.000
Pendapatan Transfer	**775.266.457.268**	**810.923.680.871**	**859.822.191.100**	**898.282.146.100**	**898.282.146.100**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	682.711.606.781	767.541.118.000	824.412.254.000	862.872.209.000	862.872.209.000
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	22.052.156.406	15.960.838.000	18.095.324.000	35.595.324.000	35.595.324.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	548.987.977.000	549.794.757.000	569.037.573.000	569.037.573.000	569.037.573.000
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.985.666.825	82.004.624.000	106.880.270.000	91.522.992.700	91.522.992.700
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	41.685.806.550	74.851.582.000	85.505.996.000	85.505.996.000	85.505.996.000
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-		36.317.232.300	36.317.232.300
DID	-	-		36.317.232.300	36.317.232.300
Dana Desa	60.246.587.200	44.929.317.000	44.893.091.000	44.893.091.000	44.893.091.000

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun Berjalan 2023	Proyeksi/Target pada Tahun	
				2024	2025
Dana Desa	60.246.587.200	44.929.317.000	44.893.091.000	44.893.091.000	44.893.091.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.308.263.287	43.382.562.871	35.409.937.100	35.409.937.100	35.409.937.100
Pendapatan Bagi Hasil	32.308.263.287	41.125.926.871	35.409.937.100	35.409.937.100	35.409.937.100
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.308.263.287	41.125.926.871	35.409.937.100	35.409.937.100	35.409.937.100
Bantuan Keuangan	-	2.256.636.000	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**23.248.615.000**	**7.817.957.663**	**7.817.957.663**	**7.817.957.663**	**7.817.957.663**
Hibah	23.248.615.000	-			
Dana Darurat	-	-			
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan	-	7.817.957.663	7.817.957.663	7.817.957.663	7.817.957.663
PENDAPATAN DAERAH	**830.153.085.297**	**862.728.048.145**	**918.000.787.449**	**956.460.742.449**	**966.570.731.513**

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2024 disetimasikan tidak jauh berbeda dengan kondisi pendapatan asli daerah yang secara nyata telah diterima oleh daerah pada tahun 2023 mengingat sumber pendapatan tersebut secara riel menjadi alokasi yang diterima secara maksimal untuk pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar Rp.50.360.638.686 dengan rincian pajak daerah sebesar Rp.6.066.362.757, Retribusi Daerah sebesar Rp.21.110.275.929, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.14.099.000.000, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 9.085.000.000.

Pendapatan transfer untuk tahun 2024 diproyeksikan meningkat dari tahun 2023 sebesar 4,47 persen yaitu menjadi sebesar Rp.898.282.146.100. pendapatan transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.862.872.209.000 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.35.409.937.100 sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.7.817.957.663.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja. Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan

Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Kapasitas riil keuangan diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Tabel 3.6
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1.	Pendapatan	956.460.742.449
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-
	Total penerimaan	956.460.742.449
	Dikurangi:	
4	Belanja Tidak Langsung	320.614.601.320
5	Pengeluaran Pembiayaan	-
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**635.846.141.129**

Tabel 3.6 menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2024 yang menggambarkan kemampuan untuk pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga, yaitu:

1. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

   Belanja wajib: belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah

pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan Sosial).

Belanja mengikat: belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

2. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.7
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2024 (Rp)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**635.846.141.129**
1	Prioritas I	259.584.817.737
2	Prioritas II	268.446.597.278
3	Prioritas III	107.814.726.114

Tabel 3.7 menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah untuk 3 prioritas yaitu untuk prioritas pertama yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar sebesar Rp.259.584.817.737, untuk prioritas kedua yang dialokasikan untuk membiayai program prioritas pembangunan daerah sebesar Rp.268.446.597.278 dan prioritas ketiga yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya sebesar Rp.107.814.726.114.

Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai program prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan arah kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan belanja mengikat. Pemenuhan belanja wajib digunakan untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

2. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, yaitu untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas), Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap), Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih), Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing), Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas), Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja), Kedaulatan Energi (Mentawai Terang), Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab), Penataan Birokrasi (Mentawai Prima).
5. Melakukan koordinasi (kontrol) secara rutin dengan seluruh OPD dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan

penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun Berjalan 2023	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2024	2025
Belanja Operasi	**544.000.215.852**	**621.907.626.848**	**635.681.054.019**	**611.176.742.880**	**609.176.742.535**
Belanja Pegawai	284.566.995.633	325.003.701.706	319.567.764.046	320.614.601.320	320.614.601.320
Belanja Barang dan Jasa	243.479.793.619	273.144.346.431	295.255.928.253	248.192.864.215	263.192.864.215
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	9.585.794.613	11.000.000.000	5.700.000.000	12.700.000.000	12.700.000.000
Belanja Hibah	5.491.419.256	11.262.328.711	13.463.361.720	27.530.277.345	10.530.277.000
Belanja Bantuan Sosial	876.212.731	1.497.250.000	1.694.000.000	2.139.000.000	2.139.000.000
Belanja Modal	**164.639.582.130**	**157.012.401.692**	**239.607.613.815**	**237.459.955.000**	**245.569.944.409**
Belanja Modal Tanah	-	50.000.000	1.006.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.876.770.459	25.527.441.782	29.684.648.564	19.110.420.327	19.110.420.327
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.708.856.761	40.977.132.611	106.582.098.774	61.346.464.026	66.956.453.435
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	115.471.089.584	87.867.827.299	102.129.466.477	153.156.270.647	153.156.270.647
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.582.865.326	2.590.000.000	205.400.000	1.346.800.000	1.346.800.000
Belanja Tidak Terduga	**1.587.597.109**	**2.220.398.523**	**4.497.167.877**	**1.000.000.000**	**5.000.000.000**

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun Berjalan 2023	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2024	2025
Belanja Tidak Terduga	1.587.597.109	2.220.398.523	4.497.167.877	1.000.000.000	5.000.000.000
Belanja Transfer	**119.166.749.510**	**103.473.560.773**	**79.304.921.569**	**106.824.044.569**	**106.824.044.569**
Belanja Bagi Hasil	2.446.929.619	1.575.096.173	2.717.663.869	2.717.663.869	2.717.663.869
Belanja Bantuan Keuangan	116.719.819.891	101.898.464.600	76.587.257.700	104.106.380.700	104.106.380.700
BELANJA DAERAH	**829.394.144.601**	**884.613.987.836**	**959.090.757.280**	**956.460.742.449**	**966.570.731.513**

Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.956.460.742.449. Belanja ini terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 611.176.742.880, Belanja Modal sebesar Rp.237.459.955.000, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.000.000.000, dan Belanja Transfer sebesar Rp.106.824.044.569. Untuk belanja pegawai pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.320.614.601.320, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan untuk belanja pegawai sebesar 30 persen diluar belanja tunjangan guru, bahwa alokasi belanja pegawai telah memenuhi persentase alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru (Rp.36.487.193.000) yaitu sebesar 29,70 persen.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Arah kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi

pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah.

2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif/surplus, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pada tahun 2024, diproyeksikan untuk pembiayaan daerah Kab. Kepulauan Mentawai sebesar nihil (0), artinya bahwa untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dialokasikan sesuai dengan peruntukan/penggunaannya sehingga SiLPA yang bersifat umum atau penggunaannya bebas/tidak terikat sudah tidak ada.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2025

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun Berjalan 2023	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2024	2025
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**32.987.630.424**	**42.013.999.823**	**41.089.969.831**	**-**	**-**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.987.630.424	42.013.999.823	41.089.969.831	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-		-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**32.987.630.424**	**42.013.999.823**	**41.089.969.831**	**-**	**-**
Pengeluaran Pembiayaan	-	2.000.000.000	-	**-**	**-**
Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	2.000.000.000	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-		-	-

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun Berjalan 2023	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2024	2025
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-		-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**2.000.000.000**	**-**	**-**	**-**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**32.987.630.424**	**40.013.999.823**	**41.089.969.831**	**-**	**-**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai penjabaran tahun ke-2 Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dokumen RKPD memiliki peran stategis dalam merumuskan sasaran prioritas pembangunan yang disusun untuk mencapai target tujuan pembangunan daerah. Pembangunan sumber daya ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menjadi perencanaan jangka menengah nasional periode terakhir dan perencanaan tahun 2024 menjadi perencanaan tahun kelima dalam RPJMN 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandasakan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut **Pilar Pertama,** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua,** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga,** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Kempat,** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka (tahun 2045) serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden mengamanatkan penyusunan

visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Amanat ini ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang tercentuk pada pembukaan UUD 1945. Pada visi Indonesia 2045 ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan *middle income trap* dan menjadi negara maju atau *high income country* sebelum tahun 2045. Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai operasionalisasi Visi Misi dan Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020–2024, serta landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, disusun tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024, yakni (1) memperkuat ketahanan

ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi Pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2024 mempertimbangkan arahan Presiden, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, sasaran RPJMN 2020-2024, kerangka

ekonomi makro, dinamika ketidakpastian global dan menyukseskan Pemilu 2024, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu:

"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Dalam sudut pandang bahwa RKP Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029 sehingga sasaran Pembangunan tahun 2024 antara lain:

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional, 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,7
Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,0-5,7
Nilai Tukar Nelayan	Nilai	107-110
Rasio Gini	Nilai	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,99-74,02
Pengurangan Emisi Has Rumah Kaca (GRK)	%	27,27
Nilai Tukar Petani	Nilai	105-108

sumber: RKP 2024

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2024

Visi Pembangunan Propinsi Sumatera Barat "Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan" yang dijabarkan melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, 2021-2026

VISI **Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusiayang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Menurunnya prevalensi stunting 3. Meningkatnya Kualitas. 4. Pendidikan Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK. 2. Meningkatnya Budaya Literasi. 3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

VISI **Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan). 2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan. 3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan.
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan. 2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah. 3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera. 4. Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor. 5. Meningkatnya pertumbuhan investasi. 6. Meningkatnya peran ekonomi digital.
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat. 2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi 2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas 4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan	1. Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang

VISI **Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan**		
Misi	Tujuan	Sasaran
Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	aparatur yang melayani	bersih dan akuntabel 2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2020 hingga 2022, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni:

"Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan"

Adapun narasi penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 (tiga) sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta sektor bagi

penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata.

2. Transformasi ekonomi yakni menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Transformasi ekonomi diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.
4. Transformasi ekonomi merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan.
5. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:
    a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja.

b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan Masyarakat.

c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2024 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2024, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Proyeksi Indikator Makro Daerah Propinsi Sumatera Barat, 2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,76
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	34,85
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	59,88
4	Indeks Gini (Rasio)	0,290
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,62
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	324,71

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2024
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,70
8	IPM - Usia Harapan Hidup (Tahun) - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Rata-rata Lama Sekoh (Tahun) - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	74,25 70,20 14,41 9,36 11.455
9	Indeks Williamson	0,309

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Kebijakan pembangunan tahun 2024 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam pemulihan ekonomi selama terjadinya pandemi COVID-19. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi berbasis komoditas unggulan menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1.1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan
		1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
		1.3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumber daya manusia

Tujuan		Sasaran	
2	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	2.1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas
		2.2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air
		2.3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah
		2.4	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi
		2.5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika
		2.6	Meningkatkan ratio elektrifikasi daerah
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	3.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
		3.2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
		3.3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	4.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat
		4.2	Meningkatkan kesempatan kerja
		4.3	Terkendalinya inflasi daerah
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		5.2	Meningkatnya kapabilitas pemerintahan
		5.3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
6	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	6.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya
		6.2	Meningkatnya budaya literasi
7	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	7.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender

Pembangunan ekonomi tahun 2024 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi, memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan baik nasional maupun regional, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan yaitu:

“Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan”

Tema tersebut memiliki arti yang penting sebagai wujud menghadirkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas, menggali potensi daerah berbasis komoditas unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 “Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan”, memiliki makna antara lain:

1. Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan.
3. Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi pada pusat atau kawasan ekonomi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
4. Meningkatkan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah di dalam dan antar sektor ekonomi.

Pembangunan daerah tahun 2024 yang fokus pada tema pembangunan tahunan, namun pada prinsipnya dengan tidak mengabaikan komitmen dan upaya yang kuat untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi dan

mandatory spending yang telah ditetapkan dalam perturan perundang-undangan. Perwujudan tema pembangunan tersebut dicerminkan melalu pencapaian sasaran pembangunan daerah. Secara umum, gambaran sasaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi	
		Tahun 2023	Tahun 2024
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	58,47	61,82
PDRB Per Kapita (Harga Konstan)	Rp (dalam Juta)	35,38	34,96
IPM	indeks	61,98	62,48
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	4,27
Tingkat Kemiskinan	%	14,67	14,44
Tingkat Pengangguran	%	2,75	2,70
Gini Rasio	%	0,320	0,316

Sebagai bentuk konsistensi dan keselarasan dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2024, berikut disajikan persandingan keselarasan tema pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

Tabel 4.6
Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2024

Tema RKP Tahun 2024	Tema RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan

Keselarasan tema pembangunan telihat dari upaya bersama bagaiama mewujudkan transformasi ekonomi guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui salah satunya hilirisasi sumber daya alam berbasis komoditas unggulan untuk peningkatan nilai tambah yang didukung dengan pembangunan sumber daya ekonomi baik infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia *re-skilling/up-skilling*, kelembagaan, penguatan pasar, manajemen rantai pasok, dan penguatan investasi.

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Propinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3–5,7	4,76	4,27
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,5–7,5	5,62	14,44
Rasio Gini	Rasio	0,374–0,377	0,290	0,316
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	73,99–74,02	74,25	62,48
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,0–5,7	5,70	2,70

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang melekat dan menguatkan dalam pencapaian sasaran pembangunan yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

   melalui strategi:

   a. Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial.
   b. Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial.
   c. Intervensi kolabrasi untuk penanggulangan kemiskinan.
   d. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
   e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan.

   melalui strategi:

   a. Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan.
   b. Reformasi sistem perlindungan sosial.
   c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
   d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
   e. Meningkatkan kualitas anak perempuan dan pemuda.
   f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

   melalui strategi:

a. Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok.
b. Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.

4. Penguatan daya saing usaha.

   melalui strategi:

   a. Meningkatkan kualitas teknologi informasi.
   b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi.
   c. Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif.
   d. Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi.
   e. Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

   melalui strategi:

   a. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh.
   b. meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air, jaga air, dan hemat air.

c. meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda Pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah.
d. meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi.
e. meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan).

6. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

   melalui strategi:

   a. Membangun gedung pemerintahan dan hunian.
   b. Membangun infrastruktur utama.

7. Pelaksanaan pemilu 2024.

   melalui strategi:

   a. Mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal.
   b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan.
   c. Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
   d. Mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda

Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 antara lain:

1. Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi; dan ekonomi hijau.

   Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP), yaitu:

   a. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
   b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

c. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.
d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan.
e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi.
f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

   diarahkan pada pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

   Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan akan dilakukan melalui tujuh Program Prioritas (PP), yaitu:

a. Pembangunan Wilayah Sumatera.

   Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 3.097 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 3 kabupaten di tahun 2024 salah satunya adalah Kab. Kepulauan Mentawai.

b. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali.
c. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
d. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
e. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
f. Pembangunan Wilayah Maluku.
g. Pembangunan Wilayah Papua.

3. Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

   Diarahkan pada Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan

pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing melalui tujuh Program Prioritas (PP), yaitu:

a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.
b. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial.
c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
d. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.
e. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.
f. Pengentasan Kemiskinan.
g. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

4. Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

   Diarahkan pada Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui empat Program Prioritas (PP), yaitu:

a. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter.
b. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi ArahPerkembangan Peradaban Dunia.
c. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial.
d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

5. Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

   Diarahkan pada Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar melalui lima Program Prioritas (PP), yaitu:

a. Infrastruktur Pelayanan Dasar.

   Jalan trans 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan, salah satunya di Propinsi Sumatera Barat (Kab. Kepulauan Mentawai).

b. Infrastruktur Ekonomi.

c. Infrastruktur Perkotaan.

d. Energi dan Ketenagalistrikan.

e. Transformasi Digital.

6. Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

   Diarahkan pada Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

   Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Membangun Lingkungan Hidup,

Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui tiga Program Prioritas (PP), yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.
c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

   Diarahkan pada Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga diadukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

   Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam

dan Transformasi Pelayanan Publik melalui lima Program Prioritas (PP), yaitu:

a. Konsolidasi Demokrasi.
b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.
c. Penegakan Hukum Nasional.
d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
e. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 juga responsif dan tanggap terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Arah kebijakan serta sasaran pembangunan daerah tahun 2024 akan difokuskan pada pencapaian Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yakni “Transformasi Sektor Strategis yang inklusif dan berkelanjutan”, yakni :

1. Transformasi ekonomi difokuskan pada 3 sektor strategis Sumatera Barat dengan distribusi PDRB terbesar yakni Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri serta Sektor bagi penumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat yakni sektor Pariwisata, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni :
    a. Nilai Tukar Petani (NTP), dengan target sebesar 101.40.
    b. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP), dengan target sebesar 104,50.
    c. Pendapatan pembudidaya ikan, dengan target sebesar Rp.50,048 juta.
    d. Pendapatan nelayan, dengan target sebesar Rp.42.443 juta.
    e. Pendapatan Peternak, dengan target sebesar Rp.52.779 juta.
    f. Peningkatan Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dibandingkkan tahun sebelumnya dengan target sebesar 5%.
    g. Peningkatan Pendapatan Petani Hutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan target sebesar 5%.
    h. Konstribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, dengan target sebesar 17,35%.
    i. Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB, dengan target sebesar 9,02%.
    j. Jumlah enterpreneur baru tercipta, dengan target sebanyak 150.658 orang.

k. Persentase Konstribusi Pariwisata pada PDRB, dengan target sebesar 1,25%.

l. Persentase Konstribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB, dengan target sebesar 6,10%.

2. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:

   a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni :

      - Laju Pertumbuhan Ekonomi, dengan target sebesar 4,76%.
      - PDRB ADHK Per Kapita, dengan target sebesar Rp.34,85 juta.
      - PDRB ADHB Per Kapita, dengan target sebesar Rp.59,88 juta.
      - Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 5,70%.

   b. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni :

      - Rasio Gini, dengan target sebesar 0,290.
      - Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan, dengan target 37,8%.

- Tingkat Kemiskinan, dengan target sebesar 5,62%.
- Pengeluaran Riil Perkapita, dengan target sebesar Rp.11.455 ribu.

c. Perluasan Akses dan Kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kuallitas Sumber Daya Manusia, yang di tandai dengan indikator kinerja yakni:

- Indeks Pembangunan Manusia, dengan target sebesar 74,25.
- Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum yang layak, dengan target sebesar 86,00%.
- Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi yang layak, dengan target sebesar 86,00%.
- Persentase Balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, dengan target sebesar 90%.

Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan, dengan target sebesar 92,4%.

Prioritas pembangunan pada tahun 2024 merupakan prioritas yang sama pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, hal ini agar terjadinya konsistensi pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya serta menjaga agar arah pembangunan RPJMD tetap terjaga, sehingga hasil akhir di tahun 2026 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Adapun Prioritas

Pembangunan RKPD Tahun 2024 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Prioritas Pembangunan 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.

   Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional. Kualitas Pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreativitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi. Selain pendidikan berkualitas, pada Prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/ pikiran/ ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna,sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan

angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Prioritas Pembangunan 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.

   Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara', Syara'Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal-vertikal maupun horizontal-horizontal.

   Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang

membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS-SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

3. Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

   Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan antara lain karena lebih dari 20% struktur perekonomian di Sumatera Barat di topang dengan sektor pertanian, selain itu sektor ini juga berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), adanya potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

   Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan

pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan. Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

4. Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/ Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital.

   Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertenian, Kehutanan dan Perikanan, namun sekotor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatan tigkat pendapatan masyarakat sehinnga Sumatera Barat dapat keluar dari *middle income trap*.

   Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusal

Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Prioritas Pembangunan 5: Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan.

   Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga proritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa. Dalam pengembangan sektor pariwisata, Sumatera Barat mengambil

langkah pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT) yang berarti memberikan pemberdayaan yang lebih demokratis dengan memberikan kesempatan atau akses kepada masyarakat setempat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata serta menikmati hasilnya secara lebih adil dan merata.

Pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT) juga memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal atau sebagai upaya untuk mengelola sumber daya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Syarat-syarat dari pariwisata berbasis komunitas *Community Based Tourism* (CBT) adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi dalam pengelolaan, membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, dapatkan posisi yang valid dengan otoritas terkait, meningkatkan martabat manusia dan kesejahteraan sosial, mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, menghormati warisan budaya lokal, berpartisipasi aktif dalam konservasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dengan meningkatkan kualitas interaksi dan bertujuan untuk membentuk kemandirian masyarakat.

6. Prioritas Pembangunan 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

   Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi). Sehingga pada prioritas ini akan di fokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang berkualitas, penyediaan infrastruktur konektivitas untuk meminimalisir ketimpangan wilayah dengan tidak mengesampingkan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan. Disamping itu mengingat Sumatera Barat juga merupakan kawasan yang dengan indek risiko bencana yang relatif tinggi, ketahanan bencana juga menjadi prioritas utama.

7. Prioritas Pembangunan 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

   Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima bertujuan untuk

menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandasan dalam prinsip *good and clean government*. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya adalah dengan cara peningkatan

penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Pembangunan ekonomi tahun 2024 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi, memperhatikan strategi pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan, sehingga arah kebijakan tahunan yang dituangkan dalam tema pembangunan yaitu "Pembangunan Sumber Daya Ekonomi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan", yaitu:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi melalui pelatihan, penyuluhan, jejaring usaha, akses keuangan perbankan, penguatan kelembagaan, dengan arah kebijakan antara lain:
   a. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
   b. Pendampingan kelompok usaha masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

c. Pendampingan kewirausahaan hulu hilir (peningkatan kapasitas, bisnis proses, akses finansial, akses pasar).
d. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
e. Pembinaan pembangunan desa wisata.
f. Pendampingan industri pengolahan perikanan.
g. Pendampingan budidaya perikanan.
h. MoU dengan pasar atau badan usaha.

2. Menyediakan dan memfasilitasi ketersediaan infrastruktur ekonomi pada pusat atau kawasan ekonomi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata, dengan arah kebijakan antara lain:
   a. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, sistem jaringan dan sampul transportasi serta pusat pemerintahan.
   b. Pengembangan kawasan strategis daerah.
   c. Faslilitasi pembangunan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
   d. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
   e. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.
   f. Percepatan penyediaan ases air bersih untuk masyarakat perdesaan.

g. Pembangunan destinasi wisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag, Katiet).

3. Mendorong transformasi ekonomi pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.
   a. Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah (pisang, dan ikan).
   b. Pengembangan komoditi pertanian yang berorientasi pasar.
   c. Pembinaan hulu hilir pelaku usaha atau wirausaha (enterprenuer).
   d. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
   e. Kemudahan perizinan.

Tema pembangunan daerah ini diwujudkan dalam beberapa prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan sebagai bagian dari arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026, antara lain:

1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)

   Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem pembangunan pendidikan dengan berkomitmen *mandatory spending* minimal 20 persen pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kesetaraaan. Pembangunan Pendidikan sebagai satu kesatuan pembangunan sistem pendidikan daerah yaitu mulai dari sisi hulunya yaitu membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat, penyediaan sarana dan prasana pendidikan seperti membuka sekolah baru, pembangunan dan

rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, beasiswa pendidikan, sekolah gratis, penyediaan asrama dan transportasi sekolah. Pada tahapan proses pembelajaran melalui penguatan pelaksanaan kurikulum merdeka, pendidikan karakter `pelaksanaan guru penggerak, merdeka mengajar, merdeka belajar, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, penguatan musyawarah tenaga kependidikan/guru dan kepala sekolah, fasilitasi sertifikasi guru/tenaga pendidik selain itu, diberikan beasiswa bagi tamatan SMA/SLTA masyarakat Mentawai yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sehingga disisi hilirnya menghasilkan peserta didik/ sumber daya manusia yang memiliki kemampuan afeksi, kognisi dan psikomotor pendidikan untuk mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing.

Dengan prioritas Pembangunan ini diharapkan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan secara kumulatif meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan angka putus sekolah, peningkatan rata lama dan harapan lama sekolah dan peningkatan kualitas

pendidikan melalui pencapaian rapor pendidikan daerah yang lebih baik.

Tabel 4.8
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan		
	Rata Lama sekolah	7,45 tahun
	Harapan Lama Sekolah	13,18 tahun
Meningkatnya Budaya Literasi		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,5

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) pada Tahun 2024 antara lain:

1. Pemenuhan SPM Pendidikan.
2. Pendidikan gratis bagi semua.
3. Beasiswa Perguruan Tinggi bagi masyarakat miskin berprestasi.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
6. Pembangunan dan Pendidikan Berasrama.
7. Peningkatan jenjang pendidikan tenaga pendidik (ke S1)
8. Fasilitasi Sertifikasi Pendidik.
9. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
10. Pengembangan intra dan ekstrakurikuler atau pembelajaran lingkungan.
11. Peningkatan fungsi perpustakaan.
12. Pengembangan pustaka keliling.

13. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah.
14. Pembinaan dan pengawasan perpustakaan daerah dan desa.

Pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan pembagunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) dilaksanakan dengan program prioritas seperti pada Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
Prioritas Pembangunan : Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)						
1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Persen	22	98.136.634.424	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SD	Persen	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APK SMP	Persen	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD /MI/ paket A	Persen	82		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SMP /MTS/ Paket B	Persen	62,50		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	>50		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persen	>50		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	Persen	2,50	140.538.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM PRIORITAS	KINERJA			PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	Persen	92	140.658.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	Persen	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	Persen	20		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	25	1.781.528.520	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Persen	100	8.600.659.897	Sekretariat Daerah
TOTAL					108.800.020.341	

Prioritas Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas) tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 5 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.108.800.020.341.

2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)

Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah untuk medukung perlindungan kesehatan semesta bagi Masyarakat Mentawai dengan mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 persen. Sebagai daerah kepulauan dengan 3 pulau besar yang terpisah oleh laut yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora dan Pulau Pagai Utara Selatan perlu mengakomodasi sistem layanan Kesehatan berbasis kepulauan dengan menempatkan RS rujukan disetiap pulau besarnya sebagai tindakan kuratif pertama sebelum

selanjutnya dilakukan tindakan layanan rujukan lanjutan baik itu di tingkat kabupaten atau di tingkat propinsi.

Penguatan sistem kesehatan daerah dilakukan dengan penguatan disisi hulunya yaitu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasana kesehatan, menyediakan alat kesehatan yang terstandardisasi, menjamin ketersediaan obat-obatan, menyediakan tenaga kesehatan hingga ditingkat desa dan dusun baik itu puskesmas pembantu (pustu) dan poskesdes. Selain itu, juga diberikan jaminan kesehatan dan jaminan persalinan bagi Masyarakat miskin. Dalam proses peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dilakukan peningkatan kapasitas dan kepastian keahlian tenaga kesehatan melalui fasilitasi sertifikasi profesi kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, melaksanakan pelayanan kesehatan diluar gedung dengan melibatkan tenaga dokter hingga ke dusun-dusun, melakukan kerjasama dengan RS dan perguruan tinggi melalui *sister hospital,* penguatan RSUD menjadi BLUD, begitu juga penguatan pada promosi dan advokasi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti para kader posyandu, pemerintahan desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (SurfAid, Yayasan Fondasi Hidup, CDRM-CDS, Bank Nagari/badan usaha lainnya). Intervensi spesifik sebagai

upaya terintegrasi penurunan stunting di Kepulauan Mentawai pada lokasi prioritas Desa Simatalu, Muntei, Sagulubbeg, Sikakap, Madobag, Sirilogui, Taikako, Pasakiat Taileleu, Makalo, Saumanganya menjadi fokus dalam pencapaian target penurunan stunting pemerintah dan pemerintah daerah khususnya tahun 2024. Begitu juga dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian pada kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan, berperilaku hidup sehat, memperbaiki pola gizi serta menjadi bagian dalam mengkampanyekan dan mengadvokasi Kesehatan, sehingga dihilirnya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan.

Dengan prioritas Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, penurunan prevalensi stunting, menurunkan angka morbiditas dan perbaikan pada kualitas Kesehatan daerah yang dilihat dari Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).

Tabel 4.10
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan		
	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,58
	Angka Harapan Hidup	65,34 tahun
	Prevalensi Stunting	17,00%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) pada Tahun 2024 antara lain:

1. Pemenuhan SPM Kesehatan.
2. Promosi kesehatan.
3. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
5. Penyediaan alat Kesehatan, obat-obatan, dan vaksin.
6. Pelayanan kesehatan daerah terpencil.
7. Advokasi kesehatan lingkungan.
8. Pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan sampai ke desa.
9. Intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan.
10. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 bulan.
11. Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum.
12. Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah.

13. Komunikasi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting.
14. Pelaksanaan aksi Konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas melalui penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.
15. Pembangunan RS rujukan setiap pulau besar (Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara Selatan) beserta kelengkapannya (alkes, mobiler, tenaga medis).

Tabel 4.11
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)					
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	90%	58.482.154.954	Dinas Kesehatan, RSUD
		Cakupan Desa UCI	80%		
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	23 /1000 KH		
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)	250 / 100rb KH		
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan	75%		
		Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	<5%		

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		Akreditasi Rumah Sakit	B		
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	85/ 100.000 penduduk		
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rata-rata lama pasien dirawat	5 Hari	230.000.000	Dinas Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12 Puskesmas	250.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	90%		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa dengan PHBS	22 desa	400.000.000	Dinas Kesehatan
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah	31%	3.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	60%	1.070.458.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL				63.532.612.954	

Prioritas Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat) tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 6 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.63.532.612.954.

3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

Pembangunan infrastruktur diperdesaan dan perkotaan dan Pembangunan infrastruktur dalam menunjang konektivitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Pembangunan jaringan jalan dan membuka konektivitas transportasi daerah merupakan hal mendasar dalam memajukan suatu daerah. Program peningkatan jaringan jalan Trans Mentawai menjadi prioritas dalam membuka akses sosial ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan kawasan strategis atau pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan wilayah seperti pada pusat ibukota kecamatan didukung dengan ketersediaan infrastruktur jaringan jalan, air bersih, telekomunikasi. Untuk wilayah yang belum dihubungkan atau diakses melalui transportasi darat maka akses tranportasi laut diarahkan untuk menjangkau konektivitas daerah tersebut terutama sebagai interkoneksi jalan Trans Mentawai.

Pengembangan kawasan perkotaan Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut, Muara Sikabaluan terus didorong dengan kelengkapan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas sosial, budaya dan ekonomi masyarakat seperti pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan/jembatan, akses transportasi laut (antar pulau dan Mentawai-Padang), pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih,

pengembangan dan pembangunan irigasi, Pembangunan TPS kecamatan (Sipora Selatan, Sikakap, Siberut Selatan, Siberut Utara). Begitu juga dengan kawasan atau pusat kegiatan wilayah lainnya senantiasa didorong pembangunan infrastruktur jalan, telekomunikasi, transportasi laut antar pulau (kapal cepat), air bersih. Selain itu, prioritas ini juga diarahkan untuk mendukung program terintegrasi dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting daerah pada lokus intervensi seperti pada Desa Simatalu, Muntei, Sagulubbeg, Sikakap, Madobag, Sirilogui, Taikako, Pasakiat Taileleu, Makalo, Saumanganya. Selain itu juga mendukung kawasan strategis pariwisata daerah 3M1K yaitu pada kawasan pariwisata Mapadegat, Madobag, Muntei, dan Katiet.

Dengan prioritas Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatnya panjang jaringan jalan mantap, cakupan air baku, cakupan telekomunikasi, rasio elektrifikasi, cakupan layanan transportasi daerah.

Tabel 4.12
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas		
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	17%
Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air		
	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	72%
	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	75%

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah		
	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi		
	Cakupan Layanan Transportasi	83%
Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika		
	Cakupan layanan telekomunikasi	88%
Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah		
	Rasio Elektrifikasi	86%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan pembangunan infrastruktur, pembangunan perdesaan perkotaan dan konektivitas (Mentawai Mantap) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Pembangunan jalan Trans Mentawai.
3. Membuka akses jalan menghubungkan pusat-pusat ekonomi, sosial, budaya, sistem jaringan dan simpul transportasi serta pusat pemerintahan.
4. Integrasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
5. Pembangunan sistem layanan irigasi.
6. Penyediaan air baku.
7. Pengendalian abrasi sungai dan pantai.
8. Penanaman kembali lahan krisis pesisir pantai.
9. Revisi RTRW kabupaten.
10. Penyusunan regulasi rencana rinci tata ruang.
11. Penyediaan sistem informasi tata ruang.

12. Pengembangan kawasan strategis daerah
13. Faslilitasi pembangunan pelabuhan pengumpan dalam mendukung sistem transportasi daerah.
14. Peningkatan layanan transportasi darat, laut.
15. Fasilitasi dan mendorong perluasan dan peningkatan kualitas data dan telekomunikasi.
16. Pengembangan SPBE (e-goverment).
17. Pembukaan jalan untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
18. Pengembangan kawasan permukiman.
19. Pembangunan SPAM di desa prioritas (Saibi Samukop, Sioban, Tuapejat).
20. Fasilitasi pembangunan SPAM (Sikabaluan).
21. Percepatan penyediaan kases air bersih untuk masyarakat perdesaan.
22. Pembinaan tata kelola penyediaan air minum berbasis masyarakat.
23. Fasilitasi pembangunan TPA Tuapejat.
24. Pembangunan TPS Kecamatan
25. Pengadaan sarana dan prasana persampahan.
26. Pengelolaan persampahan.
27. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.

Tabel 4.13
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)					
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	11%	124.997.139.547	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	5%	450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan jaringan irigasi	25 ha	5.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	7,50%		
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%	2.450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	78%	6.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase armada angkutan laik jalan/layar	88%	9.130.000.000	Dinas Perhubungan
7	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	320.606 orang	3.052.095.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	708.328 ton		
8	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80%	2.880.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	62%	13.236.160.053	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
10	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	51%	1.900.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	7%	102.842.576	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	31%	3.100.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Berkurangnya titik genangan Air	71%	4.080.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL				177.278.237.176	

Prioritas Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap) tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 13 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.177.278.237.176.

4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)

   Prioritas ini diarahkan pada penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu pada pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat korban bencana atau masyarakat yang terdampak program pemerintah seperti pada Desa Monganpoula, Pulitcoman (korban banjir) Desa Simalegi, Simatalu (bencana gempa bumi). Prioritas pembangunan ini juga mendukung upaya terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan

ekstrem serta penanganan stunting yaitu pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni seperti pada wilayah Simatalu, Muntei, Sagulubbeg, Sikakap, Madobag, Sirilogui, Taikako, Pasakiat Taileleu, Makalo, Saumanganya. Selain itu, juga penyediaan prasarana sarana utilitas pendukung hunian masyarakat seperti drainase, jalan lingkungan perumahan, Sanitasi, pengelolaan persampahan dan mitigasi bencana. Begitu juga integrasi program dalam mendukung kawasan strategis pariwisata di Desa Muntei dan Madobag melalui rehabilitasi rumah masyarakat bercirikan ornamen Mentawai.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan persentase rumah layak huni, jumlah desa dengan STBM dan meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana.

Tabel 4.14
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)
Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		
	Persentase Rumah Layak Huni	43%
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan		
	Jumlah Desa STBM	3 desa
Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana		
	Indeks Resiko Bencana	190

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Penguatan penerapan SPM Perumahan Rakyat.
2. Penguatan penerapan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganmasyarakat.
3. Pengembangan kawasan permukiman.
4. Relokasi permukiman terkena bencana atau berpotensi terkena bencana.
5. Pembangunan rumah layak huni.
6. Pembangunan rumah khusus (PNS, TNI/POLRI, nelayan, Asrama/barak).
7. Pengadaan sarana dan prasana persampahan.
8. Pengelolaan persampahan.
9. Pembangunan PSU di kawasan permukiman.
10. Penanaman dan pemeliharaan pohon/bakau disekitaran sungai atau pesisir pantai.
11. Membuka layanan pangaduan terkait pengrusakan lingkungan.
12. Penggunaan material lokal yang layak untuk pembangunan skala perdesaan dengan memperhatikan kelestarian dan dampak lingkungan.
13. Pengembangan desa siaga dan tangguh bencana.
14. Penanganan dan penanggulangan bencana.

Tabel 4.15
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)
Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)					
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	13%	5.510.930.489	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	54%	3.729.634.711	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	7%	102.842.576	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Pemukiman dengan prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	62%	3.632.948.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Perusakan lingkungan hidup yang tertangani	100%	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	100%	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana tertangani	100%	904.252.350	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	100%	297.676.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TOTAL				15.018.284.126	

Prioritas Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih) Tahun 2024 dalam pelaksanaannya

didukung 9 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.15.018.284.126.

5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)

   Prioritas ini diarahkan dengan pendekatan pengembangan komoditas unggulan daerah pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pisang, kelapa, cengkeh dan pengolahan perikanan di wilayah Kecamatan Pagai Selatan (Malakopa, Bulasat) dan Kecamatan Siberut Utara (Sikabaluan/Bose, Monganpoula) menjadi komoditas unggulan pertanian perkebunan dan perikanan yang dikembangkan melalui hilirisasi dalam rangka menaikkan nilai tambah produk komoditas daerah dan memberikan peluang pasar yang lebih besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

   Hilirisasi komoditas pisang di sisi hulu dengan memastikan ketersediaan prasarana bagi industri pengolahan komoditas pisang di Bulasai (Kec. Pagai Selatan), Sikabaluan (Kec. Siberut Utara). Infrastruktur pendukung tersedia seperti akses jalan ekonomi dan jalan produksi pertanian, irigasi, air bersih, listrik.

   Pada tahapan proses yaitu memastikan proses industri pengolahan tepung pisang berjalan (*sustainable*), pertama adalah memastikan pasokan (*supply*) terpenuhi yaitu dengan

budidaya pertanian melalui perluasan dan peningkatan kapasitas produksi tanaman pisang. Pada tahapan ini harus memastikan ketersediaan bibit unggul tanaman pisang, pupuk, alsintan (alat mesin pertanian) dalam rangka mekanisasi/ modernisasi pertanian, penyuluhan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas petani/ kelompok petani. Kedua adalah kelompok tani (poktan) atau badan usaha pertanian memiliki kapasitas dalam mengoperasionalkan, mengelola dan menjalankan/ bisnis proses industri pengolahan tepung pisang yaitu melalui peningkatan kapasitas kelembagaan/ badan usaha pertanian, membuka/ fasilitasi akses keuangan/ koperasi, sertifikasi produk/perizinan usaha, regulasi.

Pada tahap akhir, sisi hilirnya adalah memastikan pasar sudah terhubung dengan hasil produk industri pengolahan. Pada tahap ini proses logistik produk akhir sudah tersistematis dan terhubung ke pasar atau *offtaker*. Selain itu, juga memastikan peluang pasar melalui *marketplace*, *e-commerce*, kolaborasi atau kerjasama mitra strategis.

Pengembangan kawasan holtikultura (Sikakap, Sipora Utara, Siberut Selatan, Siberut Utara) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga ketahanan pangan daerah serta budidaya perikanan (lele, ikan gerapu, kepiting

bakau) di Desa Sidomakmur, Desa Sikakap, Desa Katurei, pengolahan ikan asin di Desa Sikabaluna Dusun Bose.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya wirausaha yang tumbuh.

Tabel 4.16
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
	Pendapatan Perkapita	Rp.61,82 jt
	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pendampingan kelompok nelayan.
2. Pengembangan alat tangkap dan mesin nelayan yang lebih modern.
3. Pendampingan industri pengolahan pertanian dan perikanan.
4. Pendampingan budidaya perikanan.
2. Pengembangan keanekaragaman pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
3. Pengembangan komoditi pertanian yang berorientsi pasar.
4. Pengembangan perternakan lokal dan peternakan anakan.

5. Hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan unggulan daerah (pisang, dan ikan).
6. MoU dengan pasar atau badan usaha.
7. Pendampingan usaha mikro kecil dan koperasi.

Tabel 4.17
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)					
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Indeks Ketahanan Pangan	52	279.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kawasan pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian	85%	602.999.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,2 ton		
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian dan Peternakan		160.447.892	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pisang	145.000 kwintal		
		Cengkeh	1.600 ton		
		Keladi	1.500 kwintal		
		Kelapa	16.000 ton		
		Sagu	950 ton		
		Sapi	2.820 ekor		
		Babi	45.000 ekor		
		Unggas	82.080 ekor		
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertangani	100%	50.776.054	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan nelayan kecil	9.500 ton	16.175.106.240	Dinas Perikanan
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya	260 ton	700.000.000	Dinas Perikanan
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Persentase Kelompok/Usaha Mikro	20%	1.680.000.000	Dinas Perikanan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Perikanan	Kecil pengolahan perikanan yang produktif			
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	7%	1.200.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)	5%	2.364.233.982	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
TOTAL				23.212.563.968	

Prioritas Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing) Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 10 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.23.212.563.968.

6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)

   Prioritas ini diarahkan pada tujuan menjadikan Mentawai menjadi pariwisata kelas dunia melalui pembangunan dan penataan destinasi pariwisata baik dengan skema investasi maupun melalui pemberdayaan masyarakat untuk kawasan pariwisata prioritas daerah 3M1K (Muntei, Madobag, Mapadegat, Katiet), pembinaan dan pendampingan desa wisata, penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan pariwisata lokal serta fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Siberut.

Pembangunan pariwisata Kepulauan Mentawai didorong melalui proses perencanaan terintegrasi melibatkan berbagai sektor dan pelaku pariwisata. Pembangunan kawasan pariwisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag dan Katiet) disisi hulu didorong dengan memastikan ketersediaan infrastruktur jalan sebagai konektivitas wilayah/kawasan. Pada kawasan pariwisata Mapadegat terus didorong untuk konektivitas jalan baik menghubungkan ke kawasan wisata Mapadegat juga menghubungkan kawasan wisata pendukung/penopang seperti pembangunan jalan Mapadegat-Dermaga, jalan lingkungan Desa Muntei, pengembangan jaringan air bersih, rehab rumah di sekitaran kawasan, pengembangan kawasan destinasi Mapadegat dan kawasan destinasi Muntei, peningkatan kualitas kapasitas sistem informasi dan telekomunikasi. Untuk pengembangan dan optimalisasi kawasan destinasi pariwisata dilaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non fisik seperti pembangunan kawasan destinasi serta pendukungnya, begitu juga dengan penyelenggaraan festival pesona Mentawai, pagelaran budaya, pengembangan kapasitas pelaku wisata, usaha mikro kecil, pembinaan sanggar budaya, pelatihan

budayawan, pemerhati wisata, pelatihan kelompok sadar wisata (pokdarwis) serta pembinaan kapasitas desa wisata.

Pada sisi hilirnya promosi, penguatan branding destinasi wisata 3M1K khususnya kawasan wisata Mapadegat dan kawasan wisata Desa Muntei terus dilakukan dalam upaya memperkenalkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke Mentawai. Untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Siberut di Kecamatan Siberut Barat Daya sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan serta kegiatan terkait. KEK Pariwisata Siberut terus didorong untuk ditetapkan oleh Dewan KEK Nasional.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya wirausaha yang tumbuh.

Tabel 4.18
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
	Pendapatan Perkapita	Rp.61,82 jt
	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pembangunan destinasi wisata 3M1K (Mapadegat, Muntei, Madobag, Katiet)
2. Pembinaan pembangunan desa wisata.
3. Penguatan kapasitas pelaku wisata, usaha kreatif mikro kecil.
4. Promosi dan *branding* destinasi wisata.

Tabel 4.19
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)					
1	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	13.000 orang	275.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah wisatawan domestik	725.000 orang		
		PAD sektor pariwisata	12 miliar rupiah		
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	7 hari	2.188.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	3%	1.250.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	13%	5.510.930.489	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	11%	124.997.139.547	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	320.606 orang	3.052.095.000	Dinas Perhubungan
TOTAL				137.273.165.036	

Program Prioritas mendukung Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas) Tahun 2024 dalam pelaksanaannya

didukung 6 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.137.273.165.036.

7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

   Prioritas ini dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis produk lokal dengan memanfaatkan BUMD atau BUMDes, dalam prioritas ini diharapkan munculnya wirausaha muda (enterprenuer), hilirisasi produk pertanian dan perikanan hingga pada akses pasar/pemasaran, Pendampingan UMKM dan IKM (Kelembagaan, Kapasitas SDM, Bisnis Plan/ Proses, Permodalan, Kerjasama Pasar).

   Pada sisi hulu, penguatan kemudahan investasi melalui regulasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Perizinan Berusaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk membuka dan meningkatkan realiasasi investasi. Selain itu, peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan teknis/ keahlian pada Balai Latihan Kerja (BLK) Siberut terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja pasar dan pembinaan calon wirausaha/wirausaha baru. Pada tahapan prosesnya, upaya yang dilakukan adalah membuka akses pasar tenaga kerja melalui bursa tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri bekerja sama dengan lembaga atau penyedia tenaga kerja. Begitu juga dengan membuka kerjasama dengan dunia usaha yang disesuaikan

dengan jenis pelatihan tenaga kerja yang dilakukan. Untuk usaha mikro dan kecil difasilitasi dalam membuka akses keuangan bagi usaha kecil mikro untuk pengembangan kapasitas usaha/produksi, fasilitasi izin produksi, sertifikasi halal, higienis dan perizinan lainnya yang sejenis. Begitu juga dengan penguatan sistem logistik daerah, dalam upaya pengendalian inflasi, menjaga harga barang, melakukan operasi pasar, pasar murah dan memperkuat rentang kendali distribusi barang dan jasa. Sehingga pada hilirnya pembangunan pada prioritas ini akan dihasilkan tenaga kerja yang produktif, memiliki keahlian dan siap untuk memenuhi kebutuhan pasar, begitu juga dengan terciptanya wirausaha/ enterprenuer baru dan peningkatan kapasitas usaha mikro/wirausaha.

Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan dapat menjaga inflasi daerah.

Tabel 4.20
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya Kesempatan Kerja		
	Nilai Investasi	30 miliar rupiah
	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70%
Terkendalinya Inflasi Daerah		
	Tingkat Inflasi	3,50%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pembinaan hulu hilir pelaku usaha atau wirausaha (enterprenuer).
2. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Kemudahan perizinan.
4. Pengawasan peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat.
5. Pengendalian harga kebutuhan pokok.
6. Pengendalian dan pengawasan biaya/*cost* distribusi barang kebutuhan masyarakat.
7. Menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi krisis/gejolak sosial ekonomi atau keadaan darurat.

Tabel 4.21
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)					
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	1,50%	250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerj	25%	120.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	55%	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Perindustrian dan Perdagangan
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	2%	175.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi	10,0%	250.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan nilai penjualan (omset usaha perdagangan)	3%	150.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kesesuaian perencanaan penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (investasi)	85%	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasi realisasi investasi	2,10%	390.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	6,5%	325.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti	85%	1.474.460.000	Sekretariat Daerah
TOTAL				3.334.460.000	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja) Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 10 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.3.334.460.000.

8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)

   Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai melalui fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN.

   Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi daerah.

Tabel 4.22
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah		
	Rasio Elektrifikasi	86%

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pembukaan jalan dalam rangka membuka akses untuk mendukung perluasan transmisi PLN.
2. Penyediaan listrik bagi kawasan permukiman melalui fasilitasi listrik bagi keluarga miskin baik pendanaan APBD Propinsi ataupun melalui kementerian/Lembaga dan swasta.

Tabel 4.23
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)					
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan desa yang terakses listrik	93,02%	135.200.000	Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	11%	124.997.139.547	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL				125.132.339.549	

Program prioritas mendukung prioritas pembangunan Kedaulatan Energi (Mentawai Terang) Tahun 2024 dalam pelaksanaannya didukung 2 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.125.132.339.549.

9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

   Prioritas ini dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi pembangunan rumah ibadah, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas, pembinaan, perlindungan perempuan dan anak, pengembangan seni budaya, pelestarian budaya, mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama, tokoh agama. Tokoh adat/budaya, tokoh masyarakat, serta pembinaan Masyarakat Hukum Adat, penegakan perda serta penguatan Forkopimda.

   Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah MHA yang dilestarikan, meningkatnya Tingkat Kabupaten Layak Anak, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender.

Tabel 4.24
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya		
	Jumlah MHA yang dilestarikan	7 MHA
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender		
	Tingkat Kabupaten layak Anak	500 (pratama)
	Indeks Pembangunan Gender	89,95

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pembangunan kebudayaan.
2. Pengembangan kurikulum budaya Mentawai.
3. Sinergitas dan harmonisasi antar pemangku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
2. Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
3. Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
4. Pengakuan, penetapan, dan perlindungan masyarakat hukum adat
5. Penetapan dan revitalisasi warisan budaya.
6. Peningkatan dialog dan harmonisasi antar pemangku agama, tokoh adat/ budaya dan tokoh masyarakat
7. Sinergitas dan harmonisasi antar pemaku agama tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda.
8. Pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.

9. Pencegahan dan pendampingan kekerasan pada perempuan dan anak.
10. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan yang responsif gender.

Tabel 4.25
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)					
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	63%	871.881.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar yang dibina	4 sanggar	365.195.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	5 MHA	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MHA yang diberdayakan	7 MHA	529.254.437	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	88%	250.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	4 kec	100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	172.505.767	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran	15 OPD	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya	50%		
10	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	77%	17.275.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
11	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas aktif	70%	100.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
12	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	100%	248.158.700	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
13	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial	Persentase konflik sosial tertangani	100%	375.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	944.247.100	Seluruh Kecamatan
TOTAL				21.491.242.304	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2024

dalam pelaksanaannya didukung 14 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.21.491.242.304.

10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

    Prioritas ini dilakukan dengan menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, penyelenggaraan SPBE, menata kembali struktur pemerintah daerah, penerapan sistem merit dalam pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, penuntasan kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewujudkan WTP atas laporan keuangan daerah, penerapan *e-Goverment*, penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan penguatan inovasi daerah dengan menerapkan setiap OPD minimal 2 Inovasi. Penguatan fungsi unsur penunjang pemerintahan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BKD, BKPSDM, Sekretariat Daerah, Inspektorat.

    Melalui prioritas pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai kepatuhan standar pelayanan publik, meningkatkan nilai indek kepuasan masyarakat, meningkatnya Indeks Profesional ASN, meningkatnya Indeks Inovasi Daerah, meningkatnya Indeks SPBE, meningkatnya

Maturitas SPIP, Opini BPK, WBK/WBBM, meningkatnya Nilai SAKIP.

Tabel 4.26
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2024

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	35
	Indek Kepuasan masyarakat	82
Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan		
	Indeks Profesional ASN	82
	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
	Indeks SPBE	2,2
	Maturitas SPIP	Level 3
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel		
	Opini BPK	WTP
	WBK/WBBM	3 OPD
	Nilai SAKIP	B

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) pada Tahun 2024 difokuskan pada:

1. Pelaksanaan merit sistem
2. Pemberian TPP berbasis kinerja
3. Penerapan/implementasi SPBE
4. Penyederhanaan SOTK menunjang tujuan pembangunan.
5. Pembinaan dan pendampingan tata kelola pemerintahan yang melibatkan antar OPD dan stakeholder.
6. Penguatan tata kelola melalui kerja sama antar pemerintah daerah/Lembaga.
7. Pendampingan penerapan Reformasi Birokrasi SAKIP, Zona Intregritas, WBK/WBBM.

Tabel 4.27
Program Prioritas mendukung Prioritas Pembangunan
Penataan Birokrasi (Mentawai Prima) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
Prioritas Pembangunan: Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)					
1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	75%	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)	30%	175.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	90%	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	B	581.932.203	Semua Kecamatan
5	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,25%	268.238.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	92%	150.862.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dan *update*	83%	25.000.000	Semua Kecamatan
8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan realisasi anggaran diatas 90 %	92%	434.929.800	Semua Kecamatan
9	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7%	320.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	85%	2.600.000.000	Inspektorat
		Kapabilitas APIP	Level 3		
11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	50%	150.862.000	Dinas Kependudukan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Kependudukan	kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			dan Pencatatan Sipil
12	Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20%	2.880.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90%	103.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	220	405.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	12%	100.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	70%	930.533.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	8		
17	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keselarasan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan yang responsif gender dan peduli anak	31%	125.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	35%	235.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan	15%	150.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
20	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	88%	125.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu	100%	1.597.363.115	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	87%		
22	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	86%	700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	86%		
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	86%		
23	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	100%	122.703.845.669	Badan Keuangan Daerah
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	30%		
		Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	95%		
24	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi	81%	1.016.468.100	Badan Keuangan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
		dengan baik			
25	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan	8,70%	1.388.142.350	Badan Keuangan Daerah
26	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	86%	1.100.000.000	Inspektorat
27	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	88%	8.600.659.897	Sekretariat Daerah
		Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah	2%		
		Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	100%		
28	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	83	1.474.460.000,00	Sekretariat Daerah
		Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu	90		
29	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang disetujui	80%	5.060.000.000	Sekretariat DPRD
		Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	4 hari		
		Persentase usulan masyarakat melalui reses/ monev menjadi pokok pikiran DPRD	80%		
		Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	75%		
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	401.273.145.487	Seluruh OPD
31	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	675.965.250	Semua Kecamatan
TOTAL				555.600.406.871	

Program Prioritas mendukung prioritas pembangunan Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab) Tahun 2024

dalam pelaksanaannya didukung 31 program prioritas dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.555.600.406.871.

Tabel 4.28
Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Pendanaannya, 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	7,45 tahun	108.800.020.341
			Harapan Lama Sekolah	13,18 tahun	
		Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,5	
2	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,58	58.482.154.954
			Angka Harapan Hidup	65,34 tahun	
			Prevalensi Stunting	17,00%	
3	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	17%	177.278.237.176
		Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	72%	
			Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	75%	
		Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi	83%	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)
			dan informatika		
		Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	88%	
		Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	86%	
4	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	43%	15.018.284.126
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	3 desa	
		Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	190	
5	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.61,82 jt	23.212.563.968
			Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	
6	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.61,82 jt	137.273.165.036
			Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	
7	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	30 miliar rupiah	3.334.460.000
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70%	
		Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	3,50%	
8	Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	86%	125.132.339.549
9	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	7 MHA	21.491.242.304
		Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang	Tingkat Kabupaten layak Anak	500 (pratama)	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Pagu Anggaran (Rp)
		Ramah Anak dan Gender			
			Indeks Pembangunan Gender	89,95	
10	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	35	555.600.406.871
			Indek Kepuasan masyarakat	82	
		Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan			
		Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	82	
			Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	
			Indeks SPBE	2,2	
			Maturitas SPIP	Level 3	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	
			WBK/WBBM	3 OPD	
			Nilai SAKIP	B	
TOTAL					1.225.622.874.325

Tabel 4.28 menunjukkan total anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai 10 prioritas Pembangunan adalah sebesar Rp.1.225.622.874.325. Alokasi anggaran untuk mendanai prioritas Pembangunan dijabarkan dalam program prioritas, dan terdapat beberapa program prioritas yang digunakan bersama untuk mendukung prioritas pembangunan daerah seperti pada program penyelenggaraan jalan.

Penyelarasan prioritas pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya Pembangunan dalam

rangka pencapaian tujuan Pembangunan sebagai satu kesatuan perencanaan Pembangunan nasional. Penyelarasan prioritas Pembangunan juga sebagai wujud kesamaan pandangan, cita-cita dan tujuan akhir Pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.29
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah, 2024

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pembangunan Pertanian Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
			Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang	Pembangunan Infrastruktur,

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024
	Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Penetapan Birokrasi (Mentawai Prima)

Begitu juga dengan keselarasan prioritas pembangunan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran 1 (satu) tahun implementasi dokumen perencanaan jangka menengah terhadap tujuan dan sasaran Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 yang dapat dilihat seperti tabel berikut.

Tabel 4.30
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah
dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Tujuan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	62,48	
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	7,45 tahun	
		Harapan Lama Sekolah	13,18 tahun	
	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	22%	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
		APK SD	100%	
		APK SMP	100%	

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		APM SD /MI/ paket A	82%	
		APM SMP SMP /MTS/ Paket B	62,50%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	
		Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	>50%	
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	>50%	
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	2,50%	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	92%	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
		Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	100%	
		Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	20%	
Sasaran 2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,58	
		Angka Harapan Hidup	65,34 tahun	
		Prevalensi Stunting	17,00%	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	90%	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
		Cakupan Desa UCI	80%	
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	23 /1000 KH	
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH)	250 / 100rb KH	
		Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan	75%	
		Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	<5%	
		Akreditasi Rumah Sakit	B	
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	85/ 100.000 penduduk	
	Program Sediaan Farmasi,	Rata-rata lama pasien	5 Hari	Pembangunan

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	dirawat		Kesehatan (Mentawai Sehat)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12 Puskesmas	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
		Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	90%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa dengan PHBS	22 desa	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
Sasaran 3	Meningkatnya keterampilan hidup (*life skill*) sumber daya manusia	Persentase Penduduk Miskin	14,44%	
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	85,00%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja dilatih yang telah bekerja	22%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi sehat	10%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rasio Akseptor KB	62%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga pra sejahtera beralih ke Keluarga sejahtera	3%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes yang mendapatkan profit	2%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna) yang Aktif	90 lembaga kemasyarakatan	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,2%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	12 organisasi	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Prestasi olahraga	10 Cabang olahraga	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase penurunan PMKS	25%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	100%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Tujuan 2:	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur	12%	
Sasaran 1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	17%	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap	11%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	5%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	72%	
		Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	75%	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan jaringan irigasi	25 ha	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
		Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	7,50%	
Sasaran 3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%	Pembanguan Infrastruktur,

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
				Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	78%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah kawasan strategis yang ditata bangunan dan lingkungannya	1 kawasan	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah sesuai dengan regulasi	100%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 4	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	83%	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase armada angkutan laik jalan/layar	88%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	320.606 orang	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
		Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun	708.328 ton	
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	88%	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas	80%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		Kominfo		Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	86%	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan desa yang terakses listrik	93,02%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Tujuan 3:	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>80	
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	43%	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata	13%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	54%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	62%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	51%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	7%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	31%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Berkurangnya titik genangan Air	71%	Pembanguan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Kawasan Pemukiman dengan prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman	62%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Sasaran 2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	3 desa	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Perusakan lingkungan hidup yang tertangani	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase rekomendasi izin lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Sasaran 3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	190	
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana tertangani	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
	Program Penanganan Bencana	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran	100%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Tujuan 4 :	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	4,27%	
		Indek Gini	0,316	
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.61,82 jt	

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara	13.000 orang	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
		Jumlah wisatawan domestik	725.000 orang	
		PAD sektor pariwisata	12 miliar rupiah	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	7 hari	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	3%	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Indeks Ketahanan Pangan	52	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase kawasan pertanian yang dilengkapi dengan utilitas Pertanian	85%	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,2 ton	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Pertanian dan Peternakan		Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
		Pisang	145.000 kwintal	
		Cengkeh	1.600 ton	
		Keladi	1.500 kwintal	
		Kelapa	16.000 ton	
		Sagu	950 ton	
		Sapi	2.820 ekor	
		Babi	45.000 ekor	
		Unggas	82.080 ekor	

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Bina kelompok Tani yang produktif	42%	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penyakit Hewan yang tertangani	100%	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertangani	100%	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan nelayan kecil	9.500 ton	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Budidaya	260 ton	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Kelompok/Usaha Mikro Kecil pengolahan perikanan yang produktif	20%	Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	7%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha	5%	Pembangunan Usaha Kecil

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		formal (mikro/kecil)		Menengah (Mentawai Kerja)
Sasaran 2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	30 miliar rupiah	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,70%	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	1,50%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	42%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	55%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	2%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan omset pedagang pasar yang direvitalisasi	10,0%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan nilai penjualan (omset usaha perdagangan)	3%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kesesuaian perencanaan penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (investasi)	85%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasi realisasi investasi	2,10%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Sasaran 3	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	3,50%	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	6,5%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti	85%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Tujuan 5 :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan	Indek RB	B	

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Melayani			
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	35	
		Indek Kepuasan masyarakat	82	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	75%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)	30%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	90%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	B	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,25%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	92%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid dan *update*	83%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan realisasi anggaran diatas 90 %	92%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
Sasaran 2	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	82	
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	
		Indeks SPBE	2,2	
		Maturitas SPIP	Level 3	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	85%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Kapabilitas APIP	Level 3	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	50%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Aplikasi	Persentase layanan publik	20%	Penataan Birokrasi

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Informatika	yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		(Mentawai Prima)
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	220	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	12%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	70%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	8	
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keselarasan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan yang responsif gender dan peduli anak	31%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	35%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	15%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	88%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	
		WBK/WBBM	3 OPD	
		Nilai SAKIP	B	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu	100%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	87%	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	86%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	86%	
		Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	86%	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	100%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	30%	
		Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	95%	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	81%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan	8,70%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	86%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi	88%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah	2%	
		Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	100%	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	83	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu	90	

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang disetujui	80%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	4 hari	
		Persentase usulan masyarakat melalui reses/ monev menjadi pokok pikiran DPRD	80%	
		Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	75%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
Tujuan 6 :	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,55	
Sasaran 1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	7 MHA	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	63%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar yang dibina	4 sanggar	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	5 MHA	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MHA yang diberdayakan	7 MHA	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
Sasaran 2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,5	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	25%	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
Tujuan 7 :	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	3,5 persen	
Sasaran 1	Meningkatnya Kehidupan	Tingkat Kabupaten layak	500	

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2024	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Anak	(pratama)	
		Indek Pembangunan Gender	89,95	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	88%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	4 kec	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran	15 OPD	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
		Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya	50%	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	77%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas aktif	70%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	100%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Sosial	Persentase konflik sosial tertangani	100%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	100%	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kab. Kepulauan Mentawai mengambil peran dan turut mendukung pencapaian 7 (tujuh) Prioritas Nasional, sehingga terwujudnya keselarasan proritas Pembangunan baik tingkat nasional maupun di daerah. Adapun penyelarasan dan dukungan RKPD Kab. Kepulauan Mentawai terhadap Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera barat Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.31
Dukungan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan					
	a.	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1)	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio elektifikasi Cakupan desa yang terakses listrik	
	a.1	Peningkatan pemenuhan energy domestik	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	
			4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	Sekretariat Daerah
	b.	Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2)	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Jaringan Irigasi Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	
	b.1	Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya cakupan layanan unit air baku	
			1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan	Jumlah Rencana Teknis dan	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	
			1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	
			1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	
	c.	Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Indek Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	c.1	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	
			2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber	Rencana Kebutuhan Pangan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Daya Lokal	Lokal	
			2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	
		Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan	
			2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tersedianya target konsumsi pangan perkapita/tahun	
			2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
	c	Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Babi, Cengkeh keladi, kelapa, Produktivitas Pertanian dan Peternakan (pisang) Sagu, Sapi, Unggas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	c.1	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
		Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) yang dikelola	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	
		Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mutu Produk Perternakan	
			3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya hijauan pakan ternak	
			3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
	c	Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dangan Utilitas Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lain per hektar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	c.1	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	
			3.27.03.2.01.0017	Penyusunan *Action Plan* Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	
		Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang diadakan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		laut secara berkelanjutan				
			3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
	c	Peningkatan Ketersediaan, Akses, Dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3)	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	c.1	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/kejadian bencana pertanian yang ditangani	
			3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	
	d.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4)	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	d.1	Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
			3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
	d.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4)	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
	d.2	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Usaha Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	
			3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
	d.2	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		serta database kelautan dan perikanan			Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	
			3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
	d.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4)	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Usaha Mikro dan Kecil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
	d.2	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	
			3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	
	d.2	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
	d.2	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	
	e.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5)	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	e.1	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam	Meningkatnya Koperasi Sehat	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Daerah Kabupaten/ Kota		
			2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	
	e.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5)	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	e.1	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan pelaku usaha mikro	
			2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	
	e.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5)	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	e.2	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya daya saing dan pertumbuhan koperasi dalam perekonomian	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	e.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5)	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	e.3	Peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Laporan Jumlah UMKM	
			2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	
	e.	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5)	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	e.4	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya fasilitasi UMKM	
			2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	
	f.	Peningkatan Nilai Tambah,	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN	Persentase pelaku usaha yang	Dinas Koperasi, Usaha

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)		PENDAFTARAN PERUSAHAAN	memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP toko swalayan) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)	Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	f.1	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Meningkatnya izin usaha bagi toko/swalayan	
			3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
	f.2	Pengembangan industri halal	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Meningkatnya pengawasan izin usaha minuman beralkohol	
			3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Terintegrasi Secara Elektronik	
	f.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	f.3	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya retribusi pasar	
			3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola perdagangan yang dibina	
			3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
	f.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	f.3	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	
			3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
	f.3	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan	
			3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	
	f.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	f.3	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan produk dalam negeri	
			3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	
	f.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)			dengan jumlah IUI dan IPUI	Perindustrian dan Perdagangan
	f.4	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya izin usaha industri	
			3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	
	f.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	f.4	Peningkatan industrialisasi	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian	Tersusunnya penetapan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa		Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
			2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
	f.4	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun	
			2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
	f.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	f.4	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	
	f.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	f.4	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
	g.	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7)	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	g.1	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Industri tumbuh yang mengunakan produk dalam negeri	
			3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, *marketplace*,	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					perhotelan dan jasa akomodasi	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	h.1	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
			2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun	
			2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	h.1	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
	h.1	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Usahanya	dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama Kunjungan Wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	h.2	Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1. Berkembangnya desa muntei menjadi kampung wisata adat dan budaya. 2. Berkembangnya pengelolaan ekowisata di Desa Matotonan. Berkembangnya ekowisata di Desa Saibi Samukop Berkembanya ekowisata di Desa Madobag. 3. Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					perumahan Mapadegat menjadi perumahan bermotif adat dan menjadi rumah adat. 4. Tersedianya dokumen perencanaan aksebilitas dan amenitas kawasan manggrove Tuapejat. 5. Tersedianya dokumen perencanaanaksebilitas dan amenitas wisata air terjun Mapetri Sioban dan wisata Mapadegat. 6. Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas toilet dan kamar mandi dan kamar tidur di tempat wisata Mapadegat, Katiet, Madobag dan Muntei.	
			3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	
			3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas sound sistem di lokasi wisata mapadegat	
			3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			3.26.02.2.02.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya jumlah dan kualitas toilet dan kamar tidur dikampung wisata Muntei, Mapadegat, Madobag dan Katiet. 2. Persentase Kawasan Destinasi yang Telah dimanfaatkan. 3. Terbangunnya aksebilitas dan amenitas kawasan manggrove Tuapejat. 4. Terbangunnya aksebilitas dan amenitas pariwisata air terjun Mapetri desa Sioban. 5. Terbangunnya dermaga jetty (Katiet, Tuapejat,). 6. Terbangunnya fasilitas parkir di wisata Mapadegat. 7. Terbangunnya fasilitas umum dikawasan objek wisata. 8. Terbangunnya fasilitas umum wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet 9. Terbangunnya gapura/ identitas gerbang di lokasi 3M1K. 10. Terbangunnya gerbang retribusi kawasan wisata	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Mapadegat. 11. Terbangunnya jalur pejalan kaki/ jalan setapak dan pendestrian, broadwalk dikawasan wisata (Muntei, Madobag, Jati dan Katiet). 12. Terbangunnya landmark kawasan wisata dusun Muntei. 13. Terbangunnya landmark Tuapejat. 14. Terbangunnya pagar pembatas wisata Mapadegat. 15. Terbangunnya pangggung/ pentas pertunjukkan di lokasi wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet. 16. Terbangunnya pos pengawas pantai di Mapadegt, Katiet dan Jati. 17. Terbangunnya Pos TIC di kawasan wisata Mapadegat 18. Terbangunnya sarana dan prasarana wisata di Mapadegat. 19. Terbangunnya talud pantai di Mapadegat dan Katiet. 20. Terbangunnya tempat	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					berjualan bagi pedagang kaki lima bidang kuliner dan penjual barang kerajinan tangan dikawasan wisata Mapadegat. 21. Terbentuknya satgas kebersihan pariwisata (Tuapejat). 22. Terfasilitasinya jumlah sapras di kawasan wisata (Madobag, Matotonan, Saibi). 23. Terlatihnya tenaga *bodyguard* pengawas Pantai (Jati, Mapadegat, Katiet, Goisooinan). 24. Terlengkapinya fasilitas mobiler, peralatan dan perlengkapan pendukung TIC Mapadegat. 25. Terlengkapinya sarana perlengkapan homestay Mapadegat. 26. Terpeliharanya bangunan pos pengawas Pantai. 27. Terpeliharanya pos pengawasan Pantai. 28. Tersedianya gazebo dilokasi wisata Mapadegat. 29. Tersedianya moringbuoi di Malakopa, Silabu, Tuapejat dan Katiet.	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					30. Terselenggaranya monev destinasi pariwisata. 31. Terselenggaranya Rapat koordinasi bidang pengembangan kelembagaan dan destinasi. 32. Tertatanya DAS sungai Kulukubuk. 33. Tertatanya halaman homestay Katiet. 34. Tertatanya kawasan wisata Mapadegat.	
			3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Domestik Jumlah Wisatawan Mancanegara PAD sektor pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah partisipasi event luar negeri meningkat. 2. Jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikasi meningkat. 3. Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri. 4. Jumlah Terfasilitasinya promosi dalam negeri. 5. Meningkatnya jumlah	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					promosi pariwisata melalui media terbuatnya film pariwisata. 6. Terfaslitasinya Jumlah kunjunan-kunjungan kepariwisataan. 7. Tersediannya profil statistik dan data kepariwisataan Tersedianya billboard pemasaran. 8. Tersedianya data dan informasi pariwisata ditingkat prov dan luar negeri. 9. Tersedianya kalender event Tersedianya kegiatan pengawasan wisata Bahari. 10. Tersedianya operasional bagi pos pengawas wisata bahari dan TIC. 11. Terselenggaranya event festival masyarakat tradisional di Buttui. 12. Terselenggaranya event festival muanggau Goisooinan. 13. Terselenggaranya event festival mujarik di Goisooinan. 14. Terselenggaranya event festival pembuatan sampan di Jati. 15. Terselenggaranya event festival tato Mentawai di	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Mapadegat. 16. Terselenggaranya festival kuliner tradisional di mapadegat Terselenggaranya festival pesona Mentawai di Tuapejat	
			3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1. Meningkatnya jumlah orang/masyarakat yang berpartisipasi dalam kemitraan pariwisata. 2. Meningkatnya jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Meningkatnya kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis).	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					4. Meningkatnya kapasitas tenaga kerja bidang ekonomi kreatif khusus untuk kuliner. 5. Terfasilitasinya pengembangan SDM dibidang ekonomi kreatif. 6. Terfasilitasinya proses kreasi produksi konsumsi dan konservasi wisata ekonomi kreatif.	
			3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	
			3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Meningkatnya jumlah kapasitas tenaga kerajinan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.			tangan berbahan material lokal Terfasilitasinya pembentukan kelembagaan dan tata kelola wisata berbasis masyarakat, Tersedianya dokumen kajian pembuatan kain batik motif Mentawai	
			3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Rasio elektifikasi Cakupan desa yang terakses listrik. 2. Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti. 3. Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen. 4. Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu.	Sekretariat Daerah
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik. 2. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik. 3. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					utamanya listrik. 4. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Utamanya Listrik	
			4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1. Persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen. 2. Persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen. 3. Persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	
			4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	
			4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
	h.3	Peningkatan Ketersediaan	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan	Persentase OPD yang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.		Jasa	mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang Mengikuti ULP tepat waktu	
			4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1. Jumlah dokumen koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. 2. Jumlah Dokumen Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. 3. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik. 4. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					utamanya listrik. 5. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik.	
			4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Babi, Cengkeh keladi, kelapa, Produktivitas Pertanian dan Peternakan (pisang) Sagu, Sapi, Unggas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) yang dikelola	
			3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pendampingan Unit	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Usaha Hewan dan Produk Hewan	
			3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mutu Produk Perternakan	
			3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya hijauan pakan ternak	
			3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dangan Utilitas Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lain per hektar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	
			3.27.03.2.01.0017	Penyusunan *Action Plan* Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	
			3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					yang diadakan	
			3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	
			3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
			3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.			Kapasitas Jumlah Kelompok Usaha Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	
			3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	
			3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Usaha Mikro dan Kecil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.			Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	
			3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu)	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Laporan Jumlah UMKM	
			2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya fasilitasi UMKM	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.				
			2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP toko swalayan) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Meningkatnya izin usaha bagi toko/swalayan	
			3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha	Meningkatnya pengawasan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	izin usaha minuman beralkohol	
			3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
	h.	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8)	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	h.3	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya retribusi pasar	
			3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola perdagangan yang dibina	
			3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan					

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)				
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Semua Kecamatan
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya pembinaan Penumbuhan keluarga yang Berkarakter Melalui pengamalan Pancasila Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	
			2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	
			2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
			2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	
			2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal Akses publik terhadap informasi keuangan daerah. 2. Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	Badan Keuangan Daerah
	a.1	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Pedoman Pelaksanaan APBD Persentase Tahapan Penyusunan Rencana Penganggaran Tepat Waktu	
			5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	
			5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	
			5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
	a.1	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah [deleted] Syarat Penyaluran DAU, DAK dan DID	
			5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
	a.1	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Baik	
			5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				dan Beban	Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
			5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	
			5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Pemerintah Kabupaten/Kota	
	a.1	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Baik Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan Baik	
			5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang	
			1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
			1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	
			1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	
			1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	
			1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	
			1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	
			1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata persentase lingkungan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
			1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	
			1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	
			1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	
			1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	
			1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana	
			1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	"Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha"	
			1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	
			1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
			1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Permukiman Kumuh	Terverifikasi	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
			1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	
			1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)				
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	
			1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	
			1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
			1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	
			1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Mengelola Dana BOS	
			1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	
			1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekola	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	
			1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	
			1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
			1.01.02.2.02.0036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	
			1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	
			1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	
			1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi	Jumlah Peserta Didik yang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Peserta Didik	Mengikuti Proses Belajar	
			1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD Meningkatnya APK PAUD	
			1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	
			1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
			1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	
			1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kelulusan Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
			1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
			1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	
			1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	a.1	Pengembangan Daerah	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase sekolah yang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	
			1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	
			1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Cakupan Desa UCI Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah Penduduk Akreditasi Rumah Sakit Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
			1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	
			1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	
			1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	
			1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah *Public Safety Center* (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	
			1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan	Terlaksananya Pengembangan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rata-rata lama pasien dirawat	Dinas Kesehatan/RSUD
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	a	Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan
	a.1	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
			2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
	1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1)	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.a	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	terpenuhinya dokumen kependudukan pendaftaran penduduk (KK,KTP,KIA,ket Pindah datang)	
			2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	
			2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	terpenuhinya dokumen Pencatatan Sipil (Akta lahir,	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					akta kawin,akta cerai,akta kematian)	
			2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	
	1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1)	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid dan update	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.a	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya data profile kependudukan	
			2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	
	2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2)	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penurunan PMKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.a	Kesejahteraan Sosial	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan	
			1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dilatih	
			1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2)	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.b	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar pasnti sosial yang mendapat bantuan	
			1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	Jumlah Peserta Bimbingan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Spiritual, dan Sosial	Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2)	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.b	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS menerima jaminan social Persentase data fakir miskin yang valid	
			1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2)	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.b	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan	
			1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan	Persentase masyarakat yang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	diberdayakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	
			1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	
	3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Cakupan Desa UCI Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah Penduduk Akreditasi Rumah Sakit Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Dinas Kesehatan
	3.a	Peningkatan Kesehatan ibu, anak, Keluarga	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	
			1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	
			1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kesehatan	Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	
			1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Berpotensi Bencana	Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
			1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah *Public Safety Center* (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	
			1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
	3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	Dinas Kesehatan
	3.a	Peningkatan Kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	
	3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rata-rata lama pasien dirawat	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
	3.a	Peningkatan Kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene	Terlaksananya Penerbitan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
	3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3)	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Desa dengan PHBS	Dinas Kesehatan
	3.a	Peningkatan Kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
	4.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.a	Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	
			1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Perpustakaan Sekolah	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	
			1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
			1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	
			1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	
			1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	
			1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi	Jumlah Satuan Pendidikan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Peserta Didik	yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	
			1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	
			1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	
			1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	
			1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
			1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	
			1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD Meningkatnya APK PAUD	
			1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	
			1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
			1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	
			1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kelulusan Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
			1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	
			1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
	4.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	4.a	Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	
			1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	
	4.	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					S.1	
	4.b	Penjaminan Mutu Pendidikan	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.a	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelembagaan PUG	
			2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				termasuk PPRG	Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	
			2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	
	5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.a	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/perangkat daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	
			2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Kewenangan Kabupaten/Kota	
	5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.b	Hak dan Perlindungan Anak	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA	
			2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	
			2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5.b	Hak dan Perlindungan Anak	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	
			2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				pencegahan KTA	pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	
			2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	
			2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	
			2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Penguatan dan pengembangan tingkat daerah	
			2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	
	5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	5.c	Kualitas Pemuda	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Terbayarnya operasional organisasi kepemudaan terselenggarannya jambore pramuka tingkat kabupaten. 2. Terselenggaranya kegiatan kepramukaan dan kepemudaan. 3. Terselenggarannya kursus gerakan kepramukaan Partisipasi pada raimuna	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					dan jambore nasional	
			2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	
	5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5)	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	5.c	Kualitas Pemuda	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya kompetisi sepak bola *all star* di tuapejat. 2. Terselenggaranya kompetisi sepak bola (Bupati Cup). 3. Terselenggaranya kompetisi surfing internasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 4. Terselenggaranya kompetisi surfing tingat kabupaten.	
			2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
			2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	
	6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pengendalian Penduduk yang tertangani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
						Berencana
	6.a	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
			2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonforma	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	
			2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
			2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
			2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data	Jumlah Dokumen Penyediaan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kependudukan	dan Pengolahan Data Kependudukan	
			2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	
			2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
	6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana yang tertangani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	6.a	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	
			2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
			2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Kependudukan, dan Keluarga Berencana).	
			2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	
			2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Stakeholders dan Mitra Kerja	
			2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	
			2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
			2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					(MKJP)	
			2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
			2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
			2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	
			2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
			2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	
			2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	
	6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	6.a	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kesejahteraan Keluarga	Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
			2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
			2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	
			2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					(UPPKA)	
			2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
			2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	
			2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	
			2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	
			2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	
	6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Babi, Cengkeh keladi, kelapa, Produktivitas Pertanian dan Peternakan (pisang) Sagu, Sapi, Unggas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	6.a	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) yang dikelola	
			3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	
			3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mutu Produk Perternakan	
			3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	Tersedianya hijauan pakan ternak	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kabupaten/Kota Lain		
			3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
	6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dangan Utilitas Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lain per hektar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	6.a	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	
			3.27.03.2.01.0017	Penyusunan *Action Plan* Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	
			3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang diadakan	
			3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
	6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
	6.a	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Pengembangan Kelembagaannya	
			3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
			3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
	6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
	6.a	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Usaha Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	
			3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	
			3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
	6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Usaha Mikro dan Kecil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
	6.a	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	
			3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	
	6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	6.a	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Laporan Jumlah UMKM	
			2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi	Jumlah Unit Usaha yang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				dan Pengembangan Usaha Mikro	Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	
	6.	Pengentasan Kemiskinan (PP6)	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	6.a	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya fasilitasi UMKM	
			2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	
	6.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP 7)	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	6.a	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	
	6.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP 7)	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	6.a	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	
			2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	
	6.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP 7)	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Perdagangan
	6.a	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	
			2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	
	6.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP 7)	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	6.b	Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Kesesuaian Kajian Inovasi dan Penelitian Sesuai Denga Kebutuhan Perencanaan	
			5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai dengan kebutuhan Perencanaan	
			5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
	6.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP 7)	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	6.c	Kualitas Pemuda	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Partisipasi pada raimuna dan jambore nasional. 2. Terbayarnya operasional organisasi kepemudaan. 3. Terselenggarannya jamboree pramuka tingkat kabupaten 4. Terselenggarannya kursus 5. gerakan kepramukaan 6. Terselenggaranya kegiatan kepramukaan dan kepemudaan.	
			2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	
	6.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP 7)	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	6.d	Prestasi Olahraga	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya kompetisi sepak bola allstar di Tuapejat. 2. Terselenggaranya kompetisi sepak bola (Bupati Cup). 3. Terselenggaranya kompetisi	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					surfing internasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 4. Terselenggaranya kompetisi surfing tingat kabupaten.	
			2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
			2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
	1.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.a	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	
			1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	
			1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
	1.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1.a	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	
			5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
			5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
	1.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP Meningkatnya Zona Integritas	Inspektorat
	1.a	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong,	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan dan implementasi terhadap kebijakan Terlaksananya Perumusan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		dan budi pekerti			Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	
			6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kinerja SKPD yang dilakukan pendampingan Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya Zona Integritas	
			6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
	1.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan	Semua Kecamatan

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)				
	1.a	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	
			7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
	1.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern,	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		dan Berkarakter (PP1)				
	1.a	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah dana hibah banpol yang dibayarkan dan tersalurkan danan hibah pemilu	
			8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah yang Disusun	
			8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
				umlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,		

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	1.	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas aktif	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	1.a	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terawasi	
			8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	2	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan esejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2)				
	2.a	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Sertifikasi Tenaga Permuseuman	
			2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	
			2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	
			2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	
	2	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan esejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2)	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.a	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	
			2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	
	3.	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3)	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	3.a	Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Menngkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya	
			8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	
			8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
	3.	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3)	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah. 2. Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Sekretariat Daerah
	3.a	Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter				
	4.a	Peningkatan Budaya Literasi	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai SNP	
			2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	
			2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	
			2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	
			2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	
			2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan	Jumlah Bahan Perpustakaan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Pustaka	yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	
			2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	
			2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	
			2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4.a	Peningkatan Budaya Literasi	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar	
			2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	
			2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daftar arsip in-aktif yang telah dibuat daftar	
			2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	
			2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat	1. Terlaksananya pengelolaan Simpul Jaringan Informasi	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kabupaten/Kota	Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten. 2. Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten.	
			2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
	4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	4.a	Peningkatan Budaya Literasi	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip sesuai NSPK	
			2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
	4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Berpengetahuan, dan Berkarakter			2. Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	
	4.b	Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Kesesuaian Kajian Inovasi dan Penelitian Sesuai Denga Kebutuhan Perencanaan	
			5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai dengan kebutuhan Perencanaan	
			5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata persentase lingkungan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.a	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	
			1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	
			1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	
			1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	
			1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana	
			1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	1	Infrastruktur Pelayanan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan	Dinas Perumahan dan

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Dasar (PP1)			pemukiman kumuh	Kawasan Permukiman
	1.a	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	"Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha"	
			1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	
			1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
			1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	
			1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
			1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	
			1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.b	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	
			1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPA	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	
			1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	
			1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	
			1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan system pengelolaan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.b	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Meningkatnya lingkungan pemukiman yang dilengkapi	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		dan Aman		Daerah Kabupaten/Kota	dengan sistem pengolahan air limbah	
			1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	
			1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	
	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Berkurangnya titik genangan air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.b	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan perkotaan yang dilengkapi drainase lingkungan	
			1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
			1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	
	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.b	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kawasan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	
			1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	
			1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Persampahan yang disusun	
	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan
	1.c	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Kabupaten/Kota	
	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan
	1.c	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
			2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
			2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	
	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.d	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	
			1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	
			1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	
			1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	
	1	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Jaringan Irigasi Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.e	Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigas	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnyadi Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	
			1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	
			1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	
	2	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2.a	Konektivitas Jalan	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					baik dan sedang	
			1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
			1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	
			1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	
			1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	
			1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	
			1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	
			1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	
			1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	
	2	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan
	2.b	Konektivitas Laut	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
			2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	
	2	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan
	2.c	Konektivitas Darat	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif	Jumlah Data dan Informasi	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2	Infrastruktur Ekonomi (PP2)	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
	2.d	Transportasi Perkotaan	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif	Jumlah Data dan Informasi	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	3	Infrastruktur Perkotaan (PP3)	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan
	3.a	Transportasi Perkotaan	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
			2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
			2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	
	5	Transformasi Digital	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo. 2. Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika
	5.a	Penuntasan Infrastruktur TIK	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah	
			2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya nilai indeks SPBE Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Eeletronik	
			2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
			2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
	5	Transformasi Digital	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	5.b	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	
			2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	
			2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim					
	1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	1.a	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan	
			2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	
			2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota	
			2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	
	1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tindak	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	lanjuti	
	1.a	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	
			2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yangdiawasi	
	1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	1.b	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berkurangnya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	
	1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		
	1.c	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terwujudnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		
			2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	
	1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	1.c	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terwujudnya Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Hidup				
			2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	
			2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	
			2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	
			2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	
			2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
	1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1)	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tindak lanjuti	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	1.d	Penguatan Kelembagaan	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap	Terwujudnya Pembinaan dan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	
			2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	
	2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Bencana tertangani 2. Persentase Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Siap Menghadapi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2.a	Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	
			1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
			1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	
			1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	
			1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	
			1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	
			1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban. 2. Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	
			1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	Jumlah Korban yang Berhasil	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Korban Bencana Kabupaten/Kota	Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	
			1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	
			1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	
	2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2.a	Penanggulangan Bencana	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaranhutan dan lahan	
			1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	
			1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
	2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	2.b	Peningkatan Ketahanan Iklim	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berkurangnya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	
	2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	2.c	Pembangunan Energi Berkelanjutan	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berkurangnya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	
	2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2.c	Pembangunan Energi Berkelanjutan	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaranhutan dan lahan	
			1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	
			1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Penanggulangan Kebakaran	
	2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2)	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	2.d	Pemulihan Lahan Berkelanjutan	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berkurangnya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					
	1.	Konsolidasi Demokrasi (PP1)	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	1.a	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dana hibah banpol yang dibayarkan dan tersalurkan danan hibah pemilu	
			8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	
			8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	1.	Konsolidasi Demokrasi (PP1)	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas aktif	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	1.a	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terawasi	
			8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	1.	Konsolidasi Demokrasi (PP1)	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan	Semua Kecamatan
	1.b	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	
			7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
	1.	Konsolidasi Demokrasi (PP1)	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.c	Peningkatan Kualitas	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Pengelolaan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		Komunikasi Publik		Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	
			2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	
			2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	2.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2)	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	2.a	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2)	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. Jumlah Wisatawan Domestik 2. PAD sektor pariwisata 3. Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	2.b	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah partisipasi event luar negeri meningkat. 2. Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	
			3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
	2.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2)	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase jumlah produk hukum yang	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					digugat atau bermasalah 2. Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	
	2.b	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah. 2. Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
	2.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2)	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 2. Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik 3. Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	Badan Keuangan Daerah
	2.b	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
	2.	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2)	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	2.b	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
			8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
	3	Penegakan Hukum Nasional (PP3)	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang tertangani	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	3.a	Penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
	3	Penegakan Hukum Nasional (PP3)	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	3.a	Penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terwujudnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait		

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				dengan PPLH		
			2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	
	3	Penegakan Hukum Nasional (PP3)	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.a	Penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
	3	Penegakan Hukum Nasional (PP3)	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3. Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah.	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	
	3.a	Penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	
			4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	
			4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	
	3	Penegakan Hukum Nasional (PP3)	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna Persentase Ranperda yang disetujui 2. Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	Sekretariat DPRD

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
	3.a	Penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukan perda dan peraturan DPRD	
			4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	
			4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	
			4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
			4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
	3	Penegakan Hukum Nasional (PP3)	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Level Kapabilitas Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP Meningkatnya Zona Integritas	Inspektorat
	3.a	Penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1. Meningkatnya kinerja SKPD yang dilakukan Pendampingan. 2. Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi. 3. Terlaksananya Zona Integritas	
			6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
	4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4.a	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
			5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Pemberhentian	
			5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	
			5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		
			5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	
			5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		
			5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
			5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	
			5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
			5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	
	4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	4.a	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		
			5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	
			5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
			5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
	4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2. Level Kapabilitas Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP 3. Meningkatnya Zona Integritas	
	4.b	Transformasi pelayanan publik	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	4. Meningkatnya kinerja SKPD yang dilakukan Pendampingan. 5. Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi. 6. Terlaksananya Zona Integritas	
			6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
	4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan bdan Pelaporan PelayananTugas Perangkat Daerah	Seluruh OPD
	4.c	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	X.XX.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			X.XX.1.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu 2. Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	4.c	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Monitoring Pembangunan	
			5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
	4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4)	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAANPENGAWASAN	1. Persentase Tindak Lanjut Temuan 2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Inspektorat
	4.c	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pedoman bagi Kepala SKPD, ASN, dan Aparatur Desa dalam penyelenggaraan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terlaksananya Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	
	5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5)	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan	Semua Kecamatan
	5.a	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	
			7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
	5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5)	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	5.a	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
			8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
	5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5)	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	5.a	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	jumlah dana hibah banpol yang dibayarkan dan tersalurkan danan hibah	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	pemilu	
			8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah yang Disusun	
			8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
				umlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan		

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Situasi Politik di Daerah		
			8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas aktif	
			8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terawasi	
			8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5)	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	5.b	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya suasana aman dan tentram bagi masyarakat	
			1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	
	5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5)	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	5.b	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
			8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	

No	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.32
Dukungan Program Prioritas Daerah (RKPD) Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2024
terhadap Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing				
	1.1 SUMBAR Sehat dan Cerdas				
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	
		1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	
		1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
					Personil Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
			1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	
			1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	
			1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	
			1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	
			1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekola	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	
			1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	
			1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
			1.01.02.2.02.0036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	
			1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
					dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	
			1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	
			1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
			1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD Meningkatnya APK PAUD	
			1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	
			1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	
			1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Manajemen	
			1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	
			1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kelulusan Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	
			1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
			1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
			1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	
			1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi	Jumlah Satuan Pendidikan yang	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
				Peserta Didik	Menyelenggarakan Proses Belajar	
			1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	
			1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	
			1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Cakupan Desa UCI Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Daaerah Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah Penduduk Akreditasi Rumah Sakit Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	
			1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	
			1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kesehatan	Kesehatan yang Disediakan	
			1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	
			1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	
			1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	
			1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Ibu Hamil	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	
			1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Sehat	
			1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah *Public Safety Center* (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
			1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
			1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	
			1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	
			1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	
			1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rata-rata lama pasien dirawat	Dinas Kesehatan/RSUD
			1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	
			2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	
			2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	
			2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	
			5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN	Jumlah produk rekayasa dan inovasi	Badan Perencanaan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				PENGEMBANGAN DAERAH	teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	Pembangunan Daerah
			5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Kesesuaian Kajian Inovasi dan Penelitian Sesuai Denga Kebutuhan Perencanaan	
			5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai dengan kebutuhan Perencanaan	
			5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Partisipasi pada raimuna dan jambore nasional. 2. Terbayarnya operasional organisasi kepemudaan. 3. Terselenggarannya jamboree pramuka tingkat kabupaten 4. Terselenggarannya kursus 5. gerakan kepramukaan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
					6. Terselenggaranya kegiatan kepramukaan dan kepemudaan.	
			2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	
			2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Terselenggaranya kompetisi sepak bola allstar di Tuapejat. 2. Terselenggaranya kompetisi sepak bola (Bupati Cup). 3. Terselenggaranya kompetisi surfing internasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 4. Terselenggaranya kompetisi surfing tingat kabupaten.	
			2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
			2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	
			2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat	Persentase Perpustakaan Sesuai SNP	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Daerah Kabupaten/Kota		
			2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	
			2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	
			2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	
			2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	
			2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	
			2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	
			2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Pendidikan Khusus serta Masyarakat	pada Satuan Pendidikan	
			2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar	
			2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	
			2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daftar arsip in-aktif yang telah dibuat daftar	
			2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	
			2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten. 2. Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten.	
			2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	
			2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip sesuai NSPK	
			2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah					
	2.1 SUMBAR Religius dan Berbudaya					
			2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Sertifikasi Tenaga Permuseuman	
			2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	
			2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	
			2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	
			2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	
			8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Menngkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya	
			8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	
			8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah. 2. Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Sekretariat Daerah
			4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan	Semua Kecamatan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	
			7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang tertangani	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	2		3	4	5	6
				yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
			2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terwujudnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
			2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan					
	3.1 SUMBAR Sejahtera					
			1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Jaringan Irigasi Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	
			1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya cakupan layanan unit air baku	
			1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	
			1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	
			1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	
			2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Indek Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Cadangan Pangan Masyarakat	
			2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
			2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	
			2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan	
			2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target	Tersedianya target konsumsi pangan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	perkapita/tahun	
			2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
			3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi Babi, Cengkeh keladi, kelapa, Produktivitas Pertanian dan Peternakan (pisang) Sagu, Sapi, Unggas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
			3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) yang dikelola	
			3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	
			3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mutu Produk Perternakan	
			3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
			3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya hijauan pakan ternak	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dangan Utilitas Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lain per hektar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	
			3.27.03.2.01.0017	Penyusunan *Action Plan* Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	
			3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang diadakan	
			3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
			3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Bencana Pertanian yang Tertangani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/kejadian bencana pertanian yang ditangani	
			3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	
			3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	
			3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	
			3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
			3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	
			3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Usaha Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	
			3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Pendidikan dan Pelatihan	Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	
			3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Usaha Mikro dan Kecil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
			3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	
			3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	
			4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio elektifikasi Cakupan desa yang terakses listrik	
			4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	
			4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	Sekretariat Daerah
			2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun	
			2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
			3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran	Jumlah Industri tumbuh yang	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	mengunakan produk dalam negeri	
			3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, *marketplace*, perhotelan dan jasa akomodasi	
			2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
			2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun	
			2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
4	Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital					
	4.1 SUMBAR Sejahtera					
			2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Koperasi Sehat	
			2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	
			2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan pelaku usaha mikro	
			2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	
			2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya daya saing dan pertumbuhan koperasi dalam perekonomian	
			2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Laporan Jumlah UMKM	
			2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	
			2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya fasilitasi UMKM	
			2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	
			3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP toko swalayan) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)	Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Meningkatnya izin usaha bagi toko/swalayan	
			3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Meningkatnya pengawasan izin usaha minuman beralkohol	
			3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
						Perdagangan
			3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya retribusi pasar	
			3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola perdagangan yang dibina	
			3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	
			3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler	Jumlah Laporan Pelaksanaan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan	
			3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	
			3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan produk dalam negeri	
			3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	
			3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	Meningkatnya izin usaha industri	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
			3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	
			2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo. 2. Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah	
			2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya nilai indeks SPBE Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Eeletronik	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
			2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
			2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	
			2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	
			2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	
5	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisataan				
	5.1 SUMBAR Sejahtera				
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama Kunjungan Wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1. Berkembangnya desa muntei menjadi kampung wisata adat dan budaya. 2. Berkembangnya pengelolaan ekowisata di Desa Matotonan. Berkembangnya ekowisata di Desa Saibi Samukop Berkembanya ekowisata di Desa Madobag. 3. Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan perumahan Mapadegat menjadi perumahan bermotif adat dan menjadi rumah adat. 4. Tersedianya dokumen perencanaan aksebilitas dan amenitas kawasan manggrove Tuapejat. 5. Tersedianya dokumen perencanaanaksebilitas dan amenitas wisata air terjun Mapetri Sioban dan wisata Mapadegat. 6. Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas toilet dan kamar mandi dan kamar tidur di	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					tempat wisata Mapadegat, Katiet, Madobag dan Muntei.	
			3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	
			3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas sound sistem di lokasi wisata mapadegat	
			3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya jumlah dan kualitas toilet dan kamar tidur dikampung wisata Muntei, Mapadegat, Madobag dan Katiet. 2. Persentase Kawasan Destinasi yang Telah dimanfaatkan. 3. Terbangunnya aksebilitas dan amenitas kawasan manggrove Tuapejat. 4. Terbangunnya aksebilitas dan amenitas pariwisata air terjun Mapetri desa Sioban. 5. Terbangunnya dermaga jetty (Katiet, Tuapejat,). 6. Terbangunnya fasilitas parkir di wisata Mapadegat.	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					7. Terbangunnya fasilitas umum dikawasan objek wisata. 8. Terbangunnya fasilitas umum wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet 9. Terbangunnya gapura/ identitas gerbang di lokasi 3M1K. 10. Terbangunnya gerbang retribusi kawasan wisata Mapadegat. 11. Terbangunnya jalur pejalan kaki/ jalan setapak dan pendestrian, broadwalk dikawasan wisata (Muntei, Madobag, Jati dan Katiet). 12. Terbangunnya landmark kawasan wisata dusun Muntei. 13. Terbangunnya landmark Tuapejat. 14. Terbangunnya pagar pembatas wisata Mapadegat. 15. Terbangunnya pangggung/ pentas pertunjukkan di lokasi wisata Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet. 16. Terbangunnya pos pengawas pantai di Mapadegt, Katiet dan Jati. 17. Terbangunnya Pos TIC di kawasan wisata Mapadegat 18. Terbangunnya sarana dan prasarana wisata di Mapadegat. 19. Terbangunnya talud pantai di Mapadegat dan Katiet.	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					20. Terbangunnya tempat berjualan bagi pedagang kaki lima bidang kuliner dan penjual barang kerajinan tangan dikawasan wisata Mapadegat. 21. Terbentuknya satgas kebersihan pariwisata (Tuapejat). 22. Terfasilitasinya jumlah sapras di kawasan wisata (Madobag, Matotonan, Saibi). 23. Terlatihnya tenaga *bodyguard* pengawas Pantai (Jati, Mapadegat, Katiet, Goisooinan). 24. Terlengkapinya fasilitas mobiler, peralatan dan perlengkapan pendukung TIC Mapadegat. 25. Terlengkapinya sarana perlengkapan homestay Mapadegat. 26. Terpeliharanya bangunan pos pengawas Pantai. 27. Terpeliharanya pos pengawasan Pantai. 28. Tersedianya gazebo dilokasi wisata Mapadegat. 29. Tersedianya moringbuoi di Malakopa, Silabu, Tuapejat dan Katiet. 30. Terselenggaranya monev destinasi pariwisata. 31. Terselenggaranya Rapat koordinasi bidang pengembangan kelembagaan dan destinasi.	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					32. Tertatanya DAS sungai Kulukubuk. 33. Tertatanya halaman homestay Katiet. 34. Tertatanya kawasan wisata Mapadegat.	
			3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Domestik Jumlah Wisatawan Mancanegara PAD sektor pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah partisipasi event luar negeri meningkat. 2. Jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikasi meningkat. 3. Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri. 4. Jumlah Terfasilitasinya promosi dalam negeri. 5. Meningkatnya jumlah promosi pariwisata melalui media terbuatnya film pariwisata. 6. Terfaslitasinya Jumlah kunjunan-kunjungan kepariwisataan. 7. Tersediannya profil statistik dan data kepariwisataan Tersedianya billboard pemasaran. 8. Tersedianya data dan informasi	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					pariwisata ditingkat prov dan luar negeri. 9. Tersedianya kalender event Tersedianya kegiatan pengawasan wisata Bahari. 10.Tersedianya operasional bagi pos pengawas wisata bahari dan TIC. 11.Terselenggaranya event festival masyarakat tradisional di Buttui. 12.Terselenggaranya event festival muanggau Goisooinan. 13.Terselenggaranya event festival mujarik di Goisooinan. 14.Terselenggaranya event festival pembuatan sampan di Jati. 15.Terselenggaranya event festival tato Mentawai di Mapadegat. 16.Terselenggaranya festival kuliner tradisional di mapadegat Terselenggaranya festival pesona Mentawai di Tuapejat	
			3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Baik Dalam dan Luar Negeri	Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1. Meningkatnya jumlah orang/masyarakat yang berpartisipasi dalam kemitraan pariwisata. 2. Meningkatnya jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Meningkatnya kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis). 4. Meningkatnya kapasitas tenaga kerja bidang ekonomi kreatif khusus untuk kuliner. 5. Terfasilitasinya pengembangan SDM dibidang ekonomi kreatif. 6. Terfasilitasinya proses kreasi produksi konsumsi dan konservasi wisata ekonomi kreatif.	
			3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Pariwisata	Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	
			3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1. Meningkatnya jumlah kapasitas tenaga kerajinan tangan berbahan material lokal 2. Terfasilitasinya pembentukan kelembagaan dan tata kelola wisata berbasis masyarakat, Tersedianya dokumen kajian pembuatan kain batik motif Mentawai	
			3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
			4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Rasio elektifikasi Cakupan desa yang terakses listrik. 2. Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti. 3. Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen. 4. Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu.	Sekretariat Daerah
			4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik. 2. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					utamanya listrik. 3. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik. 4. Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Utamanya Listrik	
			4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1. Persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen. 2. Persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen. 3. Persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	
			4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	
			4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan	Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan				
	6.1 SUMBAR Berkeadilan				
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kawasan permukiman yang tertata persentase lingkungan permukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	
		1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana	
			1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	umlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	"Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha"	
			1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	
			1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
			1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	
			1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
			1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	
			1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan	Jumlah Dokumen Kerja Sama	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				PSU Perumahan	Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
			1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM	
			1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	
			1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPA	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	
			1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	
			1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	
			1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Jaringan Perpipaan	
			1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan system pengelolaan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	
			1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	
			1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	
			1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Berkurangnya titik genangan air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan perkotaan yang dilengkapi drainase lingkungan	
			1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	
			1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	
			1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				REGIONAL		
			1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kawasan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	
			1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	
			1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	
			2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan
			2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan
			2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
			2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
			2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	
			1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	
			1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	
			1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	
			1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	
			1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Jaringan Irigasi Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnyadi Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	
			1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	
			1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	
			1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang	
			1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
			1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	
			1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	
			1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	
			1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	
			1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	
			1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	
			1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Secara Rutin	
			2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan
			2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
			2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
			2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	
			2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Dinas Perhubungan
			2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Dinas Perhubungan
			2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
			2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	
			2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
			2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	
			4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio elektifikasi Cakupan desa yang terakses listrik	
			4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	
			4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	
			2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terwujudnya Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	
			2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	
			2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	
			2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	
			2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
			1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
						Perlindungan Anak
			1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan	
			1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	
			1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Bencana tertangani 2. Persentase Kelompok masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Siap Menghadapi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	
			1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					selama 1 (satu) tahun	
			1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
			1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	
			1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	
			1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	
			1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	
			1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban. 2. Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	
			1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	
			1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	
			1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaranhutan dan lahan	
			1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	
			1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas					
	7.1 SUMBAR Berkeadilan					
			2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
			3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran	Jumlah Industri tumbuh yang	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	mengunakan produk dalam negeri	
			3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, *marketplace*, perhotelan dan jasa akomodasi	
			2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	
			2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun	
			2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	
			2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
			2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
			4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang Mengikuti ULP tepat waktu	
			4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Semua Kecamatan
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya pembinaan Penumbuhan keluarga yang Berkarakter Melalui pengamalan Pancasila Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
			2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	
			2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	
			2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
			2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	
			2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	
			5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal Akses publik terhadap informasi keuangan daerah. 2. Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik Persentase	Badan Keuangan Daerah

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	
			5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.Pedoman Pelaksanaan APBD 2.Persentase Tahapan Penyusunan Rencana Penganggaran Tepat Waktu	
			5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	
			5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	
			5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah [deleted] Syarat Penyaluran DAU, DAK dan DID	
			5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Baik	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
			5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	
			5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Baik Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan Baik	
			5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	terpenuhinya dokumen kependudukan pendaftaran penduduk (KK,KTP,KIA,ket Pindah datang)	
			2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	
			2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	terpenuhinya dokumen Pencatatan Sipil (Akta lahir, akta kawin,akta cerai,akta kematian)	
			2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	
			2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid dan update	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya data profile kependudukan	
			2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	
			1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penurunan PMKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase masyarakat KAT yang diberdayakan	
			1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dilatih	
			1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar pasnti sosial yang mendapat bantuan	
			1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase PMKS menerima jaminan sosial 2. Persentase data fakir miskin yang valid	
			1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelembagaan PUG	
			2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	
			2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	
			2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/perangkat daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	
			2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	
			2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	
			2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	
			2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	
			2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	
			2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Penguatan dan pengembangan tingkat daerah	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kabupaten/Kota		
			2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	
			2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pengendalian Penduduk yang tertangani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
			2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
			2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonforma	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	
			2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
			2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Berencana)	
			2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
			2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	
			2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana yang tertangani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	
			2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
			2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).	
			2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	
			2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	
			2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
			2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode 2. Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
			2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
			2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	
			2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	
					Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
			2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	
			2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	
			2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Pengelolaan Keuangan Keluarga)	serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
			2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
			2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	
			2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
			2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
			2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	
			2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	
			2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	
			2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berkurangnya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
			2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	
			1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaranhutan dan lahan	
			1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	
			1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
			2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Berkurangnya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	
			8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dana hibah banpol yang dibayarkan dan tersalurkan danan hibah pemilu	
			8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	
			8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas aktif	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terawasi	
			8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
					program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	
			2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	
			2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	
			2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
			4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	1. Persentase Penyelesaian Perkara	Sekretariat Daerah

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				KESEJAHTERAAN RAKYAT	hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah 2. Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	
			4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah. 2. Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 2. Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik 3. Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	Badan Keuangan Daerah
			5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI	Persentase desa yang tertib	Dinas Pemberdayaan

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				PEMERINTAHAN DESA	administrasi	Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah. 2.Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	Sekretariat Daerah
			4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	
			4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	
			4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	
			4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	
			4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna Persentase Ranperda yang disetujui 2. Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati	Sekretariat DPRD
			4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukan perda dan peraturan DPRD	
			4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	
			4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	
			4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
				Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
			4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.Level Kapabilitas Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP 2.Meningkatnya Zona Integritas	Inspektorat
			6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1. Meningkatnya kinerja SKPD yang dilakukan Pendampingan. 2. Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi. 3. Terlaksananya Zona Integritas	
			6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
			5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
			5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	
			5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		
			5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	
			5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		
			5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
			5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	
			5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
			5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	
			5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		
			5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	
			5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
			5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2. Level Kapabilitas Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP 3. Meningkatnya Zona Integritas	
			6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	4. Meningkatnya kinerja SKPD yang dilakukan Pendampingan. 5. Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi. 6. Terlaksananya Zona Integritas	
			6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan bdan Pelaporan PelayananTugas Perangkat Daerah	Seluruh OPD
			X.XX.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			X.XX.1.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu 2. Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Monitoring Pembangunan	
			5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
			6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAANPENGAWASAN	1. Persentase Tindak Lanjut Temuan 2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Inspektorat
			6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pedoman bagi Kepala SKPD, ASN, dan Aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terlaksananya Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan	Semua Kecamatan
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	
			7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

No	Prioritas Pembangunan/ Program Unggulan		Kode Rekening	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Organisasi Perangkat Daerah
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya suasana aman dan tentram bagi masyarakat	
			1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan hasil reses dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh Bappeda dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Tabel 4.33
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Yosep, A. Md	Belum dapatnya bantuan mesin pada kelompok nelayan	Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	300,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
2	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan Bantuan mesin 4 PK sebanyak 13 unit untuk kelompok Nelayan GABA PURIMANUAIAT Dusun Panatarat Desa Matobe Kecamatan Sikakap	Dusun Panatarat Desa Matobe Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	13	UNIT	305,409,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
3	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan Bantuan Mesin 4PK sebanyak 11 unit untuk kelompok nelayan NUAKE Dusun Biu-biu Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara	Dusun Biu-biu Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	UNIT	250,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
4	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bantuan mesin 4 PK sebanyak 12 unit untuk kelompok nelayan RIURIU AKE Dusun Keleu Desa Matobe Kecamatan Sikakap	Dusun Keleu Desa Matobe Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	12	UNIT	281,916,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
5	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bantuan mesin 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan PUSARAAT Dusun Bere Desa Makalo kecamatan pagai selatan	Dusun Bere Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
6	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bantuan mesin 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan OBA SIMERU Dusun pinatetek Desa Sikakap kecamatan	Dusun Pinatetek Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	244,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Sikakap						
7	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bantuan mesin 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan PURIMANUAIAT KA KOAT dusun berkat baru desa sikakap kecamatan sikakap	Dusun Berkat Baru Desa Sikakap kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
8	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bantuan mesin 4 PK sebanyak 15 unit untuk kelompok nelayan ARO dusun koritbua desa sinaka kecamatan pagai selatan	Dusun Koritbua Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	UNIT	352,395,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
9	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bantuan mesin 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan PUSARAAT dusun mapinang utara desa saumanganya kecamatan pagai utara	Dusun Mapinang Utara Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
10	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bantuan mesin 15 PK sebanyak 5 unit untuk kelompok nelayan SASARAINA desa saumanganya kecamatan pagai utara	Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	5	UNIT	165,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
11	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan Bantuan mesin 4 PK sebanyak 15 unit untuk kelompok nelayan BAGAT SILAIGAT dusun taikako hulu desa taikako kecamatan sikakap	Dusun Taikako Hulu Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	UNIT	352,395,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
12	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan Bantuan mesin 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan LAGGAI SIBURU dusun taikako barat desa taikakao kecamatan sikakap	Dusun Taikako Barat Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
13	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bantuan mesin 15 PK sebanyak 15 unit untuk kelompok nelayan KAJONEMIENTA dusun taikako hulu desa taikako kecamatan sikakap	Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	UNIT	495,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
14	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadan bantuan mesin boat 4 pk kelompok nelayan SOSOROATTA	Dusun Bere Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	244,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
15	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bantuan mesin boat 4 pk kelompok nelayan PAERUKAT	Dusun Maonai desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	unit	258,423,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
16	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan batuan mesin boat 4 pk kelompok nelayan KUOBA MUGALAI	Dusun Rua Monga/Bulak Monga Desa Taikako Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	unit	250,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
17	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadan bantuan mesin boat 4 pk kelompok nelayan SOSOROATTA	Dusun Bere Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	244,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
18	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bantuan mesin boat 4 pk kelompok nelayan PAERUKAT	Dusun Maonai desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	unit	258,423,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
19	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan batuan mesin boat 4 pk kelompok nelayan KUOBA MUGALAI	Dusun Rua Monga/Bulak Monga Desa Taikako Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	unit	250,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
20	Isar Taileleu, S. PAK	pengadaan bantuan mesin boat 4 pk untuk kelompok nelayan NGENA BARA	dusun lakkau desa bulasat kecamatan pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	13	unit	305,409,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
21	Isar Taileleu, S. PAK	Pengadaan bantuan mesin boat 4 pk	Dusun Parak Batu Desa	DINAS PERIKANAN	10	unit	249,000,000	Pengembangan

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		kelompok nelayan SULU SIMANCEP	Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai					Kapasitas Nelayan Kecil
22	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	bantuan pengadaan mesin boat 4 pk untuk kelompok nelayan lajo silaiming	dusun surat aban desa bulasat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
23	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	bantuan mesin boat 4 pk untuk kelompok nelayan tumandeijatta	dusun korit buah desa sinaka kecamatn pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	245,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
24	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	pengadaan bantuan mesin baot 4 pk untuk kelompok nelayan paddarai simatulu	dusun talopulei desa makalo kecamatan pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
25	Julius Tairarak, S. Pt	bantuan pengadaan mesin boat 15 pk untuk kelompok nelayan malaibibi	dusun sakalagdat desa simalegi kecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	4	unit	132,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
26	Julius Tairarak, S. Pt	bantuan pengadaan mesin baot 15 pk untuk kelompok nelayan monga simaeruk	dusun simalegi muara desa simalegi kecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	4	unit	132,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27	Julius Tairarak, S. Pt	pengadaan bantuan mesin boat 15 pk untuk kelompok nelayan sinujuk	betaet utara desasimalegi kecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	4	unit	132,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
28	Julius Tairarak, S. Pt	pengadaan bantuan mesin boat 15 pk untuk kelompok nelayan sibaithat	dusun sute uleu desa simalegi kecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	4	unit	132,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
29	Yosep, A. Md	Bantuan Mesin Boat 15 Pk Kelompok Betuet Koat	Dusun Peipei Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut	DINAS PERIKANAN	10	unit	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai					
30	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 15 unit untuk kelompok nelayan SIMATIMBALEN	Dusun Buga Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	UNIT	495,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
31	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan SIKALAUT	Dusun Kaleak Desa Sagulubbeg kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
32	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan KERET BAGA	Dusun Mapinang Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
33	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 5 unit untuk kelompok nelayan JANANG MERAH	Dusun Batsuddut Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	5	UNIT	165,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
34	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 3 unit untuk kelompok nelayan KARONIEN	Dusun Batsimaonaibaga Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	3	UNIT	99,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
35	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan SITA TETRE	Dusun Malilimok Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	3	UNIT	105,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
36	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 8 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan	Dusun Pupailiat Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab.	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	301,350,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		SIMATULU TUBU	Kepulauan Mentawai					
37	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan SIMAGGA	Dusun Tolomo Desa Pasakiat Tileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
38	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 14 unit untuk kelompok nelayan KERTANG	Dusun Batsuddut Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	14	UNIT	462,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
39	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 14 unit untuk kelompok nelayan TENGGIRI	Dusun Batsuddut Desa Muara Siberut Kec. Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	14	UNIT	462,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
40	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan SILIPET SIBAU	Dusun Tolou Laggo Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	350,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
41	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan SOSOREN	Dusun Tepuk Desa Sagulubbeg Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
42	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan TUIK	Dusun Kirip Desa Pasakiat Taileleu Kecmatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
43	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan alat tangkap jaring marlon 2 1/2 inchi sebanyak 20 set (20x1.500.000=30.000.000) untuk kelompok nelayan SILUGAI KOAT	Dusun Sikebbukat Desa Saliguma Kec Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	20	SET	50,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
44	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan alat tangkap jaring marlon 2 1/2 inchi sebanyak 10 set (10x1.500.000=15.000.000) untuk kelompok nelayan LAITA SIMAGERET	Dusun Sarausau Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	SET	25,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
45	Fernando Sabajou, S. Pd	bantuan pengadaan bibit ikan nila untuk kelompok budidaya ikan simatoro	Dusun peining buttet desa muntei kecamatan siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	1	paket	150,000,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
46	Fernando Sabajou, S. Pd	pengadaan bantuan mesin tempel 15 pk untuk kelompok nelayan buluk sura dusun makoddiai desa padakiat taileleu	dusun makoddiai desa padakiat taileleu, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
47	Fernando Sabajou, S. Pd	pengadaan bantuan mesin tempel 15 pk untuk kelompok nelayan siturere dusun sirogdak	dusun sirogdak desa muara siberut kecamatan siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	13	unit	385,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
48	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan mesin tempel YAMAHA 15 PK sebanyak 14 unit untuk kelompok nelayan HIU MACAN	Dusun Peigu Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	14	UNIT	462,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
49	Yosep, A. Md	Bantuan Mesin Boat 4 PK Kelompok Nelayan Simariuriu	Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	245,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
50	Salimi, A. Md	Bantuan armada dan alat tangkap Untuk Nelayan LUGAI KOAT Bantuan Mesin 15pk 25 unit	Desa Taileleu, Kecematan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	25	unit	900,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
51	Salimi, A. Md	Bantuan armada dan alat tangkap NELAYAN PADDARAI Pengadaan	Dusun Peipei Kecematan Siberut Barat Daya, Kab.	DINAS PERIKANAN	10	unit	360,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Mesin 15pk 10 unit	Kepulauan Mentawai					
52	Salimi, A. Md	Bantuan peralatan alat Tanggkap Untuk Nelayan PAROMAN Pengadaan jaring+timah+tali (set)	Desa Muara Siberut Kecematan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN			100,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
53	Salimi, A. Md	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan MATAT MONGA Pengadaan Mesin Pompong 5 unit	Dusun Bolotok Desa Taileleu Kecematan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	5	unit	50,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
54	Salimi, A. Md	Bantuan armada dan alat tangkap Nelayan TENGGIRI Pengadaan Mesin 8pk 10 unit	Dusun MAKAKADDUT Desa Katurei Kecematan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	270,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
55	Salimi, A. Md	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan SIMATULU Pengadaan Mesin 8pk 10 unit	Dusun Gotab Desa Saliguma Kecematan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	270,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
56	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan PATSABBLA	Dusun Matotonan Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
57	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan SILIBETAT	Dusun Mangka Baga Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	245,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
58	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan Camar Laut Mesin Boat 4 PK	Dusun Puran Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	13	unit	305,409,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
59	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan Mongan	Subelen Desa Cimpungan	DINAS PERIKANAN	17	unit	416,500,000	Pengembangan

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Subelen Mesin Boat 4 PK Yamaha	Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai					Kapasitas Nelayan Kecil
60	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan Mongan Masigem mesin Boat 4 PK Yamaha	Dusun Tinambu Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	17	unit	399,381,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
61	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin boat 8 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan SARAT SITA	Dusun Parak Batu Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	301,350,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
62	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Simatongi Mesin Boat 4 PK Yamaha	Dusun Bose Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	18	unit	422,874,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
63	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan Tanglo Koan Mesin Boat 4 PK Yamaha	Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
64	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan Saksak Somuro, Mesin 4 PK Yamaha	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	14	unit	343,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
65	Alisandre Zalukhu	Bantuan Mesin Boat 15PK (Yamaha) Kelompok Tunag Kaira	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	13	unit	429,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
66	Alisandre Zalukhu	Bantuan Mesin Boat 4 PK (Yamaha) Kelompok Facengau	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	13	unit	305,409,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
67	Alisandre Zalukhu	Bantuan Mesin Boat 4PK (Yamaha) Kelompok Iba Laut	Desa Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan	DINAS PERIKANAN	12	unit	281,916,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Mentawai					
68	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan Simuro, Mesin Boat 4 PK yamaha	Dusun Puran Desa Muara Sikabalauan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	12	unit	281,916,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
69	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan Uman Ngorun, mesin Boat 8 PK Yamaha	Dusun Tiniti Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	unit	452,025,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
70	Yosep, A. Md	bantuan mesin boat 15pk kelompok nelayan sipumanyang	Dusun Sirokdak, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	350,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
71	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bantuan mesin 8 PK sebanyak 12 unit untuk kelompok nelayan NGENAENTA	Dusun Mangka Ulu Desa Sinaka Kec. pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	12	unit	361,620,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
72	Yosep, A. Md	Bantuan Mesin Boat 15 PK Kelompok Toktuk Simatutru	Dusun Toktuk Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	12	unit	396,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
73	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan ogok Koat, Mesin Boat 8 PK Yamaha	Dusun Toktuk Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	unit	331,485,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
74	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan Masaba, Mesin Boat 4 PK Yamaha	Dusun Nang Nang Desa Muara Sikabaluan kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
75	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan Teitei Simasin mesin Boat 4 PK Yamaha	Dusun Nang nang Desa Muara Sikabaluan	DINAS PERIKANAN	10	unit	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai					
76	Alisandre Zalukhu	Bantuan Mesin Boat 15 PK (Yamaha) Kelompok Bakat Pegu	Desa Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	13	unit	429,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
77	Jakop Saguruk, SE	Bnatuan Kelompok Nelayan Pulau Sabung, Mesin Boat 4 PK Yamaha	Dusun Pokai desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
78	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan SITA LE	Dusun Tubeket Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
79	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan PULAU PITOIJAT	Dusun Malakopa Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
80	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan PUUTTUNGAN	Dusun Pasibbuat Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	245,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
81	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin boat 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan BERKAT INDAH	Dusun Seay Baru Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
82	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin boat 8 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan BUMI SIKEREI	Dusun Sikakap Tengah Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	301,350,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
83	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan MUSARA SITA	Dusun manganjo desa saumanganya kecamatan pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	UNIT	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
84	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK sebanyak 20 unit untuk kelompok nelayan PUUKTUNGAN	Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	20	UNIT	469,860,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
85	Syafridin	bantuan pengadaan mesin boat 4 pk untuk kelompok nelayan ikan kurik	desa tuapejat kecamatan sipora utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	20	unit	490,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
86	Syafridin	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata	desa sioban kecamatan sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	paket	150,000,000	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
87	Syafridin	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	desa tuapejat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	paket	75,000,000	Pengembangan Usaha Mikro
88	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan mesin tempel 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok Nelayan SOPO LAGGAI	Dusun Surat Aban Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
89	Yosep, A. Md	Bantuan Alat Tangkap Kelompok Nelayan Toktuk Simatutru	Dusun Toktuk Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	60	set	150,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
90	Jakop Saguruk, SE	Bantuan Kelompok Nelayan	Dusun Labuan Bajau Desa	DINAS PERIKANAN	10	unit	330,000,000	Pengembangan

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Pusara'at Kakoat, Mesin 15 PK Yamaha	Sigapokna Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai					Kapasitas Nelayan Kecil
91	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) Kelompok kereet baga	Dusun pinatektek Desa Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	20	unit	469,860,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
92	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) kelompok gababara	Dusun berkat lama Desa sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
93	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) kelompok pina gaba	Dusun berkat lama desa sikakap kecematan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
94	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin 4pk (yamaha) Kelompok riu riu ake	Dusun cimpungan Desa Matobe Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	12	unit	281,916,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
95	Alisandre Zalukhu	Bantuan Mesin boat 4pk (yamaha) kelompok sabak monga	Dusun sarere Desa Matobek Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	13	unit	305,409,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
96	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 15pk (yamaha) kelompok sosoroatta	Dusun bubugra desa matobek kecamatan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
97	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin 4pk (yamaha) kelompok agai kai	Dusun bubuakat desa matobe kecematan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	16	unit	375,888,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
98	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 15pk (yamaha) kelompok Karonanta	Dusun bubuakat desa taikako kecematan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	12	unit	396,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
99	Alisandre Zalukhu	Bantuan Mesin Boat 8PK (yamaha)	Dusun Masabuk Desa	DINAS PERIKANAN	11	unit	331,485,000	Pengembangan

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Kelompok Tunang mangan mangkalat	Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai					Kapasitas Nelayan Kecil
100	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) Kelompok Laut Biru	Dusun Sibai bai Desa Sikakap Kecematan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	16	unit	375,888,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
101	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) Kelompok Karonan sibau	Dusun sibai bai desa sikakap kecematan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	16	unit	375,888,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
102	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesik boat 4pk (yamaha) kelompok simariu riu	Dusun bakat monga desa sikakap kecematan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	12	unit	281,916,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
103	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 15pk (yamaha) kelompok kai boikik	Dusun leleu bukku desa taikako kecematan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	14	unit	490,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
104	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 15pk (yamaha) kelompok paddarai sawai	Dusun leleu bukku desa taikako kecematan sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	12	unit	396,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
105	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 8pk (yamaha) kelompok BELIU IBAILIU	Dusun Alai monga Desa Taikako, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	unit	452,025,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
106	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin 8pk (yamaha) kelompok UKU 'KASIMERU	DUSUN MUARA TAIKAKO TUMUR/ DESA TAIKAKO KEC.SIKAKAP, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	301,350,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
107	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) kelompok ictok kai	DUSUN TUBEKET DESA MAKALO KEC PAGAI	DINAS PERIKANAN	21	unit	493,353,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai					
108	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 8pk (yamaha) kelompok simariu riu	DUSUN TELUK PULAI DESA MAKALO KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	9	unit	271,215,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
109	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk(yamaha) kelompok TUNANG LOGGUI	DUSUN PARAKBATU DESA MAKALO KECEMATAN PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	17	unit	399,381,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
110	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) KELOMPOK GELAI SIMAERU	DUSUN MOPOU-POU DESA MAKALO KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	16	unit	375,888,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
111	Maru, SH	bantuan mesin tempel untuk kelompok nelayan Logui sebanyak 250.000.000	Desa Sirilogui kecamatan siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	250,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
112	Maru, SH	bantuan mesin tempel untuk kelompok nelayan malancan sebanyak 250.000.000	Desa malancan kecamatan siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	250,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
113	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin 4pk (yamaha) Kelompok TEI-TEI TANOPO	DUSUN MOPOU-POU DESA MAKALO KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	17	unit	399,381,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
114	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 15pk (yamaha) Kelompok TIBUI SEGE	DUSUN MOPOU-POU DESA MAKALO KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	2	unit	66,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
115	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) KELOMPOK TIBUI SEGE	DUSUN MOPOU-POU DESA MAKALO KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	18	unit	422,874,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
116	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 8pk (yamaha) Kelompok SIOBAKTA	DUSUN ABAN BAGA DESA SINAKA KECEMATAN PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	16	unit	482,160,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
117	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) KELOMPOK PADDARAITA	DUSUN BORYAI DESA SINAKA KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	16	unit	375,888,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
118	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) KELOMPOK TELUK TANOPO	DUSUN BORYAI DESA SINAKA KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	20	unit	469,860,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
119	Alisandre Zalukhu	Bantuan Mesin Boat 15pk (yamaha) KELOMPOK ROROI BAGA	DUSUN MABOLAK DESA SINAKA KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	3	unit	99,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
120	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) KELOMPOK ROROI BAGA	DUSUN MABOLAK DESA SINAKA KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	11	unit	258,423,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
121	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 8pk (yamaha) KELOMPOK TUNANG TOGLU	DUSUN MATOBAT DESA SINAKA KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	16	unit	482,160,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
122	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 15pk (yamaha) KELOMPOK SAGAT BERIKOPEK	DUSUN MATOTONAN DESA SINAKA KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	1	unit	33,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
123	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan mesin 4 PK untuk kelompok nelayan Saureinu sebanyak 235.000.000	Desa Saureinu Kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	Unit	245,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
124	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan mesin 15 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan Betumonga	Dusun Betumonga desa tuapejat kec sipora utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	3	unit	105,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
125	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) KELOMPOK SOSOROAT	DUSUN MAPADAT DESA SAUMANGANYA KEC PAGAI UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	unit	352,395,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
126	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin boat 4pk (yamaha) KELOMPOK SAGAT BERIKOPEK	DUSUN MATOTONAN DESA SINAKA KEC PAGAI SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	19	unit	446,367,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
127	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan mesin 15 Pk sebanyak 5 unit 175.000.000) untuk kelompok nelayan sioban	dusun paddarai desa sioban kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	5	unit	175,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
128	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin 4 pk (yamaha) KELOMPOK NGENAETTA	DUSUN MAPADAT DESA SAUMANGANYA KEC PAGAI UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	unit	352,395,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
129	Alisandre Zalukhu	Bantuan Mesin Boat 4pk (yamaha) KELOMPOK ROP KEREK	DUSUN BIUBIU DESA SAUMANGANYA KEC PAGAI UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	unit	352,395,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
130	Alisandre Zalukhu	Bantuan mesin 4pk (yamaha) KELOMPOK OM AKE	DUSUN SAUMANGANYA TENGAH DESA SAUMANGANYA KEC PAGAI UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	15	unit	352,395,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
131	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan mesin 4 PK sebanyak 10 unit untuk kelompok nelayan BETUMONGA	Dusun betumonga desa tuapejat kec. sipora utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
132	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MESIN BOAT 15PK KELOMPOK NELAYAN MAPOLOU MASOKUT	DESA BERILOU KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	350,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
133	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MESIN BOAT 4PK KELOMPOK NELAYAN OMBAGA	DUSUN TARAET DESA BETUMONGA KEC SIPORA UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	234,930,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
134	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MESIN BOAT 4PK KELOMPOK NELAYAN SUMBER HARAPAN	DUSUN TARAET MABUKU DESA BETUMONGA KEC SIPORA UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	245,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
135	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MESIN BOAT 15PK KELOMPOK NELAYAN RIU RIU LAINET	DESA TUAPEJAT KEC SIPORA UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERIKANAN	10	unit	330,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
136	Melki Sapolenggu, S.H	Pengadaan Mesin Boat 15 PK Kelompok Nelayan Uman Ngorun	Desa Sigapokna Dusun Tiniti Kec. Siberut Barat	DINAS PERIKANAN	10	Unit	311,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
137	Melki Sapolenggu, S.H	Pengadaan Mesin Boat 15 PK Kelompok Nelayan Panonan	Desa Sigapokna Dusun Tiniti Kec. Siberut Barat	DINAS PERIKANAN	10	Unit	311,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
138	Melki Sapolenggu, S.H	Pengadaan Mesin Boat 15 PK	Desa Muara Siberut Desa	DINAS PERIKANAN	15	Unit	466,500,000	Pengembangan

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Kelompok Nelayan Patandekan Kakoat	Muara Siberut Kec. Siberut Selatan					Kapasitas Nelayan Kecil
139	Marenobaja, SE	pengadaan bantuan mesin boat 4 pk untuk kelompok nelayan dusun boriai desa sinaka	Dusun Boriai Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan	DINAS PERIKANAN	10	Unit	235,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
140	Marenobaja, SE	Pengadaan bantuan mesin boat 4 pk untuk kelompok nelayan malainiang	dusun leleununtutbaga desa malakopa kecamatan pagai selatan	DINAS PERIKANAN	10	Unit	235,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
141	Marenobaja, SE	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK untuk kelompok nelayan Paddarai patsablah	dusun matotonan desa sinaka kecamatan pagai selatan	DINAS PERIKANAN	10	Unit	235,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
142	Marenobaja, SE	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK untuk kelompok nelayan Bujai Koat	desa boriai desa sinaka kecamatan pagai selatan	DINAS PERIKANAN	10	Unit	235,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
143	Marenobaja, SE	Pengadaan bantuan mesin boat 4 PK untuk kelompok nelayan Paddarai	dusun baKEE DESA bulasat	DINAS PERIKANAN	10	Unit	235,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
144	Marenobaja, SE	pengadaan bantuan mesin boat 4 PK untuk kelompok masiniang	dusun mapoupou desa makalo kecamatan pagai selatan	DINAS PERIKANAN	12	Unit	282,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
145	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH GEREJA GKPM JEMAT IMMANUEL	DESA NENEMLELEU KECEMATAN SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
146	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN RUMAH IBADAH GEREJA GKPM JEMAAT ELBETEL POGARI	DESA GOISOOINAN KEC SIPORA UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
147	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH PAGAR GEREJA GKPM JEMAAT EFATA	DESA MARA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		MONGA						Kesejahteraan Sosial
148	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADA GEREJA GKPM JEMAAT SARFAT ROKOT	DESA MATOBE KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
149	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH MESJID RAHMATAN LIL ALAMIN	DESA BETUMONGA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
150	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN RUMAH IBADAH GEREJA GKPM JEMAAT EBENEZER MAPADEGAT	DESA TUAPEJAT KEC SIPORA UTARA, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
151	Hendri Dunand, S. Sos	Bantuan Gereja GKPM Nehemi sebanyak 40.000.000	dusun mangili desa saureinu kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	40,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
152	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan Gereja GKLI Betlehem sebanyak 150.000.000	Dusun sawahan desa saureinu kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	150,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
153	Salimi, A. Md	Bantuan Rumah Ibadah Bantuan Gereja Khatolik Taileleu	Desa Taileleu, Kecematan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	KESRA/SEKDA	1	unit	150,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
154	Maru, SH	bantuan rumah ibadah Gereja GPDI Policoman sebanyak 40.000.000	Desa Sigapokna kecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
155	Maru, SH	bantuan rumah ibadah Gereja GKPM Simalegi Muara sebanyak 40.000.000	Desa Simalegi kecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
156	Jakop Saguruk, SE	Pembangunan Mesjid Desa Cimpungan, Rp. 150.000.000,-	Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
157	Jakop Saguruk, SE	Pembangunan Gereja Katolik ST. Teresa Stasi Puran	Dusun Puran Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
158	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	bantuan pembangunan gedung gereja GKPM jemaat sabeugugung km 14 betumonga	Km 14 desa betumonga kecamatan pagai utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
159	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	bantuan pembangunan rumah baru rumah resort GKPM	dusun limosua desa bulasat kecamatn pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
160	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan Bantuan rumah ibadah Gereja Jemaat GKPM	Dusun Malilimok Desa Katurei kec Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
161	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan rumah ibadah Gereja Katolik Stasi Buga	Dusun Buga Desa Sagulubbek Kec Siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
162	Stevanus Victorianus, S,	Pengadaan bantuan rumah ibadah	Dusun Mapinang Desa	SEKRETARIAT	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan,

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	SH	Gereja Kristen Potestan	Sagulubbeg Kec Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DAERAH				Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
163	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan rumah ibadah Gereja Kristen Protestan	Dusun Kaleak Desa Sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
164	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan rumah ibadah Mesjid Maznah AL-Muthoiri	Dusun Makukuet Desa Pasakiat Taileleu Kec Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
165	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan bantuan rumah ibadah Gereja Katolik Santo Agustinus Stasi Sagulubbeg-Paroki Santa Maria diangkat ke surga	Dusun Pupailiat Desa Sagulubbeg Kec Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
166	Fernando Sabajou, S. Pd	bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah gereja bethel indonesia (alat-alat musik)	dusun puro, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
167	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan meteran dan instalasi listrik sebanyak 50 unit di desa taikako	Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	50	UNIT	175,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
168	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan meteran dan instalasi listrik sebanyak 30 unit di desa matobe	Desa Matobe Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	30	UNIT	105,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
169	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan meteran dan instalasi listrik di desa Makalo dan desa bulasat sebanyak 20 unit	Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	20	UNIT	70,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
170	Jakop Saguruk, SE	Pembangunan Menara dan Penataan Halaman Gereja Katolik Bijakan Rp.100.000.000,-	Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	100,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
171	Maru, SH	bantuan Gereja Katolik Mongan Poula sebanyak 40.000.000	Desa mongan poula kecamatan siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	40,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
172	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan Gereja GKPM IKTUS sebanyak 100.000.000	Dusun sumber air desa saureinu kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	100,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
173	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan penerangan jalan sebanyak 50.000.000	Dusun Pogari desa goisoinan kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
174	Melki Sapolenggu, S.H	Bantuan Rehab Rumah Ibadah Gereja GKPM	Dusun Pilionan Desa Sigapokna Kec. Siberut Barat	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
175	Melki Sapolenggu, S.H	Bantuan Rehab Rumah Ibadah Gereja GKPM	Dusun Labuhan Bajau Desa Sigapokna Kec. Siberut Barat	SEKRETARIAT DAERAH	1	Unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
176	Marenobaja, SE	bantuan pembangunan rumah ibadah	Dusun Asahan Desa Bulasat	SEKRETARIAT	1	unit	60,000,000	Pelaksanaan Kebijakan,

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		GKPM Jemaat Asahan	Kecamatan Pagai selatan	DAERAH				Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
177	Marenobaja, SE	Bantuan pembangunan rumah ibadah GKPM Jemaat tapak jaya	dusun tapak jaya desa bulasat kecamatan pagai selatan	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	40,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
178	Marenobaja, SE	Bantuan pembanguna rumah ibadah gkpm jemaat bake	dusun bake desa bulasat kecamatan pagai selatan	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	40,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
179	Marenobaja, SE	bantuan pembanguan rumah resort tapak jaya	Dusun Tapak Jaya Desa Bulasat Kecamatan Pagai selatan	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	40,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
180	Marenobaja, SE	bantuan pembangunan pagar gereja GKPM mandiri dusun malakopa desa malakopa	dusun malakopa desa malakopa kecamatan pagai selatan	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	150,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
181	Marenobaja, SE	bantuan pembanguan rumah ibadah gereja GKPM Jemaat Sabbiret	Desa malakopa kecamatan pagai selatan	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
182	Maru, SH	pengadaan bibit pala untuk masyarakat simalegi muara sebanyak 175.000.000	desa simalegi kec. siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8500	Rupiah	175,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
183	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan ternak babi untuk masyarakat desa sikakap sebanyak 40 ekor	Desa Sikakap Kec. Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	40	EKOR	84,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
								Lain
184	Fernando Sabajou, S. Pd	peningkatan jalan pertanian dusun batmuntei desa muntei	dusun batmuntei desa muntei kecamatan siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200	meter	480,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
185	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan ternak kerbau untuk kelompok ternak URAUGETTA sebanyak 7 ekor	Dusun Makalo Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	7	EKOR	140,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
186	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan ternak kerbau untuk kelompok ternak GORAT BAGA sebanyak 10 ekor	Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	EKOR	200,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
187	Stevanus Victorianus, S, SH	bantuan untk kelompok Tani MANYANG, 1 Unit mesin heller, 1 paket rumah heller	Dusun puro desa muara siberut kec. siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	paket	150,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
188	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	bantuan pengadaan bibit ternak babi untuk kelompok ternak turakmonga sebanyak 18 pasang rincian 18 jantan dan 18 ekor betina	dusun betumonga timur desa betumonga , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	ekor	20,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
189	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	pengadaan bantuan ternak babi untuk kelompok totolat sebanyak 12 pasang rincian 12 ekor jantan dan 12 ekor betina	dusun baru-baru desa betumonga, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	24	ekor	48,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
190	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	bantuan pengadaan sapi untuk kelompok tani dunamos sebanyak 2 ekor dan bantuan mesin cultivator sebanyak 1 buah	dusun tuapejat desa tuapejat kecamatan sipora utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3	Ekor	30,500,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
191	T. F Yohanes Pardede	Pengadaan bantuan alat pertanian	Dusun Lagigi Desa Bulasat	DINAS KETAHANAN	15	Unit	30,000,000	Pendampingan

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		mesin shanso (15 unit) untuk kelompok pertanian RATU LAGGAI dusun lagigi desa bulasat kecamatan pagai selatan	kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	PANGAN DAN PERTANIAN				Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
192	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	bantuan pengadaan mesin cultivator	desa tuapejat kecamatan sipora utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	unit	11,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
193	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	bantuan pembangunan rumah healer untuk dusun guluk-guluk desa saumanganyak	dusun guluk-guluk desa saumanganyak, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	unit	50,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
194	Maru, SH	Bantuan ternak untuk desa sirilogui sebanyak 150.000.000	desa sirilogui kec siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	paket	150,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
195	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan ternak babi sebanyak 40 ekor untuk kelompok ternak SOPO SITA	Desa Malakopa kecamatan pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	40	ekor	84,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
196	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pengadaan bantuan ternak babi untuk masyarakat dusun beleraksok sebanyak 30 ekor	Dusun Beleraksok Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	EKOR	63,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
197	Stevanus Victorianus, S, SH	bantuan Kelompok TANI TALENTA, 4500 batang pinang super, 3000 batang pala, 3000 batang gaharu	dusun toloulaggo desa katurei kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10500	batang	367,500,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
198	Stevanus Victorianus, S, SH	bantuan untuk kelompok TANI TALENTA, 15 unit sinsaw kecil, 15 unit mesin rumput, 15 unit tengki	Dusun tolou laggo desa katurei kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	45	unit	76,500,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		semprot	Mentawai					
199	Stevanus Victorianus, S, SH	bantuan untuk kelompok tani SIMATULU, 10 unit sinsaw still 05 kecil, 10 unit mesin rumput, 10 unit tengkii semprot	Dusun magilik desa katurei kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	unit	51,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
200	Stevanus Victorianus, S, SH	bantuan bibit pinang sebanyak 1500 batang untuk kelompok tani SiMATULU	dusun magilik desa katurei kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1500	batang	22,500,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
201	Stevanus Victorianus, S, SH	bantuan kelompok Tani TEITEI LELEU, 10 unit mesin sinsaw merek sthil 070 besar	dusun tepuk desa katurei kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	unit	30,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
202	Stevanus Victorianus, S, SH	bantuan untuk kelompok tani CENGKEH, 1000 batang bibit cengkeh bogor	dusun pusaregat desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1000	batang	20,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
203	Stevanus Victorianus, S, SH	bantuan untuk kelompok tani CENGKEH, 10 unit sinsaw kecil, 10 unit mesin rumput	dusun pusaregat desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20	unit	30,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
204	Stevanus Victorianus, S, SH	bantuan untuk kelompok ternak AILIAKENEN, 9 ekor sapi jantan, 9 ekor sapi betina	dusun buttui desa madobag kec siberut selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19	ekor	279,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
205	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan mesin rumput sebanyak 35 unit (87.000.000) untuk kelompok Tani Pinang	dusun sawahan desa saureinu kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	35	UNIT	87,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
206	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan mesin pengipas padi untuk masyarakat pogari sebbanyak 20.000.000	dusun pogari desa goisoinan kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3	unit	20,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
207	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan pembangunan DAM di desa sioban sebanyak 200.000.000	Desa sioban kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	unit	200,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
208	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN BIBIT AYAM DAN KANDANG KELOMPOK TANI TERPADU AILEPPET PUERU	DESA MARA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	500	EKOR	60,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
209	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MESIN SENSO BESAR KELOMPOK TANI MACEMIN LELEU	KECEMATAN SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13	unit	28,600,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
210	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN ALAT PERTANIAN KELOMPOK TANI SIMALETCEI	DESA BOSUA KECAMATAN SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25	UNIT	30,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
211	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN BIBIT CENGKEH KELOMPOK TANI SIMALETCEI	DESA BOSUA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	178	buah	3,560,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
212	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN MESIN RAMBAH KELOMPOK TANI SIMALETCEI	DESA BOSUA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25	unit	55,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
213	Ibrani Sababalat, SH	BANTUAN TENG SEMPROT KELOMPOK TANI SIMALETCEI	DESA BOSUA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	50	unit	35,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
214	Hendri Dunand, S. Sos	pembangunan akses ekonomi sebanyak 150.000.000	dusun rokot desa matobe kec sipora selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	paket	150,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
215	Juniarman	kelompok ternak ogok laggai (Lerje)	dusun baganlelet desa	DINAS KETAHANAN	40	ekor	88,000,000	Pendampingan

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			sioban	PANGAN DAN PERTANIAN				Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
216	Juniarman	kelompok ternak Kambing boblo kriswidia)	desa sioban	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	20	ekor	20,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
217	Juniarman	kelompok ternak Babi kaliou (kanne)	desa sioban	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25	Ekor	30,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
218	Juniarman	kelompok ternak Babi amumunen (norsani)	dusun malabbaet Desa Sioban	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	40	ekor	88,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
219	Juniarman	kelompok nelayan simatulu (alber)mesin tempel 4 pk	DESA MARA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	Dinas Perikanan	14	unit	323,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
220	Juniarman	Bantuan Rumah Ibadah Gkpm Bosua	Desa Bosua, Kec. Sipora Selatan	SEKRETARIAT DAERAH	1	unit	100,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
221	Juniarman	Kelompok nelayan Taiobaket (karisman) mesin tempel yamaha 4 pk	mongan bosua Desa Bosua Sipora Selatan	Dinas Perikanan	10	unit	234,900,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
222	Juniarman	Kelompok nelayan pukatekat baga (bastian) mesin tempel 4 PK	Desa Sioban Kec. Sipora Selatan	Dinas Perikanan	10	unit	234,900,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
223	Juniarman	Kelompok usaha perbengkelan bintang maju sipora utara alat perbengkelan	Kec. Sipora Utara	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,	1	paket	100,000,000	Pengembangan Usaha Mikro

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
224	Juniarman	Kelompok nelayan ngenaet pukarajat (pardinan) mesin tempel 5 PK	DESA BETUMONGA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	Dinas Perikanan	10	unit	234,900,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
225	Juniarman	Kelompok nelayan roroi baga matuptuman betumonga (japin samangilailai) 15 PK	DESA BETUMONGA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	Dinas Perikanan	10	unit	350,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
226	Juniarman	Mesin rambah kelompok tani bintang maju beriulou	Desa Beriulou, Kec. Sipora Selatan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	100	unit	220,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
227	Juniarman	Kelompok nelayan uddut bukkuk (porse sababalat) mesin 4 pk	DESA BETUMONGA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	Dinas Perikanan	14	Unit	234,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
228	Juniarman	Gkpm jemaat kanaan Beriulou	Desa Beriulou, Kec. Sipora Selatan	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	100,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
229	Juniarman	Mesjid Ummul Muminin Mara	DESA MARA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	SEKRETARIAT DAERAH	1	Paket	40,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
230	Juniarman	Kelompok nelayan moile akek dusun mapadegat tuapejat (Psalmen Tatubeket) 4pk	Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara	Dinas Perikanan	10	Unit	234,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
231	Juniarman	Kelompok ternak Babi keret baga kasimaeruk mapadegat (uria saguntung)	Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19	Ekor	56,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
232	Juniarman	Kelompok nelayan simaineng mapadegat (Dasman) mesin tempel 8 pk	Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara	Dinas Perikanan	10	Unit	290,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
233	Juniarman	Kelompok nelayan purimanuayat nemnemleleu (tiberius) 4pk	Desa Nemnemleleu Kec. Sipora Selatan	Dinas Perikanan	10	Unit	234,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
234	Juniarman	Kelompok nelayan gabat purimanuayat nemnemleleu (samja) 4 pk	Desa Nemnemleleu Kec. Sipora Selatan	Dinas Perikanan	10	Unit	234,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
235	Juniarman	Kelompok nelayan ngena ibara dusun sipaarau desa betumonga (suharto) kadir boy 15pk	DESA BETUMONGA KEC SIPORA SELATAN, Kab. Kepulauan Mentawai	Dinas Perikanan	10	Unit	350,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
236	Juniarman	Kelomppk tani manaileleu sioban (rasidin) mesin potong rumput	Desa Sioban Kec. Sipora Selatan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	Unit	40,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
237	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Jalan Lingkungan	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat dusun Turonia (Gg Rimboz)	DINAS PEKERJAAN UMUM	200	meter	200,000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
238	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Jalan Lingkungan	Kec. Sipora Utara, Desa Tuapejat, Dusun Turonia, (Gg Susteran)	DINAS PEKERJAAN UMUM	200	meter	200,000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
239	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Alat, Mesin Senso, Mesin potong rumput, Tangki semprot. Untuk kelompok tani Turo Ngenaet	Desa Tuapejat, Dusun Turonia	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	15	unit	90,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
240	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan ternak Babi 19 Pasang untuk 19 orang kelompok ternak mangka baga dusun Tuapejat.	Desa Tuapejat Dusun Tuapejat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	38	ekor	152,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
241	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan ternak Babi 20 Pasang untuk 20 orang kelompok ternak Desa Sidomakmur	Desa Sidomakmur	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	40	ekor	160,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
242	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan ternak Babi 20 Pasang untuk 20 orang kelompok ternak Sura'k Sabeu Saureinu	Desa Saureinu	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	40	ekor	160,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
243	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan ternak Babi 20 Pasang untuk 20 Orang Kelompok ternak Moile-moile	Desa Saureinu	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	40	ekor	160,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
244	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan ternak sapi 10 Ekor Untuk kelompok tani ternak Tunas Baru	Desa Sidomakmur	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	ekor	480,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
245	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Alsintan 1 Unit Untuk Kelompok Tani KAUM	Dusun Sinabak, Desa Sidomakmur.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1	unit	40,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
246	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Jalan Usaha Tani	Desa Sidomakmur Dusun Sinabak	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200	mmeter	200,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
247	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Rumah Ibadah Methodis Agape	Desa Sidomakmur, Dusun Sinabak	SEKDA	1	unit	30,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
								Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
248	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Rumah Ibadah GKPM Eben Haezer Mapadegat	Dusun Mapadegat, Desa Tuapejat	SEKDA	1	unit	100,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
249	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Rumah Ibadah GKPM Mandiri Km 0	Dusun Tuapejat, Desa Tuapejat	SEKDA	1	unit	100,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
250	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Mesin Boat 4 PK 10 Unit, 15 PK 3 Unit. Untuk Kelompok Ola Ake	Desa Bosua, Dusun Bosua	DINAS PERIKANAN	13	unit	370,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
251	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Mesin Boat 4 PK 11 Unit, 15 PK 3 Unit. Untuk Kelompok Manyang	Desa Tuapejat Dusun Mapadegat	DINAS PERIKANAN	14	unit	395,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
252	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Mesin Boat 4 PK 12 Unit, 15 PK 2 Unit. untuk 14 Orang Kelompok Nelayan Coat Simagirau 200	Desa Tuapejat Dusun Tuapejat	DINAS PERIKANAN	14	unit	380,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
253	SAFRI HORISON SALELEUBAJA, S.T	Bantuan Perlengkapan Latihan Taekwondo (Perguruan Dojang Taekwondo Mentawai Fighter)	Dusun Turonia Desa Tuapejat	DINAS PARIWISATA	1	paket	50,000,000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
254	Marenobaja, SE	Pengadaan mesin potong rumput untuk kelompok tani singin buah	Dusun Lagigi Desa Bulasat Kecamatan Pagai selatan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	40	Unit	120,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
255	Marenobaja, SE	pengadaan bantuan ternak sapi untuk kelompok tani dusun lagigi desa	Dusun Lagigi Desa Bulasat Kecamatan Pagai selatan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN	5	Pasang	120,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		bulasat		PERTANIAN				Pendukung Pertanian
256	Marenobaja, SE	Bantuan pengadaan bibit ternak babi untuk kelompok simagirau	dusun saumanganyak desa saumanganya kecamatan pagai utara	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10	Pasang	80,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
257	Marenobaja, SE	bantuan pengadaan mesin sinso kecil untuk kelompok tani BUJAI	Dusun Bulasat Desa Bulasat	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	30	Unit	90,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
258	Julius Tairarak, S. Pt	bantuan pembangunan MCK untuk SDN 25 Simatalu	dusun suruan desa simatalu, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150	juta	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
259	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan Mobiler SD Negeri 28 untuk 3 ruang belajar (kelas)	Dusun Mapinang Desa Sagulubbeg kecamatan Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	PAKET	110,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah
260	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan rumah dinas Guru SD Negeri 28 sebanyak 1 paket	Dusun mapinang desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	PAKET	300,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
261	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Bantuan Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) SD Fransiskus Filial	Dusun Ba'i Desa Ba'I Bojakan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	unit	1,000,000,000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
262	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Guru di SD Negeri 23 Bojakan	Dusun Lubaga Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	unit	300,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
263	Stevanus Victorianus, S, SH	Pembangunan MCK SD Negeri 08 sebanyak 1 paket	Dusun Lumago Desa Sagulubbeg Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Siberut Barat Daya, Kab. Kepulauan Mentawai					Sekolah
264	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan mobiler SD Negeri 26 sebanyak 3 ruang belajar(kelas)	Dusun masi desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	paket	110,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah
265	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan MCK SD Negeri 26 sebanyak 1 paket	Dusun Masi desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
266	Stevanus Victorianus, S, SH	Pengadaan Mobiler SD 08 untuk 3 ruang belajar(kelas)	Dusun lumago desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	PAKET	110,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah
267	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Pembangunan Asrama di SMP Negeri 1 Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah.	Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah., Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	unit	1,200,000,000	Pembangunan Asrama Sekolah
268	Jakop Saguruk, SE	Pengadaan Kendaraan motor roda 2 Untuk Korwil Pendidikan Siberut Selatan	Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	unit	30,000,000	Pengadaan Mesin dan aset lainnya
269	Stevanus Victorianus, S, SH	pembangunan MCK SD Negeri 27 SEBANYAK 1 PAKET	dusun buga desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
270	Stevanus Victorianus, S, SH	penambahan ruangan guru SD Negeri 27 sebanyak 1 paket	Dusun Buga desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	300,000,000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
271	Stevanus Victorianus, S, SH	pembangunan rumah dinas guru SD Negeri 27 sebanyak 1 paket	dusun buga desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	300,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Kepulauan Mentawai					Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
272	Stevanus Victorianus, S, SH	Pembangunan rumah dinas guru SD Negeri 26 sebanyak 1 paket	dusun masi desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	300,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
273	Jakop Saguruk, SE	Pengadaan Kendaraan Motor Roda 2 untuk Korwil Pendidikan Siberut Utara	Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	unit	70,000,000	Pengadaan Mesin dan aset lainnya
274	Stevanus Victorianus, S, SH	pembangunan MCK SD Negeri 19 sebanyak 1 paket	Dusun Sarausau desa katurei kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
275	Stevanus Victorianus, S, SH	pembangunan rumah dinas guru SD Negeri 04 sebanyak 1 paket	dusun malilimok desa katurei kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	300,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
276	Stevanus Victorianus, S, SH	pembangunan rumah dinas guru SD Negeri 15 muntei sebanyak 1 paket	Desa Katurei kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	300,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
277	Jakop Saguruk, SE	Pengadaan Kendaraan Motor roda 2 untuk Korwil Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah	Kecamatan Siberut Tengah , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	unit	60,000,000	Pengadaan Mesin dan aset lainnya
278	Marenobaja, SE	Bantuan pembangunan lapangan upacara SMP 1 Pagai Selatan	SMPN 1 Pagai Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	paket	50,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
279	Stevanus Victorianus, S, SH	pembangunan pustu di Dusun masi sebanyak 1 paket	Dusun masi desa sagulubbeg kec siberut barat daya, Kab. Kepulauan	DINAS KESEHATAN	1	paket	500,000,000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Mentawai					
280	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Rehap Polindes di Dusun Limu Desa Simatalu	Dusun Limu Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	unit	500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
281	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Bantuan BBM Rujukan Pasien Mandiri di Puskesmas Simatalu Kec. Siberut Barat	Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	Unit	500,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
282	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Bantuan BBM Rujukan Pasien Mandiri di Puskesmas Sigapokna Kec. Siberut Barat	Desa Sigapokna Kecematan Siberut Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	Paket	500,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
283	Julius Tairarak, S. Pt	bantuan pembangunan rehap pustu peipejat hulu desa simatalu kecamatan siberut barat	dusun peipejat hulu desa simatalu kecamatan sibeerut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	1	Unit	500,000,000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
284	Julius Tairarak, S. Pt	bantuan pengadaan mesin 40 pk untuk puskesmas simatalu	desa simatalu kecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS KESEHATAN	2	unit	136,000,000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
285	Stevanus Victorianus, S, SH	pembangunan PAMSIMAS di dusun mapinang, dusun tepuk dan dusun siribabak	Desa katurei kecamatan siberut barat daya, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	paket	1,500,000,000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
286	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pembangunan PAM (penambahan titik distribusi) 1000 meter di Dusun Makalo	Dusun Makalo Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1000	METER	1,000,000,000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
287	Jakop Saguruk, SE	Pemotongan Tanjung Sungai (Swakelola) Muara Sikabaluan Rp. 50.000.000,-	Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	Dokumen	600,000,000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
								Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
288	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	bantuan pembangunan air bersih atau pamsimas	dusun limosua desa bulasat kecamatan pagai selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	paket	250,000,000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
289	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pembangunan PAM 2500 meter di Dusun Parak Batu	Dusun Parak Batu Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2500	METER	1,000,000,000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
290	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pembangunan Drainase 400 meter di Dusun Makalo	Dusun Makalo Desa Makalo Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	400	METER	1,500,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
291	Nelsen Sakerebau, S. Th	Pembangunan skrab jalan km 32 (12 km) dusun mapopou	Dusun Mapoupou Desa Makalo Kec Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	KM	500,000,000	Pemeliharaan Rutin Jalan
292	Maru, SH	bantuan closed jamban untuk 170 KK (120.000.000) di dusun policoman	Dusun Policoman desa sigapokna kecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	170	KK	120,000,000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
293	Maru, SH	bantuan pembanunan closed jamban dusun lubaga sebanyak 75.000.000	Dusun lubaga desa bojakan kecamatan siberut utara, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Paket	75,000,000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
294	Hendri Dunand, S. Sos	pembangunan jamban sebanyak 200.000.000	dusun nemnem leleu , Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	Paket	200,000,000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
295	Marenobaja, SE	Pemeliharaan jalan lingkung di dusun bake desa bulasat (menuju kampung lama)	dusun bake desa bulasat kecamatan pagai selatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200	meter	200,000,000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
296	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan RTLH sebanyak 15 unit untuk masyarakat Desa Matobe	Desa Matobe Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	UNIT	20,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
297	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan RTLH sebanyak 30 unit untuk masyarakat Desa Taikako	Desa Taikako Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	UNIT	20,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
298	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan RTLH sebanyak 20 unit untuk masyarakat Desa Sikakap	Desa Sikakap Kecamatan Sikakap, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	UNIT	20,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
299	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan RTLH sebanyak 90 unit untuk masyarakat Desa Sinaka	Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	UNIT	20,000,000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
300	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan RTLH sebanyak 20 unit untuk masyarakat Desa Malakopa	Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	UNIT	20,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
301	Nelsen Sakerebau, S. Th	Bantuan RTLH sebanyak 10 unit untuk masyarakat Desa Bulasat	Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	UNIT	20,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
302	Fernando Sabajou, S. Pd	bantuan pembangunan perumahan layak huni untuk desa tinambu	dusun tinambu desa saliguma kecamatn siberut tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	unit	20,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
303	Jakop Saguruk, SE	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Saibi Samukop	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah,	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	1	unit	20,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

NO	PENGUSUL	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Kab. Kepulauan Mentawai	PERMUKIMAN				
304	Jakop Saguruk, SE	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Saliguma	Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	unit	20,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
305	Jakop Saguruk, SE	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Maileppet	Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	unit	20,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
306	Jakop Saguruk, SE	Perbaikan Rumah tidak Layak Huni Desa Cimpungan	Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	unit	20,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
307	Maru, SH	bantuan RTLH untuk relokasi perkampungan sibeuotsun-terekan hulu sebanyak 500.000.000	Dusun sibeuotsun, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	UNIT	500,000,000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
308	Hendri Dunand, S. Sos	bantuan rehap rumah sebanyak 10 KK (200.000.000)	Dusun sioban desa sioban kecamatan sipora sellatan, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	UNIT	200,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
309	Fernando Sabajou, S. Pd	bantuan pengadaan tenda pesta/kemalangan untuk karang taruna desa muara siberut kecamatan siberut selatan	desa muara siberut kecamatan siberut barat, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	paket	30,000,000	-
310	Jakop Saguruk, SE	Pembangunan Asrama Paroki Saibi Samukop	Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Kab. Kepulauan Mentawai	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Paket	1,000,000,000	Pembangunan Asrama Sekolah
TOTAL							73,292,930,000	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024

Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 terdiri dari program prioritas yang menunjang pencapaian tujuan pembangunan. Rincian program prioritas, dihubungkan dengan prioritas nasional tahun 2024 sebagaimana tabel 5.1 berikut.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						238,757,251,853							245,732,942,075	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						98,845,003,724							101,565,764,775	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						98,676,831,924							101,397,592,975	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	259,000,000						100Persen	259,000,000	
	1	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100persen			100 persen	175,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100persen	175,000,000	
	1	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	175,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		175,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12bulan			12 bulan	84,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	12bulan	84,000,000	
	1	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	84,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		84,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	100persen 100persen >50Persen >50persen 6450persen 64,50Persen 88persen 100persen 100Persen 28persen			100 persen	98,136,634,424						100persen 100persen >50Persen >50persen 6250persen 62,50Persen 85persen 100persen 100Persen 25persen	100,857,395,475	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	201		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	100persen			100 persen	60,437,342,934			-	1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100persen	61,908,439,300	
	1	01	02	201	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				5 Unit	5,563,522,330	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				6 Ruang	3,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		2,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	1,300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		1,625,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	1,200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		1,350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				19 Unit	5,597,515,094	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	4,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		4,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	168,146,800	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		168,146,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				8 Paket	380,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		380,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				13000 Peserta Didik	14,589,880,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		14,589,880,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				150 Paket	900,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		900,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				326 Orang	7,090,825,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		7,095,412,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	891,294,800	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		1,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				134 Satuan Pendidikan	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				134 Satuan Pendidikan	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	3,500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	4,370,253,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		4,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				134 Satuan Pendidikan	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	201	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				23 Ruang	6,985,905,310	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		7,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	100Persen			100 Persen	32,129,177,390			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100Persen	33,378,842,075	
	1	01	02	202	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	1,500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		1,575,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0006	Pembangunan Laboratorium														
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	1,141,190,725	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		1,625,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0008	Pembangunan Asrama Sekolah														
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	600,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	450,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		450,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	3,078,002,390	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		3,380,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	1,500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		1,350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	190,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		190,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6000 Peserta Didik	7,423,990,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		7,423,990,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				30 Paket	195,794,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		195,794,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				200 Orang	3,326,387,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		3,363,193,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	479,508,800	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		550,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				34 Satuan Pendidikan	229,831,200	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				34 Satuan Pendidikan	124,615,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		124,615,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				34 Dokumen	190,501,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		190,501,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	202	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				6000 Satuan Pendidikan	210,747,975	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		210,747,975	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	10,638,608,700	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		11,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	202	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	350,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	203		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD Meningkatnya APK PAUD	75Persen			65 Persen 100 persen	3,180,861,900			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	70Persen	3,180,861,900	
	1	01	02	203	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	800,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	203	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD														
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	203	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				100 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	203	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	203	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	203	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				90 Satuan Pendidikan	1,280,861,900	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		1,280,861,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	203	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	204		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kelulusan Kesetaraan	100persen			100 persen	2,389,252,200			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100persen	2,389,252,200	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	204	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				55 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	204	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				55 Orang	149,995,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		149,995,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	204	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				13 Satuan Pendidikan	154,820,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		154,820,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	204	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				13 Satuan Pendidikan	1,674,577,300	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		1,674,577,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	204	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				13 Dokumen	104,080,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		104,080,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	204	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				300 Peserta Didik	155,779,900	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		155,779,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	350persen			undefined undefined	140,538,900						3persen	140,538,900	
	1	01	03	202		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	25Persen			25 Persen	140,538,900			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	25Persen	140,538,900	
	1	01	03	202	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				2 Dokumen	140,538,900	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		140,538,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S1	95persen 25persen 100persen			100 persen 20 persen 92 persen	140,658,600						94persen 22persen 100persen	140,658,600	
	1	01	04	201		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	500Dokumen			500 Dokumen	140,658,600			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	500Dokumen	140,658,600	
	1	01	04	201	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				500 Dokumen	140,658,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		140,658,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,237,076,300							1,237,076,300	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1,237,076,300							1,237,076,300	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	65Persen			63 Persen	871,881,300						64Persen	871,881,300	
	2	22	02	201		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Sertifikasi Tenaga Permuseuman	3Objek			3 Objek	571,881,300			-	9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	3Objek	571,881,300	
	2	22	02	201	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	571,881,300	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		571,881,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	202		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2Objek			2 Objek	300,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	2Objek	300,000,000	
	2	22	02	202	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar yang dibina	4sanggar			4 sanggar	365,195,000						4sanggar	365,195,000	
	2	22	03	201		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10Orang			10 Orang	365,195,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	10Orang	365,195,000	
	2	22	03	201	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				10 Orang	365,195,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		365,195,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X					NON URUSAN						138,675,171,829							142,930,101,000	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						138,675,171,829							142,930,101,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	138,675,171,829						100Persen	142,930,101,000	
	X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Telaksananya Administrai Keuangan Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	137,179,539,829			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100Persen	140,456,580,000	
	X	XX	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1500 Orang/bulan	136,722,959,829	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		140,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X	XX	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				65 Dokumen	456,580,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		456,580,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100persen			100 persen	316,820,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100persen	316,820,000	
	X	XX	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11 Dokumen	316,820,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		316,820,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100persen			100 persen	310,741,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100persen	310,741,000	
	X	XX	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X	XX	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	42,741,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		42,741,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X	XX	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	18,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		18,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12bulan			12 bulan	522,111,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	12bulan	1,000,000,000	
	X	XX	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	522,111,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	100Persen			100 Persen	345,960,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100Persen	845,960,000	
	X	XX	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	39,960,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		39,960,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	76,750,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		76,750,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X	XX	01	209	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	29,250,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		29,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	X	XX	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		700,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						98,845,003,724							101,565,764,775	
	1	-				-						168,171,800							168,171,800	
8	1	-	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	100persen 100persen >50Persen >50persen 6450persen 64,50Persen 88persen 100persen 100Persen 28persen			100 persen	168,171,800						100persen 100persen >50Persen >50persen 6250persen 62,50Persen 85persen 100persen 100Persen 25persen	168,171,800	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	-	02	201		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	100persen			100 persen	168,171,800			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	100persen	168,171,800	
	1	-	02	201	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	168,171,800	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		168,171,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						DINAS KESEHATAN						78,029,054,974							86,487,175,633	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						36,845,000,000							42,111,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						36,845,000,000							42,111,000,000	
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	700,000,000						100Persen	1,055,000,000	
	1	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2Sub Kegiatan			100 Persen	700,000,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	2Sub Kegiatan	1,055,000,000	
	1	02	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	700,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		1,055,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah Cakupan Desa UCI Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah Penduduk Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/pusat kesehatan	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			B 90 persen 80 persen 90 Persen <5 persen 85/100000 Penduduk 23/1000 KH 23/1000 KH 85/100000 Penduduk 250 100 ribu/KH 75 persen	35,265,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	40,003,000,000	
	1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan			12 Sub Kegiatan	17,965,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan	21,798,000,000	
	1	02	02	201	0002	Pembangunan Puskesmas														
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	3,800,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		4,258,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	201	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				3 Unit	2,400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Betumonga - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		2,640,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	201	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
							Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				5 Unit	3,200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Sagulubbeg - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		3,520,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	201	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	1,500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		1,485,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	201	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	2,150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		4,565,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	201	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		330,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	201	0022	Pengembangan Rumah Sakit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1,500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		1,650,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	201	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				20 Paket	2,615,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		2,800,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	201	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				8312 Keluarga	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	201	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				4 Paket	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		330,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			2 Pelayanan	17,200,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	18,095,000,000	
	1	02	02	202	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2853 Orang	1,500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		550,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2724 Orang	1,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		880,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2724 Orang	1,050,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		1,165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9,922 Orang	800,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		880,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11036 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65963 Orang	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		330,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5737 Orang	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		330,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5551 Orang	400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		440,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				389 Orang	350,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		385,000,000	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				217 Orang	350,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		385,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				223 Orang	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		275,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	202	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				567 Orang	650,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		785,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				575 Orang	500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		550,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		330,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		1,100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		275,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	800,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		275,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	700,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		770,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	3,500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		4,300,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		1,100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		350,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				5 Unit	500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		550,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		-	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				220 Orang	500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		550,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				500 Orang	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		330,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2400 Orang	400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Ibu Hamil,Bayi, Balita, Masyarakat Miskin yang memanfaatkan Jaminan Kesehahtan Daerah		550,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	02	203		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2 Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan			2 Pelayanan	100,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Pengelolah Media Informasi/Publikasi bidang Kesehatan	2 Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan	110,000,000	
	1	02	02	203	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Pengelolah Media Informasi/Publikasi bidang Kesehatan		110,000,000	DINAS KESEHATAN
11	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	90Persen 90Persen 15Puskesmas 15Puskesmas 15Puskesmas 90Persen 15Puskesmas 90Persen			90 Persen	250,000,000						90Persen 90Persen 12Puskesmas 12Puskesmas 12Puskesmas 90Persen 12Puskesmas 90Persen	360,000,000	
	1	02	03	201		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	2Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan			90 Persen	100,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan	2Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan 2Sub Kegiatan	110,000,000	
	1	02	03	201	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	201	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	203		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan			90 Persen	150,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan	1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan	250,000,000	
	1	02	03	203	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan		250,000,000	DINAS KESEHATAN
12	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rata-rata lama pasien dirawat	5Hari 5Hari 5Hari 5Hari			5 Hari	230,000,000						5Hari 5Hari 5Hari 5Hari	253,000,000	
	1	02	04	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan			5 Hari	50,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Balai Pengobatan Tradisional Pendukung urusan Bidang Kesehatan	1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan	55,000,000	
	1	02	04	201	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Balai Pengobatan Tradisional Pendukung urusan Bidang Kesehatan		55,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	04	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan			5 Hari	50,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Rumah Industri Rumah Tangga	1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan 1Sub Kegiatan	55,000,000	
	1	02	04	203	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Rumah Industri Rumah Tangga		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	204		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-			5 Hari	130,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Rumah Makan, Pengelola depot Air Minum	-	143,000,000	
	1	02	04	204	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	130,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Rumah Makan, Pengelola depot Air Minum		143,000,000	DINAS KESEHATAN
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Desa dengan PHBS	28Desa			22 Desa	400,000,000						25Desa	440,000,000	
	1	02	05	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100Persen			22 Desa	100,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan	100Persen	110,000,000	
	1	02	05	201	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Masyarakat, Mitra Kesehatan dan Lintas Sektor Pendukung Urusan Kesehatan		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	202		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100Persen			22 Desa	100,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	100Persen	110,000,000	
	1	02	05	202	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100Persen			22 Desa	200,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan dan Mitra Kesehatan	100Persen	220,000,000	
	1	02	05	203	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan dan Mitra Kesehatan		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	X					NON URUSAN						41,184,054,974							44,376,175,633	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						41,184,054,974							44,376,175,633	
14	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	41,184,054,974						100Persen	44,376,175,633	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2Sub Kegiatan			1 Dokumen	80,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Perencana Dinas Kesehatan dan Perencana Puskesmas Urusan Bidang Kesehatan	2Sub Kegiatan	110,000,000	
	X	XX	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Perencana Dinas Kesehatan dan Perencana Puskesmas Urusan Bidang Kesehatan		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Perencana Dinas Kesehatan dan Perencana Puskesmas Urusan Bidang Kesehatan		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2Sub Kegiatan			100 Persen	35,613,769,728			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pendukung Urusan Kesehatan	2Sub Kegiatan	37,090,999,933	
	X	XX	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				389 Orang/bulan	34,813,769,728	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pendukung Urusan Kesehatan		36,210,999,933	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	800,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Pendukung Urusan Kesehatan		880,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1Sub Kegiatan			100 Persen	200,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	1Sub Kegiatan	220,000,000	
	X	XX	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7Sub Kegiatan			100 Persen	480,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan	7Sub Kegiatan	558,000,000	
	X	XX	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		16,500,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		55,000,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		16,500,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		250,000,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2Sub Kegiatan			100 Persen	3,078,091,246			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan	2Sub Kegiatan	2,700,000,000	
	X	XX	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	3,078,091,246	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		2,700,000,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1Sub Kegiatan			2 Sub Kegiatan 100 Persen	1,432,194,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	1Sub Kegiatan	3,367,175,700	
	X	XX	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		880,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,352,194,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		3,366,295,700	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2Sub Kegiatan			100 Persen	300,000,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan	2Sub Kegiatan	330,000,000	
	X	XX	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	X	XX	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pendukung Urusan Bidang Kesehatan		220,000,000	DINAS KESEHATAN
						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						21,963,350,122							30,475,797,909	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21,963,350,122							30,475,797,909	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						21,555,166,122							29,957,613,909	
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100Persen			-	18,999,371,168						100Persen	27,014,624,275	
	1	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2Sub Kegiatan			-	16,732,084,768			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2Sub Kegiatan	21,125,730,029	
	1	02	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118 Orang/bulan	11,557,433,768	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		13,451,079,029	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	5,174,651,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		7,674,651,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7Sub Kegiatan			-	256,308,400			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	7Sub Kegiatan	406,308,400	
	1	02	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	256,308,400	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		406,308,400	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1Sub Kegiatan			-	1,257,658,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1Sub Kegiatan	4,417,190,846	
	1	02	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	441,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		891,500,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	816,158,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,525,690,846	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2Sub Kegiatan			-	753,320,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2Sub Kegiatan	1,065,395,000	
	1	02	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		392,075,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	453,320,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		673,320,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			-	2,555,794,954						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	2,942,989,634	
	1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan			-	1,946,080,520			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan	1,943,275,200	
	1	02	02	201	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				5 Paket	1,946,080,520	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		1,943,275,200	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			-	609,714,434			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	999,714,434	
	1	02	02	202	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				7 Dokumen	609,714,434	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		999,714,434	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	-				-						408,184,000							518,184,000	
17	1	-	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B 21/1000KH			-	261,360,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B 22/1000KH	311,360,000	
	1	-	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan			-	261,360,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan 10Sub Kegiatan	311,360,000	
	1	-	02	201	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				152 Unit	261,360,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		311,360,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	1	-	-			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100Persen			-	146,824,000						100Persen	206,824,000	
	1	-	-	-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7Sub Kegiatan			-	146,824,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	7Sub Kegiatan	206,824,000	
	1	-	-	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22,552,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		32,552,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	-	-	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	124,272,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		174,272,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						PUSKESMAS MAPADDEGAT						2,000,000,000							2,090,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,000,000,000							2,090,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,000,000,000							2,090,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	2,000,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	2,090,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	2,000,000,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	2,090,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	2,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		2,090,000,000	PUSKESMAS MAPADDEGAT
						PUSKESMAS SIOBAN						2,100,000,000							2,200,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,100,000,000							2,200,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,100,000,000							2,200,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	2,100,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	2,200,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	2,100,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	2,200,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2,100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		2,200,000,000	PUSKESMAS SIOBAN
						PUSKESMAS BOSUA						800,000,000							880,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						800,000,000							880,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						800,000,000							880,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 persen	800,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	880,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	800,000,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	880,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	800,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		880,000,000	PUSKESMAS BOSUA
						PUSKESMAS MUARA SIBERUT						2,000,000,000							2,090,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,000,000,000							2,090,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,000,000,000							2,090,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	2,000,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	2,090,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	2,000,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	2,090,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	2,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		2,090,000,000	PUSKESMAS MUARA SIBERUT
						PUSKESMAS PEIPEI						1,300,000,000							1,800,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,300,000,000							1,800,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,300,000,000							1,800,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	1,300,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	1,800,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	1,300,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	1,800,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1,300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		1,800,000,000	PUSKESMAS PEIPEI
						PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP						1,200,000,000							1,200,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,200,000,000							1,200,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,200,000,000							1,200,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	1,200,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	1,200,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	1,200,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	1,200,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1,200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		1,200,000,000	PUSKESMAS SAIBI SAMUKOP
						PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN						2,000,000,000							2,200,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,000,000,000							2,200,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,000,000,000							2,200,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 persen	2,000,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	2,200,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	2,000,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	2,200,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	2,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		2,200,000,000	PUSKESMAS MUARA SIKABALUAN
						PUSKESMAS BETAET						1,100,000,000							1,610,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,100,000,000							1,610,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,100,000,000							1,610,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 persen	1,100,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	1,610,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	1,100,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	1,610,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1,100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		1,610,000,000	PUSKESMAS BETAET
						PUSKESMAS SIKAKAP						2,000,000,000							2,300,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,000,000,000							2,300,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,000,000,000							2,300,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	2,000,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	2,300,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	2,000,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	2,300,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	2,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		2,300,000,000	PUSKESMAS SIKAKAP
						PUSKESMAS MALAKOPA						1,200,000,000							1,300,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,200,000,000							1,300,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,200,000,000							1,300,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	1,200,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	1,300,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	1,200,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	1,300,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1,200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		1,300,000,000	PUSKESMAS MALAKOPA
						PUSKESMAS BULASAT						1,200,000,000							1,320,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,200,000,000							1,320,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,200,000,000							1,320,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	1,200,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	1,320,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	1,200,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	1,320,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1,200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		1,320,000,000	PUSKESMAS BULASAT
						PUSKESMAS SAREREIKET						900,000,000							990,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						900,000,000							990,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						900,000,000							990,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	900,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	990,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	900,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	990,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	900,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Madobag	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		990,000,000	PUSKESMAS SAREREIKET
						PUSKESMAS SIMATALU						700,000,000							770,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						700,000,000							770,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						700,000,000							770,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	700,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	770,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	700,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	770,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	700,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		770,000,000	PUSKESMAS SIMATALU
						PUSKESMAS SIGAPOKNA						700,000,000							770,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						700,000,000							770,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						700,000,000							770,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 persen	700,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	770,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	700,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	770,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	700,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		770,000,000	PUSKESMAS SIGAPOKNA
						PUSKESMAS SAUMANGANYA						1,200,000,000							1,320,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,200,000,000							1,320,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,200,000,000							1,320,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH) Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daaerah	85persen 85persen B <5persen 230100 ribu/KH 85persen 90Persen <5persen 95/100000Penduduk 85persen <5persen B 21/1000KH 230100 ribu/KH 21/1000KH 230100 ribu/KH 85persen <5persen 95/100000Penduduk 21/1000KH B 85persen 90persen 95/100000Penduduk 85persen B			23/1000 KH 90 Persen	1,200,000,000						80persen 85persen B <5persen 250100 ribu/KH 80persen 90Persen <5persen 90/100000Penduduk 85persen <5persen B 22/1000KH 250100 ribu/KH 22/1000KH 250100 ribu/KH 85persen <5persen 90/100000Penduduk 2121000KH B 80persen 90persen 90/100000Penduduk 85persen B	1,320,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan			1 Dokumen	1,200,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	28Sub Kegiatan 28Sub Kegiatan 28 SubKegiatan 28 Sub Kegiatan	1,320,000,000	
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	1,200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		1,320,000,000	PUSKESMAS SAUMANGANYA
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						177,759,324,713							120,847,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						177,759,324,713							120,847,000,000	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						174,709,324,713							118,247,000,000	
34	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah	100Persen			100 Persen	11,896,025,113						100Persen	15,050,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD	100Persen			100 Persen	60,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	110,000,000	
	1	03	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		10,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja ASN	100Persen			100 Persen	6,136,321,113			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	6,200,000,000	
	1	03	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	5,836,321,113	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		5,900,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi BMD dengan baik	2Laporan			12 Laporan	10,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	2Laporan	10,000,000	
	1	03	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		10,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN	100Persen			100 Persen	600,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	900,000,000	
	1	03	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100Persen			100 Persen	995,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	1,030,000,000	
	1	03	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	130,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	130,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		160,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	65,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		70,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD	100Persen			100 Persen	1,810,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	1,220,000,000	
	1	03	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	560,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		970,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	207	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	207	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mendukung pelaksanaan kegiatan OPD	-			100 Persen	1,734,704,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	4,960,000,000	
	1	03	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	155,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		160,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,579,704,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		4,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya keandalan BMD	-			100 Persen	550,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	620,000,000	
	1	03	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				44 Unit	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		170,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Jaringan Irigasi Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	30HA 8Persen			25 HA 750 Persen	5,600,000,000						28HA 7,80Persen	12,050,000,000	
	1	03	02	202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya luas Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	2Persen			2 Persen	5,600,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	3Persen	12,050,000,000	
	1	03	02	202	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,3 KM	4,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		8,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	202	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,3 KM	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumangany a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	202	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3,8 KM	1,300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	202	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				2 Dokumen	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemnemleleu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		850,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	68persen			62 persen	13,236,160,053						65persen	11,000,000,000	
	1	03	03	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM	3Persen			2 Persen	13,236,160,053			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	3Persen	11,000,000,000	
	1	03	03	201	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				100 Unit	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	201	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Orang	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	201	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1,490,160,053	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	201	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				150 Liter/Detik	1,500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	201	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				550 SR	9,746,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		9,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	55persen			51 persen	1,900,000,000						52persen	2,105,000,000	
	1	03	04	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kawasan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	3Persen			1 Persen	1,900,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1Persen	2,105,000,000	
	1	03	04	201	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				200 Ton/hari	1,500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	201	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		605,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem pengelolaan air limbah	35persen			31 persen	3,100,000,000						33persen	3,100,000,000	
	1	03	05	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	2Persen			1 Persen	3,100,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	2Persen	3,100,000,000	
	1	03	05	201	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
							Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				18 Penyelenggara	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	201	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				400 Rumah Tangga	3,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Berkurangnya titik genangan air	75persen			71 persen	4,080,000,000						73persen	2,500,000,000	
	1	03	06	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan perkotaan yang dilengkapi drainase lingkungan	18Persen			6,25 Persen	4,080,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	12,5Persen	2,500,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	06	201	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				800 M	2,180,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	201	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				13 Dokumen	1,900,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			-	700,000,000						-	4,000,000,000	
	1	03	07	201		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	700,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	4,000,000,000	
	1	03	07	201	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				50 Ton/hari	450,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	07	201	0017	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
							Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				500 Ton/hari	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	85Persen			78 Persen	6,300,000,000						82Persen	6,300,000,000	
	1	03	08	201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah IMB yang diterbitlkan Meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB/PBG	3Persen			2 Dokumen 3 Persen	6,300,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	4Persen	6,300,000,000	
	1	03	08	201	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6,000,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	201	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				20 Dokumen	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jalan Mantap Persentase Jalan Mantap	10Persen			9 Persen 11 Persen	124,997,139,547						8Persen	58,880,000,000	
	1	03	10	201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang	2Persen			548 Km 1 Persen	124,997,139,547			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	2Persen	58,880,000,000	
	1	03	10	201	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	1,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	201	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				6 KM	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	201	0032	Pembangunan Jalan														
							Panjang Jalan yang Dibangun				7 KM	30,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	201	0033	Rekonstruksi Jalan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	77,447,139,547	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		30,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	201	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	5,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	201	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				30 Jembatan	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	201	0040	Pembangunan Jembatan														
							Jumlah Jembatan yang Dibangun				3 Jembatan	6,350,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		6,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	201	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	800,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Beriulou - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		880,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	201	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				400 KM	4,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		4,400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyediaan Jasa yangMemiliki Tenaga Kerja Konstruksi Terampil Bersertiikat Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis memiliki sertifikat kompetensi	10Persen			5 Persen 5 Persen	450,000,000						8Persen	1,175,000,000	
	1	03	11	201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya kapasitas tenaga terampil konstruksi Meningkatnya ketersediaan tenaga terampil konstruksi	100Persen			100 Persen 234 Orang	175,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	375,000,000	
	1	03	11	201	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Lembaga	175,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		175,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	201	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				0 Orang	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	202		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah layanan data dan sistem informasi jasa konstruksi Tersedianya Sistem Inormasi Jasa Konstruksi	12,5Persen			12,5 Persen 1 Dokumen	175,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	12,5Persen	600,000,000	
	1	03	11	202	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	202	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	203		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Meninkatnya Jumlah IUJK yang diterbitkan	12,5Persen			12,5 Persen	-			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	12,5Persen	100,000,000	
	1	03	11	203	0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi														
							Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Dokumen	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	11	204		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	100,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	100,000,000	
	1	03	11	204	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	100Persen			100 Persen	2,450,000,000						100Persen	2,087,000,000	
	1	03	12	201		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RTRR Kabupaten yang ditetapkan dan disosialisasikan Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki RRTR	10Persen			4 Dokumen 10 Persen	450,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	10Persen	122,000,000	
	1	03	12	201	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	201	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		22,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	201	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota														
							dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	201	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				2 Orang	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	202		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	10Persen			2 Dokumen 10 Persen	1,400,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	10Persen	1,300,000,000	
	1	03	12	202	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	203		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesesuaian Permanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	100Persen			100 Persen 2 Dokumen	100,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	350,000,000	
	1	03	12	203	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	203	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	204		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Meningkatnya Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100Persen			3 Dokumen 100 Persen	500,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	315,000,000	
	1	03	12	204	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		70,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	204	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	204	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		80,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	204	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
							Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		65,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	-				-						3,050,000,000							2,600,000,000	
45	1	-	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	30HA 8Persen			-	3,050,000,000						28HA 7,80Persen	2,600,000,000	
	1	-	02	201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	2Persen			-	3,050,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	3Persen	2,600,000,000	
	1	-	02	201	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	-	02	201	0107	Pembangunan Unit Air Baku														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Panjang Unit Air Baku yang Dibangun				2 KM	1,400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	-	02	201	0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
							Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,4 KM	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	-	02	201	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
							Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	-	02	201	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
							Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				10 Dokumen	1,200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT						550,000,000							750,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						550,000,000							750,000,000	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						550,000,000							750,000,000	
46	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah	100Persen			100 Persen	550,000,000							100Persen	750,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya keandalan BMD	-			100 Persen	550,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	750,000,000	
	1	03	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	550,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		750,000,000	UPT PENGELOLAAN ALAT BERAT
						UPT Pengelolaan Air Minum Daerah						2,200,000,000							2,800,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,200,000,000							2,800,000,000	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2,200,000,000							2,800,000,000	
47	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	68persen			62 persen	2,200,000,000						65persen	2,800,000,000	
	1	03	03	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM	3Persen			2 Persen	2,200,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	3Persen	2,800,000,000	
	1	03	03	201	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
							Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga	100,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		300,000,000	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH
	1	03	03	201	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 Unit	2,100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		2,500,000,000	UPT PENGELOLAAN AIR MINUM DAERAH
						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						16,682,658,121							14,994,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16,654,542,121							14,954,000,000	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						8,941,959,410							8,383,000,000	
48	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100persen			-	3,431,028,921						100persen	4,508,000,000	
	1	04	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100persen			-	40,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	42,000,000	
	1	04	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	5 Dokumen	42,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100persen			-	2,676,868,921			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	3,290,000,000	
	1	04	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			25 Orang/bulan	2,591,868,921	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	25 Orang/bulan	3,200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen			12 Dokumen	85,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	14 Dokumen	90,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100persen			-	239,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	381,000,000	
	1	04	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		25,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		43,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		106,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	34,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	4 Paket	35,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen			20 Dokumen	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	20 Dokumen	22,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	100,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Laporan	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100persen			-	50,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	65,000,000	
	1	04	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		65,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen			-	323,160,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	595,000,000	
	1	04	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	93,000,000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		95,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	230,160,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen			-	102,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	135,000,000	
	1	04	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		55,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	42,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		45,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		35,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
49	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	17persen			-	5,510,930,489						15persen	3,875,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	02	202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	100persen			-	150,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	175,000,000	
	1	04	02	202	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	290 Orang			250 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	270 Orang	175,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	100persen			-	5,360,930,489			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	3,700,000,000	
	1	04	02	203	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	70 Unit Rumah			100 Unit Rumah	5,360,930,489	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Betumonga - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan	INSENTIF FISKAL	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	66 Unit Rumah	3,700,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	-				-						7,712,582,711							6,571,000,000	
50	1	-	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	17persen			-	350,000,000						15persen	783,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	-	02	201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	100persen			-	50,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	86,000,000	
	1	-	02	201	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen			2 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Dokumen	86,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	-	02	203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	100persen			-	250,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	610,000,000	
	1	-	02	203	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah			10 Unit Rumah	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	17 Unit Rumah	610,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	-	02	204		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	100persen			-	50,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	87,000,000	
	1	-	02	204	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen			2 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Dokumen	87,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
51	1	-	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	50persen			-	3,729,634,711						52persen	2,528,000,000	
	1	-	03	203		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	100persen			-	3,729,634,711			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100persen	2,528,000,000	
	1	-	03	203	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	65 Unit Rumah			132 Unit Rumah	3,400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	65 Unit Rumah	2,160,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	-	03	203	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen			1 Dokumen	177,700,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Dokumen	178,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	-	03	203	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	151,934,711	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Dokumen	190,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
52	1	-	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	65persen			-	3,632,948,000						63persen	3,260,000,000	
	1	-	05	201		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	100persen			-	3,632,948,000			-	-	-	100persen	3,260,000,000	
	1	-	05	201	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi			15 Lokasi	3,574,335,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sotboyak - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	15 Lokasi	3,200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	-	05	201	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan														
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen			1 Dokumen	58,613,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						28,116,000							40,000,000	
	2	-				-						28,116,000							40,000,000	
53	2	-	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			-	28,116,000						-	40,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	-	05	201		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	28,116,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	40,000,000	
	2	-	05	201	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	28,116,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		40,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						5,397,111,800							8,952,459,954	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,397,111,800							8,952,459,954	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN						5,397,111,800							8,952,459,954	
54	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100persen			100 Persen 100 persen	4,849,435,800						100persen	7,607,459,954	
	1	05	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100Persen			100 persen	3,264,502,800			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	3,695,000,000	
	1	05	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3,215,302,800	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,645,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	49,200,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100persen			100 persen	170,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	241,860,000	
	1	05	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		18,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,600,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,660,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	30,400,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		51,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	18,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		18,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100Persen			1 Tahun	1,184,533,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	3,143,599,954	
	1	05	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	50,400,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55,440,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,134,133,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,088,159,954	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100Persen			1 Tahun	230,400,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	527,000,000	
	1	05	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30,400,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		44,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	140,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		320,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		11,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		152,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
55	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	90Persen			88 Persen	250,000,000						89Persen	420,000,000	
	1	05	02	201		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya suasana aman dan tentram bagi masyarakat	90Persen			44 persen	150,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	80Persen	265,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	02	201	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan															
							Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				3 Kasus	100,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		160,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	201	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa															
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				2 Laporan	50,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	203		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PPNS	30Persen			3 orang	100,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	30Persen	155,000,000	
	1	05	02	203	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS															
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		155,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
56	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100persen			100 persen	297,676,000						100persen	925,000,000	
	1	05	04	201		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan pencegahan kebaran dari bahan bahaya dan beracun	100Persen			25 persen	250,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	90Persen	790,000,000	
	1	05	04	201	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				3 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	201	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				20 Orang	100,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		350,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	201	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	50,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		330,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	204		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya kepedulian keikut sertaan masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran	90persen			25 persen	47,676,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	85persen	135,000,000	
	1	05	04	204	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				20 Orang	47,676,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		135,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						4,737,854,548							6,561,136,848	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,737,854,548							6,561,136,848	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN						4,737,854,548							6,561,136,848	
57	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80Persen			80 Persen	3,833,602,198						80Persen	3,961,136,848	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran	100Persen			100 Persen 100 Persen	25,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	30,000,000	
	1	05	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			6 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	6 Dokumen	30,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ASN	100Persen			100 Persen	2,732,297,198			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	2,965,000,000	
	1	05	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan			25 Orang/bulan	2,672,297,198	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	28 Orang/bulan	2,900,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen			12 Dokumen	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Dokumen	65,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administasi umum Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100Persen			100 Persen 100 Persen	262,500,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	340,000,000	
	1	05	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket			1 Paket	7,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	5 Paket	8,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket			5 Paket	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	10 Paket	80,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket			1 Paket	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	7 Paket	22,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			5 Dokumen	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	12 Dokumen	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan			12 Laporan	150,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	15 Laporan	220,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen 100 Persen	554,305,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	73,000,000	
	1	05	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	73,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	3 Laporan	73,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	250 Laporan			11 Laporan	481,305,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	63 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD	80Persen			80 Persen 80 Persen	259,500,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	80Persen	553,136,848	
	1	05	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit			2 Unit	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Unit	75,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			7 Unit	106,363,152	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	16 Unit	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit			12 Unit	28,136,848	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	-	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	4 Unit	28,136,848	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
58	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	[deleted] Persentase Bencana tertangani Persentase Bencana tertangani [deleted] Persentase Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Siap Menghadapi Bencana	100persen 20persen			 100 persen 100 persen 5 persen	904,252,350						100persen 5persen	2,600,000,000	
	1	05	03	201		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/ kota	80Persen			80 Persen 2 jenis	150,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	80Persen	300,000,000	
	1	05	03	201	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	440 Orang			100 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	150 Orang	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	202		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80Persen			80 Persen 12 Jenis	454,252,350			-	-	-	80Persen	1,150,000,000	
	1	05	03	202	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi														
							Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	4 Dokumen			2 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Dokumen	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	202	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang			100 Orang	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	0 Orang	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	202	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	350 Orang			1 Kawasan	84,252,350	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Orang	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	202	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	48 Dokumen			12 laporan	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	12 Dokumen	350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	203		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100Persen			100 Persen 6 Jenis	250,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	650,000,000	
	1	05	03	203	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	2000 Orang			1000 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	500 Orang	450,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	203	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang			1000 Orang	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	1000 Orang	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	204		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100Persen			100 Persen 6 Jenis	50,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	500,000,000	
	1	05	03	204	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	300 Dokumen			2 Kegiatan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100 Dokumen	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
59	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kejadian kebakaran yang tertangani	100Persen			100 Persen	-						100Persen	-	
	1	05	04	201		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	100Persen			100 Persen	-			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	-	
	1	05	04	201	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	0 Dokumen			1 Dokumen	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	0 Dokumen	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	201	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan			12 Laporan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	0 Laporan	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	201	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 Orang			14 Orang	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	0 Orang	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						6,062,058,182							6,055,667,899	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,589,552,415							5,651,267,899	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						5,519,552,415							5,580,497,899	
60	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah	100persen			100 persen	4,461,860,415						100persen	4,511,171,286	
	1	06	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2/1dokumen/1 aporan			2/1 dokumen/laporan	20,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2/1dokumen/ laporan	20,220,000	
	1	06	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		20,220,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan honor ASN yang terbayar	100persen			100 Persen	3,620,355,915			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	3,659,875,236	
	1	06	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	3,592,755,915	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,632,275,236	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	27,600,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		27,600,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	100persen			100 persen	213,026,200			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	215,864,489	
	1	06	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		5,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		25,275,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	78,024,700	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		78,882,972	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15,001,500	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		15,166,517	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	90,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		90,990,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang diadakan	100Persen			100 Persen	25,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	25,275,000	
	1	06	01	207	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		25,275,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa pelayanan umum kantor dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	100persen			100 persen	494,680,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	500,161,480	
	1	06	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	49,950,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		50,499,450	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	444,730,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		449,662,030	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah layak pakai	100persen			100 persen	88,798,300			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	89,775,081	
	1	06	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29,996,750	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		30,326,714	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	23,713,050	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		23,973,894	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		30,330,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,088,500	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		5,144,473	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
61	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	30Persen			-	322,422,000						28Persen	325,968,642	
	1	06	02	201		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	100Persen			-	150,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	151,650,000	
	1	06	02	201	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT														
							Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				186 Keluarga	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		151,650,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	02	203		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dilatih	100Persen			100 Persen	172,422,000			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	174,318,642	
	1	06	02	203	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				43 Orang	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		40,440,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	203	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	52,422,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		52,998,642	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	203	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Lembaga	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		40,440,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	203	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Sertifikat	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		40,440,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
62	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	100Persen			100 Persen	404,436,700						100Persen	408,885,505	
	1	06	04	201		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar pasnti sosial yang mendapat bantuan	100Persen			100 Persen	404,436,700			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	408,885,505	
	1	06	04	201	0001	Penyediaan Permakanan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				220 Orang	139,204,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		140,735,851	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	201	0003	Penyediaan Alat Bantu														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		101,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	201	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	60,282,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		60,945,709	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	201	0012	Pemberian Layanan Rujukan														
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	104,949,500	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		106,103,945	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
63	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100Persen			100 Persen	260,833,300						100Persen	263,702,466	
	1	06	05	202		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS menerima jaminan social Persentase data fakir miskin yang valid	100Persen 100Persen			100 Persen 100 Persen	260,833,300			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen 100Persen	263,702,466	
	1	06	05	202	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				200 Keluarga	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		101,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	202	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5006 Keluarga	160,833,300	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		162,602,466	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
64	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran	100Persen			100 Persen	70,000,000						100Persen	70,770,000	
	1	06	06	202		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	100Persen			100 Persen	70,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	70,770,000	
	1	06	06	202	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		70,770,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						472,505,767							404,400,000	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						472,505,767							404,400,000	
65	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menggunakan PPRG di dalam perencanaan dan penganggaran Persentase peran serta perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya	25OPD 75Persen			9 OPD 50 Persen	150,000,000						20OPD 75Persen	151,650,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	02	201		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelembagaan PUG	23OPD			20 OPD	100,000,000			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	22OPD	101,100,000	
	2	08	02	201	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	201	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Perangkat Daerah	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1Lembaga			3 lembaga	50,000,000			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	1Lembaga	50,550,000	
	2	08	02	203	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
66	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100Persen			100 Persen	50,000,000						100Persen	50,550,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	03	201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/perangkat daerah yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	1Dokumen			1 Dokumen	50,000,000			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	1Dokumen	50,550,000	
	2	08	03	201	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
67	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pencanangan kecamatan layak Anak	6Kecamatan			4 Kecamatan	100,000,000						5Kecamatan	101,100,000	
	2	08	06	201		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA	7Organisasi			5 lembaga	100,000,000			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	6Organisasi	101,100,000	
	2	08	06	201	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				3 Organisasi	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	201	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
68	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100Persen			100 Persen	172,505,767						100Persen	101,100,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	07	201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	18OPD			36 Perangkat Daerah	122,505,767			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	18OPD	50,550,000	
	2	08	07	201	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				36 Orang	122,505,767	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Penguatan dan pengembangan tingkat daerah	2Lembaga			2 lembaga	50,000,000			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	2Lembaga	50,550,000	
	2	08	07	203	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				1 Orang	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,589,552,415							5,651,267,899	
	1	-				-						70,000,000							70,770,000	
69	1	-	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	100Persen			-	70,000,000						100Persen	70,770,000	
	1	-	06	201		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	100Persen			-	70,000,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	70,770,000	
	1	-	06	201	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		70,770,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						UPTD PPA						200,000,000							202,200,000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						200,000,000							202,200,000	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						200,000,000							202,200,000	
70	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100Persen			100 Persen 100 Persen	50,000,000						100Persen	50,550,000	
	2	08	03	202		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	1Layanan			5 Layanan	50,000,000			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	1Layanan	50,550,000	
	2	08	03	202	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Layanan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		50,550,000	UPTD PPA
71	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100Persen			100 Persen	150,000,000						100Persen	151,650,000	
	2	08	07	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1Layanan			15 Layanan	150,000,000			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	1Layanan	151,650,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	07	202	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				15 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		151,650,000	UPTD PPA
						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						9,518,882,332							17,509,113,469	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,688,912,532							10,144,000,000	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						7,573,912,532							10,009,000,000	
72	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100Persen			-	7,294,912,532						100Persen	8,510,000,000	
	2	09	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30,000,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	400,000,000	
	2	09	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7,194,912,532			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	8,000,000,000	
	2	09	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	7,194,912,532	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		8,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	70,000,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	110,000,000	
	2	09	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		35,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
73	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	55persen			-	279,000,000						54persen	1,499,000,000	
	2	09	03	201		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	1dokumen			-	179,000,000			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	1dokumen	899,000,000	
	2	09	03	201	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	99,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		99,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	201	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				12 Laporan	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	202		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	48ton			-	80,000,000			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	10ton	400,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	09	03	202	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				5 Ton	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	09	03	204		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	20,000,000			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	200,000,000	
	2	09	03	204	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1,829,969,800							7,365,113,469	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,765,280,300							7,295,113,469	
74	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100Persen			-	951,056,554						100Persen	2,535,113,469	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	91,086,554			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	266,000,000	
	3	27	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		16,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	81,086,554	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		250,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	750,970,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	2,185,113,469	
	3	27	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	750,970,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		2,185,113,469	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	109,000,000			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	84,000,000	
	3	27	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	9,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		9,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
75	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	160,447,892						-	3,360,000,000	
	3	27	02	201		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	30,000,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	1,500,000,000	
	3	27	02	201	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		1,500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	02	202		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	160,000,000	
	3	27	02	202	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
							Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		160,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	205		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30,000,000			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	200,000,000	
	3	27	02	205	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				12 Laporan	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	50,447,892			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	1,500,000,000	
	3	27	02	206	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
							Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				10 Ekor	50,447,892	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		1,500,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
76	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	85persen			-	602,999,800						85persen	1,000,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	27	03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	0dokumen			-	30,000,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	0dokumen	-	
	3	27	03	201	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														
							Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan				1 Dokumen	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		-	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	202		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	572,999,800			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	1,000,000,000	
	3	27	03	202	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	572,999,800	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo	INSENTIF FISKAL	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		1,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
77	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	100persen			-	50,776,054						100persen	400,000,000	
	3	27	05	201		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	50,776,054			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	400,000,000	
	3	27	05	201	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	50,776,054	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,688,912,532							10,144,000,000	
	2	-				-						115,000,000							135,000,000	
78	2	-	-			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100Persen			-	115,000,000						100Persen	135,000,000	
	2	-	-	-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	30,000,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	50,000,000	
	2	-	-	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	-	-	-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	85,000,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	85,000,000	
	2	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	85,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		85,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1,829,969,800							7,365,113,469	
	3	-				-						64,689,500							70,000,000	
79	3	-	-			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100Persen			-	64,689,500						100Persen	70,000,000	
	3	-	-	-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	64,689,500			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	-	70,000,000	
	3	-	-	-	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	64,689,500	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-		70,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						4,592,161,744							6,895,947,613	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,592,161,744							6,895,947,613	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4,592,161,744							6,895,947,613	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100Persen			100 Persen 100 Persen	3,589,319,168						100Persen	3,930,947,613	
	2	11	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1Dokumen			1 Dokumen	10,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1Dokumen	52,000,000	
	2	11	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		47,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	5,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		5,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	100Persen			32 Orang 100 Persen	2,784,112,244			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	100Persen	2,853,223,406	
	2	11	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2,672,112,244	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		2,703,223,406	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	112,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan administrasi umum daerah	100Persen			100 Persen	191,600,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	371,000,000	
	2	11	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		30,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		166,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	6,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		6,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	9,600,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		19,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	90,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100Persen			100 Persen	353,338,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	398,696,000	
	2	11	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	48,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	305,338,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		348,696,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah	100Persen			100 Persen	250,268,924			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	256,028,207	
	2	11	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	53,130,717	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		54,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	187,028,207	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		187,028,207	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10,110,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
81	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	100persen			-	690,000,000						100persen	700,000,000	
	2	11	02	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	2dokumen			-	40,000,000			-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	0dokumen	100,000,000	
	2	11	02	201	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	02	202		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota	2Dokumen			2 Dokumen	650,000,000			-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	0Dokumen	600,000,000	
	2	11	02	202	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	650,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
82	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	100persen			100 persen	100,000,000						100persen	440,000,000	
	2	11	03	201		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terwujudnya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			1 dokumen	100,000,000			-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	-	440,000,000	
	2	11	03	201	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		140,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	03	201	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
83	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tindak lanjuti	100persen			100 persen	50,000,000						100persen	650,000,000	
	2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	1Laporan			1 Laporan	50,000,000			-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	1Laporan	650,000,000	
	2	11	06	201	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				16 Badan Usaha	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		650,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
84	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	6MHA			5 MHA 5 MHA	60,000,000						5MHA	350,000,000	
	2	11	07	201		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terwujudnya Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	6MHA			6 MHA	50,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	6MHA	200,000,000	
	2	11	07	201	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	07	202		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	6MHA			-	10,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	5MHA	150,000,000	
	2	11	07	202	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
							Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				2 Dokumen	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase sampah yang dikelola	-			7 persen	102,842,576						-	825,000,000	
	2	11	11	201		Pengelolaan Sampah	Terwujudnya Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	-			7 Persen	52,842,576			-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	-	575,000,000	
	2	11	11	201	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		125,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	201	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				2 Unit	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	201	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				36 Ton	32,842,576	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	11	203		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	-			7 Persen	50,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	250,000,000	
	2	11	11	203	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4,273,411,823							6,663,200,000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,273,411,823							6,663,200,000	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3,975,011,823							5,773,000,000	
86	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100Persen			-	3,555,911,823						100Persen	4,123,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100persen			-	2,855,912,823			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	3,200,000,000	
	2	12	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2,855,912,823	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100persen			100 persen	212,500,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	302,500,000	
	2	12	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		13,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		114,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		175,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	70persen			-	20,000,000			-	-	-	65persen	-	
	2	12	01	207	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen			-	417,499,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	550,000,000	
	2	12	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	417,499,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		550,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen			-	50,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	70,500,000	
	2	12	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		70,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
87	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	90Persen			-	268,238,000						75Persen	1,100,000,000	
	2	12	02	201		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	130,919,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	550,000,000	
	2	12	02	201	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	130,919,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		550,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	203		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	137,319,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	550,000,000	
	2	12	02	203	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				2 Laporan	137,319,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		550,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
88	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	9930Persen			-	150,862,000						9930Persen	550,000,000	
	2	12	03	201		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	150,862,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	550,000,000	
	2	12	03	201	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	150,862,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		550,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	-				-						298,400,000							890,200,000	
89	2	-	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	70Persen			-	25,000,000						60Persen	550,000,000	
	2	-	05	201		Penyusunan Profil Kependudukan	-	2dokumen			-	25,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2dokumen	550,000,000	
	2	-	05	201	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		550,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	2	-	-			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100Persen			-	273,400,000						100Persen	340,200,000	
	2	-	-	-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen			-	59,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	119,500,000	
	2	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		59,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	-	-	-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen			-	70,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	70,200,000	
	2	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		70,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	-	-	-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100persen			100 persen	89,400,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	90,500,000	
	2	-	-	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	14,400,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	-	-	-	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		75,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	-	-	-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100persen			-	59,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	119,500,000	
	2	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	59,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	-	-	-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100persen			-	55,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	60,000,000	
	2	-	-	-	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	55,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					7,174,711,655							520,000,000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7,174,711,655							520,000,000	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5,119,253,655							-	
91	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan tugas Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	4,349,999,218						100Persen	-	
	2	13	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	30,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	-	
	2	13	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen Dokumen	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Umum dan Keuangan Perkantoran	-			2 Jenis	3,156,172,655			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	-	
	2	13	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3,024,172,655	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	132,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	-			75 Jenis	287,542,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	-	
	2	13	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	10,042,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	65,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Paket Dokumen	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	206	0007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana penunjang urusan pemerintah daerah	-			70 Persen	45,110,563			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	-	
	2	13	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	25,110,563	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	207	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan	-			2 Jenis	721,174,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	-	
	2	13	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	85,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	208	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	636,174,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			4 Jenis	110,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	-	
	2	13	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	45,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
92	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	92Persen 92 %			75 Persen	240,000,000						92Persen 92%	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	04	201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	43Desa 1Dokumen			43 Desa	240,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	43Desa 1Dokumen	-	
	2	13	04	201	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				2 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	201	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	201	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				43 Dokumen	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	201	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				129 Orang	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	04	201	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				43 Desa	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang tertangani	75Lembaga Kemasyarakatan 10MHA			100 Persen	529,254,437						75Lembaga Kemasyarakatan 8MHA	-	
	2	13	05	201		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			43 Desa	529,254,437			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	-	
	2	13	05	201	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	201	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				43 Lembaga	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	201	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				43 Laporan	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	201	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	201	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				2 Dokumen	434,254,437	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	13	05	201	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			86 Keluarga	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1,860,458,000							450,000,000	
94	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pengendalian Penduduk yang tertangani	85 % 15Persen			100 Persen	360,000,000						80% 13Persen	450,000,000	
	2	14	02	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Dokumen			1 Dokumen	185,000,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	1Dokumen	450,000,000	
	2	14	02	201	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
							Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				2 Kegiatan	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	201	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal														
							Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	201	0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Dokumen	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	-	-	-		450,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	201	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
							Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	85,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,5%			2 Dokumen	175,000,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	1,3%	-	
	2	14	02	202	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	45,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	202	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	202	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	120,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
95	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana yang tertangani	65Persen 85%			100 Persen	1,070,458,000						64Persen 80%	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	201		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1Dokumen			1 Dokumen	548,850,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	1Dokumen	-	
	2	14	03	201	0008	Pengendalian Program KKBPK														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	67,850,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	201	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Unit	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	201	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Laporan	120,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	201	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	130,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	201	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	201	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	73,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	201	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	33,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1Laporan			12 Laporan	252,619,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	1Laporan	-	
	2	14	03	202	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
							Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				10 Unit	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	202	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				129 Orang	92,619,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	202	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				2 Organisasi	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	03	203		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	10Faskes			10 Faskes	158,989,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	10Faskes	-	
	2	14	03	203	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	32,958,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	203	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				50 Orang	96,031,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	203	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				10 Laporan	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	203	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				129 Orang	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	203	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				10 Laporan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	203	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				100 Orang	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	203	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														
							Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				0 Orang	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	203	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														
							Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				129 Orang	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1Dokumen			1 Dokumen	110,000,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	1Dokumen	-	
	2	14	03	204	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				10 Organisasi	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	204	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	204	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	204	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Kampung	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
96	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4Persen			75 Persen	430,000,000						4Persen	-	
	2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-			10 Kecamatan	430,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	-	-	
	2	14	04	201	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	201	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	201	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				4 Unit	45,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	201	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				80 Orang	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	201	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Orang	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	201	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	201	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				500 Orang	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	201	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				10 Kelompok	235,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	201	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)															
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				2 Kelompok	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	-				-						195,000,000							70,000,000	
97	2	-	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	92Persen 92 %			75 Persen	195,000,000						92Persen 92%	70,000,000	
	2	-	04	201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	43Desa 1Dokumen			43 Desa	195,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	43Desa 1Dokumen	70,000,000	
	2	-	04	201	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				5 Dokumen	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	-	04	201	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	100,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	-	04	201	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				129 Orang	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	-	04	201	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				43 Laporan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	-	04	201	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				43 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	-	04	201	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				43 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	-	04	201	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				2 Laporan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	-	04	201	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				0 Laporan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	-	04	201	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS PERHUBUNGAN						18,292,856,562							21,189,000,000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18,292,856,562							21,189,000,000	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						18,292,856,562							21,189,000,000	
98	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-			100 Persen 100 Persen	6,110,761,562						-	10,359,000,000	
	2	15	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63 ASN, 106 kali dan 1 dokumen Sejahteranya pegawai dinas perhubungan Sejahteranya pegawai Dinas Perhubungan	-			63,106,1 ASN, kali, dokumen 58 orang/bulan 58 orang/bulan	4,682,211,562			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	5,495,000,000	
	2	15	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	4,590,211,562	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		5,400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	92,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		95,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Pegawai Terlaksananya Administrasi Umum	-			3 kantor 3 Kantor	476,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	779,000,000	
	2	15	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	78,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		170,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		180,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	28,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		29,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		260,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas Tersedianya Kendaraan Dinas Terpeliharanya dan Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas	-			1 tahun 0 unit 1 tahun	50,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	850,000,000	
	2	15	01	207	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		850,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnaya administrasi perkantoran Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur Lancarnya Administrasi Perkantoran	-			63 ASN 63 ASN 63 ASN	832,550,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	3,140,000,000	
	2	15	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	132,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		140,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	700,550,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		3,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya dan terpenuhinya perizinan kendaraan dinas Lancarnya mobilitas aparatur	-			100 persen 1,2,10 unit, jenis	70,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	95,000,000	
	2	15	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
99	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	9,130,000,000						-	10,380,000,000	
	2	15	02	209		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9,000,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	10,000,000,000	
	2	15	02	209	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				11 Laporan	9,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		10,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	02	212		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	180,000,000	
	2	15	02	212	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumangany a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		180,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	216		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	200,000,000	
	2	15	02	216	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
100	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-			-	3,052,095,000						-	450,000,000	
	2	15	03	212		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-			-	3,002,095,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	-	
	2	15	03	212	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	3,002,095,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		-	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	213		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-			-	50,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	450,000,000	
	2	15	03	213	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau														
							Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				1 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		450,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6,509,787,881							11,340,414,000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,509,787,881							11,340,414,000	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6,406,787,881							10,940,414,000	
101	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	3,206,787,881						100Persen	5,147,914,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	100Persen			100 Persen	30,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD Kominfo	100Persen	55,000,000	
	2	16	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			6 Dokumen	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD Kominfo	6 Dokumen	55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	100Persen			100 Persen	2,244,254,881			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aaparatur OPD KOminfo	100Persen	2,597,000,000	
	2	16	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan			20 Orang/bulan	2,208,254,881	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aaparatur OPD KOminfo	22 Orang/bulan	2,550,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	36,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aaparatur OPD KOminfo	1 Dokumen	47,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100Persen			100 Persen	291,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	100Persen	660,000,000	
	2	16	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	1 Paket	17,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	4 Paket	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	4 Paket	76,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			1 Dokumen	16,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	2 Dokumen	17,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo		350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah Pentingnya Adminsitrasi BMD	100persen			100 persen	90,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	100persen	560,000,000	
	2	16	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo		500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	3 Unit	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	401,533,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD Kominfo	100Persen	925,914,000	
	2	16	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			4 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD Kominfo	3 Laporan	110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	301,533,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD Kominfo	1 Laporan	815,914,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	150,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	100Persen	350,000,000	
	2	16	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit			1 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	3 Unit	120,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			4 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	6 Unit	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD KOminfo	1 Unit	170,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
102	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	12Persen			7 Persen	320,000,000						10Persen	1,725,000,000	
	2	16	02	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12persen			7 persen	320,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	10persen	1,725,000,000	
	2	16	02	201	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	201	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen			1 Dokumen	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	1 Dokumen	350,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	201	0006	Pelayanan Informasi Publik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	1 Dokumen	295,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	201	0007	Layanan Hubungan Media														
							Jumlah Layanan Hubungan Media	10 Layanan			1 Layanan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	10 Layanan	600,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	201	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	1 Dokumen	170,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	201	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit			1 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	2 Unit	160,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
103	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100persen 30Persen			80 persen 20 Persen	2,880,000,000						88persen 25Persen	4,067,500,000	
	2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah	26domain			10 domain	2,780,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan Masyarakat	20domain	3,305,500,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	03	201	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
							Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	36 Unit			31 Unit	2,780,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan Masyarakat	36 Unit	3,305,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	202		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya nilai indeks SPBE Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Eeletronik	2,1indeks			1,5 indeks 1,8 indeks	100,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	1,8indeks	762,000,000	
	2	16	03	202	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
							Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit			3 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	2 Unit	432,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	202	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	30 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan masyarakat	30 Dokumen	330,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						103,000,000							400,000,000	
104	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	100Persen			90 Persen	103,000,000						90Persen	400,000,000	
	2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penggunaan Data Statistik Sektoral Untuk Pengambilan Kebijakan Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100persen			90 persen 15 Perangkat Daerah	103,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan Masyarakat	100persen	400,000,000	
	2	20	02	201	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	53,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan Masyarakat		150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	201	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen			5 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Pemda dan Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						7,980,085,957							1,350,000,000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,940,085,957							1,080,000,000	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						6,615,085,957							720,000,000	
105	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen 100 Persen	3,050,851,975						100Persen	120,000,000	
	2	17	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100Persen			100 Persen 15 Persen	2,616,543,957			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	100Persen	-	
	2	17	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2,563,143,957	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				60 Dokumen	53,400,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	75persen			60 persen 53 Persen	190,476,018			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	65persen	120,000,000	
	2	17	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	60,476,018	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		120,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kelancaran Operasional Pelaksanaan Kegiatan OPD	100Persen			100 Persen	50,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	100Persen	-	
	2	17	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayananan Perangkat Daerah Terlaksananya Jasa pelayanan Kantor	100Persen			100 Persen 60 Persen	193,832,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	100Persen	-	
	2	17	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	54,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	139,832,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
106	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	58persen			7 persen	1,200,000,000						56persen	-	
	2	17	07	201		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Bina Kelompok UKM Produktif (Modal diatas Rp 50Jt) Meningkatnya Laporan Jumlah UMKM	58Persen			7 Persen 7 Persen	1,200,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	56Persen	-	
	2	17	07	201	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1 Unit Usaha	1,200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
107	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal	2persen			5 persen 55 persen	2,364,233,982						2persen	600,000,000	
	2	17	08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya fasilitasi UMKM Meningkatnya hasil pemasaan produk UMKM	6Persen			5 Persen 55 Persen	2,364,233,982			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	4Persen	600,000,000	
	2	17	08	201	0002	Pengembangan Usaha Mikro														
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				46 Unit Usaha	2,364,233,982	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, INSENTIF FISKAL	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		600,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1,040,000,000							270,000,000	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						940,000,000							120,000,000	
108	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100Persen			100 Persen 100 Persen	40,000,000						100Persen	-	
	3	30	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan TUPOKSI OPD Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100Persen			100 Persen 55 Persen	40,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	100Persen	-	
	3	30	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP toko swalayan)	7persen			3 Persen 30 Persen	175,000,000						12persen	-	
	3	30	02	201		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Meningkatnya izin usaha bagi toko/swalayan tersedianya dokumen ranperdaka	100persen			30 Persen 20 Persen	100,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	90persen	-	
	3	30	02	201	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				20 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	02	205		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Meningkatnya pengawasan izin usaha minuman beralkohol	40Persen			30 Persen	75,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	35Persen	-	
	3	30	02	205	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														
							Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
110	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi	-			10 persen	250,000,000						-	-	
	3	30	03	201		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Retribusi Pasar Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-			85 persen 40 Persen	100,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	-	-	
	3	30	03	201	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	202		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-			-	150,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	-	-	
	3	30	03	202	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
111	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	40Persen			65 Persen	325,000,000						35Persen	120,000,000	
	3	30	04	202		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	40Persen			10 Persen	250,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	35Persen	120,000,000	
	3	30	04	202	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	202	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	202	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	203		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				75,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	-	-	
	3	30	04	203	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				10 Laporan	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
112	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	4Persen			3 persen	150,000,000						4Persen	-	
	3	30	07	201		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan produk dalam negeri Persenase Jumlah Industri yang tumbuh	25Persen			4 Persen 40 Persen	150,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	15Persen	-	
	3	30	07	201	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				10 UMKM	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						100,000,000							150,000,000	
113	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	85Persen			75 Persen	100,000,000						80Persen	150,000,000	
	3	31	03	201		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya izin usaha industri Rekomendasi teknis IUI yang ditertibkan	85Persen			75 Persen 18 Persen	100,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	80Persen	150,000,000	
	3	31	03	201	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				20 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,940,085,957							1,080,000,000	
	2	-				-						325,000,000							360,000,000	
114	2	-	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	58persen			55 persen	50,000,000						56persen	60,000,000	
	2	-	03	201		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Koperasi Sehat Persentase Koperasi Yang Sehat	58Persen			55 Persen 53 Persen	50,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	56Persen	60,000,000	
	2	-	03	201	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				10 Unit Usaha	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
115	2	-	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Persentase koperasi sehat Persentase koperasi sehat Persentase koperasi yang sehat	10persen			87 Persen 10 Persen 87 Persen 10 Persen	100,000,000						9persen	100,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	-	05	201		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus/pengawas/anggota yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian Meningkatnya Pengetahuan pelaku usaha mikro	10Persen 10Persen			87 Persen 11 Persen	100,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	10Persen 10Persen	100,000,000	
	2	-	05	201	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				150 Orang	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
116	2	-	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi	6Persen			2 persen 4 persen	175,000,000						4Persen	200,000,000	
	2	-	06	201		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya daya saing dan pertumbuhan koperasi dalam perekonomian Persentase Koperasi yang sehat	2Persen			3 Persen 40 Persen	175,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	2Persen	200,000,000	
	2	-	06	201	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				47 Unit Usaha	175,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4,346,186,161							6,952,018,888	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,346,186,161							6,952,018,888	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						120,000,000							200,000,000	
117	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	25persen			22 persen	120,000,000						24persen	200,000,000	
	2	07	03	201		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan Meningkatnya Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	70persen			65 persen 65 persen	120,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	68persen	200,000,000	
	2	07	03	201	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	48 Orang			16 Orang	120,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	48 Orang	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	2persen			150 persen	-						180persen	-	
	2	07	04	201		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang ditempatkan Tersedianya SDM Pelayan antar kerja (pengantar Kerja dan Petugas antar kerja)	20persen			10 persen 7 persen	-			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	15persen	-	
	2	07	04	201	0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				0 Orang	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4,226,186,161							6,752,018,888	
119	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	3,447,186,161						100Persen	4,879,518,888	
	2	18	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran	100persen			100 persen	30,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	100persen	30,000,000	
	2	18	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	100persen			100 persen	2,762,722,161			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	100persen	3,351,000,000	
	2	18	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2,692,722,161	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		3,277,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	-	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		73,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100persen			100 persen	261,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	100persen	519,150,000	
	2	18	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		12,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		184,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		28,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		6,900,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		287,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD	100persen			100 persen	45,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	100persen	362,250,000	
	2	18	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		345,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 komputer, 1 printe Unit	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		17,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	100persen			100 persen	288,464,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	100persen	508,368,888	
	2	18	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	115,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		132,480,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	173,464,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		375,888,888	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD	100persen			100 persen	60,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	100persen	108,750,000	
	2	18	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		86,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		22,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	213		Penataan Organisasi	-	-			-	-			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	-	-	
	2	18	01	213	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
120	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	95persen			-	239,000,000						90persen	1,050,000,000	
	2	18	02	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	1Dokumen			-	50,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	1Dokumen	250,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	02	201	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen peta Potensi dan peluang Investasi yang tersusun	1Dokumen			1 Dokumen	189,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	1Dokumen	800,000,000	
	2	18	02	202	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	189,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		800,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
121	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100Persen			90 Persen	150,000,000						95Persen	322,500,000	
	2	18	04	201		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	6kecamatan			6 kecamatan	150,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	6kecamatan	322,500,000	
	2	18	04	201	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		322,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	201	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	201	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				50 Kegiatan Usaha	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	3persen			3 persen	390,000,000						3persen	500,000,000	
	2	18	05	201		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal	20Pelaku Usaha			20 Pelaku Usaha	390,000,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	20Pelaku Usaha	500,000,000	
	2	18	05	201	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				5 Kegiatan Usaha	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	201	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				10 Pelaku Usaha	240,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	201	0006	Pengawasan Penanaman Modal														
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan Usaha	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	-				-						-								-
123	2	-	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	50persen			-	-						45persen	-	
	2	-	05	201		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	40persen			-	-			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	35persen	-	
	2	-	05	201	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				0 Laporan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						4,987,544,475							5,754,000,000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,964,544,475							5,722,000,000	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4,577,544,475							4,944,000,000	
124	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	2,796,015,955						100Persen	3,579,000,000	
	2	23	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kesejahteraan ASN	100Persen			100 Persen	2,401,987,155			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100Persen	2,865,000,000	
	2	23	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan			21 Orang/bulan	2,351,987,155	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21 Orang/bulan	2,800,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Dokumen	65,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	90Persen			90 Persen	214,205,800			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung kantor dan ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90Persen	244,000,000	
	2	23	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket			20 Paket	11,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung kantor dan ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20 Paket	12,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	53,205,800	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung kantor dan ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Paket	52,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan			36 Laporan	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung kantor dan ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	36 Laporan	180,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	90Persen			90 Persen	179,823,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90Persen	470,000,000	
	2	23	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan			11 Laporan	179,823,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11 Laporan	470,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
125	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat undefined	35Persen			25 Persen undefined undefined	1,781,528,520						30Persen	1,365,000,000	
	2	23	02	201		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai SNP	27Persen			23 Persen	738,528,520			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	25Persen	795,000,000	
	2	23	02	201	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0 Perpustakaan			5 Perpustakaan	50,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	0 Perpustakaan	60,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	23	02	201	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan			20 Perpustakaan	150,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	0 Perpustakaan	65,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	201	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang			4 Orang	186,248,520	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	1 Orang	230,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	201	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	0 Layanan			1 Layanan	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	0 Layanan	120,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	201	0008	Pengembangan Bahan Pustaka														
							Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	0 Eksemplar			5000 Eksemplar	202,280,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	0 Eksemplar	210,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	201	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5000 Eksemplar			5000 Eksemplar	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	5000 Eksemplar	110,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	202		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	30Persen			25 Persen	1,043,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD, Sekolah, Masyarakat	27Persen	570,000,000	
	2	23	02	202	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20 Lokus			25 Lokus	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD, Sekolah, Masyarakat	20 Lokus	250,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	202	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 Perpustakaan			1 Perpustakaan	793,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD, Sekolah, Masyarakat	0 Perpustakaan	320,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						235,000,000							602,000,000	
126	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	50Persen			35 Persen 35 Persen	235,000,000						45Persen	422,000,000	
	2	24	02	201		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar Persentase Daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar	25Persen			23 Persen 18 Persen	100,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD/ Desa	25Persen	150,000,000	
	2	24	02	201	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	13 Berkas			15 Berkas	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD/ Desa	12 Berkas	150,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	202		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daftar arsip in-aktif yang telah dibuat daftar	0Persen			0 Persen	100,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD/ Desa	0Persen	125,000,000	
	2	24	02	202	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	0 Arsip			5 Arsip	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD/ Desa	0 Arsip	125,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	24	02	203		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten	25persen			17 persen 17 Persen	35,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD	22persen	147,000,000	
	2	24	02	203	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	0 Pengguna			36 Pengguna	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD	0 Pengguna	110,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	203	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	54 Laporan			5 Laporan	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD	54 Laporan	37,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
127	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	25Persen			15 Persen	-						20Persen	180,000,000	
	2	24	03	201		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip sesuai NSPK	25Persen			15 Persen	-			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	20Persen	180,000,000	
	2	24	03	201	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0 Arsip			3 Arsip	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	0 Arsip	180,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	X					NON URUSAN						23,000,000							32,000,000	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						23,000,000							32,000,000	
128	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	23,000,000						100Persen	32,000,000	
	X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan/Pedoman perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	90Persen			90 Persen	23,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90Persen	32,000,000	
	X	XX	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	23,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Dokumen	32,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,964,544,475							5,722,000,000	
	2	-				-						152,000,000							176,000,000	
129	2	-	-			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	152,000,000						100Persen	176,000,000	
	2	-	-	-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD	90Persen			90 Persen	38,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90Persen	39,000,000	
	2	-	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit			1 Unit	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0 Unit	-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	-	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		-	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	-	-	-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja pelaksanaan Tupoksi PD	90Persen			90 Persen	71,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90Persen	88,000,000	
	2	-	-	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			15 Unit	6,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15 Unit	7,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			10 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10 Unit	65,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Unit	16,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	-	-	-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	90Persen			90 Persen	12,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	90Persen	15,000,000	
	2	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	12,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Laporan	15,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	-	-	-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD	90Persen			90 Persen	38,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90Persen	39,000,000	
	2	-	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			3 Unit	38,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Unit	39,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	-	-	-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	90Persen			90 Persen	31,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	90Persen	34,000,000	
	2	-	-	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			2 Dokumen	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Dokumen	16,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	-	-	-	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket			13 Paket	16,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	13 Paket	18,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
						DINAS PERIKANAN						23,510,300,023							-	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						23,510,300,023							-	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						23,510,300,023							-	
130	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	5,255,193,783						100Persen	-	
	3	25	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59Persen			4 Dokumen 1 Laporan	235,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Dinas Perikanan	55Persen	-	
	3	25	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			4 Dokumen	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Dinas Perikanan	3 Dokumen	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	165,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Dinas Perikanan	4 Laporan	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56Persen			12 Dokumen 42 Orang	3,671,330,783			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Dinas Perikanan	55Persen	-	
	3	25	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan			39 Orang/bulan	3,551,330,783	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Dinas Perikanan	43 Orang/bulan	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			1 Dokumen	120,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Dinas Perikanan	12 Dokumen	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumah Paket Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60Persen			34 Paket 5 Paket 2 Dokumen 40 Laporan 7 Paket	319,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Perikanan	55Persen	-	
	3	25	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			6 Paket	24,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Perikanan	8 Paket	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket			32 Paket	85,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	36 Paket	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	5 Paket	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			2 Dokumen	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	2 Dokumen	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan			40 Laporan	150,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Perikanan	40 Laporan	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50Persen			2 Laporan 1 Laporan	749,863,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	40Persen	-	
	3	25	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	392,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	2 Laporan	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	357,863,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan		-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharan/Direhabilitasi	60Persen			1 unit 15 unit	280,000,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	50Persen	-	
	3	25	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	1 Unit	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit			3 Unit	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	14 Unit	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			3 Unit	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan	3 Unit	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	ASN Dinas Perikanan		-	DINAS PERIKANAN
131	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap	10500Ton			9500 Ton	16,175,106,240						10000Ton	-	
	3	25	03	202		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	70Kelompok			50 Orang 20 Kelompok	16,055,106,240			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan	60Kelompok	-	
	3	25	03	202	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	500 Orang			50 Orang	15,955,106,240	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Cimpungan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan	500 Orang	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	202	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20 Kelompok			20 Kelompok	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan	20 Kelompok	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	203		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	70Persen			1 Layanan	120,000,000			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	60Persen	-	
	3	25	03	203	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan			1 Layanan	120,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	-	2 Layanan	-	DINAS PERIKANAN
132	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya	320Ton			260 Ton	400,000,000						300Ton	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	04	202		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	50Kelompok			6 kelompok 6 Kelompok	250,000,000			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	40Kelompok	-	
	3	25	04	202	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	16 Kelompok			6 Kelompok	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	14 Kelompok	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	202	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7 Kelompok			6 Kelompok	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya - Kab Kepulauan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	7 Kelompok	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	204		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan didarat	30Unit			50 Orang	150,000,000			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	50Unit	-	
	3	25	04	204	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	35 Orang			50 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	30 Orang	-	DINAS PERIKANAN
133	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Usaha Mikro dan Kecil Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	25Persen			103 Ton	1,680,000,000						22Persen	-	
	3	25	06	201		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	3Kelompok			1 Dokumen	60,000,000			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil	3Kelompok	-	
	3	25	06	201	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen			1 Dokumen	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil	1 Dokumen	-	DINAS PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	06	202		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	3Kelompok			6 Unit Usaha	120,000,000			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil	3Kelompok	-	
	3	25	06	202	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	44 Unit Usaha			6 Unit Usaha	120,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil	44 Unit Usaha	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	203		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93Ton			103 Ton	1,500,000,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil	83Ton	-	
	3	25	06	203	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	125 Ton			103 Ton	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil	110 Ton	-	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	203	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	0 Pelaku Usaha			40 Pelaku Usaha	1,400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil	0 Pelaku Usaha	-	DINAS PERIKANAN
						BBIP SIKAKAP						300,000,000							-	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						300,000,000							-	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						300,000,000							-	
134	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Hasil Produksi perikanan Budidaya	320Ton			260 Ton	300,000,000						300Ton	-	
	3	25	04	204		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30Unit			50 Unit	300,000,000			-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	50Unit	-	
	3	25	04	204	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit			50 Unit	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	6 Unit	-	BBIP SIKAKAP
						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA						9,133,432,752							7,578,221,356	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						951,875,350							520,000,000	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						951,875,350							520,000,000	
135	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100Persen			-	402,390,000						100Persen	-	
	2	19	01	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	20,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	-	
	2	19	01	204	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	215,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	-	
	2	19	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	90,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84,000,000			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	-	
	2	19	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	84,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	83,390,000			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	-	
	2	19	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	45,790,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	37,600,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	-			12 organisasi	200,000,000						-	320,000,000	
	2	19	02	202		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan kepramukaan dan kepemudaan , Terbayarnya operasional organisasi kepemudaan terselenggarannya jambore pramuka tingkat kabupaten ,Terselenggarannya kursus gerakan kepramukaan Partisipasi pada raimuna dan jambore nasional	-			1 kali 1 Paket 1 kali 1 kali 1 kali	200,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	320,000,000	
	2	19	02	202	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		320,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
137	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga	-			10 Cabang olahraga	349,485,350						-	200,000,000	
	2	19	03	202		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kompetisi sepak bola all star di tuapejat Terselenggaranya kompetisi sepak bola (Bupati Cup), Terselenggaranya kompetisi surfing internasional di kabupaten kepulauan mentawai Terselenggaranya kompetisi surfing tingat kabupaten	-			1 kali 1 kali 0 Kali 1 Kali	200,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	200,000,000	
	2	19	03	202	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		200,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	149,485,350			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	-	
	2	19	03	205	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	149,485,350	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8,181,557,402							7,058,221,356	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						8,181,557,402							7,058,221,356	
138	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100Persen			-	4,468,557,402						100Persen	4,508,221,356	
	3	26	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	30,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	-	
	3	26	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4,358,557,402			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	4,508,221,356	
	3	26	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	3,806,582,402	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		4,508,221,356	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	551,975,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	-	
	3	26	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
139	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama Kunjungan Wisata	7hari 5persen			7 hari	2,188,000,000						7hari 4persen	350,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	02	201		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Berkembangnya desa muntei menjadi kampung wisata adat dan budaya Berkembangnya pengelolaan ekowisata disesa matotonan Berkembannya ekowisata di dedesa saibi samukop Berkembanya ekowisata di desa madobag Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan perumahan mapadegat menjadi perumahan bermotif adat dan rmenjadi rumah adat Tersedianya dokumen perencanaan aksebilitas dan amenitas kawasan manggrove tuapejat Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas toilet dan kamar mandi dan kamar tidur di tempat wisata mapadegat, katiet, madobag dan muntei Tersedianya dokumen perencanaanaksebilitas dan amenitas wisata air terjun mapetri sioban dan wisata mapadegat	30unit 25orang			1 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 paket	400,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	30unit 25orang	-	
	3	26	02	201	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	400,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	202		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas sound sistem di lokasi wisata mapadegat	50Persen			0 Paket	220,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	40Persen	350,000,000	
	3	26	02	202	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	120,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	202	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		350,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	02	203		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah dan kualitas toilet dan kamar tidur dikampung wisata muntei, mapadegat, madobag dan katiet Persentase Kawasan Destinasi yang Telah dimanfaatkan Terbangunnya pagar pembatas wisata mapadegat Terbangunnya aksebilitas dan amenitas kawasan manggrove tuapejat Terbangunnya aksebilitas dan amenitas pariwisata air terjun mapetri desa sioban Terbangunnya Pos TIC di kawasan wisata Mapadegat Terbangunnya sarana dan prasarana wisata di mapadegat Terbangunnya tempat berjualan bagi pedagang kaki lima bidang kuliner dan penjual barang kerajinan tangan dikawasan wisata mapadegat	5persen			1 Paket 30 Persen 0 Meter 0 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 0 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 0 Paket 0 Paket 3 Paket 500 Meter 2 Paket 10 Orang 0 Paket 0 Paket 1 Paket 2 Paket 5 Unit 0 Paket 3 Kali 4 Kali	1,568,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	4persen	-	
	3	26	02	203	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
							Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1,568,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
140	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Domestik Jumlah Wisatawan Mancanegara PAD sektor pariwisata	-			725000 orang 130000 orang 12 Milliar	275,000,000						-	-	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	03	201		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi event luar negeri meningkat Jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikasi meningkat Terselenggaranya event festifal tato mentawai dimapadegat Terselenggaranyafestifal kuliner tradisional di mapadegat Tersedianya billboard pemasaran Tersedianya data dan informasi pariwisata ditingkat prov,dan luar negeri Terselenggaranya event festifal mujarik digoisok oinan Terselenggaranya event festifal pembuatan samapan di jati Terselenggaranya festifal pesona mentawai di tuapejat Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri Jumlah Terfasilitasinya promosi dalam negeri Meningkatnya Jumlah	-			1 Kali 20 Orang 1 Paket 1 Paket 20 Titik 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 20 Persen 2 Kali 20 Persen 1 Paket 4 Kali 1 Dokumen 1000 Lembar 10 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket	275,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	-	
	3	26	03	201	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	201	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				7 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	201	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Promosi	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		-	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
141	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Bersertifikat	735000orang 15Milliar 15000orang			3 persen	1,250,000,000						730000orang 13Milliar 14500orang	2,200,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	05	201		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatnya kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Meningkatnya kapasitas tenaga kerja bidang ekonomi kreatif khusus untuk kuliner Terfasilitasinya pengembangan SDM dibidang ekonomi kreatif Terfasilitasinya proses kreasi produksi konsumsi dan konservasi wisata ekonomi kreatif Meningkatnya jumlah orang/masyarakat yang berpartisipasi dalam kemitraan pariwisata	20kali			25 Orang/Persen, 5 kelompok 20 Orang 20 Orang 1 Paket 5 kelompok	950,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	20kali	1,850,000,000	
	3	26	05	201	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0 Laporan	400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		550,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	201	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				80 Orang	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		400,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	201	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				30 Orang	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		600,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	201	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				3 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		300,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	26	05	202		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Meningkatnya jumlah kapasitas tenaga kerajinan tangan berbahan material lokal Terfasilitasinya pembentukan kelembagaan dan tata kelola wisata berbasis masyarakat, Tersedianya dokumen kajian pembuatan kain batik motif mentawai	-			10 Orang 5 kelompok 1 Paket	300,000,000			-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-	-	350,000,000	
	3	26	05	202	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				35 Orang	300,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6 Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	-		350,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						SEKRETARIAT DAERAH						34,814,673,911							43,900,811,101	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						34,814,673,911							43,900,811,101	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						34,814,673,911							43,900,811,101	
142	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Persentase Kepatuhan Penyusunan,Perencanaan dan Pelaporan Tugas Pelayanan Perangkat Daerah	-			100 Persen 100 Persen	24,739,554,014						-	29,567,576,801	
	4	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	10,700,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	11,770,000	
	4	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10,700,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		11,770,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan	-			14 Bulan 2 layanan	10,520,998,511			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	11,689,403,322	
	4	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99 Orang/bulan	10,394,998,511	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		11,550,803,322	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	126,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		138,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	45,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	49,500,000	
	4	01	01	205	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		38,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	205	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		11,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya aneka alat tulis kantor Tersedianya aneka Alat Tulis Kantor	-			12 Bulan 12 Bulan	1,335,993,600			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	1,469,592,960	
	4	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	320,331,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		352,364,760	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	108,470,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		119,317,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	400,087,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		440,095,700	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	507,105,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		557,815,500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	-			8 Jenis 8 Jenis	682,752,600			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	751,027,860	
	4	01	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	64,246,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		70,671,260	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	418,506,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		460,356,600	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Internet ,Listri,Air Bersih dan Telepon Seluler (Pimpinan Daerah) Tersedianya layanan internet, listrik, air besih dan telefon seluler (Pimpnan Daerah)	-			12 Bulan 12 Bulan	2,418,125,400			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	4,377,701,326	
	4	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	498,450,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		548,295,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	1,919,675,400	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,829,406,326	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	-			12 Bulan 12 Bulan	6,412,949,900			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	7,472,442,890	
	4	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	399,999,900	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		439,999,890	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	5,193,150,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		6,812,465,000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		22,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	799,800,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		197,978,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	211		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH Terbayarnya Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-			1 Otang 2 Orang	1,543,934,533			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	1,698,327,986	
	4	01	01	211	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	478,446,104	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		526,290,714	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	211	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				28 Paket	111,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		122,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	211	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	954,488,429	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1,049,937,272	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	212		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terselenggaranya kebutuhan harian rumah tangga pimpinan daerah Terselenggaranya Kebutuhan Harian Rumah Tangga Pimpinan Daerah	-			12 Bulan 12 Bulan	348,845,550			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	383,730,105	
	4	01	01	212	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	348,845,550	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		383,730,105	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	213		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	-			1 Dokumen 1 Dokumen	756,454,120			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	832,099,532	
	4	01	01	213	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				36 Dokumen	250,243,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		275,267,300	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	213	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	139,102,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		153,012,200	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	213	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				36 Dokumen	171,849,120	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		189,034,032	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	213	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	78,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		85,800,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	213	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	117,260,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		128,986,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	214		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi keprotokolan yang terfasilitasi Jumlah Fasilitasi Keprotokolan yang Terfasilitasi	-			24 Kali 24 Kali	663,799,800			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	831,980,820	
	4	01	01	214	0001	Fasilitasi Keprotokolan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	200,729,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		220,801,900	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	214	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	208,568,200	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		229,425,020	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	214	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	254,502,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		381,753,900	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
143	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyelesaian Perkara hukum pemda baik litigasi maupun non litigasi Persentase jumlah produk hukum yang digugat atau bermasalah Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	-			88 Persen 2 Persen 100 Persen	8,600,659,897						-	12,711,328,300	
	4	01	02	201		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Produk Hukum yang Terevaluasi atau Terfasilitasi Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	-			85 Persen 95 Persen	515,471,800			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	567,018,980	
	4	01	02	201	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	152,266,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		167,492,600	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	201	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	115,665,900	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		127,232,490	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	201	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	247,539,900	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		272,293,890	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	202		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	-			100 Persen 95 Persen	5,314,941,097			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	8,844,309,320	
	4	01	02	202	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				15 Dokumen	598,370,400	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1,648,207,440	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	202	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				90 Dokumen	558,614,697	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,722,350,280	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	202	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				25 Dokumen	4,157,956,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,473,751,600	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	203		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	-			95 Persen	770,247,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	1,100,000,000	
	4	01	02	203	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				15 Dokumen	220,333,200	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	203	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	394,873,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	203	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	155,040,800	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	02	204		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Prioritas Daerah Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	-			100 Persen 95 Persen	2,000,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	2,200,000,000	
	4	01	02	204	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	2,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		2,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
144	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio elektifikasi Cakupan desa yang terakses listrik Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti Persentase OPD dengan realisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen Persentase OPD yang mengikuti ULP Tepat waktu	-			93,2 Persen 932 Persen 85 Persen 83 Persen 90 Persen	1,474,460,000						-	1,621,906,000	
	4	01	03	201		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Utamanya Listrik	-			30 Persen 30 Persen 30 Persen 30 Persen	115,260,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	126,786,000	
	4	01	03	201	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				5 Dokumen	52,570,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		57,827,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	201	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	62,690,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		68,959,000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	03	202		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	-			80 Persen 80 Persen 80 Persen	462,666,600			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	508,933,260	
	4	01	03	202	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	110,566,700	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		121,623,370	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	202	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	120,499,900	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		132,549,890	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	202	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	231,600,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		254,760,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	203		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu Persentase OPD yang Mengikuti ULP tepat waktu	-			90 Persen 90 Persen 90 Persen 90 Persen	761,333,400			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	837,466,740	
	4	01	03	203	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	275,055,400	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		302,560,940	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	203	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				300 Dokumen	350,642,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		385,706,200	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	203	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				15 Orang	135,636,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		149,199,600	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	204		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik Jumlah dokumen koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Jumlah Dokumen Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan,Kelautan dan Perikanan Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	-				30 Persen 30 Persen 30 Persen 30 Persen 30 Persen	135,200,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	148,720,000	
	4	01	03	204	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	135,200,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		148,720,000	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD						19,515,132,142							34,191,691,854	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						19,515,132,142							34,191,691,854	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						19,465,132,142							34,136,691,854	
145	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	-			100 Persen 100 Persen	14,405,132,142						-	18,605,691,854	
	4	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			33 ob	3,103,554,142			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	3,779,841,434	
	4	02	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2,978,554,142	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,614,841,434	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	125,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		165,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			20 jenis	453,317,800			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	1,105,500,000	
	4	02	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		33,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	63,317,800	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		165,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		385,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		137,500,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		275,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa penunjanh urusan pemerintahan daerah	-			59 orang	801,578,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	991,500,000	
	4	02	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	265,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		291,500,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	536,578,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		700,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	-			31 unit	300,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	687,500,000	
	4	02	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		302,500,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		220,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	215		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	terlaksananya layanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	-			20 orang	9,546,682,200			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	11,161,350,420	
	4	02	01	215	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				14 Orang/Bulan	9,326,682,200	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		10,919,350,420	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	215	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	220,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		242,000,000	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	216		Layanan Administrasi DPRD	terlaksananya layanan administrasi DPRD	-			4 laporan	200,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	880,000,000	
	4	02	01	216	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				4 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		165,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	216	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		715,000,000	SEKRETARIAT DPRD
146	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna Persentase Ranperda yang disetujui Persentase usulan masyarakat melalui reses/ monev menjadi pokok pikiran DPRD	-			75 Persen 4 hari 80 Persen 80 Persen	5,060,000,000						-	15,531,000,000	
	4	02	02	201		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	terlaksananya pembentukan perda dan peraturan DPRD	-			19 dokumen	300,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	1,660,000,000	
	4	02	02	201	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		165,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	201	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				16 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1,220,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	201	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		275,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	202		Pembahasan Kebijakan Anggaran	terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	-			5 dokumen	200,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	495,000,000	
	4	02	02	202	0004	Pembahasan APBD Perubahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		220,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	202	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		275,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	terlaksananya urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	-			22 laporan	650,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	3,575,000,000	
	4	02	02	203	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		715,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		550,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		660,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		715,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				4 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		660,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	203	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		275,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204		Peningkatan Kapasitas DPRD	meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	-			20 org	1,430,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	3,003,000,000	
	4	02	02	204	0001	Orientasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		330,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204	0002	Pendalaman Tugas DPRD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Dokumen	600,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1,760,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	180,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		198,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				4 Orang	240,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		264,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		66,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	204	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				6 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		385,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	205		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	terserapnya aspirasi masyarakat	-			9 laporan	1,600,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	4,400,000,000	
	4	02	02	205	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				6 Laporan	700,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1,100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	205	0003	Pelaksanaan Reses														
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	900,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,300,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	206		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-				150,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	165,000,000	
	4	02	02	206	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	206	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	208		Fasilitasi Tugas DPRD	terfasilitasinya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	-			11 dokumen	730,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	2,233,000,000	
	4	02	02	208	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				6 Dokumen	700,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		2,200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	208	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				3 Laporan	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		33,000,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	-				-						50,000,000							55,000,000	
147	4	-	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kunjungan kerja terkait proses legislasi yang disepakati Persentase Ranperda yang disetujui Persentase usulan masyarakat melalui reses/ monev menjadi pokok pikiran DPRD Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat banggar, fraksi, baleg, paripurna	-			75 Persen 80 Persen 80 Persen 4 hari	50,000,000						-	55,000,000	
	4	-	02	202		Pembahasan Kebijakan Anggaran	terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	-			5 dokumen	50,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	55,000,000	
	4	-	02	202	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		27,500,000	SEKRETARIAT DPRD
	4	-	02	202	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		27,500,000	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						8,503,230,964							9,050,500,000	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8,503,230,964							9,050,500,000	
	5	01				PERENCANAAN						7,442,697,964							8,200,500,000	
148	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	5,275,334,849						100Persen	5,395,500,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	2Layanan			2 Layanan	3,946,600,000			-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-	2Layanan	4,050,000,000	
	5	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	3,900,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7 Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	-		4,000,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	46,600,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100Persen			100 Persen	337,150,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	265,500,000	
	5	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		8,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		80,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		12,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12,150,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100Persen			100 Persen	393,984,849			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	400,000,000	
	5	01	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	393,984,849	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100Persen			100 Persen	477,600,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	500,000,000	
	5	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	297,600,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	180,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100Persen			100 Persen	120,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	180,000,000	
	5	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
149	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator kinerja perangkat daerah dengan kategori tercapai diatas 80 persen Persentase penyusunan RKPD dan Renja OPD tepat waktu	100Persen			87 Persen 100 Persen	1,467,363,115						100Persen	1,805,000,000	
	5	01	02	201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	5Dokumen			-	867,363,115			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	5Dokumen	1,205,000,000	
	5	01	02	201	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	117,363,115	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		155,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	201	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	350,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-			400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	201	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-			650,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	202		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	4Dokumen			-	300,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	4Dokumen	300,000,000	
	5	01	02	202	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				40 Buku	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-			300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	203		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Monitoring Pembangunan	2Dokumen			2 Dokumen	300,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2Dokumen	300,000,000	
	5	01	02	203	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-			300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
150	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Program RPJMD kedalam Renstra OPD Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90Persen 90Persen 90Persen			86 Persen 86 Persen 86 Persen	700,000,000						88Persen 88Persen 88Persen	1,000,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	01	03	201		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja OPD	100Persen			100 Persen 100 Persen	300,000,000			-	-	-	100Persen	400,000,000	
	5	01	03	201	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	201	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	202		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Program RKPD kedalam Renja OPD Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja OPD	100Persen			100 Persen 100 Persen	200,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	300,000,000	
	5	01	03	202	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	202	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja OPD	100Persen			100 Persen	200,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	300,000,000	
	5	01	03	203	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	203	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						930,533,000							700,000,000	
151	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai kebutuhan perencanaan	12kajian 90Persen			8 kajian 70 Persen	930,533,000						10kajian 80Persen	700,000,000	
	5	05	02	202		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Presentase Kesesuaian Kajian Inovasi dan Penelitian Sesuai Denga Kebutuhan Perencanaan	3Dokumen			2 Dokumen	250,533,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	3Dokumen	300,000,000	
	5	05	02	202	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	250,533,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	203		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Kesesuaian Kajian/Inovasi dan Penelitian sesuai dengan kebutuhan Perencanaan	2Dokumen			2 Dokumen	680,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2Dokumen	400,000,000	
	5	05	02	203	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	05	02	203	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	380,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	-				-						130,000,000							150,000,000	
152	5	-	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	100Persen			-	130,000,000						100Persen	150,000,000	
	5	-	02	202		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	4Dokumen			-	130,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	4Dokumen	150,000,000	
	5	-	02	202	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				72 Orang	130,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						BADAN KEUANGAN DAERAH						161,023,949,406							-	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						161,023,949,406							-	
	5	02				KEUANGAN						161,023,949,406							-	
153	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100%			100 % 100 Persen	35,915,493,287						100%	-	
	5	02	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm Perkantoran	-			2 Layanan	50,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	-	
	5	02	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm Perkantoran	2Dokumen			2 Dokumen	33,256,841,837			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2Dokumen	-	
	5	02	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	31,468,321,837	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	1,788,520,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah Meningkatnya Layanan Adm Perkantoran	1Laporan			2 Dokumen 1 Laporan	125,272,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1Laporan	-	
	5	02	01	204	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Laporan	125,272,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm Perkantoran	7Layanan			7 Layanan	853,558,850			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	7Layanan	-	
	5	02	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	96,063,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	17,597,250	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	89,898,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Adm Perkantoran	2Layanan			2 Layanan	200,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2Layanan	-	
	5	02	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Adm Perkantoran	1Layanan			1 Layanan	1,003,954,600			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1Layanan	-	
	5	02	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	772,371,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	231,583,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Adm Perkantoran	3Layanan			3 Layanan	425,866,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	3Layanan	-	
	5	02	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	165,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	134,520,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	126,346,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
154	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu [deleted] Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Handal Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik [deleted]1 Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik [deleted] Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	100%			100 Persen 95 Persen 95 % 100 Persen 95 Persen 100 Persen 30 Persen 30 Persen	122,703,845,669						98%	-	
	5	02	02	201		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Pelaksanaan APBD Persentase Tahapan Penyusunan Rencana Penganggaran Tepat Waktu	100%			6 Dokumen 95 %	2,715,727,060			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100%	-	
	5	02	02	201	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	201	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	1,026,320,010	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	201	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	800,820,350	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	201	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	238,586,700	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	201	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				72 Orang	400,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	02	202		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah Syarat Penyaluran DAU, DAK dan DID [deleted]	50%			30 % 5 Dokumen	1,239,683,600			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	40%	-	
	5	02	02	202	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	349,365,950	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	202	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				3 Dokumen	202,310,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	202	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				3 Dokumen	238,652,700	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	245,314,300	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	202	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				9 Dokumen	204,040,650	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	203		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Baik	100%			7 Dokumen 100 %	1,627,042,450			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	98%	-	
	5	02	02	203	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				5 Dokumen	67,330,120	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	203	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				432 Laporan	65,330,100	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	203	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	287,966,580	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	203	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	424,832,100	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	203	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	244,869,900	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	203	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	163,004,600	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	203	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				72 Orang	373,709,050	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	204		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan Baik Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Baik	100%			100 % 2 Laporan 2 Dokumen	117,121,392,559			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100%	-	
	5	02	02	204	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1,000,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-			-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	204	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	116,121,392,559	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-			-	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
155	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Persentase Jumlah OPD yang Tertib dalam Pengelolaan Aset Daerah	85%			81 % 81 Persen 81 %	1,016,468,100						83%	-	
	5	02	03	201		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang dan Jasa yang Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara Baik dan Benar	85%			81 % 6 Dokumen	1,016,468,100			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	83%	-	
	5	02	03	201	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	95,310,050	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	201	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				36 Laporan	218,028,800	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	201	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				10 Laporan	105,875,550	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	201	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				30 Dokumen	243,427,250	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	201	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	285,083,050	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	201	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	68,743,400	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
156	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total pendapatan Persentase PAD terhadap total pendapatan	10%			87 % 87 Persen	1,388,142,350						95%	-	
	5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi, Itensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	10%			6 Dokumen 870 %	1,388,142,350			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	950%	-	
	5	02	04	201	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	205,361,200	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	201	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Unit	200,847,350	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	201	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				2 Obyek Pajak	282,686,700	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	201	0011	Penagihan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	219,981,850	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	201	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	279,265,250	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	201	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						4,063,430,589							9,836,100,000	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4,063,430,589							9,836,100,000	
	5	03				KEPEGAWAIAN						3,933,430,589							8,040,100,000	
157	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3,528,430,589						-	4,784,100,000	
	5	03	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2,955,005,589			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	3,651,000,000	
	5	03	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	2,935,005,589	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,600,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		51,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	195,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	453,100,000	
	5	03	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		15,100,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		81,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		21,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		16,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	90,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		210,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	328,425,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	410,000,000	
	5	03	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		260,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	128,425,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	270,000,000	
	5	03	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		60,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		210,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
158	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	405,000,000						-	3,256,000,000	
	5	03	02	201		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	95,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	516,000,000	
	5	03	02	201	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				5 Dokumen	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		255,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	201	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	201	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		151,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	202		Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	80,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	820,000,000	
	5	03	02	202	0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				3 Dokumen	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		710,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	202	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	203		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	200,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	1,810,000,000	
	5	03	02	203	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1,100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	203	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				10 Orang	100,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		710,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	204		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	30,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	110,000,000	
	5	03	02	204	0007	Pembinaan Disiplin ASN														
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						100,000,000							1,710,000,000	
159	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	100,000,000						-	1,710,000,000	
	5	04	02	201		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	50,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	1,100,000,000	
	5	04	02	201	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				2 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1,100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	04	02	202		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	50,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	610,000,000	
	5	04	02	202	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		610,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	-				-						30,000,000							86,000,000	
160	5	-	-			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	30,000,000						-	86,000,000	
	5	-	-	-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	35,000,000	
	5	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		35,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	-	-	-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	51,000,000	
	5	-	-	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		51,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT						9,593,889,950							11,930,000,000	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						9,593,889,950							11,930,000,000	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						8,558,889,950							9,670,000,000	
161	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	4,858,889,950						100Persen	5,600,000,000	
	6	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan ASN dilingkungan Inspektorat Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen 100 Persen	4,370,890,950			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	100Persen	5,000,000,000	
	6	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan			37 Orang/bulan	4,370,890,950	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	38 Orang/bulan	5,000,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kapasitas dan kompetensi APIP yang memiliki standar Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100persen			100 Persen 100 persen 100 Persen	150,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	100persen	150,000,000	
	6	01	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang			10 Orang	150,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	20 Orang	150,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100persen			100 Persen 100 persen	150,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	100persen	150,000,000	
	6	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Paket	150,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancanya operasional perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100persen			100 persen 100 Persen	122,999,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	100persen	150,000,000	
	6	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan			12 Laporan	122,999,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Laporan	150,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kinerja perangkat daerah sesuai dengan Tupoksi	100persen			100 Persen 100 persen	65,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Sarana Kantor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	100persen	150,000,000	
	6	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	65,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Sarana Kantor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Unit	150,000,000	INSPEKTORAT
162	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Persentase Tindak Lanjut Temuan Persentase tindak lanjut temuan	90Persen level 3level			95 Persen 85 Persen 85 Persen	2,600,000,000						88Persen level 3level	3,020,000,000	
	6	01	02	201		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pedoman bagi Kepala SKPD, ASN, dan Aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terlaksananya Pengawasan Internal	90Persen			100 Persen 100 Persen	2,400,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	88Persen	2,800,000,000	
	6	01	02	201	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24 Laporan			12 Laporan	500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	24 Laporan	650,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan			12 Laporan	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	16 Laporan	350,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	0003	Reviu Laporan Kinerja														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108 Laporan			108 Laporan	300,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	108 Laporan	300,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	0004	Reviu Laporan Keuangan														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan			37 Laporan	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	37 Laporan	200,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	0005	Pengawasan Desa														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20 Laporan			12 Laporan	650,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	20 Laporan	650,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan			2 Kesepakatan	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Kesepakatan	350,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	02	201	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen			2 Dokumen	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Dokumen	300,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	02	202		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	100Persen			100 Persen 100 Persen	200,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD, Aparatur Desa, Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	100Persen	220,000,000	
	6	01	02	202	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan			12 Laporan	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD, Aparatur Desa, Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	12 Laporan	220,000,000	INSPEKTORAT
163	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Zona Integritas Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP Level Kapabilitas	90Persen 90Persen 90Persen			2 OPD 86 Persen 3 Level	1,100,000,000						88Persen 88Persen 88Persen	1,050,000,000	
	6	01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Meningkatnya kualitas pengawasan dan implementasi terhadap kebijakan	85PERSEN			100 Persen 100 Persen	200,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	80PERSEN	100,000,000	
	6	01	03	201	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi			2 Rekomendasi	200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Rekomendasi	100,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	03	202		Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya Zona Integritas Meningkatnya kinerja SKPD yang dilakukan pendampingan	100Persen 85PERSEN			100 Persen 100 Persen 100 Persen	900,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	100Persen 80PERSEN	950,000,000	
	6	01	03	202	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah			4 perangkat daerah	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	6 perangkat daerah	250,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	03	202	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26 perangkat daerah			10 perangkat daerah	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	26 perangkat daerah	150,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	03	202	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan			5 Kegiatan	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	5 Kegiatan	300,000,000	INSPEKTORAT
	6	01	03	202	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 perangkat daerah			2 perangkat daerah	250,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	5 perangkat daerah	250,000,000	INSPEKTORAT
	6	-				-						1,035,000,000							2,260,000,000	
164	6	-	-			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	1,035,000,000						100Persen	2,260,000,000	
	6	-	-	-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancanya operasional perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100persen			100 persen 100 Persen	135,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	180,000,000	
	6	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			36 Laporan	135,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	36 Laporan	180,000,000	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	-	-	-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100persen			100 Persen 100 persen	595,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	825,000,000	
	6	-	-	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Paket	50,000,000	INSPEKTORAT
	6	-	-	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket			1 Paket	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	15 Paket	20,000,000	INSPEKTORAT
	6	-	-	-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan ASN dilingkungan Inspektorat Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen 100 Persen	55,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	120,000,000	
	6	-	-	-	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen			12 Dokumen	55,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	25 Dokumen	120,000,000	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	-	-	-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100persen			100 Persen 100 persen	595,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	825,000,000	
	6	-	-	-	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1 Paket	30,000,000	INSPEKTORAT
	6	-	-	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			1 Dokumen	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2 Dokumen	25,000,000	INSPEKTORAT
	6	-	-	-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	100persen			100 persen 100 Persen	60,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	100persen	910,000,000	
	6	-	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit			1 Unit	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	0 Unit	500,000,000	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	-	-	-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100persen			100 Persen 100 persen	595,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	825,000,000	
	6	-	-	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	500,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	12 Laporan	700,000,000	INSPEKTORAT
	6	-	-	-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kinerja perangkat daerah sesuai dengan Tupoksi	100persen			100 Persen 100 persen	190,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	225,000,000	
	6	-	-	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit			3 Unit	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	8 Unit	45,000,000	INSPEKTORAT
	6	-	-	-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	100persen			100 persen 100 Persen	60,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	100persen	910,000,000	
	6	-	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit			5 Unit	-	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	0 Unit	250,000,000	INSPEKTORAT
	6	-	-	-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kinerja perangkat daerah sesuai dengan Tupoksi	100persen			100 Persen 100 persen	190,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100persen	225,000,000	
	6	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit			6 Unit	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	15 Unit	80,000,000	INSPEKTORAT
	6	-	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit			1 Unit	85,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	15 Unit	100,000,000	INSPEKTORAT
	6	-	-	-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	100persen			100 persen 100 Persen	60,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	100persen	910,000,000	
	6	-	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			8 Unit	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Unit	160,000,000	INSPEKTORAT
						KECAMATAN SIBERUT UTARA						3,000,889,367							3,090,500,000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3,000,889,367							3,090,500,000	
	7	01				KECAMATAN						3,000,889,367							3,090,500,000	
165	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	2,679,766,967						100Persen	2,703,500,000	
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100Persen			1 Layanan	40,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	100Persen	40,000,000	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			6 Laporan	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	6 Laporan	40,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100Persen			2 Layanan	2,268,389,367			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai ASN	100Persen	2,260,000,000	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			25 Orang/bulan	2,118,389,367	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai ASN	25 Orang/bulan	2,060,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	150,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai ASN	12 Dokumen	200,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100Persen			4 Layanan	226,822,600			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100Persen	235,500,000	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket			9 Paket	2,412,500	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	9 Paket	2,700,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	79,700,100	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Paket	80,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	2,520,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Paket	2,800,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	142,190,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	150,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100Persen			2 Layanan	94,500,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100Persen	113,000,000	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	12,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	13,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			11 Laporan	82,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100Persen			3 Layanan	50,055,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100Persen	55,000,000	
	7	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	30,095,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	32,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			3 Unit	4,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Unit	6,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			6 Unit	15,460,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	6 Unit	17,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
166	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Utara	BIndek			B Indek	50,000,000						BIndek	54,000,000	
	7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tersedianya Layanan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	BIndek			1 Layanan	50,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	BIndek	54,000,000	
	7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan			1 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	54,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
167	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	70Persen 70Persen			62 Persen	71,007,400						68Persen 68Persen	76,000,000	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tersedianya Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	70Persen 70Persen			2 Layanan 1 Layanan	71,007,400			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	68Persen 68Persen	76,000,000	
	7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan			10 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			12 Laporan	41,007,400	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	12 Laporan	46,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
168	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/Diselesaikan	-			100 Persen	135,115,000						-	190,000,000	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah	-			2 Layanan	135,115,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	-	190,000,000	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		150,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
	7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	35,115,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat		40,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
169	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu	92Persen			85 Persen	65,000,000						90Persen	67,000,000	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100Persen			1 Layanan	65,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	100Persen	67,000,000	
	7	01	06	201	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen			1 Dokumen	65,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabaluan - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	67,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
						KECAMATAN SIBERUT TENGAH						2,339,083,926							2,735,000,000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,339,083,926							2,735,000,000	
	7	01				KECAMATAN						2,339,083,926							2,735,000,000	
170	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	-			100 Persen	2,035,083,926						-	2,420,000,000	
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Desa Persentase Kepatuhan Penyusunan ,Perencanaan dan pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	-			95 persen 100 Persen	70,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	110,000,000	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		110,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Jumlah Pelayanan adminsitrasi yang dilaksanakan	-			100 Persen 0 layanan	1,572,208,926			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan	-	1,700,000,000	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1,422,208,926	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		1,500,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		200,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Umum Persentase peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah	-			100 persen 100 Persen	190,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan	-	280,000,000	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		15,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		100,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		15,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		150,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur	-			100 Persen 100 persen	58,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan	-	95,000,000	
	7	01	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	33,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		45,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Operasional Perkantoran Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	-			100 persen 100 Persen	136,875,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan	-	225,000,000	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		25,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	116,875,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		200,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Umum Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			100 persen 100 Persen	8,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan	-	10,000,000	
	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	8,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan		10,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
171	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah	-			B INDEKS B Indek	64,000,000						-	60,000,000	
	7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan /Dilaksanakan(Rekam E-KTP) Persentase Kegiatan yang telah dilaksanakan Oleh Pemerintah Kepada camat	-			250 Jiwa 100 persen	64,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah	-	60,000,000	
	7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	64,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah		60,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
172	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daera Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan	-			80 Persen 65 persen	100,000,000						-	100,000,000	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Menininkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	-			B INDEKS 0 persen	50,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan TP PKK	-	50,000,000	
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan TP PKK		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
	7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	50,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah dan Aparatur	-	50,000,000	
	7	01	03	202	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah dan Aparatur		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
173	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan	-			100 Persen	60,000,000						-	75,000,000	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kwalitas Masyarakat akan Nilai nilai Luhur Jiwa Kebangsaan	-			100 Persen	60,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah	-	75,000,000	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Tengah		75,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
174	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase konflik di wilayah Kecamatan Yang ditangani/diselesaikan	-			100 Persen	80,000,000						-	80,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Diberi Pembinaan dan Pengawasan	-			3 Desa	80,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Desa	-	80,000,000	
	7	01	06	201	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Desa		80,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
						KECAMATAN SIBERUT BARAT						2,081,718,588							1,358,844,000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,081,718,588							1,358,844,000	
	7	01				KECAMATAN						2,081,718,588							1,358,844,000	
175	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BBIndeks 100persen			100 Persen	1,786,718,588						BIndeks 100persen	988,844,000	
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja OPD Kecamatan Siberut Barat	100persen			100 persen	90,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	95persen	100,000,000	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			12 Laporan	90,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98persen			100 persen 100 persen	1,288,558,588			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	95persen	350,000,000	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan			12 Orang/bulan	1,124,402,588	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Orang/bulan	150,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	164,156,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Dokumen	200,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100persen			100 persen	168,844,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	95persen	207,844,000	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5,844,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	1 Paket	7,844,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	4 Paket	65,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			3 Paket	3,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	1 Paket	5,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan Laporan			12 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	130,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Di Butuhkan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	95persen			90 Persen 100 Persen	88,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	90persen	160,000,000	
	7	01	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			4 Unit	8,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	0 Unit	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit			4 Unit	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	0 Unit	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Rekening Listrik	95persen			100 persen 90 Persen	131,316,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	95persen	146,000,000	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	24,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	12 Laporan	36,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	107,316,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	12 Laporan	110,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah	85persen			80 persen	20,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	82persen	25,000,000	
	7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit			8 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	6 Unit	25,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
176	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Barat	100persen BIndek			B Indek	50,000,000						100persen BIndek	60,000,000	
	7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100persen			100 persen	50,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	95persen	60,000,000	
	7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan			3 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
177	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih) dalam Kondisi Baik Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan Tingkat Kecamatan	90persen BIndeks			90% undefined 100 persen	70,000,000						90persen BIndeks	105,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	100persen			2 Kegiatan	70,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	95persen	105,000,000	
	7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan			15 Lembaga Kemasyarakatan	45,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	25 Lembaga Kemasyarakatan	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			2 Laporan	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	3 Laporan	45,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
178	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terrlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100Persen 100Persen 51,7Persen			100 persen	85,000,000						100Persen 100Persen 51,6Persen	105,000,000	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100persen 100persen 100Indeks 100persen			100 persen	85,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	100persen 95persen 95Indeks 100persen	105,000,000	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang			100 Orang	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	100 Orang	70,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
	7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen			6 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	6 Dokumen	35,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
179	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Laporan Keuangan Desa Se-Kecamatan Siberu Barat Pada tepat waktu Indeks Kepuasan Masyarfakat Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi	BBPersen 100persen			90% undefined 100 persen 50 Persen 0 persen	90,000,000						BPersen 100persen	100,000,000	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pemerintahan yang bebas KKN Terlaksananya Fasilitasi Trantibmas Desa Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa se-Kecamatan Siberut Barat Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa Se Kecamatan Siberut Barat	95persen			90 Persen 0 persen 100 persen 90% persen	90,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	90persen	100,000,000	
	7	01	06	201	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 Dokumen Dokumen			30 Dokumen	90,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	30 Dokumen	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
						KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA						2,189,208,264							2,593,420,000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,189,208,264							2,593,420,000	
	7	01				KECAMATAN						2,189,208,264							2,593,420,000	
180	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	-			2 Laporan	1,931,718,588						-	2,258,420,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			2 Laporan	60,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	80,000,000	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		80,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			13 Laporan	1,435,532,216			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	1,600,000,000	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1,285,500,264	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1,400,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	150,031,952	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		200,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 paket	170,478,372			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya	-	208,000,000	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	7,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		8,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	51,478,372	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		60,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		20,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		120,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	55,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	-	70,000,000	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS		20,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	207	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Paket Unit	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	115,708,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kontrak	-	150,420,000	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Paket Laporan	12,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kontrak		420,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	103,708,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kontrak		150,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	-	150,000,000	
	7	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
181	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	42,489,676						-	50,000,000	
	7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	42,489,676			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya	-	50,000,000	
	7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	42,489,676	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Sagulubbeg	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
182	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-				70,000,000						-	85,000,000	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			2 Laporan	70,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya	-	85,000,000	
	7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		45,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		40,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
183	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	85,000,000						-	130,000,000	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	85,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya	-	130,000,000	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		80,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
	7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
184	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	60,000,000						-	70,000,000	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-			undefined undefined	60,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya	-	70,000,000	
	7	01	06	201	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Katurei	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua Desa, Kecamatan Siberut Barat Daya		70,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
						KECAMATAN SIBERUT SELATAN						2,647,479,010							3,475,000,000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,647,479,010							3,475,000,000	
	7	01				KECAMATAN						2,647,479,010							3,475,000,000	
185	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	2,382,479,010						100Persen	2,960,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2Laporan			100 Persen	71,511,669			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2Laporan	100,000,000	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	71,511,669	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		100,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	100Persen			100 Persen	1,821,172,766			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	2,100,000,000	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1,721,172,766	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1,950,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	100,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Operasional perkantoran	100Persen			100 Persen	222,139,575			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	341,000,000	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		12,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6,139,575	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		12,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		65,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	8,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		12,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 kali Laporan	120,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		190,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Operasional Perkantoran	2Unit			3 Unit	65,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2Unit	75,000,000	
	7	01	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		-	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	15,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		25,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Operasional Perkantoran	100Persen			100 Persen	99,725,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	116,000,000	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		16,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 org Laporan	87,725,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		100,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Kinerja Administrasi Perkantoran	100Persen			100 Persen	102,930,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	228,000,000	
	7	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		95,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	17,930,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		25,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		58,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
186	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	BIndeks BIndek			B Indeks	60,000,000						BIndeks BIndek	100,000,000	
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	BIndeks BBIndeks			B Indeks	25,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	BIndeks BIndeks	50,000,000	
	7	01	02	201	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	BBIndeks BIndeks			B Indeks	35,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	BIndeks BIndeks	50,000,000	
	7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan			1 Laporan	35,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
187	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	87persen 100Persen 10Lembaga Kemasyarakatan			90 Persen	45,000,000						85persen 100Persen 10Lembaga Kemasyarakatan	115,000,000	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	80Persen 90Persen 100Persen			90 Persen	45,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	78Persen 90Persen 100Persen	115,000,000	
	7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan			10 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	10 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1 Laporan	65,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
188	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesai kan	100Persen			100 Persen	85,000,000						100Persen	150,000,000	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100Persen			80 Persen	85,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	150,000,000	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang			50 Orang	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	50 Orang	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
189	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	92Persen			85 Persen 90 Persen	75,000,000						90Persen	150,000,000	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	95Persen			85 Persen 95 Persen	75,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	94Persen	150,000,000	
	7	01	06	201	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	1 Dokumen	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
	7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		50,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
						KECAMATAN SIPORA UTARA						2,521,870,300							3,187,064,300	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,521,870,300							3,187,064,300	
	7	01				KECAMATAN						2,521,870,300							3,187,064,300	
190	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen BIndek			100 Persen	2,281,627,715						100Persen BIndek	2,883,914,300	
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80Persen 95Persen			87 Persen	60,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	70Persen 90Persen	82,500,000	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	60,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		82,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	100Persen			100 Persen	1,585,065,300			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	1,712,564,300	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1,565,065,300	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		1,673,564,300	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		39,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100Persen				202,500,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	100Persen	219,850,000	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		6,600,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		38,250,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		80,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	11,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		12,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		82,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Operasional Perkantoran	100Persen			100 Persen	105,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	412,000,000	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		25,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		137,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		250,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Operasinal Perkantoran	100Persen			100 Persen	209,062,415			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	261,500,000	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		26,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	208	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	28,257,415	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		35,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	156,805,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		200,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Kinerja Administrasi Perkantoran	100Persen			100 Persen	120,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	195,500,000	
	7	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		68,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		27,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		25,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	45,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		75,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
191	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara	BIndek 100Persen			B Indek	65,000,000						BIndek 100Persen	84,500,000	
	7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urrusan yang dilimpahkan kepada Camat	2Urusan 2Urusan			2 Urusan	65,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	2Urusan 2Urusan	84,500,000	
	7	01	02	204	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				85 Laporan	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		42,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				150 Laporan	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		42,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
192	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan undefined Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Persentase keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	70persen 92Persen 90Persen			75 Persen 62 Persen undefined undefined 87 Persen 65 Persen	47,000,000						68persen 90Persen 85Persen	53,700,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa undefined	95Persen			73 Persen 100 Persen 70 Persen 82 Persen undefined undefined	47,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	90Persen	53,700,000	
	7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	18,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		21,250,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	28,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		32,450,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
193	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan	100Persen 100Persen			100 Persen	86,242,585						100Persen 100Persen	112,500,000	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah	95Persen			2 Urusan	86,242,585			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	93Persen	112,500,000	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	65,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		84,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
	7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	21,242,585	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		28,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
194	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu	92Persen			88 Persen	42,000,000						90Persen	52,450,000	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang dibina dan diawasi	95Persen			6 Desa	42,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	90Persen	52,450,000	
	7	01	06	201	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				18 Dokumen	42,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		52,450,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
						KECAMATAN SIPORA SELATAN						3,181,125,413							3,494,500,000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3,181,125,413							3,494,500,000	
	7	01				KECAMATAN						3,181,125,413							3,494,500,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
195	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Evaluasi dan Monitoring Pembangunan di TkKecamatan dan desa	-			1 Dokumen	2,823,125,413						-	3,079,500,000	
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pembangunan Yang di Evaluasi dan dimonitoring	-			1 Dokumen	60,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	80,000,000	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	60,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		80,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			25 Orang	2,310,843,413			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	2,480,000,000	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2,230,843,413	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		2,400,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		80,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang di butuhkan Jumlah Kebutuhan Alat Tulis KantorBahan Pembersi Kantor,Pakan natura dan Makanan dan Minuman kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	-			4 Jenis 4 Jenis 100 Persen 100 Persen	198,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	195,500,000	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		500,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		15,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		10,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		80,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	8,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		10,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		80,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Trasnportasi Darat Mobil Jumlah pengadaan kendaraan Dinas Operasional yang di penuhi	-			100 Persen 2 Unit	55,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	70,000,000	
	7	01	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		40,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		30,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Kontrask yang Mererima Honorarium	-			19 0rang	174,282,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	224,000,000	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	24,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		24,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	150,282,000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		200,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan yang dipelihara	-			3 Unit 100 Persen	25,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	30,000,000	
	7	01	01	209	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				3 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		25,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		5,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
196	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di TkKecamatan dan Desa	-			7 Dokumen	135,000,000						-	175,000,000	
	7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Dokumen dalam Forum Perencanaan yang di hasilkan	-			7 Dokumen 1 Dokumen	30,000,000			-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-	-	40,000,000	
	7	01	02	201	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2 Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	-		40,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	02	203		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	-			1 Unit	20,000,000			-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-	-	50,000,000	
	7	01	02	203	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta														
							Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				1 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4 Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	-		50,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang Dilimpahkan Terlaksananya Perekaman dan Pendataan Penduduk di TkKecamatan dan Desa	-			100 Persen 300 Orang	85,000,000			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	85,000,000	
	7	01	02	204	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				satu Laporan	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan 3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		20,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	65,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		65,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
197	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya Pembangunan yang di Usulkan di TkKecamatan	-			7 Desa	50,000,000						-	60,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Forum Pembangunan di Tk Kecamatan	-			7 Desa	30,000,000			-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-	-	40,000,000	
	7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		40,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya pembinaan Penumbuhan keluarga yang Berkarakter Melalui pengamalan Pancasila Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-			7 Desa 100 Orang	20,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-	-	20,000,000	
	7	01	03	206	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				100 Keluarga	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 1 Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	-		20,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
198	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang yang mengikuti dalam Memperingati Hari Ulang Tahun Negara republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945 Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan Terwujudnya Nilai-nilai Pancasila	-			500 Orang 100 Persen 500 Orang	103,000,000						-	110,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti HUT-RI Terwujudnya Nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Bernegara dan Berbangsa	-			500 Orang 500 Orang	103,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	110,000,000	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	80,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		80,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
	7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	23,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3 Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	-		30,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
199	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu Jumlah Penataan Dokumen Aset Desa yang diverifikasi di TkKecamatan Terwujudnya Dokumen serta laporan yang Bersih	-			88 Persen 7 Dokumen 7 Dokumen	70,000,000						-	70,000,000	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-			100 Persen 7 Dokumen	70,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	70,000,000	
	7	01	06	201	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		70,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
						KECAMATAN PAGAI UTARA						2,404,332,195							2,662,007,933	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,404,332,195							2,662,007,933	
	7	01				KECAMATAN						2,404,332,195							2,662,007,933	
200	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	2,053,849,945						100Persen	2,226,007,933	
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	90Persen			100 Persen	1,612,229,195			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	85Persen	1,746,757,933	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan			15 Orang/bulan	1,460,309,195	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumangany a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	15 Orang/bulan	1,579,645,933	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			15 Dokumen	151,920,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	12 Dokumen	167,112,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	80persen			-	250,097,750			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	75persen	278,250,000	
	7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	73,666,350	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumangany a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		88,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	46,681,400	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumangany a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		50,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	7,250,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		7,250,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumangany a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	120,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		130,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80persen			-	156,023,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	70persen	162,000,000	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumangany a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		12,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	144,023,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumangany a - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		150,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	90persen			-	35,500,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	90persen	39,000,000	
	7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	20,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumangany a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		22,500,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumangany a	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		16,500,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
201	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Pagai Utara Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	-			B Indek 95 Persen	35,000,000						-	50,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	-			B Indeks 95 Persen	35,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	50,000,000	
	7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		50,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
202	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan	95Persen			65 persen 95 Persen	97,977,500						95Persen	118,000,000	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di wilayah kecamatan	-			95 Persen	50,000,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	70,000,000	
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		70,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	03	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	47,977,500			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	48,000,000	
	7	01	03	202	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	47,977,500	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		48,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
203	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	94,514,750						-	145,000,000	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	94,514,750			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	145,000,000	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		110,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10 Dokumen	34,514,750	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		35,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
204	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu	-			88 Persen	122,990,000						-	123,000,000	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	122,990,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	-	123,000,000	
	7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	74,990,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		75,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
	7	01	06	201	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	48,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		48,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA
						KECAMATAN PAGAI SELATAN						3,254,210,630							4,592,952,028	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						1,500,000							1,665,000	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						1,500,000							1,665,000	
205	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100Persen			100 Persen	1,500,000						100Persen	1,665,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	1,500,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	1,665,000	
	6	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		1,665,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3,252,710,630							4,591,287,028	
	7	01				KECAMATAN						3,252,710,630							4,591,287,028	
206	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	3,007,710,630						100Persen	4,212,187,028	
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusuinan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	60,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	66,600,000	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	60,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		66,600,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	2,410,187,630			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	3,277,500,000	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	2,260,187,630	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		3,000,000,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		277,500,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	238,700,000			-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	441,052,268	
	7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		152,403,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7,700,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		8,547,500	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	50,343,935	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55,881,768	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		2,220,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	158,656,065	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		222,000,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	80,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	138,750,000	
	7	01	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	30,000,000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		33,300,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		77,700,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	207	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		27,750,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100Persen			100 Pesen	148,823,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	210,584,760	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4,800,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		5,328,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	144,023,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		205,256,760	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100Persen			100 Persen	70,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	77,700,000	
	7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	15,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		16,650,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	5,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		5,550,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55,500,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
207	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan	BIndeks BIndek			B Indek	35,000,000						BIndeks BIndek	55,500,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BIndeks			100 Persen	35,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	BIndeks	55,500,000	
	7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55,500,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
208	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	70Persen			65 Persen	50,000,000						68Persen	90,500,000	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	70Persen			65 Persen	50,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	68Persen	90,500,000	
	7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		35,000,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		55,500,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
209	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan	100Persen			100 Persen	85,000,000						100Persen	122,100,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan	100Persen			100 Persen	85,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	100Persen	122,100,000	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	50,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		83,250,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
	7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		38,850,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
210	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu	92Persen			100 Persen	75,000,000						90Persen	111,000,000	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	4Desa			4 Desa	75,000,000			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-	4Desa	111,000,000	
	7	01	06	201	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 10 Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	-		111,000,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
						KECAMATAN SIKAKAP						2,495,919,290							1,030,000,000	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,495,919,290							1,030,000,000	
	7	01				KECAMATAN						2,495,919,290							1,030,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
211	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	-			100 Persen	2,184,669,290						-	840,000,000	
	7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Palayanan Aparatur Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			58 persen 1 layanan	58,260,000			-	-	-	-	60,000,000	
	7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	58,260,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	-			100 persen	1,736,961,290			-	-	-	-	330,000,000	
	7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	1,616,961,290	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	120,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur Perangkat Daerah pada Kecamatan Sikakap	-			100 persen	246,490,000			-	-	-	-	250,000,000	
	7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	8,600,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		-	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	67,890,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		-	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	70,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150,000,000	KECAMATAN SIKAKAP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	-			100 persen	20,000,000			-	-	-	-	100,000,000	
	7	01	01	207	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	-			100 persen	111,958,000			-	-	-	-	100,000,000	
	7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	33,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		-	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	78,958,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kecamatan Pagai Selatan	-			100 persen	11,000,000			-	-	-	-	-	
	7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	11,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		-	KECAMATAN SIKAKAP
212	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sikakap	-			B Indeks	45,500,000						-	-	
	7	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tersedianya Layanan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-			12 Laporan	45,500,000			-	-	-	-	-	
	7	01	02	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	45,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		-	KECAMATAN SIKAKAP
213	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	-			100 persen	75,000,000						-	80,000,000	
	7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 persen	75,000,000			-	-	-	-	80,000,000	
	7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	40,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	35,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
214	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 persen	125,750,000						-	40,000,000	
	7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	-			1 Layanan	125,750,000			-	-	-	-	40,000,000	
	7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	95,750,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		-	KECAMATAN SIKAKAP
	7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	30,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
215	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu	-			100 persen	65,000,000						-	70,000,000	
	7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 persen	65,000,000			-	-	-	-	70,000,000	
	7	01	06	201	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	65,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
						KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						19,472,572,826							9,346,500,000	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						19,472,572,826							9,346,500,000	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						19,472,572,826							9,346,500,000	
216	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas pelayanan perangkat daerah	100Persen			100 Parsen	1,474,414,126						100Persen	2,271,500,000	
	8	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah gaji ASN yang dibayarkan	20Persen			13 orang	1,058,073,126			-	9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	15Persen	1,615,000,000	
	8	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,038,073,126	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		1,550,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		65,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbayarnya honor pengelola kuangan dan honor tenaga knrak	100Persen			20 orang	216,500,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	100Persen	319,500,000	
	8	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		12,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	90,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		90,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		8,500,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	8,500,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		9,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		200,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang kebutuhan kantor	90Persen			15 unit	58,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	85Persen	170,000,000	
	8	01	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	33,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		50,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	25,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		120,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan admnistrasi perkantoran	95Persen			9 kegiatan	111,841,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	90Persen	125,000,000	
	8	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	24,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		25,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	87,841,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang mlk darah	95Persen			15 unit	30,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	90Persen	42,000,000	
	8	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		27,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		15,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
217	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam pemilu	85persen			80 persen	17,275,000,000						70persen	6,080,000,000	
	8	01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah dana hibah banpol yang dibayarkan dan tersalurkan danan hibah pemilu	12DOKUMEN			10 kegiatan	17,275,000,000			-	9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	12DOKUMEN	6,080,000,000	
	8	01	03	201	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi															
							Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	17,200,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		6,000,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	03	201	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan															
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				10 Laporan	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		80,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
218	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas aktif Persentase ormas aktif	90Persen			80 Persen 75 Persen	100,000,000						85Persen	100,000,000	
	8	01	04	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terawasi	90Persen			80 Parsen	100,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	85Persen	100,000,000	
	8	01	04	201	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Laporan	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
219	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase berkurangnya jumlah kasus NAPZA	90Persen			85 Persen	248,158,700						85Persen	390,000,000	
	8	01	05	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Menngkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya	90Persen			80 Parsen	248,158,700			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	85Persen	390,000,000	
	8	01	05	201	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
							Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	73,158,700	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	05	201	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				250 Orang	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	05	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Orang	100,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		190,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
220	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	100Persen			-	375,000,000						100Persen	505,000,000	
	8	01	06	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	100Persen			-	375,000,000			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-	100Persen	505,000,000	
	8	01	06	201	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				25 Orang	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		105,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	201	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	201	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	75,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	8	01	06	201	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	150,000,000	- Kab Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing 9 Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	-		200,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
											J U M L A H	956,460,742,449							778,925,186,860	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RKPD tahun 2024 mengacu pada capaian dan target RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, hal ini dimaksudkan agar penetapan target kinerja RKPD tahun 2024 konsisten dengan target RPD. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama

NO	IKU	Target Kinerja	
		2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	61,98	62,48
2	Rata Lama sekolah	7,36 tahun	7,45 tahun
3	Harapan Lama Sekolah	13,09 tahun	13,18 tahun
4	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,55	0,58
5	Angka Harapan Hidup	65,19 tahun	65,34 tahun
6	Prevalensi Stunting	20,00%	17,00%
7	Persentase Penduduk Miskin	14,57%	14,44%
8	Indeks Kinerja Infrastruktur	10%	12%

NO	IKU	Target Kinerja	
		2023	2024
9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	15%	17%
10	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	70%	72%
11	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	70%	75%
12	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	100%
13	Cakupan Layanan Transportasi	80%	83%
14	Cakupan layanan telekomunikasi	85%	88%
15	Rasio Elektrifikasi	85%	86%
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>80	>80
17	Persentase Rumah Layak Huni	40%	43%
18	Jumlah Desa STBM	2 desa	3 desa
19	Indeks Resiko Bencana	197	190
20	Pertumbuhan ekonomi	3,93%	4,27%
21	Indek Gini	0,320	0,316
22	Pendapatan Perkapita	Rp.58,47 jt	Rp.61,82 jt
23	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	15%
24	Nilai Investasi	20 miliar rupiah	30 miliar rupiah
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%	2,70%
26	Tingkat Inflasi	3,80%	3,50%
27	Indek RB	B	B
28	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	30	35
29	Indek Kepuasan masyarakat	80	82
30	Indeks Profesional ASN	80	82
31	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
32	Indeks SPBE	2	2,2
33	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
34	Opini BPK	WTP	WTP
35	WBK/WBBM	2 OPD	3 OPD
36	Nilai SAKIP	B	B
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,5	51,55
38	Jumlah MHA yang dilestarikan	5 MHA	7 MHA
39	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,3	11,5
40	Tingkat Kriminalitas	3,5 persen	3,5 persen

NO	IKU	Target Kinerja	
		2023	2024
41	Tingkat Kabupaten layak Anak	400	500 (pratama)
42	Indek Pembangunan Gender	89,90	89,95

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pada akhir penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan ekonomi	BPS	2,89%	3,93%	4,27%
2	Indek Gini	BPS	0,321	0,320	0,316
3	Pendapatan Perkapita	BPS	Rp.54,80 jt	Rp.58,47 jt	Rp.61,82 jt
4	Persentase Penduduk Miskin	BPS	14,84%	14,57%	14,44%
5	Indeks Pembangunan Manusia	BPS	61,35	61,98	62,48
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS	2,79%	2,75%	2,70%
7	Rata Lama sekolah	BPS	7,20 tahun	7,36 tahun	7,45 tahun
8	Angka Harapan Hidup	BPS	64,73 tahun	65,19 tahun	65,34 tahun
9	Prevalensi Stunting	SGGI	27,3%	20,00%	17,00%
10	Indeks Pembangunan Gender	BPS	89,81	89,90	89,95
ASPEK PELAYANAN UMUM					
I.	**URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.	**Urusan Pendidikan**				
	a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	19,05%	22%	25%
	b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-	Dinas Pendidika dan	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	12tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Kebudayaan			
	c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	100%	100%	100%
	d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	100%	100%	100%
2.	**URUSAN KESEHATAN**				
	a. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	70/ 100.000 Penduduk	80/ 100.000 Penduduk	85/ 100.000 penduduk
	b. Persentase RS rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	0	1 RSUD	1 RSUD
	c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalilnan	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	70%	75%	80%
	h. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	75%	80%	82%
	i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	70%	75%	78%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	73%	80%	82%
	k. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	76%	80%	82%
	l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	75%	83%	85%
	m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan	76%	80%	82%
	n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dinas Kesehatan	80%	83%	85%
3.	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
	a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,20%	5%	5,20%
	b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4%	4,70%	5%
	c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20ha	23ha	25ha
	d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40%	45%	47%
	e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26%	30%	31%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	f. Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68%	75%	78%
	g. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7%	10%	11%
	h. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2%	3%	5%
	i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NA	85%	88%
4.	**URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8%	10%	13%
	b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	NA	2%	2%
	c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5%	10%	12%
	d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tangga Layak Huni)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6500 unit	5000 unit	4500 unit
	e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 kawasan permukiman	1 kawasan permukiman	1 kawasan permukiman
5.	**URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
	a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%
	b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80%	85%	88%
	c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	60	65%	68%
	d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	bencana				
	e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%
	f. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20 menit	15 menit	15 menit
6.	**URUSAN SOSIAL**				
	a. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
	b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan stelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
II	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.	**URUSAN TENAGA KERJA**				
	a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70%	80%	85%
	b. Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2%	3%	5%
	c. Tingkat produktivitas tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16%	20%	22%
	d. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35%	40%	42%
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0%	0,1%	0,15%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
2.	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
	a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	20%	25%	42%
	b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
	c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
3.	**URUSAN PANGAN**				
	a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37,67	50	52
4.	**URUSAN PERTANAHAN**				
	Penanganan sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi (persen)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	100	100
	Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,14	1,2	1,25
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38	40	42
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,02	0,1
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.200 ha	1.200 ha	1.200 ha
	Tersedianya Tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
5.	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**				
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	>80	>80	>80
	b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5%	7%	7%
	c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	75%	80%	85%
6.	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
	a. Perekaman KTP elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95%	99,20%	99,25%
	b. Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70%	75%	78%
	c. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32%	40%	50%
	d. Persentase kepemilikan akte kelahiran (persen)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,24%	78%	80%
7.	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
	a. Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35%	30%	26%
	b. Persentase peningkatan status desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11%	12%	12%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
8.	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA**				
	a. TFR (Angka Kelahiran Total)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,25	4,10	3,86
	b. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62%	65%	68%
	c. Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,12%	1,10%	1,05%
9.	**URUSAN PERHUBUNGAN**				
	a. Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	75%	80%	82%
	b. V/C Ratio di jalan Kota	Dinas Perhubungan	0,18	0,19	0,20
10.	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
	a. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	64%	70%	80%
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,20%	10%	20%
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,20%	5%	7%
11.	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	a. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	44%	50%	55%
	b. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	1,20%	2%	2%
12.	**URUSAN PENANAMAN MODAL**				
	a. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,20%	2	2,10%
13.	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8%	10%	15%
	b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	45%	50%	55%
	c. Peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	NA	2%	5%
14.	**URUSAN STATISTIK**				
	a. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	70%	75%	78%
	b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	70%	75%	78%
15.	**URUSAN PERSANDIAN**				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	NA	Tingkat kematangan I	Tingkat kematangan II
16.	**URUSAN KEBUDAYAAN**				
	a. Terlestarikannya cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55%	60%	63%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
17.	**PERPUSTAKAAN**				
	a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	15%	20%	25%
	b. Indeks pembangunan literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	11	11,3	11,5
18.	**URUSAN KEARSIPAN**				
	a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10%	30%	35%
	b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	NA	10%	15%
III	**URUSAN PILIHAN**				
1.	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
	a. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Dinas Perikanan	8.694 ton	9.000 ton	9.500 ton
2.	**URUSAN PARIWISATA**				
	a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	10%	11%	13%
	b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang kekabupaten/kota	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	12%	15%	18%
	c. Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0,76%	0,80%	1%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	14%	15%	16%
3.	**URUSAN PERTANIAN**				
	a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7000 ton	7000 ton	7000 ton
	b. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100%	100%	100%
4.	**URUSAN PERDAGANGAN**				
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	15%	20%	30%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	63%	70%	75%
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0,35%	0,5%	1%
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0,2%	0,25%	0,32%
5.	**URUSAN PERINDUSTRIAN**				
	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	1.25	3 IKM	5 IKM
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	0,5%	1%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1,2%	1,5%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1,2%	1,5%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1,2%	1,5%
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	ada	ada	ada
IV	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
1.	**URUSAN KEPEGAWAIAN**				
	a. Nilai Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	NA	200	220
	b. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,20%	10%	12%
2.	**URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN**				
	a.Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	Badan Keuangan Daerah	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	b. Persentase PAD terhadap total pendapatan	Badan Keuangan Daerah	5,24	8,50%	8,70%
	c.Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	Badan Keuangan Daerah	80%	90%	95%
	d.Persentase Barang dan Jasa yang terindentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	Badan Keuangan Daerah	72%	80%	81%
3.	**URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**				
	a. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	8%	20%	30%
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Tingkat Kriminalitas	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	6 persen	3,5 persen	3,5 persen
2	Rasio Ketergantungan (%)	BPS	62,78	62,40%	62,35%
3	Pengeluaran Perkapita	BPS	6.321 rb rupiah/orang/ tahun	6.442 rb rupiah/orang/ tahun	6.536 rb rupiah/orang/ tahun

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran tahun 2024, disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui transformasi strukturan yang inkusif dan berkelanjutan menjadi fokus pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Tahun 2045. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menitikberatkan pembangunan pada sektor komoditas unggulan dengan pembangunan sumber daya ekonomi, peningkatan produktivitas masyarakat terutama pada hilirisasi komoditas pertanian. Kolaborasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga pemerintah lainnya bersama-

sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia usaha perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK